

SUMEDANG
Simpati

sejahtera - agamis - maju - profesional - kreatif



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH



2021

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena atas ridho dan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 tepat waktu. Laporan ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Barat dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan LPPD ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauhmana keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak-hak yang diperoleh daerah berdasarkan hasil capaian kinerja sesuai rencana kerja yang telah direncanakan.

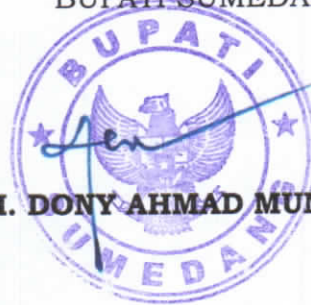
LPPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 memuat gambaran tentang penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2021 secara jelas dan terukur. Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 dapat berjalan dengan baik. Berbagai upaya dilakukan oleh segenap pihak untuk tetap konsisten dan terarah sesuai dengan penetapan kinerja di masing-masing bidang urusan guna mewujudkan Visi “**Sumedang SIMPATI (Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, Kreatif) Pada Tahun 2023**”.

Kami sangat berterima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Instansi Vertikal yang berada di Kabupaten Sumedang yang telah berperan aktif menyampaikan data dan informasi. Dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan adanya saran dan masukan, untuk penyempurnaan penyusunannya.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 ini dapat dijadikan bahan evaluasi Pemerintah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Sumedang, Maret 2022

BUPATI SUMEDANG,



Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST, MM



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
SURAT PERNYATAAN REVIU OLEH APIP	iii
DAFTAR ISI	iv
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xxi
Daftar Grafik	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.1.1. Penjelasan Umum	I-1
a. Undang-undang Pembentukan daerah	I-7
b. Data geografis wilayah	I-8
1. Batas Administrasi Daerah	I-8
2. Luas Wilayah	I-8
3. Topografi	I-11
4. Klimatologi	I-11
c. Jumlah Penduduk	I-15
1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin	I-15
2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia	I-18
3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	I-19
4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan	I-20
d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang....	I-21
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	I-30
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	I-37
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I-39
a. Permasalahan Pembangunan Daerah..	I-39
b. Isu Strategis	I-70
c. Visi dan Misi Kepala Daerah	I-99
1. Visi Kepala Daerah	I-99
2. Misi Kepala Daerah	I-101



3.	Keselarasn Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025	I-105
4.	Keselarasn Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.....	I-108
5.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	I-109
d.	Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan menengah	I-127
e.	Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	I-145
1.1.3.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal ...	I-181
a.	Dasar pertimbangan penerapan SPM.....	I-181
b.	Dasar Penerapan SPM	I-182
c.	Kebijakan Umum Daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM	I-183
BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
2.1	Capaian Kinerja Makro	II-1
2.1.1	Pembangunan Sumber Daya Manusia	II-1
2.1.2	Kemiskinan	II-2
2.1.3	Ketenagakerjaan	II-5
2.1.4	Pertumbuhan Ekonomi	II-7
2.1.5	Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	II-10
2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-13
2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II-13
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil	II-51
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-63
2.3.1	Angka Harapan Hidup (AHH)	II-65
a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-65
b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-66



	c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-66
	d.	Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/ Nasional....	II-67
	e.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-67
	f.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-69
	g.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-69
2.3.2		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	II-70
	a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-70
	b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-70
	c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-71
	d.	Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/ Nasional....	II-71
	e.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-72
	f.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-73
	g.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-73
2.3.3		Angka Harapan Lama Sekolah (AHL)	II-74
	a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-74
	b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-74
	c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-75
	d.	Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional	II-75
	e.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-75
	f.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-77



	g.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-77
2.3.4		Persentase Penduduk Miskin	II-78
	a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-78
	b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-78
	c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-79
	d.	Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/ Nasional	II-79
	e.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-81
	f.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-82
	g.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-82
2.3.5		Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	II-84
	a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-84
	b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-84
	c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-85
	d.	Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional....	II-85
	e.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-86
	f.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-87
	g.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-87
2.3.6		Indek Pemberdayaan Gender (IDG).....	II-88
	a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-88
	b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-88
	c.	Perbandingan Realisasi Kinerja	



	dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-89
d.	Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional.....	II-89
e.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-90
f.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-91
g.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-91
2.3.7	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	II-92
a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-92
b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-92
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-93
d.	Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional....	II-93
e.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-94
f.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-94
g.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-95
2.3.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).....	II-96
a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-96
b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-97
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-97
d.	Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional.....	II-98
e.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-98
f.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-99
g.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang	



	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-101
2.3.9	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap.....	II-108
	a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-108
	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-108
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-109
	d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-110
	e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-110
	f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-111
2.3.10	Rasio Jaringan Irigasi.....	II-112
	a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-113
	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-113
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-113
	d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-114
	e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-115
	f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-116
2.3.11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	II-116
	a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-116
	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-118
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-118
	d. Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional.....	II-119
	e. Analisis Penyebab Keberhasilan/	



	Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-119
f.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-120
g.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-122
2.3.12	Indeks Risiko Bencana.....	II-125
a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-125
b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-125
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-126
d.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-126
e.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-127
f.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-128
2.3.13	Opini BPK.....	II-129
a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-129
b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-129
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-130
d.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-130
e.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-132
f.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-133
2.3.14	Nilai Sakip Kabupaten.....	II-136
a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-136
b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-136
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja	



	dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-138
d.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-139
e.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-141
f.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-142
2.3.15	Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-145
a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-145
b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-146
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-147
d.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-147
e.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-152
f.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-153
2.3.16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	II-153
a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-153
b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-155
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-155
d.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-156
e.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-158
f.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-160
2.3.17	Pengeluaran Per Kapita.....	II-162
a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-162
b.	Perbandingan Antara Realisasi serta	



	Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-163
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-163
d.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/ Nasional	II-164
e.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-164
f.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-165
g.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-166
2.3.18	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-167
a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-167
b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-167
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-168
d.	Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/ Nasional	II-168
e.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-169
f.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-170
g.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-170
2.3.19	Jumlah UMKM.....	II-171
a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-171
b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	II-172
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-173
d.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	II-174



e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-175
f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-176

BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	III-1
3.1	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	III-1
3.2	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pusat/Kementerian	III-2
3.3	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	III-5
3.4	Permasalahan dan Solusi	III-14

BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
4.1	Urusan Pendidikan	IV-1
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2	Target Pencapaian SPM oleh daerah	IV-1
4.1.3	Realisasi	IV-1
4.1.4	Alokasi Anggaran	IV-6
4.1.5	Dukungan Personil	IV-8
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	IV-12
4.2	Urusan Kesehatan	IV-16
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-16
4.2.2	Target Pencapaian SPM oleh daerah	IV-17
4.2.3	Realisasi	IV-18
4.2.4	Alokasi Anggaran	IV-20
4.2.5	Dukungan Personil	IV-21
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	IV-21
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	IV-23
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-23
4.3.2	Target Pencapaian SPM oleh daerah	IV-24
4.3.3	Realisasi	IV-24
4.3.4	Alokasi Anggaran	IV-26
4.3.5	Dukungan Personil	IV-27
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	IV-32
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	IV-33
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-33
4.4.2	Target Pencapaian SPM oleh daerah	IV-34
4.4.3	Realisasi	IV-
4.4.4	Alokasi Anggaran	IV-35
4.4.5	Dukungan Personil	IV-36



4.4.6	Permasalahan dan Solusi	IV-37
4.5	Urusan Sosial	IV-38
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-38
4.5.2	Target Pencapaian SPM oleh daerah	IV-38
4.5.3	Realisasi	IV-39
4.5.4	Alokasi Anggaran	IV-42
4.5.5	Dukungan Personil	IV-43
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	IV-43
4.6	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-44
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-44
4.6.2	Target Pencapaian SPM oleh daerah	IV-44
4.6.3	Realisasi	IV-45
4.6.4	Alokasi Anggaran	IV-46
4.6.4	Dukungan Personil	IV-48
4.6.5	Permasalahan dan Solusi	IV-49
4.7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IV-50
4.7.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-50
4.7.2	Target Pencapaian SPM oleh daerah	IV-53
4.7.3	Realisasi	IV-54
4.7.4	Alokasi Anggaran	IV-56
4.7.5	Dukungan Personil	IV-58
4.7.6	Permasalahan dan Solusi	IV-58

BAB V PENUTUP	V-1
LAMPIRAN	
SURAT PERNYATAAN REVIU OLEH APIP	



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
1.1	Luas Wikayah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan	I-8
1.2	Iklim Per Bulan Berdasarkan Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, Tekanan Udara, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2021	I-13
1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenis Kelamin Per Wilayah Tahun 2021	I-16
1.4	Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio	I-17
1.5	Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2021	I-19
1.6	Komposisi Penduduk Kabupaten Sumedang berdasarkan Jenis Pekerjaan	I-19
1.6	Komposisi Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan Pendidikan	I-21
1.7	Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumedang	I-19
1.8	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020	I-32
1.9	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun 2020	I-35
1.10	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang	I-79
1.11	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020	I-80
1.12	Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	I-93
2.1	IPM Kab/Kota di Jawa Barat dan Pertumbuhannya di Tahun 2021	II-2
2.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-64
2.3	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021	II-64
2.4	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2021	II-66
2.5	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-66
2.6	perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-66
2.7	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2021	II-69
2.8	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021	II-70



2.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-71
2.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-71
2.11	Realisasi Anggaran Per Program yang Mendukung Pencapaian Kinerja Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021	II-71
2.12	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021	II-74
2.13	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Sebelumnya .	II-74
2.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD	II-75
2.15	Realisasi Anggaran Per Program Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2021	II-77
2.16	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021	II-78
2.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-78
2.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-79
2.19	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021	II-82
2.20	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021	II-84
2.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-85
2.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat Dalam Dokumen RPJMD	II-85
2.23	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021	II-87
2.24	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2021	II-88
2.25	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-89
2.26	Perbandingan Realisasi Kinerja IDG Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-89
2.27	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2021	II-91
2.28	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-91
2.29	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021	II-92



2.30	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kerukunan Umat Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-93
2.31	Perbandingan Realisasi Kinerja IKUB Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-93
2.32	Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja IKUB Tahun 2021.....	II-95
2.33	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja LPE Tahun 2021	II-96
2.34	Perbandingan Realisasi Kinerja LPE Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-97
2.35	Perbandingan Realisasi Kinerja LPE Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-98
2.36	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja LPE Tahun 2021	II-99
2.37	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2021	II-108
2.38	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-109
2.39	Kondisi Jalan Kabupaten	II-109
2.40	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-110
2.41	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2021	II-111
2.42	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2021	II-111
2.43	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021	II-112
2.44	Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-113
2.45	Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-114
2.46	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021	II-115
2.47	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021	II-116
2.48	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	II-117
2.49	Kriteria IKLH	II-117
2.50	Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-118



2.51	Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-119
2.52	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja IKLH Tahun 2021	II-120
2.53	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-122
2.54	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2021	II-125
2.55	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-126
2.56	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-126
2.57	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2021	II-127
2.58	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2021	II-128
2.59	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2021	II-129
2.60	Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-130
2.61	Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-130
2.62	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Opini BPK Tahun 2021	II-132
2.63	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Opini BPK Tahun 2021	II-133
2.64	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2021	II-136
2.65	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-137
2.66	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	II-137
2.67	Peringkat Nilai SAKIP	II-137
2.68	Perbandingan Realisasi Kinerja SAKIP Kabupaten Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-139
2.69	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2021	II-141
2.70	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021	II-145
2.71	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-146
2.72	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD	II-147
2.73	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Indeks Reformasi Tahun 2021	II-152



2.74	Hasil Survei Kepuasan MAsyarakat Tahun 2021	II-154
2.75	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja IKM Tahun 2021	II-154
2.76	Perbandingan Realisasi Kinerja IKM Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-155
2.77	Perbandingan Realisasi Kinerja IKM Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-155
2.78	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja IKM Tahun 2021	II-158
2.79	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Pengeluaran Per Kapita Tahun 2021	II-163
2.80	Perbandingan Realisasi Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2001 dengan Tahun Sebelumnya	II-163
2.81	Perbandingan Realisasi Kinerja Pengeluaran Per Kapita Tahun 2001 dengan Target Rencana Jangka Menengah RPJMD	II-164
2.82	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Pengeluaran Per-Kapita Tahun 2021	II-165
2.83	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021	II-167
2.84	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-167
2.85	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-168
2.86	Realisasi Anggaran Program Penunjang Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021	II-170
2.87	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Jumlah UMKM Tahun 2021	II-172
2.88	Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah UMKM Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	II-172
2.89	Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah UMKM Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-173
2.90	Jumlah UMKM Tahun 2019 - 2021	II-174
2.91	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Jumlah UMKM Tahun 2020	II-175
2.92	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Jumlah UMKM Tahun 2021	II-175
3.1	Tugas Pembantuan Yang Diterima	III-4
3.2	Rincian Tugas Pembantuan di Kabupaten Sumedang ...	III-7
3.3	Rincian Tugas Pembantuan di Kabupaten Sumedang ...	III-10
4.1	Capaian Kinerja Realisasi Standar Pelayanan Minimal 2021 Sub Bidang Pendidikan	IV-7
4.2	Capaian Kinerja Realisasi Standar Pelayanan Minimal 2021	



	Sub Bidang Kesehatan	IV-20
4.3	Capaian Realisasi Anggaran APBD dan APBN Penerapan SPM Tahun 2021 Sub Bidang Pekerjaan Umum	IV-26
4.4	Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten sumedang Per 31 Desember 2021	IV-27
4.5	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 Sub Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	IV-34
4.6	Capaian Realisasi SPM Tahun 2021 Sub Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	IV-36
4.7	Target SPM Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang 2021	IV-38
4.8	Capaian/Realisasi SPM Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang 2021	IV-39
4.9	Capaian/Realisasi SPM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang 2021	IV-42
4.10	Capaian/Realisasi SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang 2021	IV-47
4.11	Capaian/Realisasi SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang 2021	IV-57





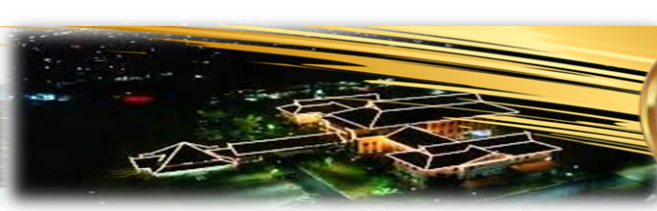
DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.a	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Sumedang	I-10
2.a	IPM dan Perubahannya dari 2020 ke 2021	II-1
2.b	Tingkat Kemiskinan dan Perubahannya 2020 ke 2021 (%)	II-3
2.c	Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhannya di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	II-4
2.d	Jumlah Penduduk Miskin	II-4
2.e	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	II-5
2.f	TPT dan Perubahannya dari 2020 ke 2021	II-6
2.g	TPT Tahun 2021 dan Pertumbuhannya di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	II-6
2.h	UMK Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021	II-7
2.i	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang di bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (%)	II-8
2.j	Lapangan Usaha Realisasi PMDN Triwulan I tahun 2020 di Jawa Barat	II-9
2.k	Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2020	II-10
2.l	Gini Ratio dan Perubahannya dari 2020 ke 2021	II-11
2.m	Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Sumedang	II-11
2.n	Proporsi Pengeluaran Per Kapita Berdasarkan Kelompok Pengeluaran di Sumedang	II-12
6.1	Kawasan Strategis/Khusus Kabupaten Sumedang ...	VI-23



DAFTAR GRAFIK

Nomor Grafik	Judul Grafik	Halaman
1.1.1	Jumlah Hari Curah Hujan Menurut Bulan Pada Tahun 2021	I-14
1.1.2	Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk	I-17
2.1.1	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat	II-67
2.1.2	Perbandingan rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat	II-72
2.1.3	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat	II-75
2.1.4	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia	II-79
2.1.5	Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhannya di 27 Kab/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	II-80
2.1.6	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020	II-86
2.1.7	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional	II-90
2.1.8	Perbandingan IKUB Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2021	II-94
2.1.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia	II-98
2.1.10	Perbandingan IKLH Tahun 2021 Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional .	II-119
2.1.11	Perkembangan Nilai SAKIP	II-138
2.1.12	Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumedang	II-146
2.1.13	Perbandingan Pengeluaran Per-Kapita Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat	II-164
2.1.14	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia	II-169
2.1.15	Jumlah UMKM Tahun 2018 – 2021	II-173



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas :

- 1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas :
 - a. Capaian kinerja makro Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.
 - b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan kinerja



kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah.

c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

2) Capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah Provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

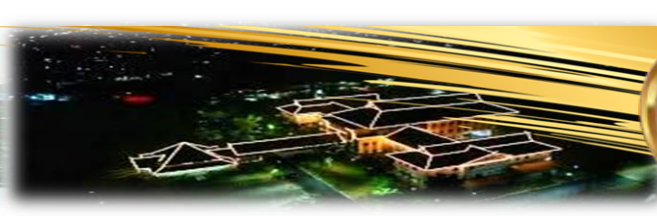
3) Dasar Hukum Penyusunan LPPD Tahun 2021

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

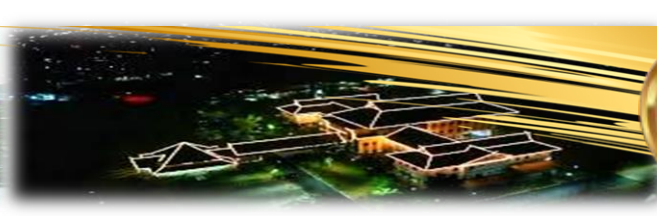


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

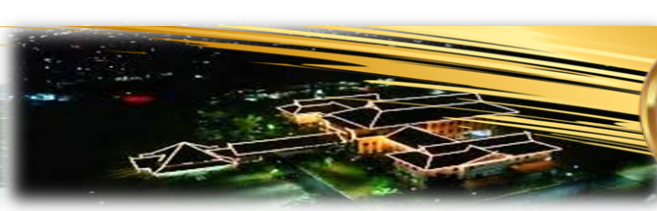
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);



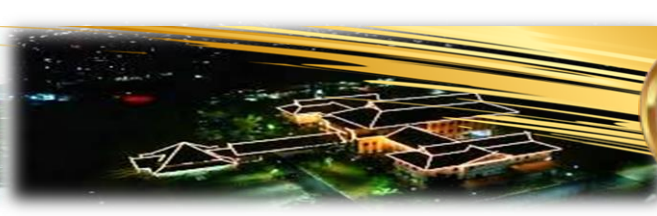
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran



- Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
 27. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang, (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020
 32. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.



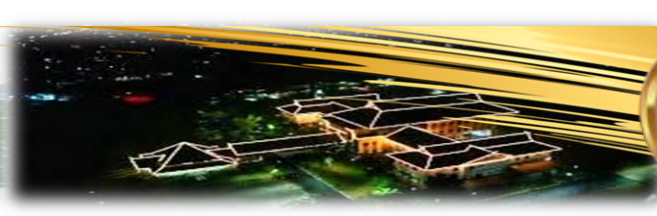
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.

Kabupaten Sumedang merupakan sebuah kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Sumedang memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Sebelum berbentuk kabupaten, Sumedang merupakan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sumedang Larang. Sebelum bernama Sumedang Larang, cikal bakalnya bernama Kerajaan Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Aji Putih. Kemudian ketika kekuasaan kerajaan berpindah kepada putranya, nama kerajaan berganti menjadi Himbar Buana dan kemudian berganti lagi menjadi Kerajaan Sumedang Larang.

Kerajaan Sumedang Larang menjadi pewaris kekuasaan Kerajaan Padjadjaran ketika Kerajaan Padjadjaran runtuh setelah menerima empat orang Kandaga Lante Kerajaan Padjadjaran beserta simbol kerajaan berupa Mahkota Binokasih. Pada saat itu wilayah kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang semakin luas sebagai warisan dari Kerajaan Padjadjaran. Sepeninggal Prabu Geusan Ulun, kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang melemah menyebabkan banyak wilayah yang melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang. Dan akhirnya kekuasaannya hanya meliputi Parakanmuncang, Bandung dan Sukapura saja. Dan ketika Kerajaan Mataram memperluas kekuasaannya sampai ke wilayah Jawa Barat, Sumedang memilih untuk tunduk dan menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Mataram dengan status bukan lagi sebagai kerajaan namun lebih sebagai sebuah kabupaten.

Ketika penjajah Belanda atau VOC bisa menguasai wilayah Jawa Barat dari kekuasaan Kerajaan Mataram, pihaknya membagi-bagi wilayah Jawa Barat menjadi beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Sumedang.

Untuk peresmian Kabupaten Sumedang sendiri sebagai sebuah Kabupaten di bawah pemerintahan Propinsi Jawa Barat dikukuhkan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun



1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1968 nomor 31, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 2851).

b. Data geografis wilayah

1. Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Sumedang terletak antara $6^{\circ}44'-70^{\circ}83'$ Lintang Selatan dan $107^{\circ}21'-108^{\circ}21'$ Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 152.220 Ha yang terdiri dari 26 Kecamatan dengan 272 desa dan 7 Kelurahan.

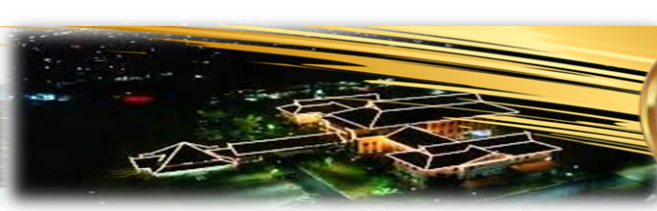
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

2. Luas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang

Selanjutnya luas wilayah Kabupaten berdasarkan kecamatan serta jumlah desa/kelurahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



Tabel 1.1
Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Jatinangor	2.570	12
2	Cimanggung	4.305	11
3	Tanjungsari	4.325	12
4	Sukasari	3.904	7
5	Pamulihan	5.377	11
6	Rancakalong	5.605	10
7	Sumedang Selatan	9.675	10/4
8	Sumedang Utara	3.141	10/3
9	Ganeas	2.531	8
10	Situraja	5.668	15
11	Cisitu	6.410	10
12	Darmaraja	5.413	12
13	Cibugel	5.004	7
14	Wado	7.331	10
15	Jatinunggal	6.322	9
16	Jatigede	11.394	11
17	Tomo	7.541	9
18	Ujungjaya	8.692	9
19	Conggeang	11.186	12
20	Paseh	3.387	10
21	Cimalaka	4.763	14
22	Cisarua	1.452	7
23	Tanjungkerta	4.399	12
24	Tanjungmedar	6.687	9
25	Buahdua	11.156	14
26	Surian	7.630	9
	Jumlah	155.872	270 / 7

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

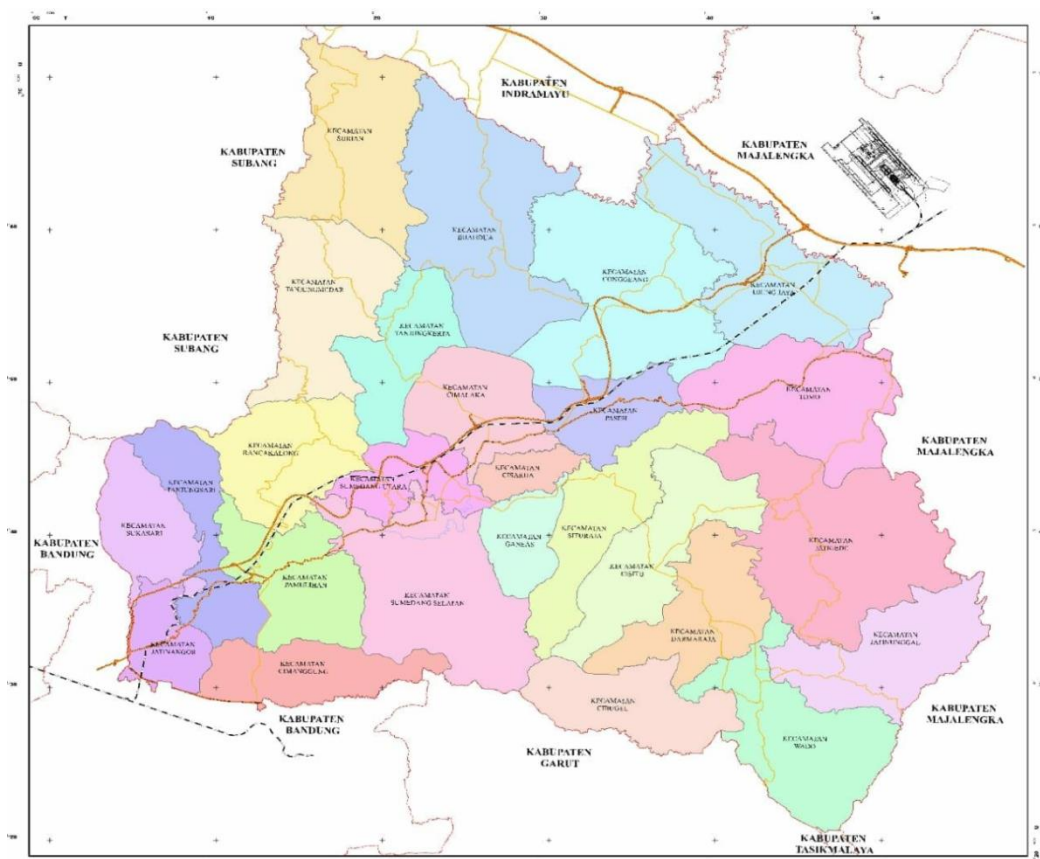
Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Sumedang berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional,



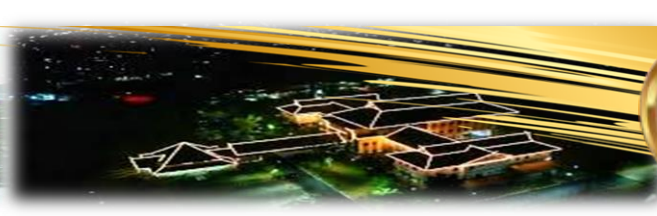
karena sebagian diantaranya masuk dalam wilayah Kawasan Cekungan Bandung yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) oleh Pemerintah Pusat dan juga sebagai penyangga Ibukota Propinsi. Hal ini menjadikan Kabupaten Sumedang memiliki beberapa sektor unggulan untuk dikembangkan lebih lanjut diantaranya yaitu industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya.

Pembagian wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peta Administratif adalah sebagai berikut :

Gambar 1.a
Peta Administratif Kabupaten Sumedang



Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038



3. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan kedalam 5 kelas, yaitu :

1. 0 – 8%, merupakan daerah datar dengan luas area sekitar 12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkotaan;
2. 8–15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;
3. 15 – 25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di Wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;
4. 25 – 40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;
5. Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

4. Klimatologi

Secara umum wilayah Kabupaten Sumedang termasuk dalam Tipe B (Iklim Kering) menurut *kriteria Schmidt & Ferguson dalam Daldjoeni*, dengan nilai Q (perbandingan rata-rata bulan



kering dengan rata-rata bulan basah) adalah 0,32% (berada pada kisaran nilai Q antara $0,14 \leq 0,33$ yang merupakan kriteria tipe iklim B). Iklim dengan tipe B berarti iklim basah, sehingga hampir setiap vegetasi bisa tumbuh di tempat ini. Hal ini berarti bahwa iklim di wilayah Kabupaten Sumedang pada umumnya cocok untuk pengembangan sistem pertanian dan perkebunan, dan baik untuk hampir semua jenis tanaman budidaya. Sebagian besar lahan di Kabupaten Sumedang merupakan lahan pertanian sebanyak 125.138 hektar, dan sisanya sebanyak 27.082 hektar merupakan lahan bukan pertanian.



Tabel 1.2
Iklim Per Bulan Berdasarkan Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, Tekanan Udara, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2021

Bulan	Suhu			Kelembaban			Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara (mb)			Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
	Minimum	Rata - Rata	Maksimum	Minimum	Rata - Rata	Maksimum	Minimum	Rata - Rata	Maksimum	Minimum	Rata - Rata	Maksimum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	3	15	16
Januari	23.6	27.53	34.4	52	86.22	98	calm	1.02	7.72	1 000,40	1 004,96	1 009,10	368	16	53.27
Februari	23.2	26.93	33.3	43	87.78	99	calm	1.02	8.23	1 001,0	1 005,79	1 008,80	607	24	44.48
Maret	23.5	27.41	34.4	50	88.75	98	calm	0.81	9.26	1 000,50	1 005,11	1 008,80	458	23	55
April	23.2	28.02	34.8	55	87.43	99	calm	0.75	7.2	1 001,30	1 005,21	1 008,50	411	18	71.25
Mei	23.9	28.32	35	55	84.93	98	calm	0.78	4.63	999.6	1 004,71	1 009,0	271	17	62.58
Juni	22.1	27.9	34.4	44	82.33	98	calm	0.94	6.17	1 000,70	1 005,02	1 008,60	74	7	88.92
Juli	20.4	27.53	34	38	76.34	98	calm	1.21	5.66	1 001,70	1 004,52	1 008,30	38	3	83.19
Agustus	22.2	28.23	35.7	37	76.01	100	calm	1.24	6.69	1 000,60	1 004,93	1 008,60	36	4	91.05
September	20.2	28.94	36.2	32	68.85	97	calm	1.54	11.32	1 000,20	1 004,82	1 007,90	32	3	94.67
Oktober	22	28.2	37.2	36	76.49	98	calm	1.05	6.17	999.9	1 004,12	1 008,50	227	12	73.35
November	23	28.06	36.4	45	81.4	99	calm	0.61	5.14	999.8	1 004,37	1 008,20	229	14	70.67
Desember	22.5	26.87	34	56	87.83	99	calm	0.67	5.14	999.4	1 003,19	1 006,20	353	21	47.06

Sumber : Kabupaten Sumedang Dalam Angka 2021, BPS

Berdasarkan Tabel di atas sepanjang tahun 2021 suhu udara maksimum rata-rata berada pada bulan September 28,94 dan terendah pada bulan Desember 26,87, Kelembaban maksimum rata-rata berada pada bulan Desember 87,83 dan terendah pada bulan September 68,85, Kecepatan angin maksimum rata-rata berada pada bulan September 1,54 menit/detik dan terendah pada bulan November 0,61 menit/detik, Tekanan Udara maksimum rata-rata berada pada bulan Februari 1 005,79 dan terendah pada bulan Desember 1 003,19, Curah Hujan maksimum berada pada bulan Februari 607 mm sebanyak 24 hari dan terendah pada bulan September 32 mm

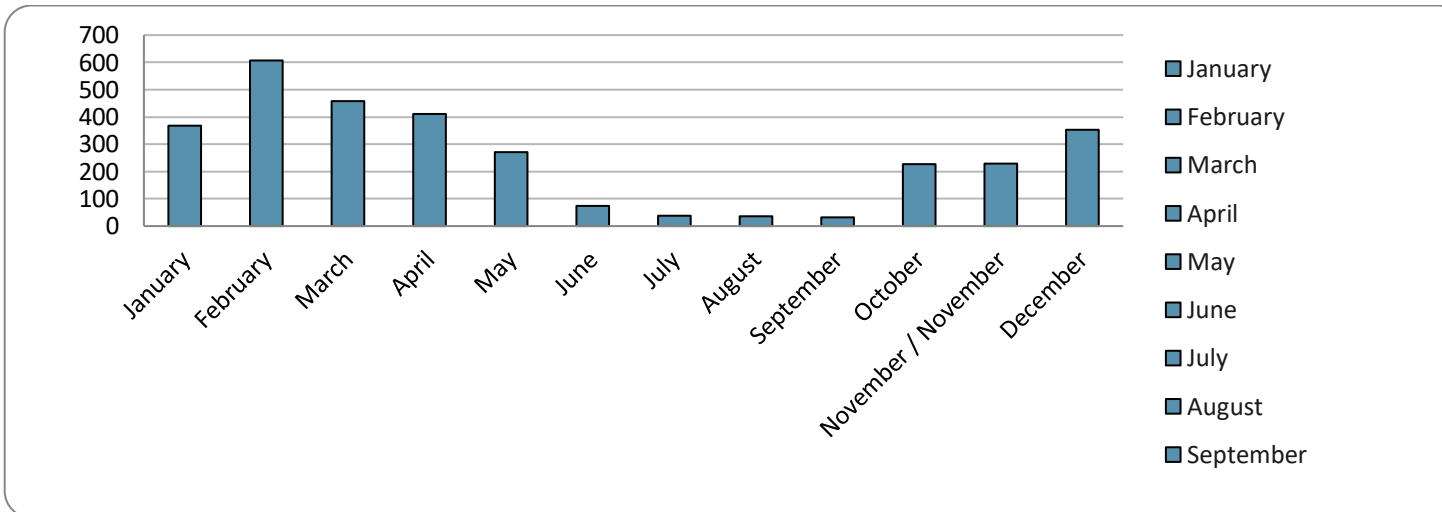


sebanyak 3 hari dan Penyinaran Matahari maksimum berada pada bulan September 94,67 % dan terendah pada bulan Februari 44,48 %.

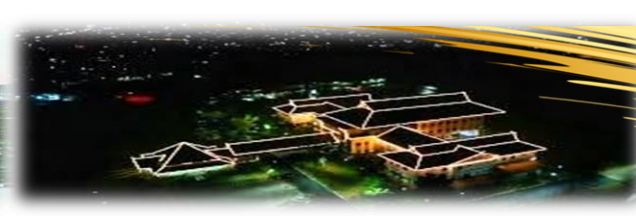
Jumlah curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis dan perputaran/pertemuan arus udara. Curah hujan tertinggi sepanjang Tahun 2021 di Kabupaten Sumedang terjadi pada Bulan Februari 2021 yang mencapai 607 mm³ dengan jumlah hari hujan 24. Jumlah curah hujan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021 tercatat sebesar 3.104 mm³ dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada setiap bulannya terdapat hari hujan.

Adapun gambaran atas penjelasan tersebut dapat dijelaskan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 1.1.1
Jumlah Hari Curah Hujan Menurut Bulan
Pada Tahun 2021



Sumber : Kabupaten Sumedang Dalam Angka, BPS 2021



Adapun berdasarkan penggunaan lahan, menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Lindung

1. Kawasan Hutan Lindung;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
3. Kawasan perlindungan setempat;
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
5. Kawasan rawan bencana alam;
6. Kawasan Lindung geologi; dan
7. Kawasan Lindung lainnya

b. Kawasan Budidaya

1. Kawasan peruntukan Hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan Hutan Rakyat;
3. Kawasan peruntukan pertanian;
4. Kawasan peruntukan perikanan;
5. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
6. Kawasan peruntukan industri;
7. Kawasan peruntukan pariwisata;
8. Kawasan peruntukan permukiman; dan
9. Kawasan peruntukan lainnya

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang sampai dengan akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 1.165.047 jiwa. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, jenis pekerjaan dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut.

1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin meliputi 587.268 jiwa atau 50,45% penduduk laki-laki dan 576.848 jiwa atau 49,55% penduduk perempuan. Sedangkan komposisi



penduduk berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sumedang Utara yaitu 99.246 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Surian yaitu 11.665 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah disajikan pada gambar berikut.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Jenis Kelamin Per Wilayah Tahun 2021

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	WADO	22.624	21.630	44.254
2	JATINUNGGAL	23.172	22.640	45.812
3	DARMARAJA	18.636	18.314	36.950
4	CIBUGEL	12.685	12.195	24.880
5	CISITU	15.443	15.106	30.549
6	SITURAJA	21.353	20.900	42.252
7	CONGGEANG	14.309	14.584	28.893
8	PASEH	19.002	18.968	37.970
9	SURIAN	5.884	5.836	11.720
10	BUAHDUA	16.300	16.641	32.941
11	TANJUNGSARI	42.887	42.096	84.983
12	SUKASARI	17.124	16.593	33.717
13	PAMULIHAN	31.551	31.072	62.623
14	CIMANGGUNG	44.682	43.105	87.787
15	JATINANGOR	46.390	45.001	91.391
16	RANCAKALONG	20.633	20.373	41.006
17	SUMEDANG SELATAN	40.704	40.172	80.876
18	SUMEDANG UTARA	49.969	49.154	99.123
19	GANEAS	13.142	12.751	25.893
20	TANJUNGGERTA	17.562	17.037	34.599
21	TANJUNGMEDAR	13.156	13.275	26.431
22	CIMALAKA	31.449	30.830	62.279
23	CISARUA	10.601	10.466	21.067
24	TOMO	11.548	11.753	23.301
25	UJUNGJAYA	15.515	15.769	31.284
26	JATIGEDE	11.112	11.354	22.466
		587.432	577.615	1.165.047

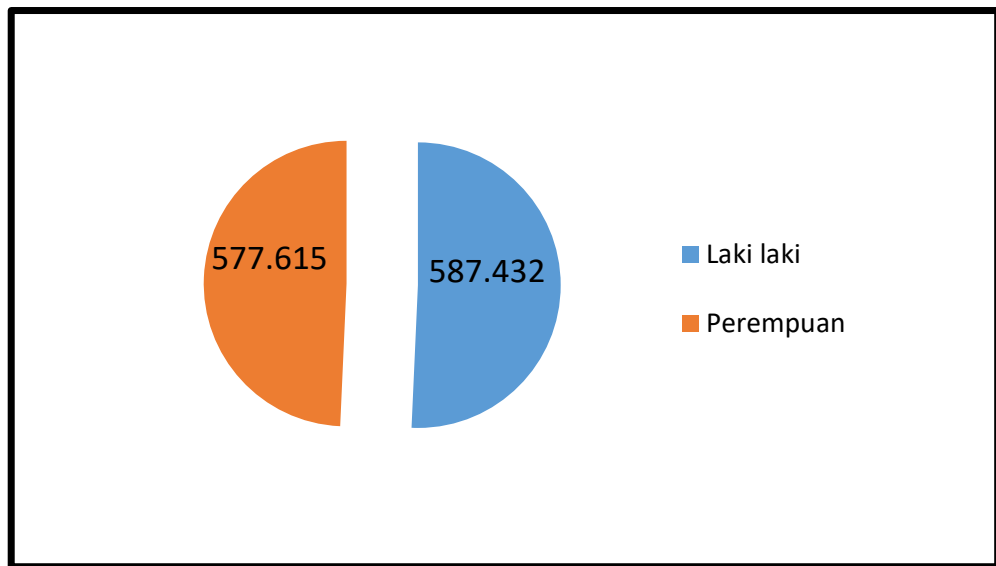
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang, Per 31 Desember 2021



Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang tahun 2021 mengalami kenaikan 1,00% dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2020) yang berjumlah 1.164.116 jiwa. Laju kenaikan penduduk ini kecil selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021 sebanyak 414.028 keluarga dengan rata-rata anggota keluarga sebesar 2,53.

Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk mencapai rata-rata sebesar 747 jiwa/km². Sedangkan dilihat dari sex ratio yaitu sebesar 101,70%, artinya bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Berikut dapat digambarkan dalam grafik dan tabel dibawah ini.

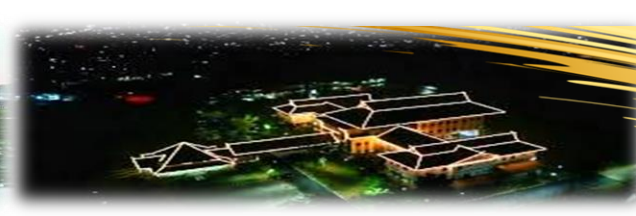
Grafik 1.1.2
Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk



Tabel 1.4
Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio

Kepadatan Penduduk per Km ²	Sex Ratio
747 Jiwa	101,70%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang (diolah) 2021



2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Komposisi penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa kelompok usia produktif, yaitu antara usia 15 – 64 tahun dengan prosentase sebesar 66,20% atau sebanyak 771.259 jiwa sisanya 33,80% merupakan penduduk tidak produktif sebesar 393.788 jiwa yaitu terdiri dari penduduk usia 0 – 14 tahun yaitu sebesar 305.610 jiwa dan penduduk usia lanjut yaitu usia 59 tahun ke atas sebesar 88.178 jiwa. Kondisi tersebut memperlihatkan kondisi Kabupaten Sumedang yang masih memiliki bonus demografi yaitu proporsi penduduk usia produktif masih mendominasi dibandingkan dengan penduduk tidak produktif.

Pada tahun 2021, penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang berjumlah 771.259 jiwa, sedangkan penduduk non-produktif berjumlah 393.788 jiwa, sehingga Angka Ketergantungannya 51,06%. Angka Ketergantungan adalah persentase jumlah penduduk non produktif atas penduduk produktif. Rumusannya yaitu jumlah penduduk non-produktif dibagi penduduk yang produktif dikalikan 100%. Artinya dari 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 51 orang penduduk usia non-produktif.

Dari data di bawah dapat diilustrasikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sumedang terbanyak berada pada usia produktif, dan ini merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah. Dengan banyaknya penduduk pada usia produktif, maka pemerintah dituntut untuk memberdayakan guna membangun Kabupaten Sumedang. Jumlah penduduk terbesar pada usia produktif ini merupakan modal dasar dalam pembangunan. Program-program pemerintah hendaknya mengarah kepada pendayagunaan penduduk pada usia ini.



Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2021

No.	Kelompok Umur	Jumlah	
		n (jiwa)	%
1.	0 – 4	89.823	7,71
2.	5 – 9	95.254	8,18
3.	10 – 14	94.972	8,15
4.	15 – 19	87.438	7,51
5.	20 – 24	91.689	7,84
6.	25 – 29	87.556	7,52
7.	30 – 34	75.771	6,80
8.	35 – 39	87.486	7,11
9.	40 – 44	78.189	7,00
10.	45 – 49	77.342	6,64
11.	50 – 54	73.791	6,49
12.	55 – 59	62.409	5,80
13.	60 – 64	49.588	4,70
14.	65 – 69	38.455	3,68
15.	70 – 74	23.618	2,33
16.	> 75	51.666	3,01
Jumlah		1.165.047	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang, 2021

3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 1.6
Komposisi Penduduk Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	%
1	2	3	4
1.	Tidak/belum kerja	231.854	19,91
2.	Mengurus Rumah Tangga	313.871	26,94
3.	Pelajar /Mahasiswa	204.309	17,36



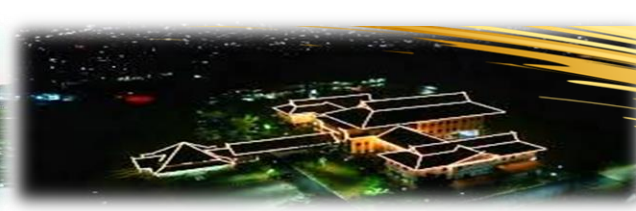
No.	Pekerjaan	Jumlah	%
1	2	3	4
4.	Pensiunan	10.862	0,93
5.	PNS	14.984	1,29
6.	Petani / Pekebun	64.950	5,57
7.	Pegawai swasta	71.832	6,16
8.	Buruh Harian Lepas	51.732	4,44
9.	Pedagang	15.190	1,31
10.	Wiraswasta	150.002	12,87
11.	Lain-lain	35.461	3,04
	Jumlah	1.165.047	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Berdasarkan jenis pekerjaan, masyarakat Kabupaten Sumedang mayoritas masih didominasi oleh pekerjaan mengurus rumah tangga sebesar 26,94 %, Petani/Pekebun sebesar 5,57 %, pegawai swasta sebesar 6,16 %, bekerja sebagai buruh harian lepas sebesar 4,44% kemudian pegawai negeri sipil sebesar 1,29%. Kondisi penduduk yang belum / tidak bekerja cukup banyak yaitu sebanyak 231.854 jiwa atau sebesar 19,91 %, kondisi tersebut dikarenakan penduduk yang berusia tidak produktif yaitu usia 0-4 tahun dan > 59 tahun, dan sisanya merupakan pelajar/mahasiswa dan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Perbandingan antara penduduk yang bekerja dan tidak bekerja serta penduduk yang bukan angkatan kerja di Kabupaten Sumedang masih cukup baik karena prosentase penduduk yang bekerja adalah sebesar 80,09% sedangkan sisanya adalah belum / tidak bekerja dan masih berstatus pelajar.

4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 1.7
Komposisi Penduduk Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum sekolah	201.445
2.	Belum tamat SD/ sederajat	111.747
3.	Tamat SD/ sederajat	364.909
4.	SLTP/ sederajat	208.514
5.	SLTA/ sederajat	221.396
6.	D-1 dan D-2	3.689
7.	D-3 (Sarjana Muda)	12.260
8.	D-4 / S-1	38.567
9.	S-2	2.351
10.	S-3	159
Jumlah		1.165.047

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, 2021

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan untuk kategori tingkat pendidikan tinggi (diploma dan sarjana), tertinggi didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Sarjana S1 sebanyak 38.567 jiwa. Sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah dan dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 221.139 jiwa, SLTP/ sederajat 208.514 jiwa, tidak/ belum sekolah sebanyak 201.445 jiwa dan tamat SD/ sederajat sebanyak 364.909 jiwa.

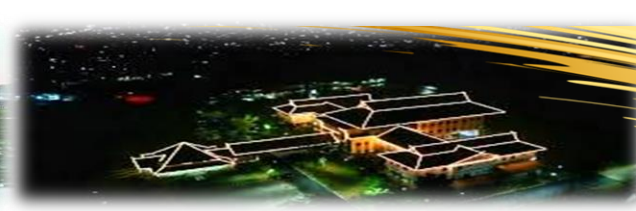
d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang terdiri dari 26 Kecamatan, 270 Desa dan 7 Kelurahan, dengan nama-nama Kecamatan, Desa/ Kelurahan sebagaimana table berikut :



Tabel 1.8
DAFTAR KECAMATAN, DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN SUMEDANG

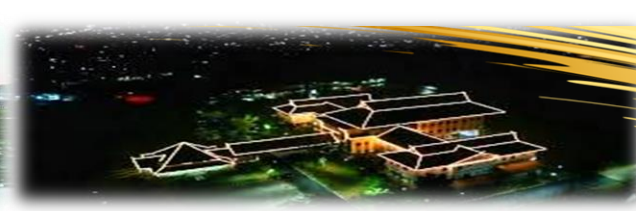
No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	Wado	10	1. Cimungkal	Desa
			2. Ganjarresik	Desa
			3. Cilengkrang	Desa
			4. Cikareo Selatan	Desa
			5. Cikareo Utara	Desa
			6. Wado	Desa
			7. Mulyajaya	Desa
			8. Sukajadi	Desa
			9. Cisurat	Desa
			10. Sukapura	Desa
2	Jatinunggal	9	1. Sirnasari	DESA
			2. Tarikolot	Desa
			3. Sarimekar	Desa
			4. Banjarsari	Desa
			5. Sukamanah	Desa
			6. Cipeundeuy	Desa
			7. Cimanintin	Desa
			8. Pawenang	Desa
			9. Kirisik	Desa
3	Darmaraja	12	1. Darmaraja	Desa
			2. Darmajaya	Desa
			3. Sukamenak	Desa
			4. Sukaratu	Desa
			5. Cikeusi	Desa
			6. Cipeuteuy	Desa
			7. Cieunteung	Desa
			8. Karangpakuan	Desa
			9. Pakualam	Desa
			10. Neglasari	Desa
			11. Tarunajaya	Desa
			12. Ranggon	Desa



No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
4	Cibugel	7	1. Jayamekar	Desa
			2. Buanamekar	Desa
			3. Cibugel	Desa
			4. Cipasang	Desa
			5. Tamansari	Desa
			6. Suka Raja	Desa
			7. Jayamandiri	Desa
5	Cisitu	10	1. Cisitu	Desa
			2. Situmekar	Desa
			3. Pajagan	Desa
			4. Cigintung	Desa
			5. Sundamekar	Desa
			6. Linggajaya	Desa
			7. Ranjeng	Desa
			8. Cilopang	Desa
			9. Cimarga	Desa
			10. Cinangsi	Desa
6	Situraja	15	1. Situraja Utara	Desa
			2. Situraja	Desa
			3. Mekarmulya	Desa
			4. Cikadu	Desa
			5. Kaduwulung	Desa
			6. Karangheuleut	Desa
			7. Cijeler	Desa
			8. Ambit	Desa
			9. Malaka	Desa
			10. Sukatali	Desa
			11. Pamulihan	Desa
		12	12. Jatimekar	Desa
			13. Bangbayang	Desa
			14. Cijati	Desa
			15. Cicarimanah	Desa
7	Conggeang	12	1. Conggeang Kulon	Desa
			2. Conggeang Wetan	Desa
			3. Cipamekar	Desa



No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status			
			4. Cibeureuyeh	Desa			
			5. Jambu	Desa			
			6. Babakan Asem	Desa			
			7. Padaasih	Desa			
			8. Ungkal	Desa			
			9. Karanglayung	Desa			
			10. Cacaban	Desa			
			11. Narimbang	Desa			
			12. Cibubuan	Desa			
			8	Paseh	10	1. Paseh Kidul	Desa
						2. Paseh Kaler	Desa
						3. Legok Kidul	Desa
4. Legok Kaler	Desa						
5. Bongkok	Desa						
6. Padanaan	Desa						
7. Pasireungit	Desa						
8. Cijambe	Desa						
9. Haur Kuning	Desa						
10. Citepok	Desa						
9	Surian	9	1. Wanasari	Desa			
			2. Wanajaya	Desa			
			3. Pamekarsari	Desa			
			4. Tanjung	Desa			
			5. Surian	Desa			
			6. Suriamukti	Desa			
			7. Suriamedal	Desa			
			8. Ranggasari	Desa			
			9. Nanjungwangi	Desa			
10	Buahdua	14	1. Buahdua	Desa			
			2. Hariang	Desa			
			3. Karangbungur	Desa			
			4. Mekarmukti	Desa			
			5. Citaleus	Desa			
			6. Nagrak	Desa			
			7. Cibitung	Desa			



No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
			8. Sekarwangi	Desa
			9. Gendereh	Desa
			10. Panyindangan	Desa
			11. Cilangkap	Desa
			12. Bojongloa	Desa
			13. Cikurubuk	Desa
			14. Ciawitali	Desa
11	Tanjungsari	12	1. Gudang	Desa
			2. Tanjungsari	Desa
			3. Jatisari	Desa
			4. Margaluyu	Desa
			5. Kutamandiri	Desa
			6. Margajaya	Desa
			7. Raharja	Desa
			8. Cijambu	Desa
			9. Pasigaran	Desa
			10. Gunungmanik	Desa
			11. Kadakajaya	Desa
			12. Cinanjung	Desa
12	Sukasari	7	1. Sukasari	Desa
			2. Genteng	Desa
			3. Banyuresmi	Desa
			4. Nanggerang	Desa
			5. Mekarsari	Desa
			6. Sindangsari	Desa
			7. Sukarapih	Desa
13	Pamulihan	11	1. Cigendel	Desa
			2. Cijeruk	Desa
			3. Pamulihan	Desa
			4. Haurgombong	Desa
			5. Cilembu	Desa
			6. Cimarias	Desa
			7. Cinanggerang	Desa
			8. Mekarbakti	Desa
			9. Sukawangi	Desa



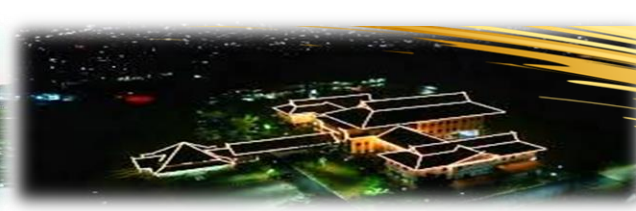
No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
			10. Ciptasari	Desa
			11. Citali	Desa
14	Cimanggung	11	1. Cimanggung	Desa
			2. Sindangpakuon	Desa
			3. Tegalmanggung	Desa
			4. Sindulang	Desa
			5. Sindanggalih	Desa
			6. Sawahdadap	Desa
			7. Cikahuripan	Desa
			8. Sukadana	Desa
			9. Mangunarga	Desa
			10. Cihanjuang	Desa
			11. Pasirnanjung	Desa
15	Jatinangor	12	1. Cikeruh	Desa
			2. Hegarmanah	Desa
			3. Cibeusi	Desa
			4. Cipacing	Desa
			5. Sayang	Desa
			6. Mekargalih	Desa
			7. Cintamulya	Desa
			8. Jatimukti	Desa
			9. Cisempur	Desa
			10. Jatiroke	Desa
			11. Cileles	Desa
			12. Cilayung	Desa
16	Rancakalong	10	1. Nagarawangi	Desa
			2. Cibunar	Desa
			3. Pangadegan	Desa
			4. Sukahayu	Desa
			5. Sukamaju	Desa
			6. Pamekaran	Desa
			7. Rancakalong	Desa
			8. Sukasirnarasa	Desa
			9. Cibungur	Desa
			10. Pasirbiru	Desa



No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
17	Sumedang Selatan	14	1. Sukagalih	Desa
			2. Baginda	Desa
			3. Cipancar	Desa
			4. Citengah	Desa
			5. Gunasari	Desa
			6. Sukajaya	Desa
			7. Margamekar	Desa
			8. Ciherang	Desa
			9. Margalaksana	Desa
			10. Mekar Rahayu	Desa
			11. Regolwetan	Kelurahan
			12. Kotakulon	Kelurahan
			13. Pasanggrahan Baru	Kelurahan
			14. Cipameungpeuk	Kelurahan
18	Sumedang Utara	13	1. Padasuka	Desa
			2. Mulyasari	Desa
			3. Girmukti	Desa
			4. Mekarjaya	Desa
			5. Margamukti	Desa
			6. Sirnamulya	Desa
			7. Kebonjati	Desa
			8. Jatihurip	Desa
			9. Jatimulya	Desa
			10. Rancamulya	Desa
			11. Kotakaler	Kelurahan
			12. Situ	Kelurahan
			13. Talun	Kelurahan
19	Ganeas	8	1. Ganeas	Desa
			2. Dayeuhluhur	Desa
			3. Cikoneng	Desa
			4. Sukaluyu	Desa
			5. Sukawening	Desa
			6. Tanjunghurip	Desa
			7. Cikondang	Desa
			8. Cikoneng Kulon	Desa



No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
20	Tanjungkerta	12	1. Sukamantri	Desa
			2. Cipanas	Desa
			3. Gunturmekar	Desa
			4. Mulyamekar	Desa
			5. Banyuasih	Desa
			6. Kertamekar	Desa
			7. Kertaharja	Desa
			8. Cigentur	Desa
			9. Tanjungmekar	Desa
			10. Tanjungmulya	Desa
			11. Boros	Desa
			12. Awilega	Desa
21	Tanjungmedar	9	1. Cikaramas	Desa
			2. Wargaluyu	Desa
			3. Jinkang	Desa
			4. Kamal	Desa
			5. Kertamukti	Desa
			6. Tanjungwangi	Desa
			7. Sukamukti	Desa
			8. Sukatani	Desa
			9. Tanjungmedar	Desa
22	Cimalaka	14	1. Cimalaka	Desa
			2. Galudra	Desa
			3. Cibeureum Kulon	Desa
			4. Naluk	Desa
			5. Nyalindung	Desa
			6. Trunamanggala	Desa
			7. Cikole	Desa
			8. Cibeureum Wetan	Desa
			9. Mandalaherang	Desa
			10. Licin	Desa
			11. Citimun	Desa
			12. Serang	Desa
			13. Padasari	Desa
			14. Cimuja	Desa



No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
23	Cisarua	7	1. Cisarua	Desa
			2. Ciuyah	Desa
			3. Cimara	Desa
			4. Bantarmara	Desa
			5. Cipandanwangi	Desa
			6. Cisalak	Desa
			7. Kebon Kalapa	Desa
24	Tomo	9	1. Tomo	Desa
			2. Tolengas	Desa
			3. Darmawangsi	Desa
			4. Marongge	Desa
			5. Jembarwangi	Desa
			6. Bugel	Desa
			7. Cipeles	Desa
			8. Karyamukti	Desa
			9. Mekarwangi	Desa
25	Ujungjaya	9	1. Ujungjaya	Desa
			2. Palabuan	Desa
			3. Palasari	Desa
			4. Keboncau	Desa
			5. Sakurjaya	Desa
			6. Kudangwangi	Desa
			7. Sukamulya	Desa
			8. Cipelang	Desa
			9. Cibuluh	Desa
26	Jatigede	11	1. Cijeungjing	Desa
			2. Kadujaya	Desa
			3. Lebaksiuh	Desa
			4. Cintajaya	Desa
			5. Cipicung	Desa
			6. Mekarasih	Desa
			7. Ciranggem	Desa
			8. Cisampih	Desa
			9. Jemah	Desa
			10. Karedok	Desa

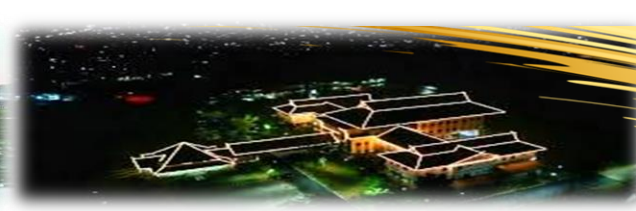


No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
			11. Kadu	Desa

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumedang 2021

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

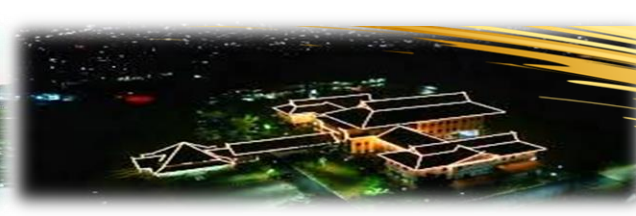
Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan bahwa jenis perangkat daerah pada Daerah Kabupaten terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan serta Kecamatan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dimaksud, juga mengatur mengenai kriteria tipologi perangkat daerah, kelembagaan rumah sakit daerah, nomenklatur perangkat daerah serta jabatan perangkat daerah. Implementasi atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Namun pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan lainnya tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan hukum. Beberapa perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah ini meliputi aspek perubahan bentuk kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipologi B sebagaimana hasil evaluasi kelembagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dengan pertimbangan aspek efektivitas



pelaksanaan urusan, terjadi pengalihan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga pengalihan urusan pemerintahan ini berdampak pada perubahan nomenklatur dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Sosial dengan Tipologi A, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan disertai dengan peningkatan Tipologi yang semula Tipe B menjadi Tipe A. Selanjutnya perubahan kelembagaan Rumah sakit Daerah yang semula berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi unit organisasi bersifat khusus dibawah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada aspek nomenklatur, dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah yaitu, yang semula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Aspek terakhir yang dilakukan adalah penyesuaian jabatan perangkat daerah khusus pada rumah sakit daerah.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Susunan Perangkat Daerah dimaksud, terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD tipe A,
- c. Inspektorat Daerah tipe A,
- d. Dinas Daerah terdiri dari :



1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat;
5. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
12. Dinas Perhubungan tipe A menyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;



13. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan bidang Statistik;
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian ;
 15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 16. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan, Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga ;
 17. Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
 18. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
 19. Dinas Perikanan Dan Peternakan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan dan sebagian Urusan Pemerintahan bidang Peternakan;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan dan fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan ;



2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan Keuangan;
 4. Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan keuangan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Buahdua tipe A;
 2. Kecamatan Cimalaka tipe A;
 3. Kecamatan Cimanggung tipe A;
 4. Kecamatan Conggeang tipe A;
 5. Kecamatan Darmaraja tipe A;
 6. Kecamatan Jatigede tipe A;
 7. Kecamatan Jatinangor tipe A;
 8. Kecamatan Pamulihan tipe A;
 9. Kecamatan Paseh tipe A;
 10. Kecamatan Situraja tipe A;
 11. Kecamatan Sumedang Selatan tipe A;
 12. Kecamatan Sumedang Utara tipe A;
 13. Kecamatan Tanjungkerta tipe A;
 14. Kecamatan Tanjungsari tipe A;
 15. Kecamatan Wado tipe A;
 16. Kecamatan Jatinunggal tipe A;
 17. Kecamatan Rancakalong tipe A;
 18. Kecamatan Tomo tipe A;
 19. Kecamatan Ujungjaya tipe A;
 20. Kecamatan Cibugel tipe A;
 21. Kecamatan Cisarua tipe A;
 22. Kecamatan Cisitu tipe A;
 23. Kecamatan Ganeas tipe A;
 24. Kecamatan Sukasari tipe A;



- 25. Kecamatan Surian tipe A;
- 26. Kecamatan Tanjungmedar tipe A;
- g. Kantor terdiri dari :
 - a. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah

Jumlah data pegawai berdasarkan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2021 sebanyak 9.252 orang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9

Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2021

No.	Perangkat Daerah	Pejabat Struktural			Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Jumlah Seluruh
		II	III	IV			
1	Sekretariat Daerah	7	11	36		139	193
2	Sekretariat DPRD	1	4	9		15	29
3	Inspektorat	1	5	4	42	11	63
4	Dinas Pendidikan	1	5	13	5277	265	5560
5	Dinas Kesehatan	1	5	87	700	156	949
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	5	19		162	187
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	4	9		54	68
8	Dinas Sosial	1	5	11		16	33
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	5	11	7	19	43
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	5	26	3	138	173
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	4	8		26	39
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	5	10		23	39
13	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	4	36		11	52
14	Dinas Perhubungan	0	5	16	4	32	57



No.	Perangkat Daerah	Pejabat Struktural			Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Jumlah Seluruh
		II	III	IV			
15	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	1	5	8		25	39
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	5	15	3	43	67
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	5	9		24	39
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1	5	10		26	42
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1	4	8	24	14	51
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	5	71	75	53	203
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	1	4	33		21	59
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1	5	15	3	36	60
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	4	11	6	36	58
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	5	10	1	36	53
25	Badan Pendapatan Daerah	0	5	11		38	54
26	Satuan Polisi Pamong Praja	0	5	18	26	15	62
27	Rumah Sakit Umum Daerah		11	13	392	54	470
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1	4		9	14
29	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1	4		10	15
30	Kecamatan Jatinangor		2	7		13	22
31	Kecamatan Cimanggung		2	7		9	18
32	Kecamatan Tanjungsari		2	7		10	19
33	Kecamatan Pamulihan		2	7		9	18
34	Kecamatan Sumedang Selatan		2	27		16	45
35	Kecamatan Sumedang Utara		2	22		15	39
36	Kecamatan Cimalaka		2	7		8	17
37	Kecamatan Paseh		2	7		6	15
38	Kecamatan Darmaraja		2	7		16	25
39	Kecamatan Situraja		2	7		13	22
40	Kecamatan Wado		2	7		6	15
41	Kecamatan Rancakalong		2	7		9	18



No.	Perangkat Daerah	Pejabat Struktural			Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Jumlah Seluruh
		II	III	IV			
42	Kecamatan Tanjungkerta		2	7		6	15
43	Kecamatan Conggeang		2	7		8	17
44	Kecamatan Buahdua		2	7		7	16
45	Kecamatan Jatinunggal		2	7		6	15
46	Kecamatan Jatigede		2	7		6	15
47	Kecamatan Tomo		2	7		3	12
48	Kecamatan Ujungjaya		2	7		9	18
49	Kecamatan Cisitu		2	7		6	15
50	Kecamatan Sukasari		2	7		7	16
51	Kecamatan Ganeas		2	7		3	11
52	Kecamatan Cisarua		2	7		7	16
53	Kecamatan Cibugel		2	7		5	14
54	Kecamatan Tanjungmedar		2	7		6	16
55	Kecamatan Surian		2	7		4	13
	JUMLAH	28	192	752	6560	1720	9252

Sumber : BKPSDM Kab. Sumedang 2021

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021

Berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun 2021, capaian penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari target pendapatan daerah sebesar Rp. 2.865.884.595.193,00 terealisasi sebesar Rp. 2.835.867.145.956,29 atau 98,95%, dan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 2.974.489.241.833,00 terealisasi sebesar Rp. 2.712.131.019.837,00 atau 91,18%.

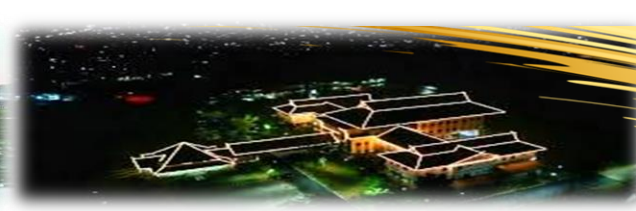
Dari jumlah pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp. 2.835.867.145.956,29 diperhitungkan dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 2.712.131.019.837,00 dan realisasi pembiayaan daerah sebesar Rp. 108.604.646.639,61, maka Sisa



Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan adalah sebesar Rp. 232.340.772.758,90. Hal ini dapat dimaknai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun anggaran 2021 dapat melakukan efisiensi anggaran. Laporan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.10
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Sumedang Tahun 2020

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
4.	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	2.865.884.595.193,00	2.835.867.145.956,29	98,95
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	486.586.138.339,00	470.279.711.324,29	96,65
4.1.01.	Pajak Daerah	217.313.708.500,00	198.243.612.757,00	91,22
4.1.02.	Retribusi Daerah	16.282.030.378,00	6.733.798.976,00	41,36
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.692.068.000,00	11.164.520.965,00	87,96
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	240.298.331.461,00	254.137.778.626,29	105,76
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.236.389.433.854,00	2.233.686.395.115,00	99,88 2
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.872.538.691.151,00	1.892.016.917.253,00	101,04
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	363.850.742.703,00	341.669.477.862,00	93,90
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	142.909.023.000,00	131.901.039.517,00	92,30
4.3.01.	Pendapatan Hibah	142.909.023.000,00	131.901.039.517,00	92,30
5.	<u>BELANJA DAERAH</u>	2.974.489.241.833,00	2.712.131.019.837,00	91,18
5.1.	BELANJA OPERASI	2.099.668.443.781,00	1.955.815.407.557,00	93,15
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.291.302.501.307,00	1.182.261.056.674,00	91,56
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	741.590.457.474,00	709.093.480.270,00	95,62
5.1.03.	Belanja Bunga	707.640.000,00	500.908.500,00	70,79
5.1.05.	Belanja Hibah	61.227.050.000,00	59.369.641.613,00	96,97
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	4.840.795.000,00	4.590.320.500,00	94,83
5.2.	BELANJA MODAL	402.761.944.953,00	353.171.282.580,00	87,69
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	1.512.440.000,00	734.126.000,00	48,54
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.463.045.988,00	115.927.870.582,00	96,24
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.245.585.816,00	137.937.639.826,00	79,16
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.673.834.100,00	87.697.349.012,00	94,63
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.556.287.160,00	10.874.297.160,00	80,22



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	310.751.889,00	-	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	92.733.513.099,00	23.812.747.069,00	25,68
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	92.733.513.099,00	23.812.747.069,00	25,68
5.4.	BELANJA TRANSFER	379.325.340.000,00	379.331.582.631,00	100,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	23.359.612.700,00	23.441.269.922,00	100,35
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	355.965.727.300,00	355.890.312.709,00	99,98
	SURPLUS/(DEFISIT)	(108.604.646.640,00)	123.736.126.119,29	(113,93)

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sumedang 2021

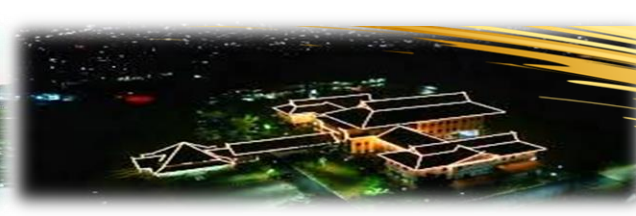
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pemerintahan Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2018-2023 dilaksanakan atas dasar permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mengatasi masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada disusun dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Dokumen tersebut berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun sehingga dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi pada akhir tahun kelima.

Pada awal Tahun 2021, RPJMD telah dilaksanakan selama dua Tahun. Dengan demikian dapat dilakukan evaluasi atas capaian perencanaan pembangunan sampai dengan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023. Capaian tersebut telah diuraikan pada Bab II kondisi kinerja pemerintah Kabupaten Sumedang atas capaian kinerja pelayanan pemerintah di seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan.

Kinerja pembangunan periode Tahun 2018 sampai Tahun 2019 sebagian besar telah memenuhi target sebagaimana tercantum pada RPJMD Tahun 2018-2023. Akan tetapi pada Tahun 2020 telah terjadi



beberapa kondisi yang menyebabkan asumsi dalam RPJMD Tahun 2018- 2023 menjadi tidak sesuai dengan perkembangan Kabupaten Sumedang di masyarakat. Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian, terutama berkenaan dengan kodefikasi dan dampak kondisi Pandemi Covid-19.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Sumedang dapat dianalisis dengan menggunakan metode *gap analysis* atau analisis dengan membandingkan antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan. Apabila terdapat gap maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian agar pada akhir Tahun RPJMD, kesejahteraan masyarakat tetap tercapai sesuai yang direncanakan yaitu masyarakat Sumedang yang SIMPATI. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum termanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi baik yang dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Permasalahan yang saat ini telah teridentifikasi secara garis besar dapat dibagi dalam dua cakupan permasalahan, yaitu yang pertama identifikasi permasalahan pembangunan yang berdampak pada sasaran pembangunan daerah untuk penentuan prioritas daerah dan yang kedua adalah identifikasi permasalahan pembangunan yang berdampak pada urusan penyelenggaraan pemerintah untuk penentuan prioritas masing-masing urusan. Adapun masing-masing identifikasi permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :



1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang paling nampak di Kabupaten Sumedang adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat baik pada laju pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi, angka kemiskinan yang belum menurun secara signifikan, masih tidak meratanya distribusi diantara kelompok masyarakat, dan rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Sumedang masih dibawah IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Pandemi Covid-19 di awal Tahun 2019, mendorong pemerintah Kabupaten Sumedang harus merelokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak terkait penanganan Pandemi Covid-19. Berdasarkan kondisi tersebut, maka di Kabupaten Sumedang masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :

Tabel 1.11
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kemiskinan, Ketimpangan dan Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kemiskinan 10,26% pada Tahun 2020 masih sangat tinggi dibandingkan dengan target SDG's (0%); • Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi selama 5 Tahun terakhir (Tahun 2015 sebesar 0,349 meningkat menjadi 0,384 di Tahun 2020); 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses pelayanan dasar (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) masih terbatas dan belum merata; • Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam; • Produktivitas sumber daya manusia yang masih rendah; • Kebijakan yang belum menerapkan konsep <i>pro poor, pro job, pro growth</i>, dan <i>pro environment</i> • dengan memperhatikan <i>community empowerment</i>;



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pengangguran Terbuka semakin meningkat (7,15% pada Tahun 2019 meningkat menjadi 9,89% pada Tahun 2020). 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sistem pengembangan lapangan kerja baru berbasis kewirausahaan (pelatihan wirausaha, pendampingan usaha bantuan perijinan, akses jejaring pemasaran, analisa laporan keuangan, dan akses permodalan sesuai kebutuhan)
2	Kualitas Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas jalan dan jembatan masih rendah; • Kualitas infrastruktur perhubungan masih rendah; • Kualitas permukiman dan sarana prasarana pendukungnya masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan prioritas kebutuhan layanan infrastruktur dasar tidak memadai (data dan informasi sebagai landasan pembuatan kebijakan sangat kurang); • Perencanaan kurang terkoordinasi.
3.	Indeks Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian IPM Kab. Sumedang masih dibawah IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat; • Angka Harapan Hidup masih dibawah capaian provinsi; • Rata-rata lama sekolah masih dibawah capaian provinsi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya maupun infrastruktur penunjang layanan dasar; • Masih kurangnya kualitas, distribusi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan;
		<ul style="list-style-type: none"> • Harapan Lama sekolah masih dibawah standar UNDP; • Pengeluaran per kapita masih dapat ditingkatkan seiring dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Jangkauan akses ke pelayanan dasar terbatas karena ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan masih terbatas.
4.	Struktur Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Rendahnya kontribusi sektor produktif terhadap PDRB; 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada sistem yang menyediakan akses permodalan dan pemasaran produk lokal;



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi sektor swasta masih rendah (minat investasi rendah); Pertumbuhan sektor industri belum berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat. • Capaian PDRB Kabupaten Sumedang masih rendah (peringkat 14 dari total 27 kabupaten kota di Jabar Tahun 2020); 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan SDA lokal belum optimal; Belum terdorongnya produk-produk unggulan sebagai penciptaan peningkatan ekonomi rakyat masyarakat Kab. Sumedang. • Pertumbuhan nilai tambah pada sektor pertanian masih rendah.
5.	Rendahnya efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen pemerintahan yang kurang baik; • Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berada pada posisi 83,80 (survei Tahun 2020). 	<ul style="list-style-type: none"> • Profesionalisme aparatur masih rendah dengan beban yang ada; • Prosedur kerja sesuai standar pelayanan yang baik masih belum tersedia; • Sarana dan prasarana pemerintahan yang belum memadai.

Sumber : FGD P-RPJMD

2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merinci permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah di Kabupaten Sumedang yang menjadi hak dan kewajiban setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.



Tabel 1.11

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
PRIORITAS AKSELERASI PELAYANAN DASAR				
1	Urusan Pendidikan	<p>Masih rendahnya APK PAUD Sederajat</p> <p>Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan kesetaraan</p> <p>Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni</p>	<p>1. Masih kurangnya standar pelayanan pendidikan tingkat Usia Dini;</p> <p>2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan tingkat usia dini;</p> <p>1. Rata-rata Lama Sekolah pada Tahun 2020, masih pada angka 8,51;</p> <p>2. Angka partisipasi pada Tahun 2020 masih pada angka 3,00%</p> <p>Meskipun APK dan APM menunjukkan angka di atas 100 pada tahun 2019 namun terjadi penurunan pada tahun 2020 hal tersebut akibat tidak diketahui distribusi siswa beralamat Sumedang dan Siswa di luar Sumedang yang bersekolah di Sumedang serta siswa beralamat Sumedang bersekolah di luar Sumedang, terutama kelompok margin penduduk usia sekolah Sumedang yang tidak bersekolah.</p>	<p>Melakukan pembinaan standar pendidikan pada jenjang PAUD;</p> <p>Melakukan sosialisasi pendidikan jenjang PAUD untuk wilayah (kecamatan) yang APK dan APM PAUDnya rendah;</p> <p>Peningkatan program sekolah Paket A, B dan C;</p> <p>Koordinasi antara Dinas Kependudukan Dinas Pendidikan merekap/ melaporkan anak usia sekolah by name by address</p>



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum memadainya sarana dan prasarana sekolah	1. Belum meratanya ruang Lab IPA dijenjang SD-SMP; 2. Belum meratanya Lab Komputer di jenjang SD-SMP	Membangun Lab IPA dan Lab Komputer dijenjang SD-SMP;
		Masih rendahnya persentase Guru yang bersertifikasi	Masih adanya guru yang belum berkualifikasi S1 berdampak pada kurangnya jumlah guru yang bersertifikat pendidik;	Melakukan bantuan pendidikan lanjutan untuk guru baik dari Pemerintah maupun Swasta (CSR);
		Karakter siswa harus terus dikembangkan	Asal siswa dari bermacam kalangan dan golongan menghasilkan berbagai macam karakter dan akhlak baik dan kurang baik,	Penyelenggaraan pendidikan berbasis Eksotis dan PERKASA
2	Urusan Kesehatan	Pelayanan kesehatan belum optimal	1. Jumlah Nakes masih Kurang; 2. Jumlah Sarpras (alkes) masih kurang untuk meningkatkan status RS Tipe B ke RS Tipe B Pendidikan; 3. Jumlah tempat tidur rawat inap masih kurang.	1. Penambahan tenaga kesehatan ; 2. Pengajuan kenaikan status RS Tipe B ke Tipe B Pendidikan; 3. Penambahan jumlah tempat tidur (Pembangunan Rumah Sakit)
		Masih terdapat Balita Gizi Buruk dan Balita Stunting sebanyak 12,05%	Kurangnya pendamping makanan tambahan ASI	Tersedianya bantuan MP ASI;
		Masih terjadi kasus Kematian Ibu	1. Belum adanya sistem penanganan kegawatdaruratan terpadu sehingga adanya keterlambatan penanganan pasien	Pelatihan penanganan kegawatdaruratan neonatal (Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatus)



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			2. Masih terdapat kasus komplikasi yang lahir di rumah sakit Sumedang dari Penduduk di luar Kabupaten Sumedang yang dilaporkan; 3. Penanganan ibu hamil dan melahirkan di puskesmas belum sesuai standar karena SDM belum terlatih penanganan kegawat daruratan neonatal;	
		Masih terjadi kasus Kematian Bayi	Banyak kasus Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	Peningkatan kondisi dan gizi ibu hamil;
		Masih tingginya rasio Puskesmas per Satuan penduduk	Kurangnya jumlah puskesmas;	Peningkatan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas
		Kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) masih terjadi	Kasus DBD mencapai 707 kasus pada Tahun 2021	Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD dengan cara menjaga kebersihan lingkungan
		1. Dokter Umum 2. Dokter Spesialis 3. Dokter Gigi 4. Rasio Bidan per 10.000 penduduk	1. Tidak ada pengangkatan PNS Nakes, PTT Nakes, maupun TKD Nakes; 2. Kurang diminatinya praktek dokter di Sumedang	1. Mengadakan perekrutan Nakes dengan pola PPK BLUD; 2. Pengajuan PNS Nakes dan PTT ke Pusat dan Provinsi
		Remaja perokok sebanyak 7,1%	1. Kurangnya pendidikan karakter pada anak usia sekolah 2. Akses mudah bagi remaja untuk mendapatkan rokok	1. Penyebaran informasi secara intensif tentang bahaya merokok kepada para remaja 2. Pelaksanaan secara konsisten regulasi kawasan tanpa rokok



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Cakupan peserta UHC 73,17%	Masih banyak penduduk yang tidak terdaftar JKN	Perbarui data DTKS untuk urusan JKN
3	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rumah tangga bersanitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat dalam hidup sehat; 2. Masyarakat masih ada yang belum memiliki Sarana dan prasarana sanitasi (basis data Podes); 3. Penyediaan tanah/lahan untuk membangun sanitasi komunal belum tersedia sehingga saat ini septitank masih dibuang ke sungai; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarpras sanitasi; 2. Menyediakan tanah untuk sanitasi komunal; 3. Melaksanakan STBM. 4. Menyediakan sanitasi komunal; 5. Penyediaan layanan sedotan tinja.
		Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan akses air bersih
		Lingkungan Permukiman Kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan penduduk miskin; 2. Kurangnya peran pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. 	Konsistensi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kebijakan penurunan angka kemiskinan.
		Rasio Rumah Layak Huni	Pertumbuhan penduduk miskin	Konsistensi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kebijakan penurunan angka kemiskinan.
4	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase aparaturnya dan kendaraan pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	Jumlah pegawai Petugas Damkar masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk serta jumlah kendaraan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Sumedang	Penambahan personil Petugas Damkar serta penambahan sarana Damkar



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya pelanggaran Perda 2. Masih banyaknya masyarakat yang menduduki lahan pemda secara ilegal 	Konsistensi personil Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah
5	Urusan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya jumlah PMKS dan munculnya PMKS baru; 2. belum adanya regulasi daerah tentang penanganan PMKS (penangan ODGJ, orang terlantar, korban bencana, kaum minoritas); 3. Belum sinkronnya data penerima bantuan program pusat dengan data kabupaten/kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemberdayaan sosial dan menyediakan jaminan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi sosial; 2. Penyusunan perda/perbup; 3. verifikasi data secara rutin.
1.	Urusan Pendidikan	Belum semua siswa Pendidikan dasar memiliki sertifikat Diniyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pendidikan dasar Agama Islam bagi siswa sekolah dasar dan menengah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program wajib belajar madrasah diniyah selama 4 tahun; 2. Sertifikat diniyah menjadi salah satu persyaratan dalam melanjutkan sekolah ke tingkat menengah bagi siswa muslim.
PRIORITAS PENGUATAN SUMEDANG AGAMIS				
2.	Urusan Kebudayaan	Masih rendahnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan event seni budaya/promosi budaya masih terbatas; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelaksanaan event (Melakukan kerjasama penyelenggaraan event dengan swasta);



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			2. Belum optimal kontribusi budayawan lokal dalam pengembangan Kabupaten Sumedang sebagai daerah PuseurBudaya Sunda; 3. Pelestarian situs cagar budaya belum optimal (masih banyak yang tidak terpelihara); 4. Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya	1. Merangkul/mengkoordinasikan budayawan lokal untuk berkontribusi menyumbangkan ide dan gagasan dalam menciptakan suatu produk budaya yang dapat mewujudkan sumedang puseur budaya sunda; 2. Melakukan pemeliharaan dan pelestarian situs cagar budaya
PRIORITAS PENGUATAN KETAHANAN DAERAH				
1.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan RDTR	1. Masih terbatasnya dokumen RDTR, sehingga yang menjadi dasar perizinan masih berdasarkan pada Perda RTRW Kabupaten; 2. Masih terbatasnya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang; 3. Masih terbatasnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;	1. Tersedianya dokumen RDTR sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW; 2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang yang optimal; 3. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal;
2.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Sumedang merupakan kawasan rawan bencana tinggi	Belum komprehensifnya komunikasi dan informasi tentang rawan bencana	Terlaksananya KIE rawan bencana



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum bisa diprediksinya bencana Pandemi COVID 19 akan berakhir	Tingkat kesadaran masyarakat dalam merubah kebiasaan terhadap Adaptasi Kebiasaan Baru belum optimal	Peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran Covid 19
3.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Responsif Gender	Kurangnya pemahaman masyarakat atas responfif gender	Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan dan kaum disabilitas Pemberdayaan ekonomi bagi kepala keluarga perempuan dan kepala keluarga disabilitas Sarana publik yang inklusif.
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan		masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; pemenuhan hak anak; Peningkatan pelayanan korban tindak kekerasan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A);	
Pemberdayaan perempuan		Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Pemberdayaan ekonomi bagi kepala keluarga perempuan	
4.	Urusan Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah dan pertamanan	Masih rendahnya cakupan ketersediaan TPS Kurangnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan pengelolaan sampah melalui 3R (recycle, reduce, reuse); Optimalnya enanganan dan pengurangan sampah Penyerahan TPS dari Kemen PUPR sehingga memudahkan pengelolaan TPS Bertambahnya luasan RTH sesuai dengan standar
		Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi	1. Kualitas Air Sungai masih rendah; 2. Kualitas Udara masih rendah	1. Perketat AMDAL pada perusahaan yang mempunyai buangan limbah;



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> 3. Kualitas Tutupan Lahan/ Vegetasi masih belum optimal 4. Kualitas lingkungan hidup masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Penerapan hari bebas kendaraan; 3. Penghijauan
5.	Urusan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Skor Pola Pangan Harapan masih pada angka 89,10; 2. Rendahnya ketersediaan pangan utama 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan kebutuhan gizi; 2. Peningkatan cadangan pangan sesuaijumlah penduduk; 3. Izin ketat IMB di atas lahan persawahan.
6.	Urusan Pertanian	Masih kurangnya jumlah produksi komoditas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penurunan luas baku lahan pertanian (banyak pergeseran fungsi lahan pertanian); 2. Masih kurangnya peralatan yang dapat mendukung sesuai kondisi geografis (dataran tinggi dan Bukit); 3. Ketersediaan sumber air masih minim; 4. Perlu adanya integrasi antara kewenangan pertanian (jaringan tersier) dalam hal jaringan irigasi pertanian dengan pupr dalam hal irigasi-pengairan (bendungan- jaringan primer, sekunder); 5. Minat pemuda tani untuk bertani berkurang; 6. Nilai tambah sektor pertanian komoditas strategis masih rendah; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perlu penerbitan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 2. Perlu penyediaan peralatan pertanian yang mendukung geografis wilayah; 3. Perlu penyediaan fasilitas sumber- sumber air dan jaringan irigasi pertanian serta jalan pertanian (infrastruktur pertanian); 4. Peningkatan koordinasi antar sektor (leading sektor Bappeda) 5. Penguatan pelaku usaha tani berbasis agrobisnis (pelatihan); 6. Perlu ditambah pengolahan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah komoditas strategis (sinergi dengan Dinas Industri dan Perdagangan);



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			<p>7. Masih adanya daerah rentan pangan (produksi padi tidak stabil, dampak relokasi jatigede);</p> <p>8. Diversifikasi konsumsi pangan masih rendah (ketergantungan terhadap konsumsi beras masih tinggi);</p> <p>9. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan segar (penggunaan pestisida dan bahan kimia dalam pertanian);</p> <p>10. Masih lemahnya pengawasan terhadap pangan segar;</p> <p>11. Belum memadai sarpras kesehatan hewan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner,</p> <p>12. Belum adanya rumah pemotongan hewan;</p> <p>13. Belum adanya pasar hewan regional</p>	<p>7. Penguatan cadangan pangan masyarakat;</p> <p>8. Tersedianya regulasi dalam mendukung diversifikasi pola konsumsi masyarakat;</p> <p>9. Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dalam memproduksi komoditas non beras;</p> <p>10. Penyuluhan masyarakat untuk keamanan pangan segar;</p> <p>11. Penindakan terhadap penggunaan bahan berbahaya untuk pangan segar.</p> <p>12. Penyediaan sarpras kesehatan hewan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner;</p> <p>13. Pembangunan rumah pemotongan hewan;</p> <p>14. Pembangunan pasar hewan regional</p>



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
7.	Urusan Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan Konsumsi ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana budidaya-tangkap perikanan; 2. Belum optimalnya unit pembenihan perikanan (Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat); 3. Belum terintegrasinya kebijakan hulu dan hilir antar sektor (pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian); 4. Kesadaran masyarakat dalam konsumsi ikan masih kurang 5. Belum terimplementasi regulasi terkait pelestarian perikanan dan penggunaan alat-alat perikanan yang ramah lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarpras perikanan budidaya-tangkap; 2. Penyediaan pakan ikan- induk ikan dan sarana pendukung lainnya; 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pembenihan (Penyuluh); 4. Koordinasi antar sektor yang terkait ; 5. Menumbuhkan gerakan gemar makan ikan (diversifikasi produk pengolahan ikan, sosialisasi ke masyarakat); 6. Pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap usaha produksi perikanan
PRIORITAS AKSELERASI PEMULIHAN EKONOMI				
1.	Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kondisi jalanyang mantap; 2. Masih rendahnya standar jalan yang dibangun oleh Pemerintah; 3. Banyaknya jembatan yang masih di bawah standar; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas jalan dengan kondisi mantap; 2. Peningkatan kualitas jalan; 3. Peningkatan jembatan sesuai dengan standar kebinamargaan;



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Persentase Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Permasalahan bidang Sumber Daya Air 1. Adanya penurunan kualitas system irigasi 2. Tumpang tindihnya data status daerah irigasi	1. Peningkatan kualitas system irigasi 2. Tertibnya data status daerah irigasi
		Kesesuaian pemanfaatan ruang	1. Permasalahan bidang Penataan Ruang 2. Masih terbatasnya dokumen RDTR, sehingga yang menjadi dasar perizinan masih berdasarkan pada Perda RTRW Kabupaten; 3. Masih terbatasnya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang; 4. Masih terbatasnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;	1. Tersedianya dokumen RDTR sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW; 2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang yang optimal; 3. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal;
		Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang memenuhi kualifikasi teknis	Belum optimalnya pelatihan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis;	Meningkatkan kualitas pelatihan yang diukur melalui pre dan post test pada saat pelatihan
2	Urusan Tenaga Kerja	Masih tingginya angkatan kerja pencari kerja dan Tingginya pengangguran akibat PHK.	1. Jumlah lowongan kerja tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja; 2. Kompetensi calon tenaga kerja tidak dapat memenuhi bursa kerja;	1. kerjasama dengan perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja Kab Sumedang dan sosialisasi Perpres No 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan untuk perusahaan dan meningkatkan pendataan perusahaan;



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			<p>3. pencari kerja yang telah ditempatkan tidak mengembalikan kartu kuning (yang sudah bekerja tidak melapor kembali ke disnaker);</p> <p>4. Wajib lapor dari pihak perusahaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan terutama dalam hal penerimaan pekerja/buruh.</p> <p>5. Laporan rutin tentang keadaan jumlah pekerja/buruh dari perusahaan belum dilaksanakan sepenuhnya. Banyaknya perusahaan yang merasionalkan pekerjaannya akibat dari pandemi Covid 19.</p>	<p>2. Pelaksanaan jobfair serta meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan;</p> <p>3. Peningkatan motivasi bekerja, pada pencari kerja untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan memberikan motivasi bekerja pada pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan, kerjasama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja untuk megal balikkan kartu kuning;</p> <p>4. Kerjasama dengan Bidang pendidikan terutama Sekolah Kejuruan untuk membuka Jurusan sesuai formasi yang dibutuhkan baik di Perusahaan maupun Lemabaga lainnya. Wajib lapor baik data pekerja/buruh baik penerima pekerjaan dan meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan</p> <p>5. Pemanfaatan Balai Latihan Kerja sebagai upaya dalam meningkatkan keterampilan dan munculnya kemandirian dalam berwirausaha</p> <p>6. Adanya pelatihan kewirausahaan bagi para korban PHK.</p>



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
3	Urusan Perhubungan	Masih rendahnya kenyamanan dan keamanan pengguna jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan 2. Kurang tertatanya jaringan trayek angkutan umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 2. Tertatanya jaringan trayek angkutan umum
4.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melemahnya koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi; 2. Tingginya persaingan koperasi dengan lembaga keuangan lainnya; 3. Terbatasnya permodalan dalam pengembangan koperasi; Rendahnya tingkat kewirausahaankoperasi. 	Melakukan pembinaan tata kelola dan penguatan kelembagaan perkoperasian;
		Peningkatan UMKM belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemanfaatan IT oleh pelaku usaha; 2. Database UMKM belum tersedia secara akurat; 3. Kualitas produk usaha mikro belum bisa bersaing; 4. Terbatasnya pelaku usaha yang dapat mengakses permodalan Cakupan pemasaran masih terbatas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Megoptimalkan pengelolaan data (melakukan pendataan/updating data UMK); 2. Melakukan pelatihan kewirausahaan yang komprehensif (proses hulu hingga hilir) 3. Bantuan Modal Usaha bagi bagi UMK dalam meningkatkan dan pengembangan usaha.



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
5.	Urusan Perdagangan	Pembinaan pelaku usaha perdagangan masih kurang	Sub sektor perdagangan merupakan penyumbang ketiga terbesar pada PDRB Kabupaten Sumedang, namun perhatian Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha masih kurang	Peningkatan pembinaan berkelanjutan bagi pelaku usaha perdagangan
		Pengawasan perdagangan	Mata rantai terlalu panjang sehingga mempengaruhi harga jual Kecilnya nilai tambah yang diterima produsen	Memberikan pendidikan manajemen pemasaran bagi produsen
		Revitalisasi Pasar Rakyat	Permasalahan sosial Kondisi pasar rakyat yang representatif belum merata	Intervensi Pemda dalam menyelesaikan permasalahan sosial Pembangunan dan pengembangan Pasar Rakyat
6.	Urusan Perindustrian	Belum akuratnya data industri kecil menengah	Industri kecil menengah jarang melaporkan usahanya sehingga terlambat terdeteksi oleh Pemda	Pemutakhiran data
		Sertifikasi hasil industri	Masih rendahnya hasil industri yang tersertifikasi halal dan PIRT	Pemda menjadi penghubung untuk proses sertifikasi
		Laju Pertumbuhan Industri pengolahan berkontraksi minus 1,46%	Banyak industri pengolahan yang terdampak akibat pandemic Covid 19	Perlu adanya intervensi Pemerintah Daerah untuk mendorong keberlangsungan industri pengolahan.



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
7.	Urusan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya jumlah penanaman modal di Kabupaten Sumedang; 2. Pelayanan perizinan yang belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya aturan yang overlapping satu dengan lainnya, sehingga menghambat proses perizinan; implementasi perda/perbup terkait in sentif-disinsentif belum optimal; 2. Masih adanya oknum (internal- eksternal) yang menghambat proses perizinan; 3. Belum mendukung infrastruktur wilayah dalam konteks peningkatan investasi (lintas sektor); 4. Belum efektifnya fungsi tim teknis dalam penyelenggaraan PTSP; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya koordinasi untuk mensinergikan antara peraturan pusat dan daerah; 2. Penyederhanaan peraturan daerah yang ada; 3. Pembaruan regulasi yang mengatur investasi; 4. Pemberiaan insentif-disinsentif sesuai perda; 5. Perlu ditingkatkan pengawasan dan penindakan; 6. Koordinasi kepada dinas terkait dalam penyediaan infrastruktur perkotaan yang mendukung investasi; 7. Tim Teknis ditetapkan setiap Tahun;
8	Urusan Pariwisata	Rendahnya kunjungan wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur/sarana prasarana pariwisata masih kurang memadai (khususnya akses jalan menuju destinasi wisata); 2. Terbatasnya pelaksanaan event festival/pagelaran seni, budaya, olahraga; 3. Terbatasnya promosi pariwisata seni dan budaya; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi/penataan kawasan pariwisata; 2. Meningkatkan pelaksanaan event (Melakukan kerjasama penyelenggaraan event dengan swasta); 3. Melakukan promosi pariwisata seni dan budaya; 4. Pembangunan galeri ekonomi kreatif sekaligus kepariwisataan;



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>Sub sektor ekonomi kreatif belum berkembang sampai skala nasional</p>	<p>4. Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan; 5. Masih rendahnya kualitas SDM bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam mendorong peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>Sub sektor ekonomi kreatif masih membidik pasar lokal</p>	<p>5. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada penggerak ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan.</p> <p>1. Peningkatan kualitas produk sub sektorekonomi kreatif; 2. Penciptaan pasar pada level nasional, pencetakan akte kelahiran;</p>
PRIORITAS Penguatan Inovasi Publik dan Tata Kelola Pemerintahan				
			<p>1. Data yang sudah ada belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh SKPD pengguna disebabkan kewenangan penerbitan user id adadi Kemendagri.</p>	<p>1. Percepatan kepemilikan akte kelahiran untuk usia lebih dari 18 Tahun.</p>
2.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Peningkatan kualitas pengelolaan desa belum optimal	Desa dengan status Desa Cepat Berkembang masih sedikit	Peningkatan kualitas perencanaan desa, inovasi kegiatan dan ketajaman prioritas pembangunan desa.



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		2. Kualitas Pengelolaan Desa Dalam Siskeudes, Pemanfaatan Potensi Desa dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) sesuai Standar belum optimal	1. Masih terdapat LKD dan LAD yang belum memenuhi standar; 2. Belum optimalnya BUMDes yang maju, berkembang dan mandiri	Dinas berperan aktif dalam pembinaan penerapan Siskeudes
		3. Kualitas penerapan Siskeudes belum optimal	Penerapan Siskeudes belum optimal	Perlunya peningkatan peran kecamatan dalam sistem pengelolaan aset dan keuangan desa.
3.	Urusan Komunikasi dan Informatika	Layanan komunikasi dan informasi	Masih terdapat wilayah <i>blind spot</i>	1. Pelayanan fasilitas wifi gratis sampai ke pelosok desa 2. Penguatan jaringan telekomunikasi di wilayah <i>blind spot</i>
		Nilai SPBE Kabupaten Sumedang Tahun 2020 berada pada 3,81 poin (ideal 5)	Nilai SPBE dinilai sangat tinggi, namun untuk mencapai nilai memuaskan (>4) terdapat penambahan berupa penilaian instrument domain manajemen SPBE yang terdiri atas jaringan, infrastruktur dan aplikasi yang harus diaudit oleh BPPT	Peningkatan jaringan, infrastruktur dan aplikasi Komponen infrastruktur harus terfasilitasi Cloud
4.	Urusan Statistik	Ketersediaan data yang akurat dan berkualitas	1. Belum tersedianya data yang akurat dan berkualitas; 2. Belum tersedianya data real time	Super Apps yang mengintegrasikan semua system aplikasi ke Command Center



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
5.	Urusan Persandian	Pengamanan Informasi daerah	Skor pengamanan informasi daerah 275 pada Tahun 2020 (skor tertinggi 645 menurut ISO 270001)	Peningkatan keamanan informasi daerah memenuhi 113 kontrol keamanan informasi sesuai ISO 270001
6.	Urusan Perpustakaan	Minimnya minat baca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya bahan pustaka (eksemplar dan judul) sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumedang; 2. Masih rendahnya pemeliharaan koleksi bahan pustaka 	Penambahan dan pemeliharaan koleksi dan jumlah eksemplar bahan pustaka
7.	Urusan Perencanaan	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sama nya pemahaman Perencanaan Pembangunan antara PD Perencana dengan PD teknis 2. Perencanaan yang dilakukan masih ego sektoral 3. Keterlibatan masyarakat/ stakeholder masih rendah dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah 4. Perencanaan belum didasarkan pada hasil kajian (<i>by evidence</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM Perencana 2. Penambahan jumlah fungsional Perencana 3. Peningkatan koordinasi horizontal antar sektor dan Lintas Perangkat Daerah 4. Peningkatan koordinasi vertical dengan perangkat daerah provinsi dan kementerian/ lembaga 5. Peningkatan keterlibatan stakeholder dalam proses perumusan perencanaan pembangunan 6. Peningkatan penelitian dan pengembangan permasalahan pembangunan di daerah



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum semua Perangkat Daerah memiliki tingkat capaian pembangunan yang berkategori baik	5. Keterlambatan penyampaian kebijakan Nasional dan Provinsi kepada Daerah 1. Kualitas dokumen perencanaan yang belum specific, measureable, achievable, relevant dan timebound (SMART) 2. Pendekatan perencanaan tidak menggambarkan holistik, integratif, thematic dan spasial (HITS)	1. Penyamaan pemahaman Perencanaan di internal satuan Perangkat Daerah mulai dari pelaksana sampai dengan pejabat tinggi pratama; 2. Kolaborasi dan koordinasi antar elemen di internal satuan Perangkat Daerah
8.	Urusan Penelitian dan Pengembangan	Hasil kelitbangan belum diimplementasikan secara optimal	1. Belum memiliki fungsional peneliti 2. Belum optimalnya penyebarluasan informasi arah rencana penelitian dan pengembangan 3. Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan litbang daerah dengan kementerian/ lembaga pusat	1. Menyediakan fungsional peneliti 2. Peningkatan kuantitas fungsional di bidang kelitbangan 3. Penyebarluasan informasi rencana kelitbangan kepada semua Perangkat Daerah dan Stakeholder lainnya 4. Penyebarluasan hasil kelitbangan kepada semua Perangkat Daerah dan Stakeholder lainnya 5. Koordinasi kelitbangan antar kabupaten/ kota dan pemerintah provinsi serta kementerian/ Lembaga ditingkat pusat.



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
9.	Urusan Pengawasan	Belum optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan pemerintah di Kabupaten Sumedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat maturitas SPIP masih berada pada level 3; 2. Penerapan Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah masih rendah; 3. Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah belum optimal; 4. Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan dengan rekomendasi belum optimal; 5. Temuan penyimpangan terhadap APBD masih terjadi; 6. Tingkat kapabilitas APIP/IACM masih berada pada level 3; 7. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas 8. Pemberian konsultasi pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa belum optimal 	<p>Penambahan jumlah auditor fungsional;</p> <p>Peningkatan kompetensi pemeriksaan bidang infrastruktur, PBJ, Perencanaan, dan Investigasi;</p> <p>Peningkatan intensitas pendampingan SPIP kepada Perangkat Daerah;</p> <p>Peningkatan intensitas pendampingan evaluasi Sakip kepada Perangkat Daerah</p>



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
10	Urusan Administrasi Pemerintahan (Keseekretariatan Daerah)	Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Masih sulitnya pemenuhan data dari seluruh Perangkat Daerah untuk penyusunan LPPD	Perlunya penggunaan sistem informasi data LPPD yang terintegrasi Penguatan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah
		Masih rendahnya kualitas SAKIP (Level BB pada Tahun 2020)	Masih rendahnya kualitas SAKIP (Level BB pada Tahun 2020)	Peningkatan bimbingan teknis dan pendampingan pengelola SAKIP pada Perangkat Daerah
		Reformasi birokrasi harus ditingkatkan	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi di seluruh Perangkat Daerah	Peningkatan berkelanjutan atas situasi yang mendukung reformasi birokrasi
		Masih perlu ditingkatkan capaian target kinerja Perangkat Daerah	Masih perlu ditingkatkan capaian target kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan pengawasan dan bimbingan pada Perangkat Daerah
11.	Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Masih kurangnya kompetensi, kinerja, disiplin ASN dan pelayanan kepegawaian yang bersih dan melayani.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya PNS mendapat kesempatan pendidikan dan pelatihan 2. Masih kurang fokusnya antara kebutuhan diklat dengan unit organisasinya 3. Masih banyak jumlah pejabat yang belum mendapatkan kesempatan diklat sebagai syarat menduduki jabatan; 4. belum optimalnya identifikasi kebutuhan jabatan fungsional tertentu; 	Harus ditingkatkan kesempatan PNS dalam mendapatkan Pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS Membuat skala prioritas pejabat yang sudah menduduki jabatan dalam mendapatkan kesempatan diklat untuk syarat menduduki jabatan



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			5. Belum adanya perhitungan beban kerja untuk kebutuhan jumlah jabatan fungsional tertentu.	Melakukan koordinasi dengan bagian organisasi setda dalam identifikasi jabatan fungsional tertentu;
12	Urusan Administrasi Pemerintahan (Kesekretariatan DPRD)	Belum optimalnya fasilitasi dan dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal kegiatan DPRD yang tidak disiplin belum sesuai dengan ketersediaan anggaran 2. Masih banyaknya penyampaian proposal aspirasi yang bukan merupakan tugas kesekretariatan DPRD; 4. Adanya pemahaman sebagian anggota DPRD bahwa kewenangannya harus difasilitasi secara penuh; 5. Masih rendahnya kualitas notulen sipersidangan; 6. Masih rendahnya produktivitas penyusunan Perda; 7. Belum adanya tenaga fungsio- nal perancang produk hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Juklak dan Juknis pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; 2. Penyediaan tenaga fungsional perancang produk hukum.



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
13.	Urusan Keuangan Daerah	Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas layanan pendataan masih rendah; 2. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera bagi wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur; 3. Belum ada sistem baku dalam perencanaan penerimaan pendapatan; 4. Belum adanya sistem terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan terhadap kolektor desa; 2. Penerbitan regulasi dengan penyertaan system reward and punishment; 3. Menyusun system perencanaan pendapatan daerah; 4. Kajian analisis potensi pajak daerah
		Masih rendahnya kualitas dokumen keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat ketidakkonsistenan anggaran kas dengan pelaksanaan pengajuan pembayaran; 2. Sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian belum terintegrasi; 3. Sistem informasi akuntansi dengan asset belum terintegrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi terhadap PD yang masih belum konsisten dalam pengajuan pencairan; 2. Integrasi system kepegawaian dan penggajian; 3. Integrasi system akuntansi dan asset.



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
14.	Urusan Kesatuan Bangsa Politik	<p>Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat</p> <p>Masih rendahnya partisipasi dalam mendukung proses demokrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya potensi konflik antar suku/agama, ras dan antar golongan 2. Belum optimalnya koordinasi forum-forum strategis masyarakat (contoh FKUB, FKDM, FPK, Forkopinda) 3. Belum optimalnya pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan sosial budaya dan ekonomi di masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sistem kewaspadaan daerah dalam menghadapi konflik, 2. Peningkatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan sosial budaya dan ekonomi di masyarakat 3. Peningkatan koordinasi forum-forum strategis masyarakat 4. Peningkatan kondisi yang kondusif di masyarakat 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilkada dan Pilkades 6. Peningkatan pembinaan Ormas berkategori aktif.
URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN SERTA URUSAN PENUNJANG LAINNYA				
1.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengendalian penduduk melalui KB 2. Kemandirian keluarga peserta KB belum optimal 	<p>Angka TFR masih tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I masih tinggi 2. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. 	<p>Peningkatan Peran DPPKB sebagai leading sektor pengendalian penduduk</p> <p>Peningkatan Peran DPPKB sebagai leading sektor keluarga berencana</p>



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
2.	Urusan Kepemudaan dan olahraga	1. Peningkatan jumlah atlet berprestasi 2. Masih kurangnya wirausahawan muda	1. Masih terbatasnya pelaksanaan event olahraga; 2. Masih terbatasnya sarana prasarana di bidang olahraga 3. Masih kurangnya pelatihan dan pembinaan kewirausahaan bagi para pemuda	1. Melakukan pembinaan kepada Cabor-cabor untuk meningkatkan prestasi; 2. Memberikan pemberdayaan dan pembinaan kepada atlet disabilitas; 3. Meningkatkan penyelenggaraan event olahraga tingkat kabupaten maupun tingkat nasional; 4. Penyediaan sarpras olahraga 5. Pelatihan dan pembinaan wirausahawan muda
3.	Urusan Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	1. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap kearsipan 2. Belum adanya kesamaan persepsi di setiap PD terhadap kearsipan 3. Belum memadainya sarana prasarana kearsipan 4. Belum tersedianya sistem elektornik kearsipan 5. Belum adanya regulasi daerah tentang kearsipan 6. Masih rendahnya kualitas layanan kearsipan di setiap PD 7. Masih rendahnya pemeliharaan ankearsipan	1. Pembinaan PD tentang pentingnya kearsipan 2. Peningkatan sarana dan prasaran kearsipan (gedung, depo) 3. Penyediaan sistem elektornik kearsipan 4. Penyusunan Perbup Kearsipan



No.	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
4.	Urusan Kehutanan	Perekonomian masyarakat sekitar Taman Hutan Rakyat	Kreativitas ekonomi masyarakat sekitar penyangga Tahura belum optimal	Pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat di sekitar Tahura
5.	Urusan Transmigrasi	Belum optimalnya jumlah transmigran yang ditempatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kuota Transmigran dari Provinsi 2. Belum adanya legalitas hak kepemilikan tanah pada Transmigran lokal (Tanah tersebut masih milik kas Desa) 3. Pengalokasian dana pemberangkatan Transmigran yang dulu dibiayai dari Pusat sekarang menjadi beban Kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya kesepakatan pemenuhan kuota transmigran antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang 2. Harus adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk kepemilikan Tanah (Tukar guling Tanah) 3. Perlunya adanya dana dari tingkat kabupaten untuk penanganan Transmigran/ Pemberangkatan Transmigran

Sumber : Bapppeda 2021 (diolah)



b. Isu Strategis

1. Telaahan Isu Strategis Internasional

Isu-Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan selama lima tahun masa perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Sumedang antara lain:

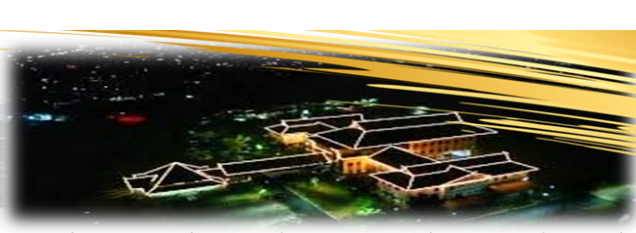
1) Revolusi Industri 4.0

Industri 4.0 menghasilkan "pabrik cerdas". Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat Internet untuk segala/ *Internet Of Things (IoT)*, sistem siber- fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai.

Sebagaimana revolusi terdahulu, revolusi industry keempat berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Namun, kemajuan di bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan telah menimbulkan kekhawatiran bahwa mesin-mesin suatu hari akan mengambil alih pekerjaan manusia. Selain itu, revolusi-revolusi sebelumnya masih dapat menghasilkan lapangan kerja baru untuk menggantikan pekerjaan yang diambilalih oleh mesin, sementara kali ini kemajuan kecerdasan buatan dan otomatisasi dapat menggantikan tenaga kerja manusia secara keseluruhan yang digantikan oleh teknologi dan robotik.

2) Society 5.0

Society 5.0, didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang

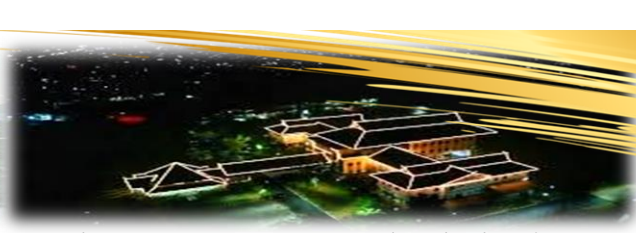


menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Di Society 5.0, itu bukan lagi modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung.

3) Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Telah diselenggarakan konferensi tingkat internasional mengenai *Green Economic Global* yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur mengusung tema *The Role of Lokal Government on Blue Economy*. Pemrakarsa konferensi internasional ini adalah Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Universitas Khon Kaen Thailand, dan Yayasan Damandiri dengan didukung oleh Pemerintah Daerah Surabaya. Sekitar 400 peserta termasuk para tokoh dari berbagai negara hadir dalam konferensi itu, antara lain dari Afrika Selatan dan beberapa negara di Afrika, Asia, Australia, dan Selandia Baru.

Dalam forum berskala internasional tersebut, sejumlah pakar terkait baik dari kalangan akademisi maupun pemerintah telah menyajikan berbagai persoalan berkaitan dengan pengembangan ekonomi bersifat ramah lingkungan yang dapat diterapkan di beberapa wilayah di Tanah Air. Hal ini dilakukan sebagai penerapan *Green Economy* yang telah menjadi pembicaraan hangat di sejumlah negara di dunia karena degradasi lingkungan semakin lama semakin meluas dengan tingkat keparahan yang semakin tinggi. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan internasional



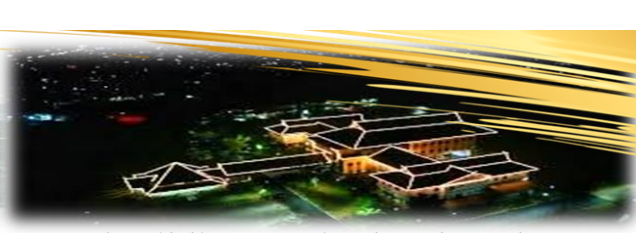
ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih, dan obat-obatan alami bagi masyarakat.

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi kerusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat kedepan.

4) Penerapan Sumber Energi Alternatif Sebagai Antisipasi Sumber Energi Tak Terbaharukan

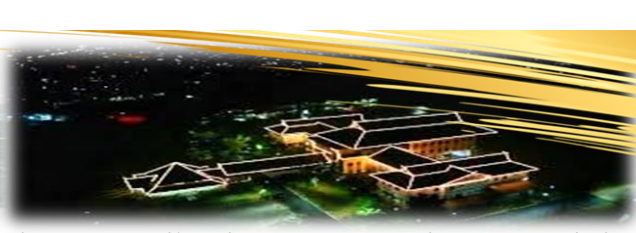
Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, selain khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, masyarakat dunia juga khawatir akan isu global warming yang diakibatkan oleh hasil pembakaran energi fosil sehingga membuat lapisan ozon semakin tipis. Indonesia sendiri masih sangat tergantung dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil untuk digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM).

Tingginya konsumsi BBM di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya pembaharuan dalam menyikapi krisis energi dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan kondisi geografis



Indonesia yang beriklim tropis dan kesuburan tanah yang berpotensi. Sumber energi alternatif dapat berasal dari sampah yang kita hasilkan baik organik maupun an-organik serta berasal dari sumber energi terbarukan seperti biomassa, matahari, angin, dan sebagainya. Diharapkan ke depannya, Indonesia memiliki sumber energi yang akan mencukupi kebutuhan energi dalam negeri tanpa khawatir dengan peningkatan pemanasan global. Menanggapi isu energi baru terbarukan ini, Pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan energi baru terbarukan antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan energi terbarukan difokuskan pada panas bumi (*geothermal*), energi biomass, surya (*solar*) dan Bahan Bakar Nabati (BBN);
2. Penyediaan dana khusus untuk penelitian dan pengembangan energi terbarukan guna menurunkan biaya produksi;
3. Pengaturan dan pemberlakuan harga khusus untuk energy terbarukan;
4. Peningkatan pengembangan industri peralatan produksi energi terbarukan dalam negeri (peralatan penyulingan BBN, *solar cell* dan panel harus menggunakan produksi dalam negeri);
5. Pengalokasian dana dengan skema khusus (*smart funding*) untuk pengembangan energi terbarukan diluar BBM, khususnya untuk skala kecil;
6. Pemerintah melakukan pengaturan dan pengalokasian dana dari program *Clean Development Mechanism* (CDM), sehingga insentif karbon kredit dapat memberi manfaat pada publik.
- 5) Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/ Climate Change*)

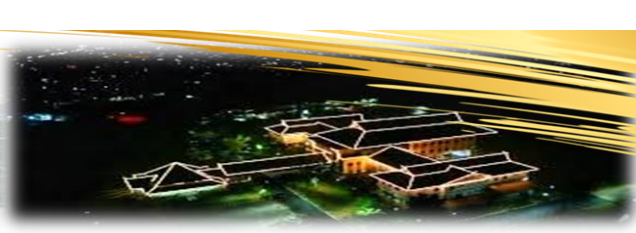


Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini, menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menyatakan visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

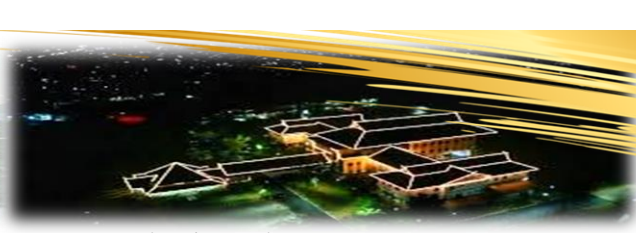
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;



4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi dan kawasan bahan baku, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-undang Pemberdayaan UMKM;



4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;

5. Transformasi Ekonomi

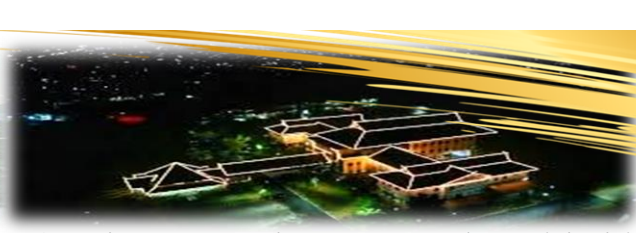
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan 7 Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdayasaing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai



dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah: **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”** Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018- 2023 memiliki makna sebagai berikut: Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri. Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan diberbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

- 1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa**, melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.
- 2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif**, melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif

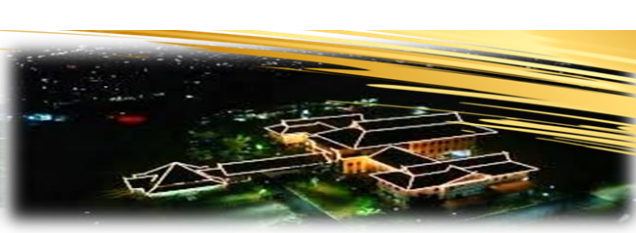


3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan,** melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera Dan Adil,** melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan selama masa jabatan. Prioritas pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, sepanjang tahun 2020 dihadapkan pada kondisi pandemi COVID- 19, yang berdampak luas terhadap kualitas pengelolaan seluruh prioritas pembangunan daerah.

Atas dasar itulah maka, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyesuaikan kembali Prioritas Pembangunan Daerahnya dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang terdiri dari:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;

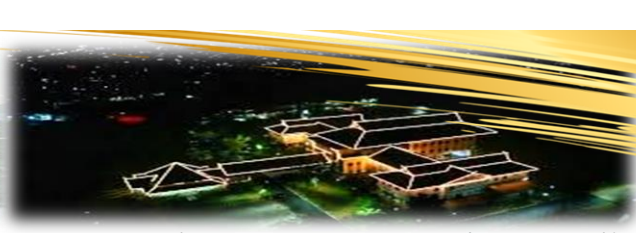


6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
 2. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial;
 3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
 4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan;
 5. Reformasi Birokrasi.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025

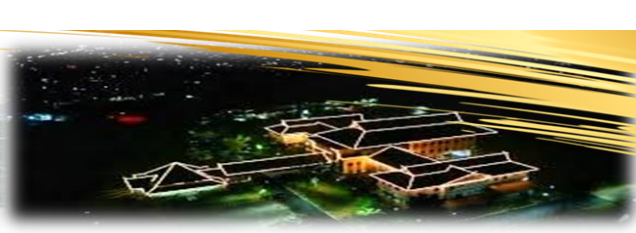
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023 dan merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Sumedang. Visi Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 adalah **“Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis, dan Demokratis pada Tahun 2025”**. Visi tersebut dapat diringkas menjadi **“SUMEDANG SEHATI”**.



Kabupaten Sumedang yang **Sejahtera** ditandai dengan kondisi kehidupan masyarakat Sumedang yang memenuhi standar kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan dan bermatapencaharian layak serta jaminan keamanan dengan senantiasa mempertimbangkan kelestarian daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. **Agamis** ditandai dengan kondisi lingkungan kehidupan sosial yang makin dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha kuasa, sesuai keyakinan masyarakat yang diakui dalam sistem keagamaan nasional; **Demokratis** ditandai dengan kondisi lingkungan kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat yang makin dijiwai oleh supremasi dan kesadaran hukum, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, partisipasi masyarakat berlandaskan kesetaraan gender yang makin dewasa dalam proses penetapan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pewarisan nilai nilai kejuangan bangsa dan kearifan lokal masyarakat.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumedang 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

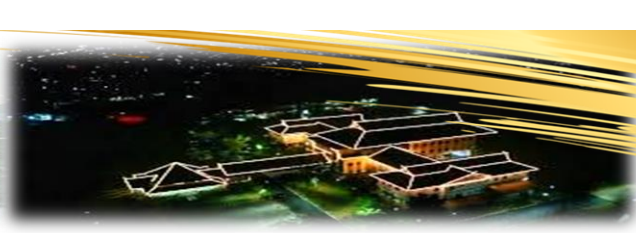
1. Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri;
3. Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila;



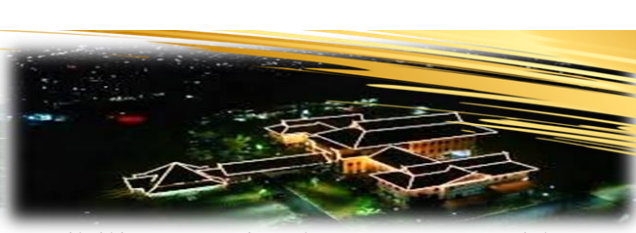
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
5. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD tahap ke-4 pembangunan Sumedang diharapkan makin mencerminkan sebuah lingkungan masyarakat daerah yang mantap kesejahteraannya, mantap dalam kehidupan berdemokrasi yang dewasa dan jiwa solidaritas mantap dalam menjaga kesatuan dan persatuan nasional serta kehidupan sosial yang makin menempatkan agama sebagai wahana untuk menyeimbangkan jati dirinya selaku makhluk beragama dan makhluk sosial yang beragam. Dari tahapan dan prioritas pada RPJMD ke-4 ini, terdapat fokus yang menjadi panduan untuk dapat dituntaskan pada kurun perencanaan tahap ini yaitu:

1. Melanjutkan fokus pembangunan daerah pada RPJMD ke-3 yang dapat memperkuat capaian RPJMD ke-4;
2. Pengembangan sistem insentif daerah dalam penyelenggaraan kemitraan pembangunan di sektor swasta, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, jaringan energi tepat guna perdesaan serta jaringan transportasi ke lingkungan perdesaan;
3. Pengembangan tatanan sistem pemerintahan daerah yang menjadi supportin sistem bagi aktivitas ekonomi kreatif;
4. Peningkatan pelaksanaan implementasi falsafah Pancasila dalam perikehidupan sosial dan berpemerintahan dengan keseimbangan penerapan nilai-nilai keagamaan yang beraam dalam suasana penuh toleransi;



5. Pemantapan reformasi birokrasi yang menopang pelayanan berorientasi customer satisfaction;
6. Pengembangan tatanan sistem pemerintahan daerah yang menjadi supporting sistem bagi aktivitas kehidupan sosial masyarakat yang lebih dewasa dalam berinteraksi dengan pembangunan politik daerah;
7. Pemantapan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik guna penerapan kehidupan sosio politik masyarakat daerah yang telah matang dalam melaksanakan norma- norma konstitusi negara dan Pancasila;
8. Penataan penyesuaian kewenangan dalam wilayah kecamatan;
9. Meningkatkan proteksi terhadap potensi, gangguan terhadap masyarakat;
10. Meningkatkan kemandirian desa;
11. Pemantapan rencana tata ruang kecamatan dan kawasan strategis kabupaten, provinsi dan nasional (antara lain kawasan perguruan tinggi Jatinangor, kawasan waduk Jatigede, kawasan industri dan kawasan koridor jalan tol cisumdawu serta rencana induk pusat pemerintahan) termasuk kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi rencana tata ruang yang telah ada, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
12. Pemantapan penyiapan data dan analisis potensi daerah untuk penyusunan RPJPD 2025-2050;
13. Pemantapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), sebagai sumber informasi perencanaan pembangunan yang akurat; dan
14. Pemeliharaan dan pemantapan ketahanan mental ideologi Pancasila bagi seluruh warga masyarakat

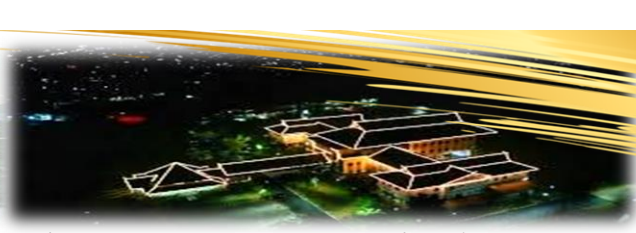


melalui pendidikan, kegiatan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan.

5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif serta bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berdasarkan tujuan pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana gambar dibawah ini. Adapun pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, Sosial, dan Ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kemudian dengan adanya perubahan kebijakan yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem



Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang. Kemudian dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menyebabkan perlu adanya perubahan perencanaan. Termasuk dalam konteks KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, yang telah disusun rekomendasi hasil dari analisis KLHS terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan disajikan pada Tabel di bawah ini:



Tabel 1.12
Alternatif dan Rekomendasi Skenario dengan Upaya Tambahan
dan Rekomendasi untuk Daya Dukung dan Daya Tampung

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
PILAR SOSIAL				
1.2 Pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Masih tingginya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui wirausaha baru 2. Melakukan pemberdayaan pada PMKS 3. Mendorong produktifitas petani gurem 4. Memberikan pelatihan kerja terhadap usia kerja pencari kerja 5. Mendorong peningkatan sektor pariwisata untuk menyediakan lapangan pekerjaan 6. Menggerakkan UMKM dan ekonomi kreatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 6. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada Tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	1.3.1 (a)	Belum terpenuhinya jaminan kesehatan masyarakat melalui SJSN Bidang Kesehatan	Perlu ditingkatkan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat melalui SJSN Bidang Kesehatan sampai dengan 98%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. Rumah Sakit Umum Daerah
	1.3.1. (d)	Masih kurangnya rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Perlu dilakukan sinkronisasi data masyarakat miskin antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun BPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Badan Pusat Statistik



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
				4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.4 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1 (a)	Masih rendahnya perempuan pernah kawin umur 15-49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkatkan upaya Penyebarluasan informasi tentang pentingnya menggunakan fasilitas kesehatan	1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Dinas Kesehatan
	1.4.1. (d)	Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatkan penyediaan sarana air minum	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
1.5 Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Masih adanya korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana saat ini mencapai 9 orang per 100.000 orang.	Meningkatkan upaya penyebaran informasi peringatan dini bencana Meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan (membentuk desa/kelurahan tangguh bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.5.1. (a)	Masih kurangnya alokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan (membentuk desa/kelurahan tangguh bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
	1.5.1. (e)	Masih tingginya risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi peringatan dini bencana Meningkatkan kesiap siagaan kebencanaan (membentuk desa/ kelurahan tangguh bencana) 	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.1. Pada Tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang Tahun.	2.1.1(a)	Masih adanya Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga kekurangan gizi Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat 	Dinas Kesehatan
2.2. Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada Tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima Tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Masih tingginya prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga baduta <i>stunting</i> Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat 	Dinas Kesehatan
	2.2.1.(a)	Masih adanya Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua Tahun/baduta.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga prevalensi <i>stunting</i> Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat 	Dinas Kesehatan
	2.2.2*	Masih adanya Prevalensi malnutrisi/ wasting (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga prevalensimalnutrisi/wasting Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat 	Dinas Kesehatan



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
	2.2.2.(a)	Rendahnya Prevalensi anemia pada ibu hamil.	<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan tingkat anemia pada ibu hamil 	Dinas Kesehatan
	2.2.2.(c)	Masih rendah Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga prevalensi malnutrisi/wasting Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat 	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1	Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI).	<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan tingkat anemia pada ibu hamil Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil Meningkatkan kegawatdaruratan kesehatan 	Dinas Kesehatan
	3.1.2.(a)	Masih rendahnya perempuan pernah kawin umur 15-49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatkan upaya penyebaran informasi tentang pentingnya menggunakan fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan
3.2 Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka	3.2.1*	Masih tingginya Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil Meningkatkan kegawatdaruratan kesehatan Pemberian asupan gizi makanan tambahan pada balita Meningkatkan peran posyandu dalam kesehatan balita 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
	3.2.2*	Masih adanya Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil • Meningkatkan kegawat daruratan kesehatan • Pemberian asupan gizi makanan tambahan pada balita • Meningkatkan peran posyandu dalam kesehatan balita • Pendampingan kesehatan pada ibu hamil 9 bulan 	
Kematian Neonatal setidak nya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.2. (a)	Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil • Meningkatkan kegawat daruratan kesehatan • Pemberian asupan gizi makanan tambahan pada balita • Meningkatkan peran posyandu dalam kesehatan balita • Pendampingan kesehatan pada ibu hamil 9 bulan 	- Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.3 Pada Tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.1.(a)	Masih adanya Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi HIV	Dinas Kesehatan
	3.3.2.(a)	Masih tingginya resiko masyarakat terjangkit TB karena faktor lingkungan dan gaya hidup yang tidak sehat	Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi TB	Dinas Kesehatan



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
3.4 Pada Tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1.(a)	Masih adanya penduduk merokok pada umur ≤ 18 Tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • pengawasan orang tua, guru, dan masyarakat terhadap anak kurang dari usia 18 Tahun dan • Penyusunan regulasi penjualan rokok kepada pembeli rokok pada usia anak kurang dari 18 Tahun. 	Dinas Kesehatan
3.7 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkatkan upaya penyebar luasan informasi tentang MKJP	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR).	Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tentang (Age Specific Fertility Rate /ASFR).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah (JKD).	Perlu sinkronnya data kependudukan masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh BPS maupun Dinas Dukcapil; dan jangkauan luas wilayah yang sangat besar	Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan upaya penyebaran informasi tentang dampak kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) 	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan upaya penyebaran informasi tentang dampak kekerasan seksual 	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PILAR EKONOMI				
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per Tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Masih rendahnya Laju pertumbuhan PDB per kapita	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong sektor-sektor unggulan dalam meningkatkan PDRB per Kapita Menyediakan kelengkapan kebijakan dan data dukung untuk meningkatkan investasi Meningkatkan perlindungan terhadap komoditas lokal Meningkatkan kualitas SDM Meningkatkan infrastruktur pengembangan wilayah ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas UMKM dan Perdagangan dan Perindustrian/Kop Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Penanaman Modal dan PPTSP



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
	8.1.1. (a)	Masih rendahnya PDB per kapita	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong sektor-sektor unggulan dalam meningkatkan PDRB per Kapita • Menyediakan kelengkapan kebijakan dan data dukung untuk meningkatkan investasi • Meningkatkan perlindungan terhadap komoditas lokal • Meningkatkan kualitas SDM • Meningkatkan infrastruktur pengembangan wilayah ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas UMKM dan Perdagangan dan Perindustrian Kop 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Dinas Peternakan dan Perikanan 4. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Menyamakan persepsi bahwa perempuan bekerja di sektor formal dianggap lebih prestisius daripada yang bekerja pada sektor non formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
8.6 Pada Tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Mengurangi pengaruh 2 faktor lingkungan yang menyebabkan penduduk usia muda yang tidak bersekolah, bekerja dan mengikuti pelatihan, adanya pengaruh faktor gaya hidup.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
8.9 Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Peningkatan jumlah dan kemampuan pekerja yang ahli dan terampil dalam sektor pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1. (a)	Belum tercapainya jalan dengan kondisi mantap.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas jalan dan jembatan • Peningkatan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan • Penyediaan lahan untuk mendukung pembangunan jalan baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Masih tingginya tingkat kesenjangan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui wirausahaan baru • Melakukan pemberdayaan pada PMKS • Mendorong produktifitas petani gurem • Memberikan pelatihan kerja terhadap usia kerja pencari kerja • Mendorong peningkatan sector pariwisata untuk menyediakan lapangan pekerjaan • Mengerakan UMKM dan • ekonomi kreatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembean Daerah 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Dinas Perikanan dan Peternakan 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6. Dinas Koperasi UKM 7. Perdagangan dan Perindustrian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	10.1.1. (a)	Masih adanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui wirausahaan baru • Melakukan pemberdayaan pada PMKS • Mendorong produktifitas petani gurem • Memberikan pelatihan kerja terhadap usia kerja pencari kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembean Daerah 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Dinas Perikanan dan Peternakan



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
			<ul style="list-style-type: none"> Mendorong peningkatan sektor pariwisata untuk menyediakan lapangan pekerjaan Menggerakkan UMKM dan ekonomi kreatif 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
6.1 Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1. (a)	Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penyediaan sarana air minum 	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
PILAR LINGKUNGAN				
6.2 Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Dinas Kesehatan
	6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan higienis terhadap sanitasi tempat umum 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Dinas Kesehatan
	6.2.1. (d)	Jumlah desa / kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan higienis terhadap sanitasi tempat umum Penyuluhan penggunaan sanitas rumah tangga 	Dinas Kesehatan



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
<p>11.5 Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.</p>	<p>11.5.1. (a).</p>	<p>Masih tingginya Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Kabupaten Sumedang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan upaya penyebaran informasi peringatan dini bencana • Meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan (membentuk desa/kelurahan tangguh bencana) • Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. • Perlu disusun kajian kebencanaan termasuk menyusun kontijensi plan, mitigasi dll 	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>
<p>11.6 Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</p>	<p>11.6.1. (a).</p>	<p>Masih tingginya sampah perkotaan yang belum tertangani.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jangkauan pelayanan penanganan sampah 	<p>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
<p>11.7 Pada Tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas</p>	<p>11.7.2. (a)</p>	<p>Masih adanya korban dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan pembinaan masing-masing unit kerja 	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
12.5 Pada Tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1. (a)	Masih rendahnya timbulan sampah yang diolah dengan sistem 3R.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengelolaan sampah 3R (recycle, reduce, reuse) 	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.1 Pada Tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1. (a).	Berkurangnya tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA				
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat	16.6.1. (d)	Pemerintah Kabupaten Sumedang belum mencapai nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang optimal (A)	<ul style="list-style-type: none"> Perlu penyempurnaan indikator kinerja utama sesuai dengan standar Perlu dilakukan pembinaan masing-masing unit kerja 	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan masyarakat perempuan agar mempunyai kesempatan menjadi anggota DPR dan DPRD 	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
	16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan (kompetensi) ASN perempuan sehingga bisa berkompetisi dengan ASN laki - laki 	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16.9 Pada Tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 Tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan kependudukan dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan kependudukan dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan kependudukan dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah PPID yang memiliki sertifikat . 	Sekretariat Daerah



c. Visi dan Misi Kepala Daerah

Pada bagian ini disajikan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023. Visi, misi yang menjadi dasar dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2018 – 2023. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Adapun Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diupayakan diukur melalui indikator yang bersifat kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 tidak merubah Visi-Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Akan tetapi terjadi perubahan indikator sasaran sebagai dampak diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta peraturan penyerta lainnya.

1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang periode Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaknya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya, dan Kreatif Ekonominya.

Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Sejahtera : kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan



tenteram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

Agamis : sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya.

Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maju : Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.



Profesional : *good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

Kreatif : masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan



penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

2.1. Misi Pertama: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau.

Misi ini dimaksudkan untuk: perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan akses pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik. Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang mendesak pelaksanaan pembangunannya. Peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

2.2. Misi Kedua: Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.

Misi ini dimaksudkan agar : setiap manusia mendambakan kehidupan harmonis, tentram, dan damai dalam hidupnya. Disinilah norma-norma memegang peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah norma agama. Norma agama merupakan aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk,



pedoman dan lampu penerang manusia dalam menjalani kehidupannya. Aturan atau petunjuk hidup ini sifatnya pasti dan tak ada keraguan karena merupakan "anugerah" langsung dari Tuhan YME. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti.

Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti, kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada. Seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma agama menopang dan mendorong fungsi pembaharuan untuk mengajak umat beragama bekerja produktif dan inovatif.

2.3. Misi Ketiga: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.

Misi ini dimaksudkan untuk : Sumedang akan maju jika seluruh daerahnya mampu memaksimalkan potensi yang ada. Keberagaman baik dari segi sumber daya alam maupun sosial dan budaya merupakan sebuah modal *competitive advantages* bagi Kabupaten Sumedang untuk bangkit. Setiap daerah/wilayah pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Perekonomian masyarakat akan bangkit menjadi perekonomian yang kuat, tangguh dan terhormat jika indeks daya saing berada pada tingkat yang tinggi. Membangun perekonomian yang berdaya saing tidak semudah membalik tangan, melainkan harus ditunjang



dengan basis industri yang mantap dan tangguh, mengandalkan teknologi tinggi sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang memadai. Pembangunan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor-sektor produksi dari yang semula mengandalkan sektor primer (industri) kemudian sektor jasa. Industrialisasi dianggap mampu meningkatkan kemakmuran suatu daerah secara lebih cepat dibandingkan dengan strategi lain.

2.4. Misi Keempat: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.

Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif dan dialogis. Rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan Pemerintah terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi rakyat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik.

Sistem pemerintahan berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) memungkinkan rakyat untuk berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan dengan cara cepat dan tepat. Komunikasi dan konsultasi publik bisa dilakukan secara sistematis melalui kanal-kanal media komunikasi virtual.

Demikian pula interaksi dengan rakyat bisa dilakukan tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang lebih cepat. Masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun keluhannya terhadap



pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi. Karena birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.

2.5. Misi Kelima: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di daerah tersebut.

Kewirausahaan merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada individu yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan dan mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif yang dimiliki ke dalam kegiatan yang bernilai. Jiwa dan sikap kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh wirausahawan, melainkan pula setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari dan memanfaatkan peluang menuju sukses.

Menjadi wirausahawan berarti memiliki kemauan dan kemampuan menemukan dan mengevaluasi peluang, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari peluang itu. Mereka berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan menyukai tantangan dengan risiko moderat. Wirausahawan percaya dan teguh pada dirinya dan kemampuannya mengambil keputusan yang tepat.

3. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025

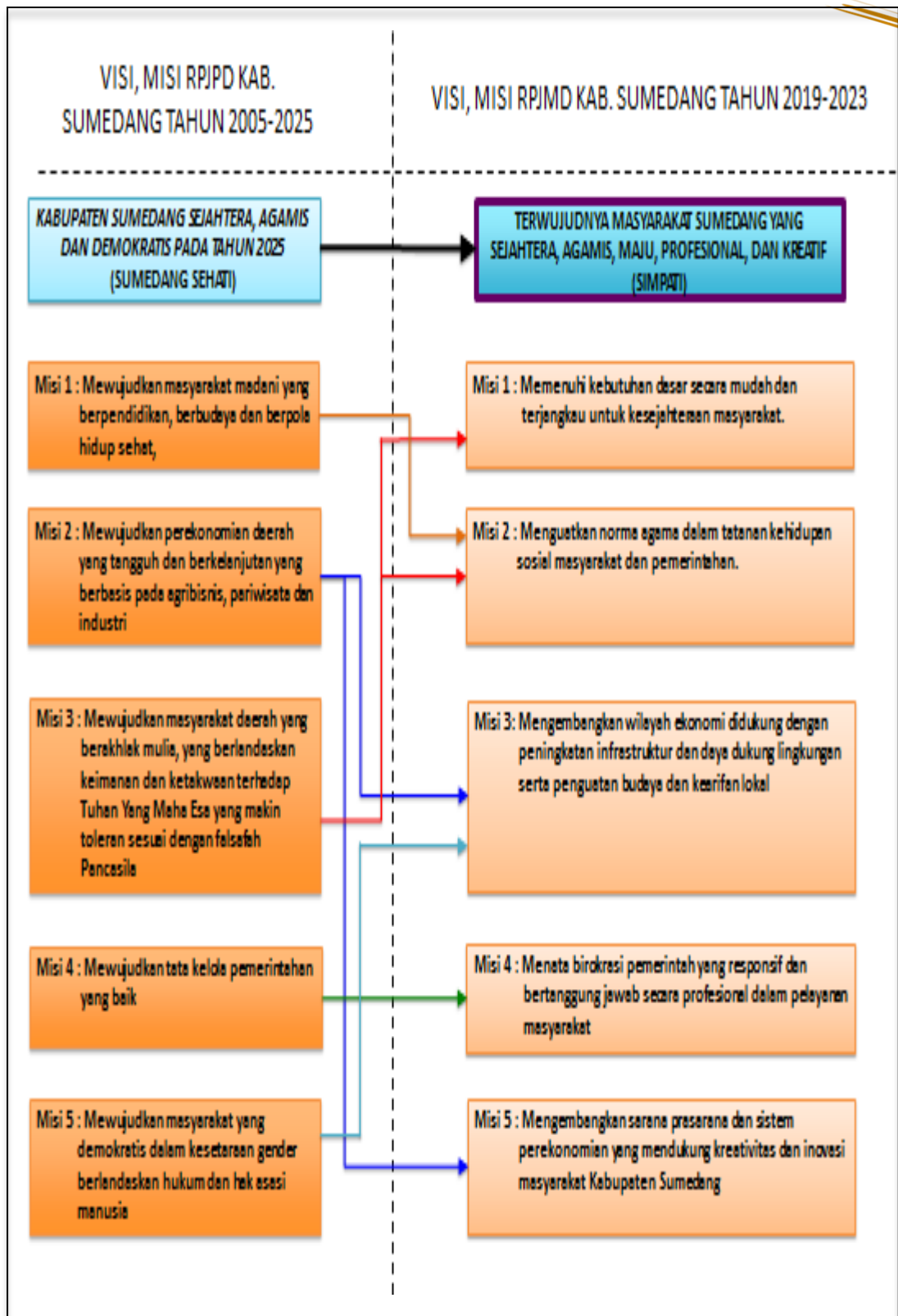


Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Visi jangka panjang Kabupaten Sumedang adalah **“Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis Dan Demokratis Pada Tahun 2025 (Sumedang Sehati)”** yang pada periode keempat diwujudkan melalui visi jangka menengah yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”**.

Misi 1 jangka panjang *“Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat”* diwujudkan melalui misi jangka menengah **Misi 2** *“Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan”*.

Misi 2 jangka panjang *“Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri”* diwujudkan melalui misi jangka menengah **Misi 3** *“Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal”* dan **Misi 5** *“Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang”*.

Misi 3 jangka panjang *“Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila”* diwujudkan melalui misi jangka menengah **Misi 1** *“Memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat secara mudah dan terjangkau ”* dan Misi 2 *“Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan”*.



Misi 4 jangka menengah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” diwujudkan melalui misi jangka



menengah **Misi 4** “Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat”.

Misi 5 jangka menengah “Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia” diwujudkan melalui misi jangka menengah **Misi 3** “Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal”

Pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, Visi dan Misi Sumedang Simpati tidak mengalami perubahan atau sama dengan yang tercantum pada Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023. Lebih lanjut uraian mengenai hal ini dapat disimak pada Gambar 1. ... di bawah ini.

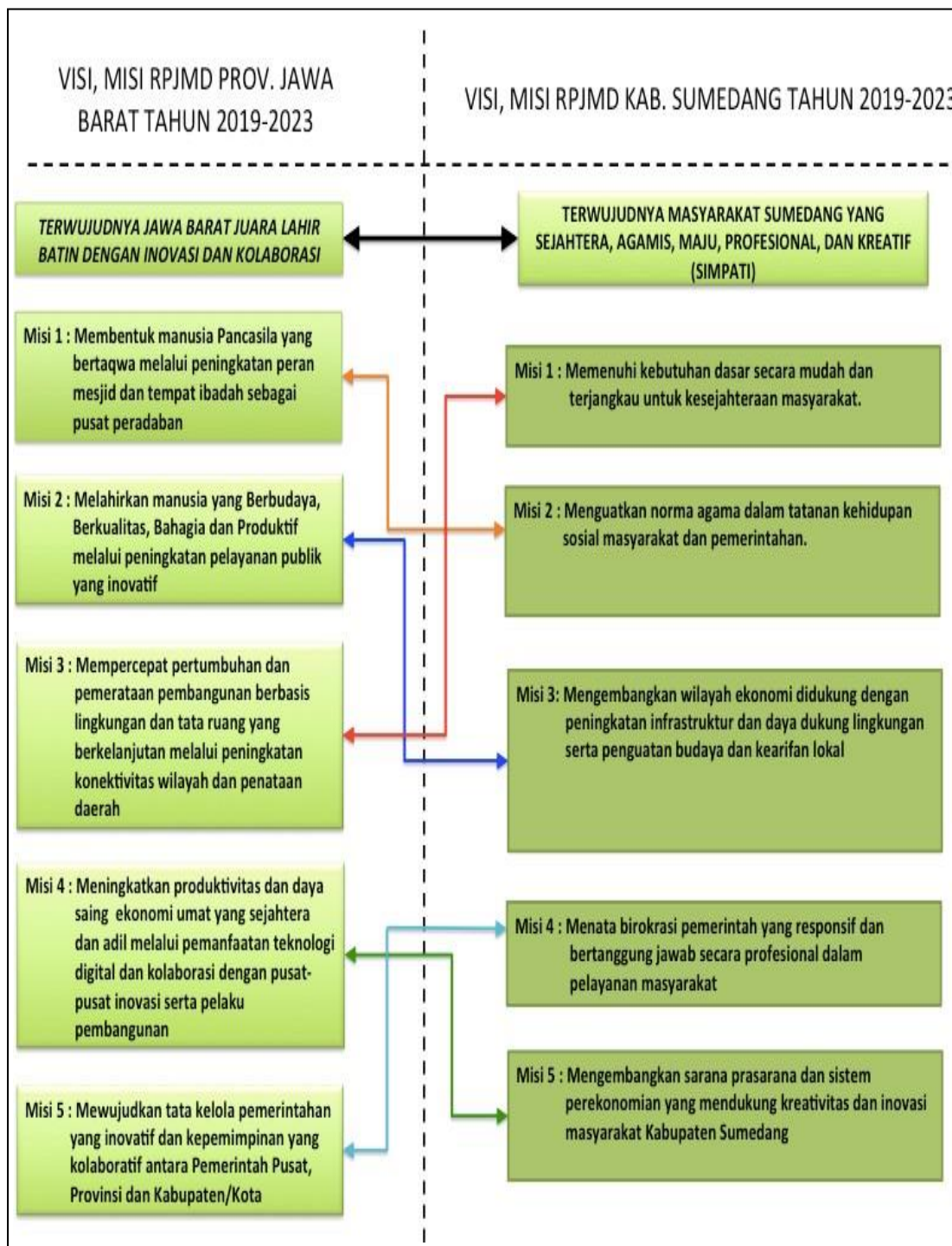
Keselarasan Visi, Misi RPJPD Kab. Sumedang 2005-2025 dengan Visi, Misi RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023

4. Keselarasan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Untuk menciptakan keselarasan pembangunan antara Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka perlu adanya telaahan kesesuaian antara visi misi Provinsi dengan visi misi Kabupaten/kota. Dalam konteks pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang, diketahui terdapat irisan persamaan antara substansi visi misi Kabupaten Sumedang dengan substansi visi misi Provinsi Jawa Barat. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Keselarasan Visi, Misi RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023 dengan Visi, Misi RPJMD Prov. Jawa Barat 2018-2023



5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.



Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : *Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau.*

RPJMD Tahun 2018-2023

- Tujuan 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata
- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan yang merata
- Tujuan 3 : Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- Sasaran 2 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak

Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

- Tujuan : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat
- Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan
- Sasaran 3 : Meningkatkan penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Sasaran 4 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak



2. Misi Kedua : *Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.*

RPJMD Tahun 2018-2023

- Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang
- Sasaran 1 : Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama
- Sasaran 2 : Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar

Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

- Tujuan : Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang
- Sasaran : Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama

3. Misi Ketiga : *Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.*

RPJMD Tahun 2018-2023

- Tujuan 1 : Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata
- Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air
- Sasaran 2 : Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat
- Sasaran 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis
- Sasaran 4 : Menjamin Ketahanan Pangan Daerah
- Sasaran 5 : Meningkatkan pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata
- Sasaran 6 : Meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Sumedang
- Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan
- Sasaran 1 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan



Sasaran 2 : Pengurangan indeks resiko bencana

Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Tujuan : Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan

Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri

Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian

Sasaran 5 : Meningkatnya Ketahanan Daerah

Sasaran 6 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

4. Misi Keempat : *Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.*

RPJMD Tahun 2018-2023

Tujuan 1 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Sasaran 2 : Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran 2 : Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT

Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Tujuan : Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik



Sasaran 3 : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja daerah

5. Misi Kelima : *Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang*

RPJMD Tahun 2018-2023

Tujuan 1 : Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing

Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan yang inklusif

Sasaran 2 : Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar

Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Tujuan : Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing

Sasaran : Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat

Untuk menciptakan sinergitas tujuan dan sasaran antara RPJMD Kabupaten Sumedang dan RPJMD Provinsi Jawa Barat, dirumuskan sinkronisasi sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.14
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang	Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Prov. Jabar	Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar	Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat
MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau			Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban



Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang	Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Jabar	Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar	Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat
Tujuan 1.1 Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Terkait dengan Tujuan 2.1 Provinsi		Tujuan 1.1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Terkait dengan Sasaran 2.1.1 Provinsi	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Kualitas		Terkait dengan Sasaran	
Penyelenggaraan Pendidikan		2.1.3 Provinsi	
Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Penanggulangan PPKS		Terkait Dengan Sasaran 2.1.1 Provinsi	
Sasaran 1.1.4. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		Terkait dengan Sasaran 2.1.2 Provinsi	
MISI 2 : Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan			Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif
Tujuan 2.1 Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Terkait dengan Tujuan 1.1 Provinsi		Tujuan 2.1. Meningkatkan Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran 2.1.1 Memperkuatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama		Terkait dengan Sasaran 1.1.1 Provinsi	Sasaran 2.1.1 Meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan memperluas kesempatan pemenuhan kebutuhan dasar



<p>MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan</p>			<p>Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif</p>
			<p>Sasaran 2.1.2 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak</p> <p>Sasaran 2.1.3 Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan</p> <p>Sasaran 2.1.4 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional</p> <p>Tujuan 2.2 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah</p> <p>Sasaran 2.2.1 Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal</p> <p>Sasaran 2.2.2 Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial</p>
<p>MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal</p>			<p>Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah</p>



Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang	Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Prov. Jabar	Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar	Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat
Tujuan 3.1 Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata yang berkelanjutan	Terkait dengan Tujuan 3.1 Provinsi		Tujuan 3.1 Terwujudnya Percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
Sasaran 3.1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan Kawasan industri		Terkait dengan Sasaran 3.1.2; 3.1.3; dan 4.1.3. Provinsi	Sasaran 3.1.1. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis		Terkait dengan Sasaran 3.1.2 Provinsi	Sasaran 3.1.2. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
Sasaran 3.1.3. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata		Terkait dengan Sasaran 4.1.2 provinsi	Sasaran 3.1.3. Pengembangan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Sasaran 3.1.4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sebagai penunjang perekonomian		Terkait dengan Sasaran 3.1.2 dan 3.1.3 Provinsi	Sasaran 3.1.4. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
Sasaran 3.1.5. Meningkatnya Ketahanan Daerah		Terkait dengan Sasaran 3.2.3 Provinsi	Sasaran 3.1.5. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan
Sasaran 3.1.6. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		Terkait dengan sasaran 3.2.1 Provinsi	Tujuan 3.2. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Sasaran 3.1.7. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Terkait dengan sasaran 3.2.1 dan 3.2.2 Provinsi	Sasaran 3.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat



Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang	Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Prov. Jabar	Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar	Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat
			Sasaran 3.2.2. Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik Sasaran 3.2.3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.			Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat- Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan
Tujuan 4.1 Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Terkait dengan Tujuan 5.1 Provinsi		Tujuan 4.1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan		Terkait dengan Sasaran 5.1.1. Provinsi	Sasaran 4.1.1 Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan
Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Terkait dengan Sasaran 5.1.1. Provinsi	Sasaran 4.1.2 Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
Sasaran 4.1.3 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja daerah		Terkait dengan Sasaran 5.1.1 Provinsi	Sasaran 4.1.3 Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat Sasaran 4.1.4 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi



MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang			Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tujuan 5.1 Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Terkait dengan Tujuan 4.1 Provinsi		Tujuan 5.1 Terwujudnya good governance dan whole of government
Sasaran 5.1.1 Meningkatnya kompetensi dan produktivitas masyarakat		Terkait dengan Sasaran 4.1.3 Provinsi	Sasaran 5.1.1 Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel Sasaran 5.1.2 Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

6. Program Unggulan

Program Unggulan merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang kepada masyarakat yang menggambarkan kegiatan konkret yang mudah dimengerti masyarakat, bermanfaat dan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat yang direncanakan dan dilaksanakan setiap tahun selama masa jabatan. Pada RPJMD Tahun 2018-2023 terdapat 9 (sembilan) program unggulan sedangkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 menjadi 8 (delapan) program unggulan. Perubahan tersebut sebagai hasil penelaahan kembali program unggulan pada dokumen visi-misi. Adapun Program Unggulan Bupati dan



Wakil Bupati Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:

No	RPJMD 2018-2023	Perubahan RPJMD 2018-2023
1.	Sumedang Agamis	1. Sumedang Agamis
2.	Rumah Besar Fakir Miskin dan Pelayanan Kesehatan sampai tingkat desa	2. Rumah Besar Fakir Miskin dan Pelayanan Kesehatan
3.	Sumedang Buludru	3. Sumedang Buludru
4.	Pemenuhan Pelayanan Dasar	-
5.	Pembangunan Infrastruktur Konektivitas	4. Pembangunan Infrastruktur

No	RPJMD 2018-2023	Perubahan RPJMD 2018-2023
6.	Pengembangan Pariwisata	5. Pengembangan Pariwisata
7.	Pengembangan Agribisnis	6. Perluasan Kesempatan Kerja
8.	Peningkatan Profesionalisme ASN	7. Peningkatan Profesionalisme ASN
9.	Membangun Sumedang Preneurship	8. Gerakan Wirausaha Muda (GARUDA)

Adapun penjelasan setiap program unggulan, adalah sebagai berikut:

6.1 Sumedang Agamis.

Program unggulan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang mengedepankan peningkatan mental dan spiritual dengan mewujudkan nilai-nilai agama pada tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan. Aktivitas yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan, diantaranya terbentuk dan berkembangnya Koperasi Syariah di 26 Masjid Besar Kecamatan, pelaksanaan Maghrib Mengaji Online setiap hari kerja, peningkatan lulusan Sekolah Dasar/Sederajat



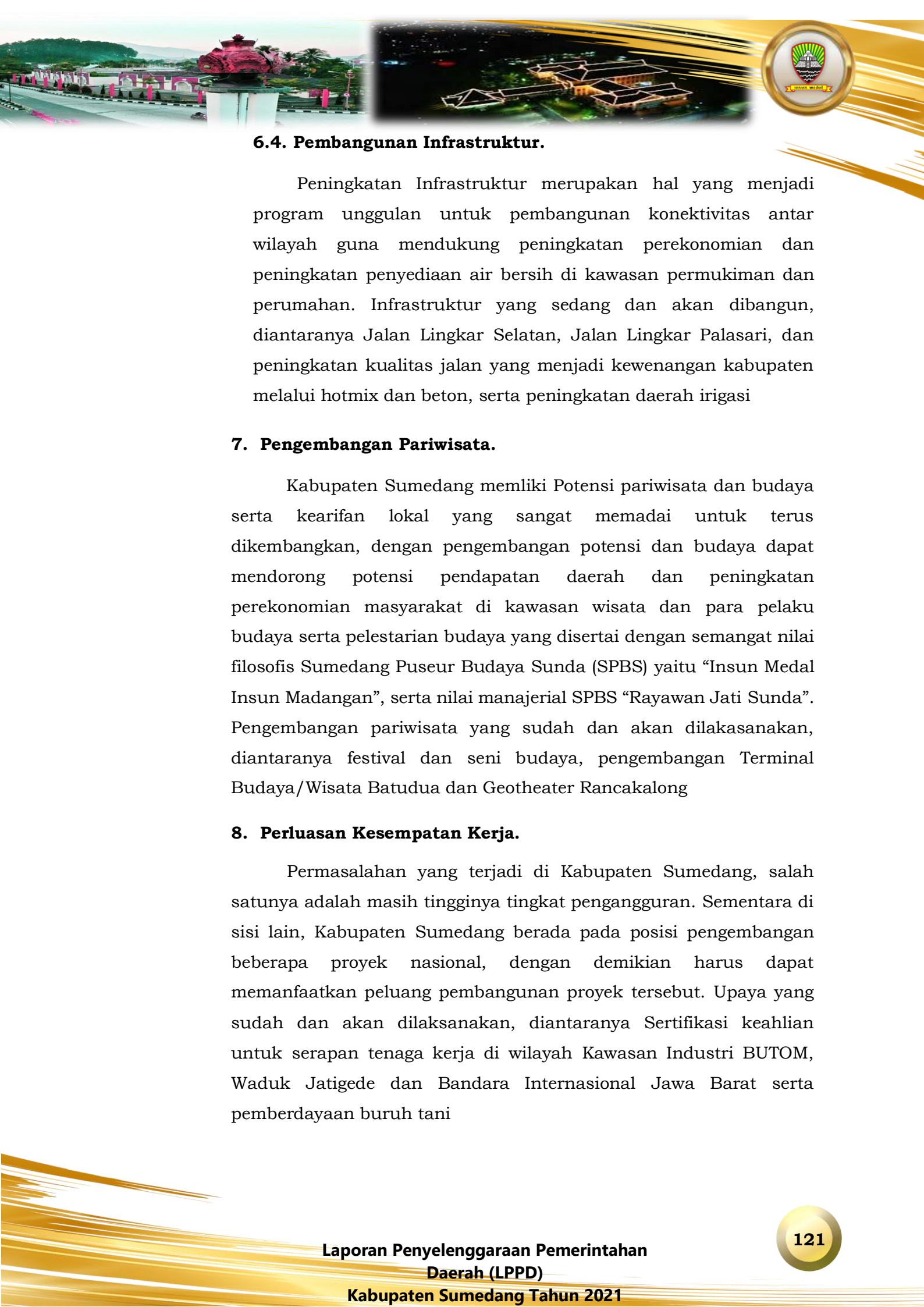
yang memperoleh Sertifikat Diniyah, pelaksanaan subuh berjamaah satu bulan sekali di Masjid Besar Kecamatan yang dihadiri Bupati Sumedang, pelaksanaan taklim aparatur, Peringatan Hari Besar Islam, Pentas PAI, Insentif Guru Mengaji, Safari Ramadhan, Pembangunan Masjid Al Kamil di IPP dan Panenjoan Jatigede, bantuan dana stimulan perbaikan sarana keagamaan, insentif guru mengaji/ustadz/takmir masjid, insentif RT/ RW

6.2 Rumah Besar Fakir Miskin dan Pelayanan Kesehatan.

Program unggulan ini bertujuan membentuk rumah besar penanganan fakir miskin/lansia serta peningkatan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa dengan optimalisasi peran Pemerintahan Desa, RT/RW, DKM dan Pontren. Program ini dilaksanakan untuk mengurangi permasalahan sosial dengan pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemusatan pengelolaan pemberdayaan fakir miskin/ lansia/ anak terlantar/ psikososial di 270 Desa dan tersedianya sekretariat Rumah Besar Fakir Miskin. Sekretariat dibentuk agar program penanganan fakir miskin dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Adapun untuk pelayanan kesehatan, telah dibantuk PSC 119.

6.3. Sumedang Buludru.

Program ini untuk mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan ruang aktivitas publik berbasis budaya dan kearifan lokal, menuju Sumedang kota BULUDRU. Harapan dari terwujudnya janji kerja Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini adalah Mewujudkan Sumedang yang Hijau, Bersih, Indah dan Nyaman. Pencapaian Sumedang BULUDRU dilaksanakan melalui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan pelayanan persampahan khusus (Unit Reaksi Cepat) di wilayah Sumedang Selatan dan Sumedang Utara.



6.4. Pembangunan Infrastruktur.

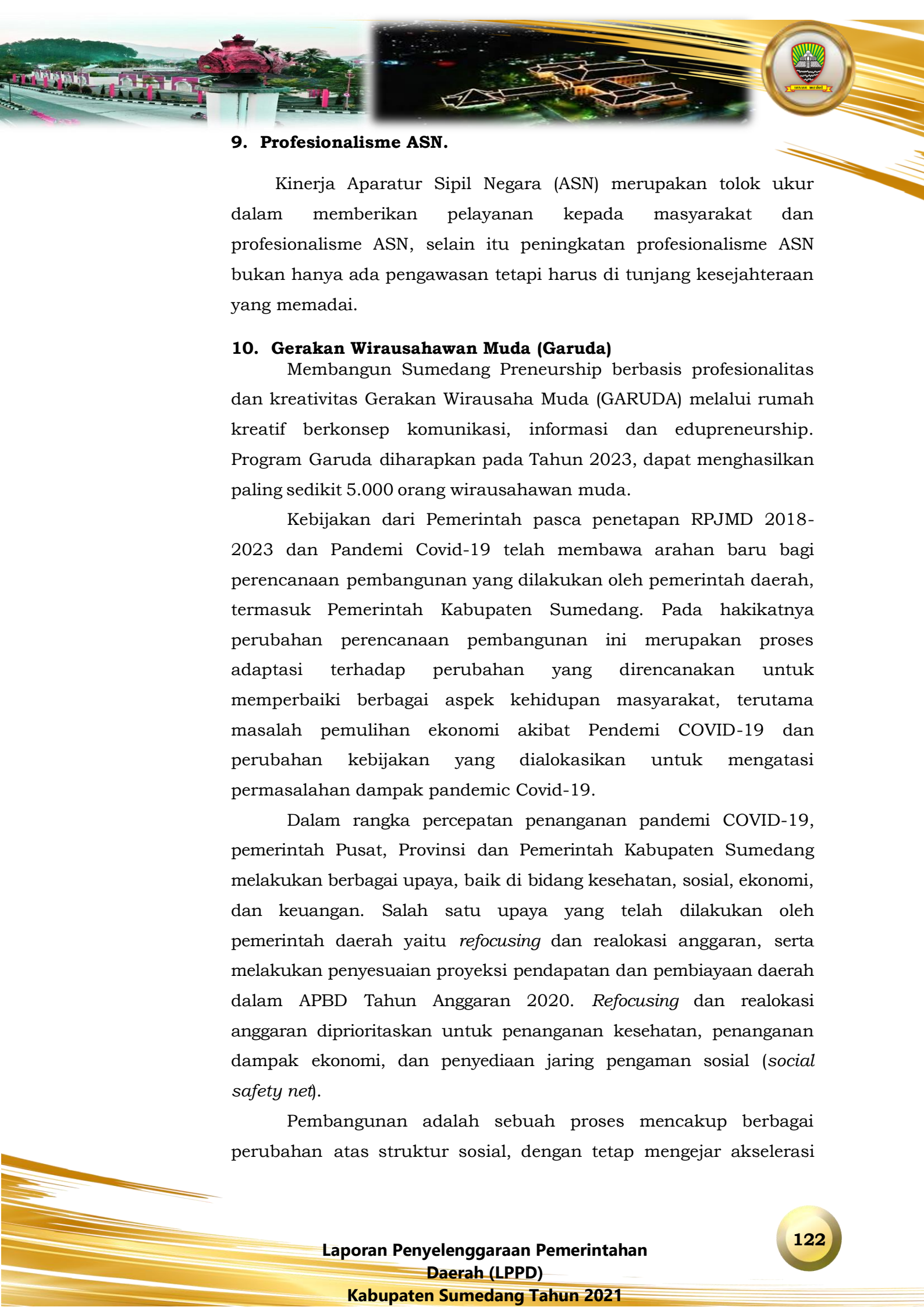
Peningkatan Infrastruktur merupakan hal yang menjadi program unggulan untuk pembangunan konektivitas antar wilayah guna mendukung peningkatan perekonomian dan peningkatan penyediaan air bersih di kawasan permukiman dan perumahan. Infrastruktur yang sedang dan akan dibangun, diantaranya Jalan Lingkar Selatan, Jalan Lingkar Palasari, dan peningkatan kualitas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten melalui hotmix dan beton, serta peningkatan daerah irigasi

7. Pengembangan Pariwisata.

Kabupaten Sumedang memiliki Potensi pariwisata dan budaya serta kearifan lokal yang sangat memadai untuk terus dikembangkan, dengan pengembangan potensi dan budaya dapat mendorong potensi pendapatan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan wisata dan para pelaku budaya serta pelestarian budaya yang disertai dengan semangat nilai filosofis Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) yaitu “Insun Medal Insun Madangan”, serta nilai manajerial SPBS “Rayawan Jati Sunda”. Pengembangan pariwisata yang sudah dan akan dilaksanakan, diantaranya festival dan seni budaya, pengembangan Terminal Budaya/Wisata Batudua dan Geotheater Rancakalong

8. Perluasan Kesempatan Kerja.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sumedang, salah satunya adalah masih tingginya tingkat pengangguran. Sementara di sisi lain, Kabupaten Sumedang berada pada posisi pengembangan beberapa proyek nasional, dengan demikian harus dapat memanfaatkan peluang pembangunan proyek tersebut. Upaya yang sudah dan akan dilaksanakan, diantaranya Sertifikasi keahlian untuk serapan tenaga kerja di wilayah Kawasan Industri BUTOM, Waduk Jatigede dan Bandara Internasional Jawa Barat serta pemberdayaan buruh tani



9. Profesionalisme ASN.

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tolok ukur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan profesionalisme ASN, selain itu peningkatan profesionalisme ASN bukan hanya ada pengawasan tetapi harus di tunjang kesejahteraan yang memadai.

10. Gerakan Wirausahawan Muda (Garuda)

Membangun Sumedang Preneurship berbasis profesionalitas dan kreativitas Gerakan Wirausaha Muda (GARUDA) melalui rumah kreatif berkonsep komunikasi, informasi dan edupreneurship. Program Garuda diharapkan pada Tahun 2023, dapat menghasilkan paling sedikit 5.000 orang wirausahawan muda.

Kebijakan dari Pemerintah pasca penetapan RPJMD 2018-2023 dan Pandemi Covid-19 telah membawa arahan baru bagi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Sumedang. Pada hakikatnya perubahan perencanaan pembangunan ini merupakan proses adaptasi terhadap perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama masalah pemulihan ekonomi akibat Pandemi COVID-19 dan perubahan kebijakan yang dialokasikan untuk mengatasi permasalahan dampak pandemic Covid-19.

Dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *refocusing* dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. *Refocusing* dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi



pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah, termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, maka perumusan tujuan dan sasaran dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode Tahun 2018-2023 mengalami perubahan. Perubahan Indikator Tujuan dan Sasaran dikarenakan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan, dan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Sumedang 2021-2023
(Setelah Perubahan)



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			KONDISI AKHIR	
				2021	2022	2023		
MISI 1 : MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT SECARA MUDAH DAN TERJANGKAU								
1	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71.72-72.00	71.93-72.48	72.40-73.37	73.37	
		Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,71-10,75	8.95-9,70	7,56-8,94	8,94	
	1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72.51-72.70	72.65-72.82	72.70-73.20	73.20
	1.2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.50-8.57	8.58-8.80	8.81-9.00	9.00
			Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	12.91-12.98	12.99-13.04	13.05-13.12	13.12
	1.3	Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,71-10,75	8.95-9,70	7,56-8,94	8,94
	1.4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,81	96,28	96,75	96,75
Indeks Pemberdayaan Gender			Poin	70,80	70,84	71,37	71,37	
MISI 2 : MENGUATKAN NORMA AGAMA DALAM TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN								
	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73,5	74	74,5	74,5	
1.1	Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	73,5	74	74,5	74,5	
MISI 3 : MENGEMBANGKAN WILAYAH EKONOMI DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, SERTA PENGUATAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL								



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	
	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.50 – 4.50	4.60-6.00	5.50-7.00	7,00
1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri	Indeks Resiko Bencana Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Poin persen	145 5.38	140 2.20 - 4.15	135 4.15 - 6.40	135 6.40
1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	3.13-4.97	3.45-5.28	3.76-5.59	5,59
1.3	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	0.23-1.74	4.50-6.01	8.77-10.27	10.27
1.4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	71,65	74,65	77,65	77,65
1.5	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,47	0,49	0,52	0,52
1.6	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	persen	88	89,4	90,2	90,2
1.7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	71,1	71,4	71,8	71,8



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	
MISI 4 : MENATA BIROKRASI PEMERINTAH YANG RESPONSIF DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PROFESIONAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT.							
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75	80	85	85
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A	A	A	A
1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
1.3	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86	89	92	92
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	4	4,1	4,2	4,2
MISI 5 : MENGEMBANGKAN SARANA PRASARANA DAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG MENDUKUNG KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT KABUPATEN SUMEDANG							
	Terwujudnya Perekonomian Sumedang yang Kreatif dan Berdaya Saing	PDRB per Kapita	Rp (juta)	30.75-32.08	32.09-33.84	33.85-34.70	34.70
	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9.35-8.51	7.99-8.50	6.95-7.98	7.98



d. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan menengah

1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam bab ini disajikan tabel penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah (indikator tujuan) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah digunakan indikator makro pembangunan sebagaimana tersajikan dalam Tabel c.1, pada tabel ini terdapat penyesuaian target dampak dari COVID 19 yang terjadi pada semester I Tahun 2020 baik secara Nasional, Provinsi maupun Kabupaten, serta untuk menggunakan indikator tujuan atau sasaran penetapan Indikator Utama Daerah tersajikan dalam Tabel c.2, pada tabel ini menyajikan target dan capaian tahun 2019-2020 dan target kesepakatan Tahun 2021-2023 tersaji pada tabel ini. Lebih lanjut, sementara indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) disajikan pada Tabel c.3 untuk target dan capaian Tahun 2019-2020 sedangkan target Perubahan RPJMD tersaji pada tabel c.4.



Tabel 1.15
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Sumedang
Tahun 2021-2023

No	Variabel	Satuan	Kondisi Awal		2019		Target RPJMD			2020		Target Perubahan RPJMD		
			2017	2018	Target	Capaian	2021	2022	2023	Target	Capaian	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,07	70,99	71,39	71,46	73,11	73,97	74,83	71,30-71,95	71,64	71,72-72,00	71,93-72,48	72,40-73,37
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,53	9,76	8,96	9,05	7,36	6,56	5,76	10,04 - 9,87	10,26	10,75-9,71	10,41-9,54	9,70-7,56
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,15	7,04	6,55	7,63	6,15	5,96	5,68	7,90 - 7,87	9,89	8,51-9,35	8,78-7,99	8,18-6,95
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,23	6,48	6,74	6,33	7,29	7,58	7,88	(3) - (1,74)	-1,12	3,66 - 4,70	4,70-5,70	5,20-6,20
5	Gini Ratio	Poin	0,39	0,42	0,39	0,344	0,37	0,36	0,35	0,382	0,384	0,39-0,36	0,38-0,35	0,37-0,34
6	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	30,74	30,75-32,08	32,09-33,84	33,85-34,70

Sumber: Hasil Analisis



Tabel 1.16
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2023
(Sebelum Perubahan)

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET	REALISASI
			2017	2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	11
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72	72,14	72,29	72,44	72,43
2	Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	7,98	8,17	8,27	8,48	8,51
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,93	12,94	12,96	13,44	12,97
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,53	9,76	9,05	8,16	10,26
5	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,60	94,88	95,01	95,34	95,34
6	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	68,08	70,57	70,57	69,77	-
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	n/a	72,2	n/a	73	n/a
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,23	5,83	6,32	7,01	-1,12
9	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen		62,8	70,75	70,80	76,96
10	Rasio Jaringan Irigasi	Persen		60	62,02	64	64,46
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin		58,68	59,01	59,18	59,18
12	Indeks Resiko Bencana	Poin		162	157	150	150
13	Oponi BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Nilai Sakip Kabupaten	Kategori	B	B	B	BB	BB
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin		56,05	79,34	70	70



NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET	REALISASI
			2017	2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	11
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin		80,74	82,27	83	83
17	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	Rp (Juta)	9.569	10.153	10.406	10.380	10.217
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,15	7,52	7,63	7,9-7,87	9,89
19	Jumlah UMKM	UMKM		15.467	2.800	17.467	1.557

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 1.17
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2023
(Setelah Perubahan)

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR
			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,43	72.51-72.70	72.65-72.82	72.70-73.20	73.20
2	Rata-Rata lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,51	8.50-8.57	8.58-8.80	8.81-9.00	9.00
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,97	12.91-12.98	12.99-13.04	13.05-13.12	13.12
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,26	10,75-9,71	10.41-9,54	9,70-7,56	7.56
5	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,34	95,81	96,28	96,75	96,75
6	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	70,78	70,80	70,84	71,37	71,37
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	n/a	73,5	74	74,5	74,5



NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR
			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	-1.46	5.38	2.20 - 4.15	4.15 - 6.40	6.40
9	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	2.82	3.13-4.97	3.45-5.28	3.76-5.59	5,59
10	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	-4.50	0.23-1.74	4.50-6.01	8.77-10.27	10.27
11	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	71,65	71,65	74,65	77,65	77,65
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,18	71,1	71,4	71,8	71,8
13	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen	-0,04	20	20	30	30
14	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	n/a	0,47	0,49	0,52	0,52
15	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	89,1	88	89,4	90,2	90,2
16	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Nilai Sakip Kabupaten	Kategori	BB	A	A	A	A
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83	86	89	92	92
19	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,3	4	4,1	4,2	4,2
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,89	8.51-9.35	8.78-7.99	8.18-6.95	6.95



Tabel 1.18
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target		Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB								
1,1	URUSAN WAJIN PELAYANAN DASAR								
1.1.1	PENDIDIKAN								
1.1.1.1	Angka partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	106,75	106,83	106,93	107,03	104,46	99,34	Dinas Pendidikan
1.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	103,42	103,62	103,72	103,82	103,80	97,96	Dinas Pendidikan
1.1.1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	105,23	105,34	105,44	105,55	104,06	97,45	Dinas Pendidikan
1.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	102,78	102,99	103,19	103,40	103,74	88,51	Dinas Pendidikan
1.1.1.5	Persentase Guru yang Bersertifikasi	Persen	65,03	66,09	73,77	82,52	63,26	90,23	Dinas Pendidikan
1.1.1.6	Sekolah pendidikan Dasar kondisi bangunan baik	Persen	13,45	21,51	29,50	37,49	21,51	37,92	Dinas Pendidikan
1.1.1.7	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SD)	-	1 : 27	1 : 27	1 : 27	1:27	1 : 27	1:17	Dinas Pendidikan
1.1.1.8	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SMP)	-	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1:32	1 : 32	1:15	Dinas Pendidikan
1.1.1.9	APK PAUD	Persen	88,44	89,53	89,62	89,71	89,53	80,60114351	Dinas Pendidikan
1.1.1.10	Persentase PAUD yang terakreditasi	Persen	31,08	52,89	74,7	96,51	74,7	45,32	Dinas Pendidikan
1.1.1.11	Angka partisipasi kasar kesetaraan	Persen	1,35	1,63	1,9	2,1	1,63	3	Dinas Pendidikan
1.1.1.12	Persentase siswa Bersertifikat Diniyah	Persen	n/a	0	100	100	0	100	Dinas Pendidikan
1.1.2	KESEHATAN								
1.1.2.1	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	16	13	10	8	14	21	Dinas Kesehatan



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target		Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.2	Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	155	140	120	94	114	137	Dinas Kesehatan
1.1.2.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Poin	78,73	85	87	90	82,5	100	Dinas Kesehatan
1.1.2.4	Persentase Balita Stunting	Persen	32,2	29	26	23	24,4	17,5	Dinas Kesehatan
1.1.2.5	Prevalensi HIV/AIDS	Persen	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	Dinas Kesehatan
1.1.2.6	Angka Kesakitan Penyakit Menular	Angka	113/ 100.000	111/ 100.000	109/ 100.000	< 107/100.000	56/100.000	0	Dinas Kesehatan
1.1.2.7	Universal Health Coverage	Persen	73,17	96	97	98	76,46	77,06	Dinas Kesehatan
1.1.2.8	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,12	0,2	0,3	0,40	0,13	0,13	Dinas Kesehatan
1.1.2.9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai kewenangan Kelas B	Persen	98	98	98	100	98,92	96,12	Rumas Sakit Umum Daerah
1.1.2.10	IKM Rumah Sakit	poin	83,7	90	91	92	83,79	83,92	Rumas Sakit Umum Daerah
1.1.2.11	Persentase Pencapaian Indikator Mutu Pelayanan di Rumah Sakit	Persen	88,25	90	91	92	91,03	90	Rumas Sakit Umum Daerah
1.1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.1.3.1	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	62,8	66,8	70,8	74,80	70,75	76,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.3.2	Rasio jaringan irigasi	Persen	60	62	64	60	62,02	64,46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.3.3	Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang	Persen	100	100	100	100	70,22	75,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.3.4	Usaha Jasa Konstruksi yang terstandarisasi	Persen	0	20	40	60	23	40,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.3.5	Persentase Bangunan Pemerintahan yang tertata	Persen	20	28,75	48,75	58,75	35	58,75	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target		Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3.6	Persentase penanganan sampah	persen	n/a	80	75	70	99,975	99,97333333	Dinas lingkungan dan kehutanan
1.1.3.7	Persentase pengurangan sampah	persen	n/a	20	25	30	99,9	99,92	Dinas lingkungan dan kehutanan
1.1.3.8	Persentase RTH Terkelola	Persen	11,04	11,04	11,07	11,11	#N/A	#N/A	Dinas lingkungan dan kehutanan
1.1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1.1.4.1	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	80	80,67	81,33	82,00	80,13	80,34	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
1.1.4.2	Persentase lingkungan Pemukiman kumuh	Persen	0,31	0,3	0,27	0,15	0,3	0	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
1.1.4.3	Persentase Rumah Tangga berakses air minum	Persen	79,02	80	83	85	79,92	80,45	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
1.1.4.4	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	55	60	65	70	55,23	55,29	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
1.1.5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.1.5.1	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT)	Persen	60,55	65	70	75	60,55	81,42	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.5.2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target		Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.5.3	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.5.4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	32,04	60	70	80	32,04	93,17	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.5.5	Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	87,5	87,5	90	90	75,1	94,32	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.5.6	Indeks Resiko Bencana	Poin	162	155	150	145	157	150	Badan penanggulangan bencana daerah
1.1.6	SOSIAL								
1.1.6.1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	10,05	9,25	8,45	7,65	9,11	8,1	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1,2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
1.2.1	TENAGA KERJA								
1.2.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,04	6,55	6,35	6,15	7,63	9,89	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
1.2.1.2	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
1.2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1.2.2.1	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.2.2.2	Kabupaten Layak Anak	Skor	501	601	650	701	549,7	0	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target		Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.3	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi keluarganya	Persen	0,7	1,7	2,7	3,70	0,7	9,7	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.2.3	PANGAN								
1.2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	85	87,3	88,5	89,60	87,7	89,10	Dinas pertanian dan ketahanan pangan
1.2.4	PERTANAHAN								
1.2.4.1	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	79,82	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
1.2.4.2	Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	96,37	99,19	
1.2.5	LINGKUNGAN HIDUP								
1.2.5.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	47,89	48,09	48,29	48,49	#N/A	#N/A	Dinas lingkungan hidup dan kehutanan
1.2.5.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	80,29	80,49	80,69	80,89	#N/A	#N/A	
1.2.5.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	50,57	50,86	51,22	51,63	#N/A	#N/A	
1.2.7	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
1.2.7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Poin	76	80	83	85	80	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.2.7.2	Persentase Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Wajib KTP	Persen	89	97	97	98	97	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.2.7.3	Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran	Persen	81	91	91	93	91,2	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.2.7.4	Persentase Data Ganda dan Anomali	Persen	17	9	3	3	9	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.2.8	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target		Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.8.1	Persentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang	Persen	56,3	74,8	92,6	100	94	95,50	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
1.2.8.2	Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang	Persen	24,8	50	81,5	100	29,37	82,22	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
1.2.8.3	Persentase Penerapan Siskudes Kategori Optimal	Persen	32,2	100	100	100	100	80,47	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
1.2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1.2.8.1	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,09	2,07	2,05	2,03	2,07	212	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1.2.8.2	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	4,12	3,71	3,3	2,88	4,01	4,51	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1.2.8.3	Persentase Keluarga Sejahtera 1	Persen	67,03	58,22	49,42	40,61	17,28	18,26	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1.2.9	PERHUBUNGAN								
1.2.9.1	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	25,31	31,27	42,12	51,83	98,47	79,04	Dinas Perhubungan
1.2.9.2	Cakupan Trayek Angkutan Umum	Persen	58,45	59,85	61,24	62,64	88,32	50,74	Dinas Perhubungan
1.2.9.3	Peningkatan Penumpang Angkutan Umum	orang/hari	10044	10284	10524	10,764	10284	10428	Dinas Perhubungan
1.2.9.4	Persentase Kendaraan Laik Jalan	Persen	83,4	86,7	90	93,30	91,92	62,59	Dinas Perhubungan
1.2.9.5	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	Jumlah Pelanggaran	1787	1490	1133	984	30	135,48	Dinas Perhubungan
1.2.9.6	Cakupan Satuan Ruas Parkir (SRP)	Persen	50	60	70	80	60	100	Dinas Perhubungan
1.2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMASI								



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target		Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.10.1	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi	Persen	n/a	100	100	100	100	100	Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik
1.2.10.2	Nilai SPBE	Poin	2,46	3	3,3	3,60	2,51	3,81	Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik
1.2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1.2.11.1	Cakupan Koperasi Aktif	persen	72,93	75	78	81	77,41	38,39	Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan
1.2.11.2	Jumlah UMKM	UMKM	15.467	16.467	17467	18.467	2.800	1.557	
1.2.12	PENANAMAN MODAL								
1.2.12.1	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	(Rp)	1,10617E+12	1,21679E+12	1,33847E+12	1.606.158.840.000	9,15826E+11	1,33847E+12	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
1.2.12.2	Indek Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan	Poin	84,11	84,95	86,25	87,23	85,25	86,25	
1.2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1.2.13.1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	n/a	80	90	100	80	100	Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
1.2.13.2	Jumlah Atlet yang berprestasi tingkat Nasional	atlet	14	20	20	20	13	20	
1.2.14	STATISTIK								
1.2.14.1	Presentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas	Persen	45,5	70	85	95	67,8	100	Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target		Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.15	PERSANDIAN								
1.2.15.1	Cakupan Pengamanan Informasi Daerah	Persen	n/a	33,33	50	66,67	27,59 (8 OPD)	207,14 (29 OPD)	Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik
1.2.16	KEBUDAYAAN								
	Cakupan Perlindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan, dan Pembinaan Kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
1.2.17	PERPUSTAKAAN								
1.2.17.1	Peningkatan Jumlah Pengunjung perpustakaan	Orang	70235	73511	75716	77.988	73671	12304	Dinas arsip dan perpustakaan
1.2.17.2	Cakupan Lokasi yang terlayani melalui pusling	Persen	22,22	31	48	64	31	82,27	Dinas arsip dan perpustakaan
1.2.17.3	Tingkat kepuasan pengunjung	Persen	74,4	76	80	84	88,05	0,34	Dinas arsip dan perpustakaan
1.2.18	KEARSIPAN								
1.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar	Persen	3,64	21,82	40		21,82	40	Dinas arsip dan perpustakaan
2	URUSAN PILIHAN								
2,1	KELAUTAAN DAN PERIKANAN								
2.1.1	laju pertumbuhan Subsektor Perikanan	Persen	3,15	4	4,6	58,18	n/a	n/a	Dinas perikanan dan peternakan
2,2	PARIWISATA								
2.2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	498472	598166	717800	861.360	81494	717800	Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target		Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.2	Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional	Persen	44	63	75	100	63	100	Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
2,3	PERTANIAN								
2.3.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian :								Dinas pertanian dan ketahanan pangan
	Tanaman Pangan	Persen	10,04	10,14	10,24	10,34	19,14	n/a	
	Tanaman Hortikultura	Persen	3,2	4	4,7	5,40	4	n/a	
	Perkebunan	Persen	4,12	4,2	4,8	5,50	18,79	n/a	
2.3.2	laju pertumbuhan Subsektor Peternakan	persen	3,68	4,3	4,9	5,50	n/a	n/a	Dinas perikanan dan peternakan
2,4	KEHUTANAN								
2.4.1	Prosentase Pengelolaan Kawasan Konservasi	Persen	60	63	64	66	#N/A	#N/A	Dinas lingkungan hidup dan kehutanan
2.4.2	Nilai Pengelolaan Hutan Kota	Nilai	83	83	83	83	#N/A	#N/A	
2,5	PERDAGANGAN								
2.5.1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	4,59	4,89	5,19	5,49	4,89	n/a	Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan
2,6	PERINDUSTRIAN								
2.6.1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	Persen	5,29	5,32	5,35	5,38	5,32	n/a	Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan
2,7	TRANMIGRASI								
2.7.1	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK	51	56	61	66	6	56	Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi
3	URUSAN PENUNJANG DAN PENDUKUNG								



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target		Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3,1	INSPEKTORAT								
3.1.1	Persentase Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	20	80	80	90	80	80	Inspektorat
3.1.2	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik"	Persen	36	80	80	90	80	80	Inspektorat
3.1.3	Tingkat Kapabilitas APIP/ IACM	Kategori	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	level 3	Inspektorat
3.1.4	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Persen	n/a	20	100	100	20	100	Inspektorat
3.1.5	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi	Persen	75	80	90	90	82	85	Inspektorat
3.1.6	Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD	Persen	8,79	8	7	6	8	7	Inspektorat
3,2	PERENCANAAN								
3.2.1	Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD	Persen	85	100	100	100	100	100	Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
3.2.2	Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	Persen	85	100	100	100	100	100	Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
3.2.3	Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD	Persen	85	100	100	100	100	100	Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
3.2.4	Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik"	Persen	85	100	100	100	100	100	Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target		Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.	KEUANGAN								
3.3.1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan pengelolaan keuangan dan aset
3.3.2	APBD Tepat Waktu	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
3.3.3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	16,47	17,03	17,77	18,99	#N/A	#N/A	Badan pengelolaan pendapatan
3.3.4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	Poin	77,34	85	87	90	#N/A	#N/A	
3,4	KEPEGAWAIAN. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
3.4.1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	59	65	70	75,00	59,45	65,03	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
3.4.2	Indeks Sistem Merit ASN	Poin	48,9	60	66,25	72,50	60,88	74,47	
3,5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
3.5.1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	Persen	80	100	100	100	100	100	Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
3,6	SEKRETARIAT DAERAH								
3.6.1	Persentase Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100	100	#N/A	#N/A	Sekretariat Daerah
3.6.2	Persentase Manajemen Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100	100	#N/A	#N/A	Sekretariat Daerah
3.6.3	Persentase Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100	100	#N/A	#N/A	Sekretariat Daerah
3.6.4	Persentase Perangkat Daerah bidang pembangunan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100	100	#N/A	#N/A	Sekretariat Daerah

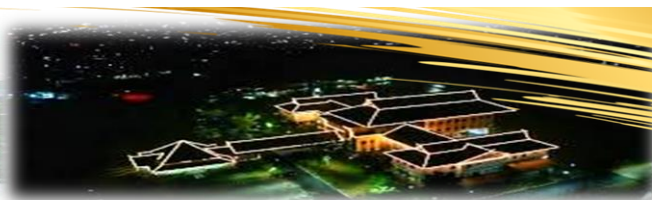


No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target		Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6.5	Persentase Perangkat Daerah Bidang Administrasi Umum Yang Capaian Target Kinerja Tahunannya Berkategori "Baik"	Persen	n/a	100	100	100	#N/A	#N/A	Sekretariat Daerah
3.6.6	Nilai LPPD Kabupaten	Angka	3,092	3,15	3,3	3,45	3,15	n/a	Sekretariat Daerah
3.6.7	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56,06	65	70	75,00	22,38	n/a	Sekretariat Daerah
3.6.8	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	B	BB	A	B	n/a	Sekretariat Daerah
3.6.9	Cakupan Layanan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persen	100	100	100	100	#N/A	#N/A	Sekretariat Daerah
3.6.10	Persentase Dokumen Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindak Lanjuti Kedalam Perjanjian Kerjasama	Persen	46,67	100	100	100	#N/A	#N/A	Sekretariat Daerah
3.6.11	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan triwulannya berkategori "baik"	Persen	60	100	100	100	#N/A	#N/A	Sekretariat Daerah
3.6.12	Tingkat Kematangan UKPBJ	Kategori	Level 1	Level 3	Level 3	Level 4	#N/A	#N/A	Sekretariat Daerah
3.6.13	Cakupan Fasilitasi dan Dukungan Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah	Persen	100	100	100	100	#N/A	#N/A	Sekretariat Daerah
3.6.14	Tingkat Pengetahuan masyarakat terhadap Program Sumedang Simpati	Persen	30	65	70	75	#N/A	#N/A	Sekretariat Daerah
3.6.15	Cakupan Tertib Administrasi Keuangan	Persen	90	100	100	100	#N/A	#N/A	Sekretariat Daerah
3.6.16	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	80	100	100	100	#N/A	#N/A	Sekretariat Daerah



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target		Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3,7	SEKRETARIAT DPRD								
3.8.1	Persentase Fasilitasi Dukungan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	93,4	100	100	100	92,75	93,68	Sekretariat DPRD
4	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
4,1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
4.1.1	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	72,2	72,5	73	100	0	0	Kantor kesatuan bangsa dan politik
4.1.2	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Persen	100	100	100	80,65	100	100	Kantor kesatuan bangsa dan politik
4.1.3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	80,60	80,65	80,65	100	83,5	79	Kantor kesatuan bangsa dan politik
4.1.4	Persentase Ormas yang dibina kategori Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	Kantor kesatuan bangsa dan politik

Sumber Hasil Analisis Bapppeda, 2021



e. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja penyelenggaraan pada pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.19
Indikator Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,53	73,11	74,83
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,76	7,36	5,76
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,04	6,15	5,68
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,48	7,29	7,88
5	Indeks Gini	Poin	0,42	0,37	0,35



Tabel 1.20
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sumedang
Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Kodisi Awal (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1	Angka harapan hidup	Tahun	72,07	72,63	73,00
2	Rata - rata lama sekolah	Tahun	8,10	8,67	9,07
3	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,00	13,66	14,11
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,76	7,36	5,76
5	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,4	95,81	96,75
6	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	68,7	70,3	71,37
7	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	72,2	73,5	74,5
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,48	7,29	7,88
9	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	62,8	74,8	82,8
10	Rasio jaringan irigasi	Persen	60	66	70
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,68	59,47	60,11
12	Indeks Resiko Bencana	Poin	162	145	135
13	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
14	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	A	A
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56,05	75	85
16	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	80,74	86	90
17	Pengeluaran per kapita	Rp (juta)	9,67	10,70	11,35
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,04	6,15	5,68
19	Jumlah UMKM	UMKM	15,467	18,467	20,467



Tabel 1.21
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Sumedang Tahun 2021

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,53	73,11	74,83
1.2	Rata – rata lama sekolah	Tahun	8,10	8,67	9,07
1.3	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,00	13,66	14,11
1.4	Angka harapan hidup	Tahun	72,07	72,63	73,00
1.5	Pengeluaran per kapita	Rp (juta)	9,67	10,70	11,35
1.6	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,76	7,36	5,76
1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,04	6,15	5,68
1.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,48	7,29	7,88
1.9	Indeks Gini	Poin	0,42	0,37	0,35
1.10	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,40	95,81	96,75
1.11	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	68,70	70,30	71,37
1.12	Nilai tukar petani (NTP)	Poin	108,39	110,50	111,50
2	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	URUSAN WAJIB				
1.1	URUSAN WAJIN PELAYANAN DASAR				



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.1.1	PENDIDIKAN				
1.1.1.1	Angka partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	106,75	107,03	107,23
1.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	103,42	103,82	104,02
1.1.1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	105,23	105,55	105,76
1.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	102,78	103,40	103,81
1.1.1.5	Persentase Guru yang Bersertifikasi	Persen	65,03	82,52	100,00
1.1.1.6	Sekolah pendidikan Dasar kondisi bangunan baik	Persen	13,45	37,49	53,48
1.1.1.7	APK PAUD	Persen	88,44	89,71	89,89
1.1.1.8	Persentase PAUD yang terakreditasi	Persen	31,08	96,51	100,00
1.1.1.9	Angka partisipasi kasar kesetaraan	Persen	1,35	2,1	2,7
1.1.1.10	Persentase siswa Bersertifikat Diniyah	Persen	n/a	100	100
1.1.2	KESEHATAN				
1.1.2.1	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	16	8	6
1.1.2.2	Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	155	94	50
1.1.2.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Poin	78,73	90	92
1.1.2.4	Persentase Balita Stunting	Persen	32,2	23	17
1.1.2.5	Prevalensi HIV/AIDS	Persen	<0,04	<0,04	<0,04
1.1.2.6	Angka Kesakitan Penyakit Menular	Angka	113/ 100.000	107/ 100.000	100/ 100.000



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.1.2.7	Universal Health Coverage	Persen	73,17	98	100
1.1.2.8	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,12	0,40	0,60
1.1.2.9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai kewenangan Kelas B	Persen	98	100	100
1.1.2.10	IKM Rumah Sakit	poin	83,70	92	95
1.1.2.11	Persentase Pencapaian Indikator Mutu Pelayanan di Rumah Sakit	Persen	88,25	92	95
1.1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.1.3.1	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	62,80	74,80	82,80
1.1.3.2	Rasio jaringan irigasi	Persen	60	66	70
1.1.3.3	Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang	Persen	100	100	100
1.1.3.4	Usaha Jasa Konstruksi yang terstandarisasi	Persen	0	60	100
1.1.3.5	Persentase Bangunan Pemerintahan yang tertata	Persen	20	58,75	75
1.1.3.6	Persentase penanganan sampah	persen	n/a	70	60
1.1.3.7	Persentase pengurangan sampah	persen	n/a	30	40
1.1.3.8	Persentase RTH Terkelola	Persen	11,04	11,11	11,17
1.1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.1.4.1	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	80	82,00	83,33
1.1.4.2	Persentase lingkungan Pemukiman kumuh	Persen	0,31	0,15	0,06
1.1.4.3	Persentase Rumah Tangga berakses air minum	Persen	79,02	85	90
1.1.4.4	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	55	70	80
1.1.5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.1.5.1	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (Orang Setiap RT)	Persen	60,55	75	90
1.1.5.2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	100
1.1.5.3	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani	Persen	100	100	100
1.1.5.4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	32,04	80	80
1.1.5.5	Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	87,50	90	90
1.1.5.6	Indeks Resiko Bencana	Poin	162	145	135
1.1.6	SOSIAL				
1.1.6.1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	10,05	7,65	6,05
1.2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
1.2.1	TENAGA KERJA				
1.2.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,04	6,15	5,68



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.2.1.2	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100	100	100
1.2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1.2.2.1	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	100	100
1.2.2.2	Kabupaten Layak Anak	Skor	501	701	801
1.2.2.3	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi keluarganya	Persen	0,70	3,70	5,70
1.2.3	PANGAN				
1.2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	85	89,60	92,50
1.2.4	PERTANAHAN				
1.2.4.1	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	Persen	100	100	100
1.2.4.2	Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	Persen	100	100	100
1.2.5	LINGKUNGAN HIDUP				
1.2.5.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	47,89	48,49	48,89
1.2.5.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	80,29	80,89	81,29
1.2.5.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	50,57	51,63	52,63
1.2.7	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
1.2.7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Poin	76	85	90
1.2.7.2	Persentase Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Wajib KTP	Persen	89	98	98
1.2.7.3	Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran	Persen	81	93	93
1.2.7.4	Persentase Data Ganda dan Anomali	Persen	17	3	3



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.2.8	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1.2.8.1	Persentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang	Persen	56,30	100	100
1.2.8.2	Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang	Persen	24,80	100	100
1.2.8.3	Persentase Penerapan Siskudes Kategori Optimal	Persen	32,20	100	100
1.2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1.2.8.1	TFR	Angka	2,09	2,03	2
1.2.8.2	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	4,12	2,88	2,06
1.2.8.3	Persentase Keluarga Sejahtera 1	Persen	67,03	40,61	23
1.2.9	PERHUBUNGAN				
1.2.9.1	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	25,31	51,83	77,27
1.2.9.2	Cakupan Trayek Angkutan Umum	Persen	58,45	62,64	65,43
1.2.9.3	Peningkatan Penumpang Angkutan Umum	orang/hari	10.044	10.764	11.244
1.2.9.4	Persentase Kendaraan Laik Jalan	Persen	83,40	93,30	100
1.2.9.5	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	Jumlah Pelanggaran	1.787	984	62
1.2.9.6	Cakupan Satuan Ruas Parkir (SRP)	Persen	50	80	100
1.2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
1.2.10.1	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi	Persen	n/a	100	100
1.2.10.2	Nilai SPBE	Poin	2,46	3,60	4,20
1.2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
1.2.11.1	Cakupan Koperasi Aktif	persen	72,93	81	85



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.2.11.2	Jumlah UMKM	UMKM	15,467	18,467	20,467
1.2.12	PENANAMAN MODAL				
1.2.12.1	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	(Rp)	1.106.170.000.000	1.606.158.840.000	2.505.607.790.400
1.2.12.2	Indek Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan	Poin	84,11	87,23	90
1.2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1.2.13.1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	n/a	100	100
1.2.13.2	Jumlah Atlet yang berprestasi tingkat Nasional	atlet	14	20	20
1.2.14	STATISTIK				
1.2.14.1	Persentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas	Persen	45.5	95	100
1.2.15	PERSANDIAN				
1.2.15.1	Cakupan Pengamanan Informasi Daerah	Persen	n/a	66.67	100.00
1.2.16	KEBUDAYAAN				
	Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	Persen	100	100	100
1.2.17	PERPUSTAKAAN				
1.2.17.1	Peningkatan Jumlah Pengunjung perpustakaan	Orang	70.235	77.988	82.737
1.2.17.2	Cakupan pelayanan Perpustakaan Keliling	Persen	22,22	64	100
1.2.17.3	Tingkat kepuasan pengunjung	Persen	74,4	84	90
1.2.18	KEARSIPAN				
1.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar	Persen	3,64	58,18	100
2	URUSAN PILIHAN				
2.1	KELAUTAAN DAN PERIKANAN				
2.1.1	laju pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	Persen	3,15	5,20	6,40



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
2.2	PARIWISATA				
2.2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	498.472	861.360	4.451.316
2.2.2	Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional	Persen	44	100	100
2.3	PERTANIAN				
2.3.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian :				
	Tanaman Pangan	Persen	10,04	10,34	10,55
	Tanaman Hortikultura	Persen	3,20	5,40	6,80
	Perkebunan	Persen	4,12	5,50	6,90
2.3.2	laju pertumbuhan Sub Sektor Peternakan	persen	3,68	5,50	6,70
2.4	KEHUTANAN				
2.4.1	Prosentase Pengelolaan Kawan Konservasi	Persen	60	66	71
2.4.2	Nilai Pengelolaan Hutan Kota	Nilai	83	83	83
2.5	PERDAGANGAN				
2.5.1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	persen	4,59	5,49	6,09
2.6	PERINDUSTRIAN				
2.6.1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	persen	5,29	5,38	5,44
2.7	TRANMIGRASI				
2.7.1	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK	51	66	76
3	URUSAN PENUNJANG DAN PENDUKUNG				
3.1	INSPEKTORAT				
3.1.1	Persentase Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	20	90	100
3.1.2	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik"	Persen	36	90	100
3.1.3	Tingkat Kapabilitas APIP/ IACM	Kategori	Level 3	Level 4	Level 4



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
3.1.4	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Persen	n/a	100	100
3.1.5	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi	Persen	75	90	100
3.1.6	Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD	Persen	8,79	6	4
3.2	PERENCANAAN				
3.2.1	Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD	Persen	85	100	100
3.2.2	Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD		85	100	100
3.2.3	Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD		85	100	100
3.2.2	Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik"	Persen	96,5	100	100
3.3.	KEUANGAN				
3.3.1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
3.3.2	APBD Tepat Waktu	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.3.3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	16,47	18,99	21,67
3.3.4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	Poin	77,34	90	91
3.4	KEPEGAWAIAN. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
3.4.1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	59,00	75,00	85,00
3.4.2	Indeks Sistem Merit ASN	Poin	48,90	72,50	85,00
3.5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
3.5.1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	Persen	80	100	100
3.6	SEKRETARIAT DAERAH				
3.6.1	Persentase Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
3.6.2	Persentase Manajemen Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100
3.6.3	Persentase Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100
3.6.4	Persentase Perangkat Daerah bidang pembangunan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100
3.6.5	Persentase Perangkat Daerah Bidang Administrasi Umum yang Capaian Target Kinerja Tahunannya Berkategori "Baik"	Persen	n/a	100	100
3.6.6	Nilai LPPD Kabupaten	Angka	3,09	3,45	3,75
3.6.7	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56,06	75,00	85,00
3.6.8	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	A	A
3.6.9	Cakupan Layanan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persen	100	100	100
3.6.10	Persentase Dokumen Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindak Lanjuti Kedalam Perjanjian Kerjasama	Persen	46,67	100	100
3.6.11	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan triwulannya berkategori "baik"	Persen	60	100	100
3.6.12	Tingkat Kematangan UKPBJ	Kategori	Level 1	Level 4	Level 5
3.6.13	Cakupan Fasilitiasi dan Dukungan Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah	Persen	100	100	100
3.6.14	Tingkat Pengetahuan masyarakat terhadap Program Sumedang Simpati	Persen	30	75	85
3.6.15	Cakupan Tertib Administrasi Keuangan	Persen	90	100	100
3.6.16	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	80	100	100



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
3.7	SEKRETARIATA DPRD				
3.8.1	Persentase Fasilitasi Dukungan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	93,40	100	100
4	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
4.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
4.1.1	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	72,2	73,5	74,5
4.1.2	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Persen	100	100	100
4.1.3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	80,60	80,65	80,65
4.1.4	Persentase Ormas yang dibina kategori Aktif	Persen	100	100	100
3	ASPEK DAYA SAING				
3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,68	59,47	60,11
3.2	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	80,74	86	92
3.3	Pertumbuhan PDRB ADHK	persen	6,48	7,29	7,88
3.4	Pertumbuhan PDRB ADHB	persen	10,00	10,81	11,40
3.5	PDRB per Kapita	juta	27,00	30,85	33,58
3.6	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,15	0,11	0,09



Tabel 1.22
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Tingkat Outcome Kabupaten Sumedang Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	URUSAN WAJIB				
1.1.1	PENDIDIKAN				
1.1.1.1	Persentase Siswa Paud Yang Melanjutkan Kejenjang SD/MI	Persen	n/a	100	100
1.1.1.2	Angka Melanjutkan (AM) Dari SD Ke SMP/Mts	Persen	119,01	119,37	119,61
1.1.1.3	Angka Melanjutkan (AM) Dari SMP Ke SMA/SMK/MA	Persen	88,69	89,48	90,00
1.1.1.4	Angka Putus Sekolah (Aps) Sd	Persen	0,09	0,06	0,04
1.1.1.5	Angka Putus Sekolah (Aps) Smp	Persen	0,81	0,78	0,75
1.1.1.6	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar Kondisi Bangunan Baik	Persen	13,45	37,40	53,48
1.1.1.7	Angka Partisipasi Kasar Paket A	Persen	0,01	0,03	0,01
1.1.1.8	Angka Partisipasi Kasar Paket B	Persen	0,71	0,40	0,20
1.1.1.9	Angka Partisipasi Kasar Paket C	Persen	3,13	2,83	2,63
1.1.1.10	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	97,20	99,00	100,00
1.1.1.11	Rata Rata Peningkatan Hasil UN	Persen	46,13	57,20	64,58
1.1.1.12	Cakupan Pelayanan Pendidikan	Persen	85,47	88,03	90,00
1.1.1.13	Persentase Siswa Yang Berpartisipasi Aktif Dalam Pendidikan Diniyah	Persen	n/a	100	100



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.1.2	KESEHATAN				
1.1.2.1	Persentase Ketersediaan Farmasi, Reagent Dan Perbekalan Kesehatan	Persen	100	100	100
1.1.2.2	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan	Persen	60	90	100
1.1.2.3	Persentase PPK BLUD Memiliki IKM Kategori Baik	Persen	100	100	100
1.1.2.4	Persentase Capaian SDM Bidang Kesehatan	Persen	83	100	100
1.1.2.5	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	100	100	100
1.1.2.6	Persentase Lingkungan Bersih Sehat	Persen	72	90	100
1.1.2.7	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Sesuai Standar	Persen	100	100	100
1.1.2.8	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Sesuai Standar	Persen	100	100	100
1.1.2.9	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persen	100	100	100
1.1.2.10	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	Persen	100	100	100
1.1.2.11	Persentase Sarana Kesehatan Yang Terakreditasi	Persen	77,78	100	100
1.1.2.12	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Tersertifikasi	Persen	48	71	85



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.1.2.13	Persentase Anemia Pada Ibu Hamil	Persen	8,07	6,87	6,07
1.1.2.14	Persentase BBLR	Persen	3,09	1,17	0,11
1.1.2.15	Persentase Balita Gizi Lebih	Persen	1,01	0,63	0,31
1.1.2.16	Persentase Balita Kurus	Persen	2,11	0,81	0,61
1.1.2.17	Persentase Lansia Yang Mendapat Screening Kesehatan	Persen	54,2	100	100
1.1.2.18	Persentase Kepesertaan JKN Seluruh Penduduk Sumedang	Persen	73,13	97	100
1.1.2.19	Persentase Pelayanan PPK BLUD Yang Sesuai Standar	Persen	100	100	100
1.1.2.20	Persentase Pengadaan Kelengkapan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Persen	98	100	100
1.1.2.21	Presentase Pelayanan Indikator Mutu Bidang Pelayanan Medis	Persen	86,21	92	95
1.1.2.22	Presentase Pelayanan Indikator Mutu Bidang Perawatan	Persen	88,64	92	95
1.1.2.23	Presentase Pelayanan Indikator Mutu Bidang Pelayanan Penunjang Medis	Persen	87,96	92	95
1.1.2.24	Presentase Pelayanan Indikator Mutu Bagian Program Dan Anggaran	Persen	89,08	92	95
1.1.2.25	Presentase Pelayanan Indikator Mutu Bagian Keuangan	Persen	87,64	92	95
1.1.2.26	Presentase Pelayanan Indikator Mutu Bagian Umum,Aset Dan Kepegawaian	Persen	90	93	95



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.1.3	PEKERJAAN UMUM				
1.1.3.1	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten/Kota Baik Dan Sedang	Persen	62,80	74,80	82,80
1.1.3.2	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	42	46,20	49,00
1.1.3.3	Persentase Pembangunan Turap Di Wilayah Sungai Rawan Longsor	Persen	18	19,80	21,00
1.1.3.4	Persentase Usaha Jasa Konstruksi Yang Terverifikasi	Persen	0	60	100
1.1.3.5	Persentase Peruntukan Lahan Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	100	100	100
1.1.3.6	Persentase Sarana Air Minum Yang Terbangun	Persen	70	85	90
1.1.3.7	Persentase Bangunan Dan Lingkungan Yang Tertata	Persen	20	58,75	75,00
1.1.3.8	Persentase Bangunan Yang Tsertifikasi Layak Fungsi	Persen	n/a	19,54	33,04
1.1.3.9	Timbulan Sampah Yang Ditangani	Persen	n/a	70,00	60,00
1.1.3.10	Indek Kepuasan Masyarakat;	Persen	71,31	79,00	81,00
1.1.3.11	Persentase Cakupan Area Pelayanan	Persen	5,38	5,87	6,33
1.1.3.12	Persentase Operasionalisasi TPA/TPST/SPA Di Kabupaten/Kota	Persen	68,53	69,67	70,67
1.1.3.13	Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R Dan Sektor Informal	Persen	19	30	40
1.1.3.14	Persentase Luas RTH Terkelola	Persen	11,04	11,11	11,17



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.1.4.1	Persentase PSU Di Lingkungan Perumahan/Permukiman Tradisional	Persen	50	57,83	63,05
1.1.4.2	Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	80	80,48	80,87
1.1.4.3	Persentase PSU Di Lingkungan Kompleks Perumahan/Permukiman (Pengembang)	Persen	0	7,50	13,50
1.1.4.4	Persentase Sanitasi Yang Terbangun	Persen	55	75	85
1.1.5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.1.5.1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	100
1.1.5.2	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT)	Persen	60,55	75	90
1.1.5.3	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Yang Tertangani	Persen	100	100	100
1.1.5.4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	32,04	80	80



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.1.5.5	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Timerate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (Wmk)	Persen	87,50	90	90
1.1.5.6	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana	Desa/kelurahan	277	277	277
1.1.5.7	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Desa/Kelurahan	0	15	25
1.1.5.8	Persentase Kecepatan Respons Bencana Kurang Dari 24 Jam	Persen	100	100	100
1.1.5.9	Persentase Korban Bencana Yang Diberikan Bantuan	Persen	100	100	100
1.1.5.10	Persentase Pemulihan Pasca Bencana Yang Berhasil Direalisasikan	Persen	100	100	100
1.1.6	SOSIAL				
1.1.6.1	Persentase PMKS Yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Sejenisnya	Persen	1,71	5,18	7,49
1.1.6.2	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	Persen	8,53	35,36	54,28
1.1.6.3	Persentase Tuna Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	2,77	29,79	51,60
1.1.6.4	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	5,73	33,21	53,05
1.1.6.5	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	0,68	30,47	50,34



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.1.6.6	Persentase PMKS Yang Direhabilitasi	Persen	n/a	30	50
1.1.6.7	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Aktif	Persen	50,00	58,33	58,33
1.1.6.8	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	100
1.1.6.9	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Menerima Jaminan Sosial	Persen	52,14	53,24	53,24
1.1.6.10	Persentase Pemeliharaan TMP Daerah Dan Nasional	Persen	100	100	100
1.2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
1.2.1	TENAGA KERJA				
1.2.1.1	Cakupan Tenaga Kerja Yang Bersertifikat	Persen	60	100	100
1.2.1.2	Cakupan Tenaga Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Persen	20	20	20
1.2.1.3	Persentase Kasus Yang Diselesaikan	Persen	100	100	100
1.2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1.2.2.1	Persentase OPD Responsif Gender	Persen	9,68	61,29	100
1.2.2.2	Jumlah Kebijakan Pengarustamaan Gender Yang Dihasilkan	Perda/ Perbup	1	5	7
1.2.2.3	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan Dan Anak Yang Ditangani	Persen	100	100	100



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.2.2.4	Persentase Kecamatan Yang Telah Membentuk Forum Anak Dan Sekolah Ramah Anak	Persen	3,85	42,31	73,08
1.2.2.5	Persentase Organisasi Wanita Yang Aktif	Persen	9,52	54,76	100
1.2.2.6	Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga	Persen	12,84	16,19	18,42
1.2.3	PANGAN				
1.2.3.1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	100	100	100
1.2.3.2	Persentase Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita	Persen	91,50	94,50	95,50
1.2.3.3	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Dan Pangan Olahan	Persen	100	100	100
1.2.4	PERTANAHAN				
1.2.4.1	Persentase (Jumlah Bidang) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Difasilitasi	Persen	100	100	100
1.2.4.2	Persentase Sengketa Pertanahan Yang Difasilitasi	Persen	100	100	100
1.2.5	LINGKUNGAN HIDUP				
1.2.5.1	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Pemda Kabupaten	Persen	26,90	43,8	63,8



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.2.5.2	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100
1.2.5.3	Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup;	Persen	15	70	100
1.2.5.4	Persentase Pengujian Kualitas Air Sungai;	Persen	40,74	62,96	81,48
1.2.5.5	Persentase Kecukupan Instrumen Pengelolaan Lingkungan	Persen	98,91	100,00	100,00
1.2.5.6	Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat / Lembaga Yang Berperan Aktif Dalam Pengembangan Kapasitas Lingkungan	Persen	3,16	5,24	8,95
1.2.5.7	Persentase Pemantuan Kualitas Udara	Persen	66,,67	77,78	86,67
1.2.5.8	Persentase Luas Lahan Berfungsi Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati	Persen	29,86	32,33	34,65
1.2.5.9	Persentase Mata Air Yang Dilindungi	Persen	12,12	19,48	27,27
1.2.7	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
1.2.7.1	Persentase Layanan Yang Sesuai Standar Manajemen Mutu	Persen	100	100	100
1.2.7.2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	81	97	97
1.2.7.3	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	74	86	88
1.2.7.4	Jumlah Instansi Yang Menggunakan Data Base Kependudukan	Instansi	0	20	31
1.2.8	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.2.8.1	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan	Persen	30	39	45
1.2.8.2	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan Yang Aktif	Persen	35	100	100
1.2.8.3	Persentase Desa Yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa	Persen	0	90	100
1.2.8.4	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Standar	Persen	32,2	100	100
1.2.8.5	Persentase Desa Yang Pengelolaan Aset Desa Yang Akurat	Persen	0	90	100
1.2.9	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1.2.9.1	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	Persen	74,28	75,07	75,67
1.2.9.2	Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Persen	8,37	9,06	9,04
1.2.9.3	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Aktif	Persen	68,94	72,51	73,11
1.2.9.4	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Aktif	Persen	64,37	65,8	66,32
1.2.9.5	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Aktif	Persen	62,81	63,6	64,1
1.2.9.6	Cakupan Keluarga Pra Sejahtera Dan KS 1 Yang Menjadi Anggota UPPKS	Persen	49,62	53,79	57,51
1.2.9.7	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	19,5	19,70	19,8



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.2.10	PERHUBUNGAN				
1.2.10.1	Persentase Kelengkapan Dokumen Perhubungan	Persen	5,06	10,37	15,45
1.2.10.2	Persentase Ketersediaan Rambu - Rambu Dan Fasilitas Lalu Lintas	Persen	7,59	15,55	23,18
1.2.10.3	Persentase Ketersediaan Penerangan Jalan Umum	Persen	10,12	20,73	30,91
1.2.10.4	Persentase Ketersediaan Terminal/Dermaga	Persen	2,53	5,18	7,73
1.2.10.5	Jumlah Trayek Angkutan Umum	trayek	837	897	937
1.2.10.6	Jumlah Kir Angkutan Umum	unit	9.000	10.071	10.787
1.2.10.7	Peningkatan Penumpang Angkutan Umum/Hari	orang/hari	10.044	10.764	11.244
1.2.10.8	Persentase Satuan Ruas Parkir	Persen	50	80	100
1.2.10.9	Jumlah Operasi Lalu Lintas	Kali	6	17	17
1.2.11	KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
1.2.11.1	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan	Persen	27	100	100
1.2.11.2	Cakupan Media Masa Yang Dikembangkan	Persen	n/a	100	100
1.2.11.3	Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah	Persen	25,45	100	100



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.2.11.4	Cakupan Akses Internet Di Desa/Kelurahan	Persen	93,86	100	100
1.2.12	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
1.2.12.1	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	423	467	485
1.2.12.2	Cakupan Sistem Pendukung Usaha Koperasi Terhadap Koperasi	Koperasi	362	72	362
1.2.12.3	Peningkatan Jumlah Koperasi Besar	Koperasi	8	14	18
1.2.12.4	Jumlah UMKM	UMKM	15.467	18.467	20.467
1.2.12.5	Jumlah UMKM Yang Mendapat Sapras	UMKM	2.566	5.659	8.056
1.2.13	PENANAMAN MODAL				
1.2.13.1	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Persen	10	40	90
1.2.13.2	Persentase Izin Yang Terbit Tepat Waktu	Persen	60	77	85
1.2.13.3	Persentase Kerjasama Penanaman Modal Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
1.2.13.4	Persentase Kepatuhan Investor Terhadap Kebijakan Penanaman Modal Dan PTSP	Persen	50	70	85
1.2.14	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1.2.14.1	Jumlah Organisasi Kepemudaaan Yang Di Bina	Organisasi	n/a	338	338



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.2.14.2	Jumlah Pemuda Yang Dibina	Orang	1.010	2.697	3.000
1.2.14.3	Jumlah Atlet Pemula Yang Dibina	orang	14	20	20
1.2.14.4	Jumlah Penyelenggaraan Olahraga Kemasyarakatan	Kali	6	20	30
1.2.15	STATISTIK				
1.2.15.1	Persentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas	Persen	45.5	95	100
1.2.16	PERSANDIAN				
1.2.16.1	Cakupan Pengamanan Informasi Daerah	Persen	n/a	67	100
1.2.17	KEBUDAYAAN				
1.2.17.1	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Yang Di Lindungi, Dikembangkan, Dimanfaatkan Dan Dibina	objek	11	11	11
1.2.18	PERPUSTAKAAN				
1.2.18.1	Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	70.235	77.988	82.737
1.2.18.2	Tingkat Kepuasan Pengunjung	Persen	74,4	84	90
1.2.18.3	Cakupan Lokasi Yang Terlayani Melalui Pusling	Persen	22,22	64	100
1.2.19	KEARSIPAN				
1.2.19.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Berstandar Arispnya	Persen	3,64	58,18	100



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
2	URUSAN PILIHAN				
2.2	PARIWISATA				
2.2.1	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dipromosikan	Kali	2	6	8
2.2.2	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	Objek	1	15	25
2.2.3	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan	Sub Sektor	7	16	16
2.3	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
2.3.1	Jumlah Produksi Perikanan				
	1. Ikan Konsumsi	Ton	8.286	9.483	10.675
	2. Ikan Hias	Ekor	612.470	700.915	789.029
	3. Benih Ikan	Ribu Ekor	179.275	205.164	230.955
2.3.2	Jumlah Unit Pengolahan Dan Pemasaran Perikanan Yang Terbina	Unit	45	56	64
2.3.3	Persentase Kelestarian Lingkungan Budidaya Perikanan	Persen	100	100	100
2.4	PERTANIAN				
2.4.1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	740.732	992.381	1.211.722
2.4.2	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	ton	151.333	173.682	196.807
2.4.3	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	6.462	7.445	8.452
2.4.4	Jumlah Penambahan Alat Mesin Pertanian	Unit	5.752	6.652	7.252
2.4.5	Peningkatan Indeks Pertanaman (Ip)	Persen	1,85	2,15	2,35



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
2.4.6	Jumlah Penambahan Panjang Jalan Pertanian	Km	62	107	137
2.4.7	Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian	Kelompok	105	157	206
2.4.8	Jumlah Dokumen Kerjasama Kemitraan Usaha Kelompok Tani	Dokumen	48	63	73
2.4.9	Jumlah Teknologi Pertanian Yang Diadopsi Petani	teknologi/ penyuluh pertanian	3	12	18
2.4.10	Penumbuhan Kelompok Tani Baru	Kelompok	2.835	825	1.375
2.4.11	Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaksana Kegiatan Penyuluhan :	Kelompok	2.242	2.242	2.242
2.4.12	-Kelas Pemula (Skor 0-250)	Kelompok	767	752	739
2.4.13	-Kelas Lanjut (Skor 251-500)	Kelompok	1.405	1.408	1.413
2.4.14	-Kelas Madya (skor 501-750)	Kelompok	68	77	83
2.4.15	-Kelas Utama (skor 751-1000)	Kelompok	2	5	7
2.4.16	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan	Persen	100	100	100
2.4.17	Jumlah populasi ternak:				
	1. Sapi potong	Ekor	29.783	34.378	38.919
	2. Sapi perah	Ekor	4.149	4.789	5.422
	3. Kambing	Ekor	27.957	32.270	36.533
	4. Domba	Ekor	111.324	128.499	145.472
	5. Ayam buras	Ekor	519.506	599.657	678.864
	6. Ayam ras petelur	Ekor	111.883	129.145	146.203
	7. Ayam ras pedaging	Ekor	2.866.495	3.308.746	3.745.788
	8. Itik	Ekor	49.553	57.198	64.753



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
2.4.18	Jumlah Produksi				
	1. Daging	Ton	15.474	17.861	20.221
	2. Telur	Ton	1.639	1.892	2.142
	3. Susu	Ton	12.323	14.224	16.103
2.4.19	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Yang Terbina	Unit	75	124	196
2.4.20	Persentase Jaminan Keamanan Pangan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, BUtuh Dan Halal)	Persen	100	100	100
2.6	URUSAN KEHUTANAN				
2.6.1	Prosentase Pengelolaan KawasanBKonservasi	Persen	60	66	71
2.6.2	Nilai Pengelolaan Hutan Kota	Nilai	83	83	83
2.7	URUSAN PERDAGANGAN				
2.7,1	Cakupan Jenis Pengawasan Perdagangan	jenis	4	4	4
2.7.2	Jumlah UTTP Yang Di Tera	UTTP	28.502	28.502	28.502
2.7,2	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan Yang Dibina	orang	1.503	6.724	8.405
2.7.3	Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima Yang Dibentuk	wilayah	0	3	5
2.7,3	Jumlah Pasar Yang Di Revitalisasi	Pasar	10	10	10
2.8	URUSAN PERINDUSTRIAN				
2.8.1	Peningkatan Jumlah IKM	IKM	1.771	4.013	4.602
2.8.2	Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan Sarana dan Prasarana	Jumlah Kelompok	160	187	205
2.8.3	Peningkatan Jumlah Sentra Industri	Sentra	5	9	12



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
2.9	TRANMIGRASI				
2.9.1	Jumlah Transmigran Yang Telah Dilatih Dan Ditempatkan	KK	51	66	76
2.9.2	Jumlah Transmigran Lokal Yang Terlatih	KK	30	120	180
3	URUSAN PENUNJANG DAN PENDUKUNG				
3.1	INSPEKTORAT				
3.1.1	Persentase Pemenuhan Unsur SPIP	Persen	100	100	100
3.1.2	Persentase SAKIP Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Persen	100	100	100
3.1.3	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Yang Telah Ditindaklanjuti Berdasarkan Aspek Pemeriksaan	Buah	400	360	340
3.1.4	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Berdasarkan Aspek Pemeriksaan	Buah	545	450	400
3.1.5	Persentase Perangkat Daerah Dan Pemerintah Desa Yang Berkonsultasi	Persen	15,63	39,06	54,69
3.1.6	Persentase Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan	Persen	25	50	66,67
3.1.7	Persentase Elemen IACM Yang Terpenuhi	Persen	66,67	100	100
3.1.8	Persentase Penilaian Zona Integritas	Persen	n/a	100	100
3.2	PERENCANAAN				
3.2.1	Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	Persen	85	100	100



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
3.2.2	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Prasarana Dan Pengembangan Wilayah Berkategori "Baik";	Persen	95	100	100
3.2.3	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Ekonomi Dan SDA Berkategori "Baik";	Persen	96,5	100	100
3.2.4	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Berkategori "Baik".	Persen	98	100	100
3.3.	KEUANGAN				
3.3.1	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Persen	90	94	97
3.3.2	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Persen	100	100	100
3.3.3	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran Yang Sesuai Dengan Aturan	Persen	90	93	97
3.3.4	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKOPD Dan LKPD	Persen	80	92	97
3.3.5	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materialitas)	Persen	86	89	91
3.3.6	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak	poin	77,34	90	91
3.3.7	Persentase Potensi Pajak Daerah	Persen	60	85	90
3.3.8	Persentase Rata Rata Wajib Pajak Yang Membayar	Persen	70	90	95
3.3.9	Cakupan Regulasi PDRD Yang Relevan	Persen	80	100	100



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
3.4	KEPEGAWAIAN				
3.4.1	Persentase ASN Yang Memiliki Nilai PPK PNS Minimal Baik	Persen	99,74	100	100
3.4.2	Persentase Penempatan Jabatan Eselon ASN Sesuai Kualifikasi	Persen	56,31	83	100
3.4.3	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin PNS	Persen	0,020	0,014	0,010
3.4.4	Persentase Pemetaan Jabatan Pelaksana Sesuai Kebutuhan	Persen	7,56	63	100
3.4.5	Persentase Pegawai Yang Terlayani Administrasi Kepegawaian	Persen	90,17	97	100
3.4.6	Persentase Ketersediaan Data Pegawai Yang Akurat	Persen	100	100	100
3.5	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
3.5.1	Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persen	17,77	70	100
3.5.2	Persentase ASN Yang Mengikuti Uji Kompetensi	Persen	27,74	71	100
3.6	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
3.6.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	80	100	100
3.6.2	Persentase Perangkat Daerah Yang Menghasilkan Inovasi	Persen	n/a	100	100
3.7	SEKRETARIAT DAERAH				
3.7.1	Persentase Manajemen Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Yang Berkategori "Baik"	Persen	n/a	100	100



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
3.7.2	Persentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	80	100	100
3.7.3	Persentase Mediasi Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persen	60	100	100
3.7.4	Nilai LPPD	Persen	3,09	3,45	3,75
3.7.5	Persentase Tertib Administrasi Kewilayahan	Persen	60	100	100
3.7.6	Persentase Sakip Kecamatan Yang Nilainya "B"	Persen	0	88,46	100
3.7.7	Persentase Data Tanah HGU Yang Terferivikasi Dan Tervalidasi	Persen	n/a	100	100
3.7.8	Nilai Sakip Kabupaten	Kategori	B	A	A
3.7.9	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	56,05	75	85
3.7.10	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Kabupaten Sumedang	Persen	60	80	90
3.7.11	Persentase Pemrosesan Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Harmonis Dan Tidak Tumpang Tindih	Persen	60	100	100
3.7.12	Persentase Cakupan Pengaduan Hukum Yang Ditindak Lanjuti	Persen	100	100	100
3.7.13	Persentase Pemutakhiran Data Pada Website JDIH Secara Berkelanjutan	Persen	70	100	100
3.7.14	Persentase Dokumen Kesepakatan Bersama Yang Ditindak Lanjuti Ke Dalam Perjanjian Kerjasama	Persen	46,67	100	100



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
3.7.15	Persentase Perjanjian Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Kedalam Rencana Aksi Yang Jelas Dan Terukur	Persen	85	100	100
3.7.16	Persentase BUMD Dan Lembaga Keuangan Yang Capaian Target Kinerja Tahunannya "Baik"	Persen	80	100	100
3.7.17	Persentase Perangkat Daerah Bidang SDA, Pertanian, Sarana Ekonomi, Perdagangan Dan UMKM Yang Target Capaian Kinerja Tahunannya Berkategori "Baik"	Persen	80	100	100
3.7.18	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Kesehatan ; Bidang Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; Bidang Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan Dan KB Yang Capaian Target Kinerja Tahunannya Berkategori "Baik"	Persen	80	100	100
3.7.19	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Administrasi Kinerja Pembangunan Triwulanannya Berkategori "Baik"	Persen	80	100	100
3.7.20	Tingkat Kematangan Ukpbj	Kategori	level 1	Level 4	Level 5
3.7.21	Capaian Realisasi Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Jumlah Usulan	Persen	80	100	100
3.7.22	Cakupan Fasilitasi Dan Dukungan Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah	Persen	100	100	100



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
3.7.23	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Dilingkungan Sekretariat Daerah	Persen	60	100	100
3.7.24	Tingkat Penggunaan Digital Office (E- Office) Sekretariat Daerah	Persen	0	100	100
3.7.25	Persentase Koordinasi Dan Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	Persen	100	100	100
3.7.26	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik	Persen	80	90	95
3.7.27	Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Program Sumedang Simpati	Persen	30	85	95
3.7.28	Cakupan Tertib Administrasi Keuangan	Persen	90	100	100
3.7.29	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dikelola Secara Efektif Dan Efisien	Persen	80	100	100
3.7.30	Persentase Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100
3.8	SEKRETARIAT DPRD				
3.8.1	Persentase Cakupan Produk Hukum Yang Ditetapkan	Persen	85	88	90
3.8.2	Persetujuan Apbd Tepat Waktu	Persen	100	100	100
3.8.3	Prosentase Fungsi Pegawai	Persen	100	100	100
3.8.4	Prosentase Aspirasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Bentuk Rekomendasi	Persen	95	95	95



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
3.8.5	Prosentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Persen	100	100	100
3.8.6	Prosentase Aktifitas Kegiatan DPRD Yang Dipublikasikan	Persen	100	100	100
4	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
4.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
4.1.1.1	Persentase Potensi Konflik Yang Tidak Menjadi Konflik Lingkup Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100
4.1.1.2	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik	Orang	1.050	2.700	4.050
4.1.1.3	Persentase Ormas Yang Dibina	Persen	35,42	48,09	50
4.1.1.4	Persentase Potensi Konflik Yang Tidak Menjadi Konflik Lingkup (Sosial Politik, Ekonomi Dan Budaya)	Persen	100	100	100
4.1.1.5	Persentase Potensi Konflik Yang Tidak Menjadi Konflik Lingkup Kewaspadaan Nasional	Persen	100	100	100
4.1.1.6	Jumlah Konflik Sara Dan Keagamaan	Jumlah	0	0	0



1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar pertimbangan penerapan SPM

Esensi penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan memaksimalkan potensi dan kemampuan daerah. Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah otonom untuk menjamin terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal. Satu satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar pelayanan minimal. Meskipun petunjuk pelaksana (Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal) belum terbit, namun Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, dimana salah satu pengaturannya menyangkut kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan indikator-indikator SPM.

Beberapa pertimbangan bagi penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Sumedang, antara lain:

1. Menentukan jumlah anggaran yang berbasis kinerja, karena SPM terdiri dari indikator dan perhitungan anggaran yang jelas;
2. Untuk menentukan alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur;
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pemerintah daerah;



4. Untuk menentukan rasionalisasi kelembagaan pemerintahan daerah;
5. Untuk merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan

b. Dasar penerapan SPM

Beberapa ketentuan yang menjadi dasar penerapan SPM di Kabupaten Sumedang, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalama Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020.

c. Kebijakan Umum Daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai



dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Adapun jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat sesuai kewenangan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan;
4. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. Pelayanan kesehatan balita;
8. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
16. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
19. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
20. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
21. Pelayanan informasi rawan bencana;



22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
26. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
29. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

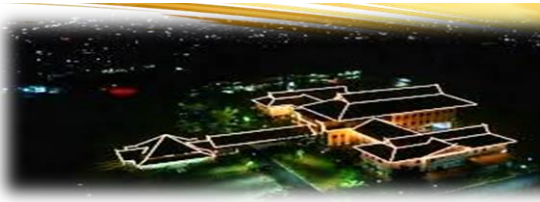
Penyusunan RKPD tahun 2020 menggunakan target dan capaian SPM dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan outcome program. Berikut kebijakan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 yang disandingkan dengan SPM 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Tabel 1.23
Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020
Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Urusan SPM	Kebijakan Kabupaten Sumedang Tahun 2020
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">▪ Perluasan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal• Peningkatan kualitas SDM pendidikan dan sarana pendidikan berakreditasi A• Peningkatan fasilitasi pemuda berprestasi
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan standar kualitas pelayanan kesehatan• Peningkatan pola hidup bersih dan sehat
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sistem angkutan publik secara terpadu• Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif• Peningkatan ketersediaan air bersih• Peningkatan kapasitas infrastruktur sanitasi lingkungan• Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang



No	Urusan SPM	Kebijakan Kabupaten Sumedang Tahun 2020
		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana• Peningkatan infrastruktur rawan banjir
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha• Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
5	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kesiagaan aparatur ketentraman dalam mengamankan wilayah
6	Sosial	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender• Peningkatan daya beli masyarakat• Peningkatan perluasan kesempatan kerja



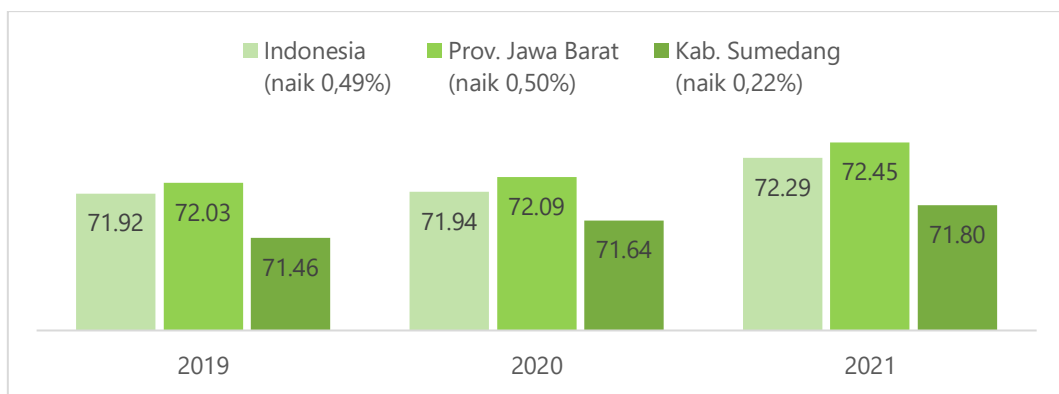
BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

2.1.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia

IPM Sumedang dalam 3 tahun terakhir sudah berada pada kategori Tinggi (>70 poin), dan masih mampu meningkat meskipun dihadapkan pada pandemi Covid-19 di 2020 dan 2021. Komponen IPM yang mengalami peningkatan lebih lambat hanya pada pendidikan, meskipun komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) Sumedang sudah lebih baik dari Jawa Barat.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.a. IPM dan Perubahannya dari 2020 ke 2021

Posisi IPM Sumedang jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat memang relatif lambat, namun secara peringkat masih berada di urutan 12 kabupaten kota Jawa Barat. Bahkan, jika dibandingkan antar kabupaten, karena IPM tinggi didominasi oleh kotamadya, Kab. Sumedang berada di posisi 3 terbaik. Namun demikian, capaian IPM 2021 ini menjadi tantangan bagi Pemkab Sumedang untuk meningkatkan keteringgalan terutama pada aspek pendidikan (RLS dan HLS).



Tabel 2.1.

IPM Kab/Kota di Jawa Barat dan Pertumbuhannya di Tahun 2021

WILAYAH	UHH	%UHH	RLS	%RLS	HLS	%HLS	PPP	%PPP	IPM	%IPM	Rank
INDONESIA	71.57	0.10	8.54	0.06	13.08	0.10	11,156	143	72.29	0.49	
JAWA BARAT	73.23	0.19	8.61	0.06	12.61	0.11	10,934	89	72.45	0.50	
Bogor	71.36	0.19	8.31	0.01	12.49	0.01	10,410	93	70.60	0.28	16
Sukabumi	71.21	0.24	7.10	0.03	12.24	0.01	8,850	27	67.07	0.28	24
Cianjur	70.32	0.19	7.19	0.01	12.00	0.01	8,052	72	65.56	0.31	27
Bandung	73.72	0.19	9.07	0.11	12.70	0.01	10,307	106	72.73	0.47	10
Garut	71.59	0.18	7.53	0.01	12.03	0.12	7,961	85	66.45	0.50	25
Tasikmalaya	69.67	0.20	7.48	0.13	12.54	0.01	7,829	-23	65.90	0.35	26
Ciamis	72.02	0.19	7.90	0.20	14.20	0.14	9,259	-29	70.93	0.62	15
Kuningan	73.78	0.19	7.80	0.23	12.23	0.01	9,409	-50	69.71	0.48	17
Cirebon	72.18	0.19	7.10	0.18	12.27	0.02	10,368	26	69.12	0.54	19
Majalengka	70.46	0.19	7.31	0.04	12.23	0.01	9,591	70	67.81	0.33	22
Sumedang	72.62	0.19	8.52	0.01	12.98	0.01	10,262	45	71.80	0.22	12
Indramayu	71.84	0.21	6.52	0.22	12.26	0.01	9,810	-49	67.64	0.52	23
Subang	72.58	0.23	7.11	0.01	11.71	0.01	10,854	64	69.13	0.26	18
Purwakarta	71.18	0.19	8.10	0.01	12.12	0.01	11,669	55	70.98	0.23	13
Karawang	72.33	0.18	7.78	0.01	12.10	0.01	11,522	207	70.94	0.40	14
Bekasi	73.81	0.13	9.30	0.18	13.10	0.01	11,341	100	74.45	0.51	8
Bandung Barat	72.52	0.18	8.20	0.01	11.88	0.01	8,546	91	68.29	0.31	20
Pangandaran	71.60	0.20	7.85	0.11	12.08	0.01	9,065	-19	68.28	0.32	21
Kota Bogor	73.82	0.21	10.53	0.20	13.42	0.01	11,716	152	76.59	0.63	5
Kota Sukabumi	72.58	0.16	9.81	0.22	13.58	0.11	10,942	-57	74.60	0.53	7
Kota Bandung	74.46	0.18	10.99	0.24	14.21	0.01	16,996	109	81.96	0.55	1
Kota Cirebon	72.44	0.18	10.12	0.21	13.13	0.01	11,810	10	75.25	0.48	6
Kota Bekasi	75.19	0.18	11.31	0.15	14.10	0.10	15,903	127	81.95	0.55	2
Kota Depok	74.62	0.18	11.46	0.18	13.93	0.01	15,420	139	81.37	0.49	3
Kota Cimahi	74.21	0.18	11.08	0.12	13.81	0.01	12,019	-6	78.06	0.30	4
Kota Tasikmalaya	72.34	0.19	9.52	0.19	13.46	0.01	10,213	-50	73.31	0.37	9
Kota Banjar	71.19	0.20	8.77	0.14	13.24	0.01	10,476	-59	71.92	0.31	11

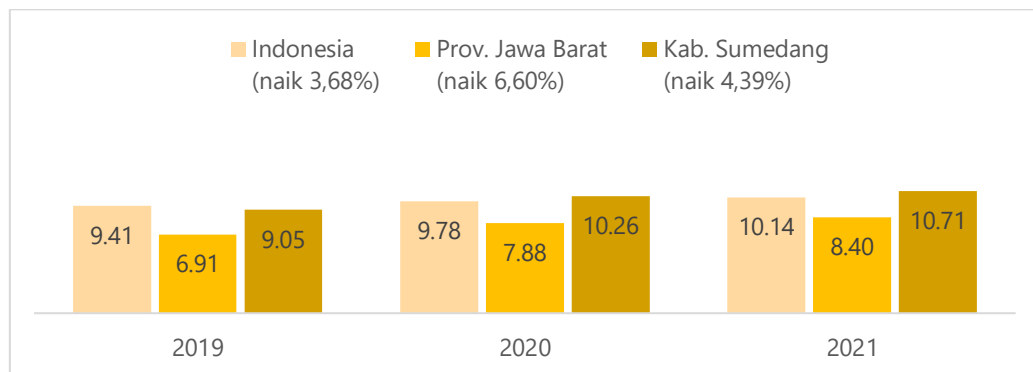
Sumber: BPS (2022)

2.1.2 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan sejak adanya pandemi Covid-19 menunjukkan peningkatan di hampir semua wilayah. Jika dikomparasikan peningkatan kemiskinan di Kab. Sumedang dengan tingkat kemiskinan di level nasional dan regional Jawa Barat dari tahun 2020 ke 2021 maka peningkatan di



Sumedang relatif lebih rendah dibandingkan Jawa Barat namun masih berada di atas peningkatan kemiskinan nasional.

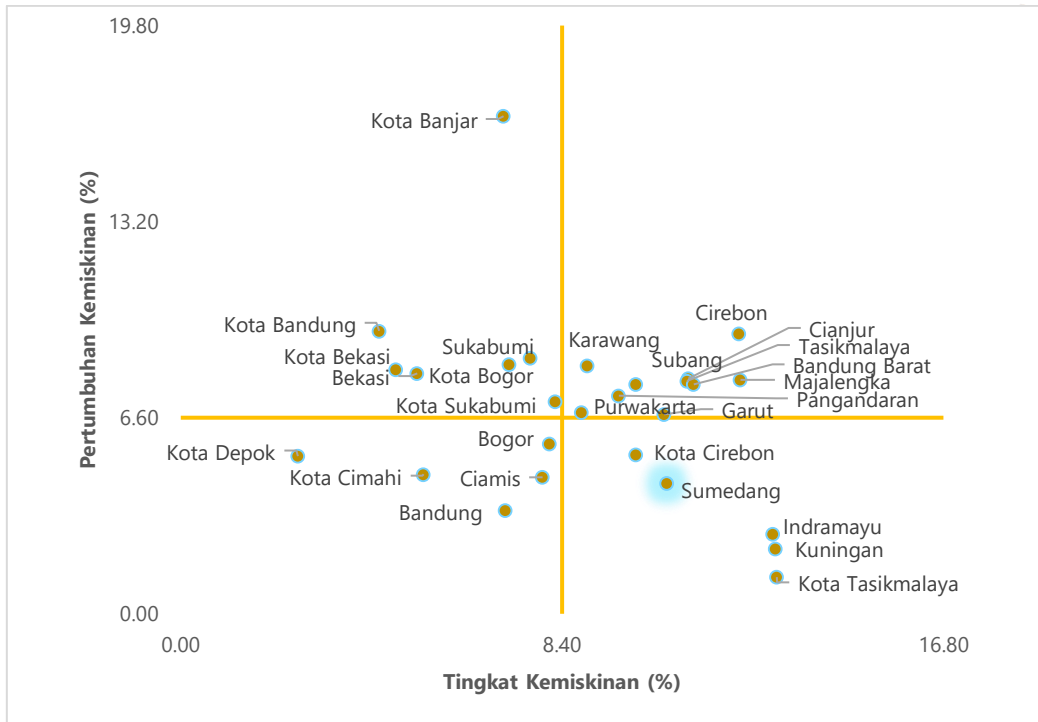


Sumber : BPS, 2021

Gambar 2.b. Tingkat Kemiskinan & Perubahannya 2020 ke 2021 (%)

Untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar wilayah, perlu dihitung persentase perubahan tingkat kemiskinan sehingga dapat menilai progress penurunan/peningkatan kemiskinan secara proporsional. Dengan kata lain, tidak cukup fair hanya membandingkan persentase atau jumlah penduduk miskin di setiap wilayah tanpa dilihat dari pertumbuhannya. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki kondisi awal tingkat kemiskinan yang berbeda-beda.

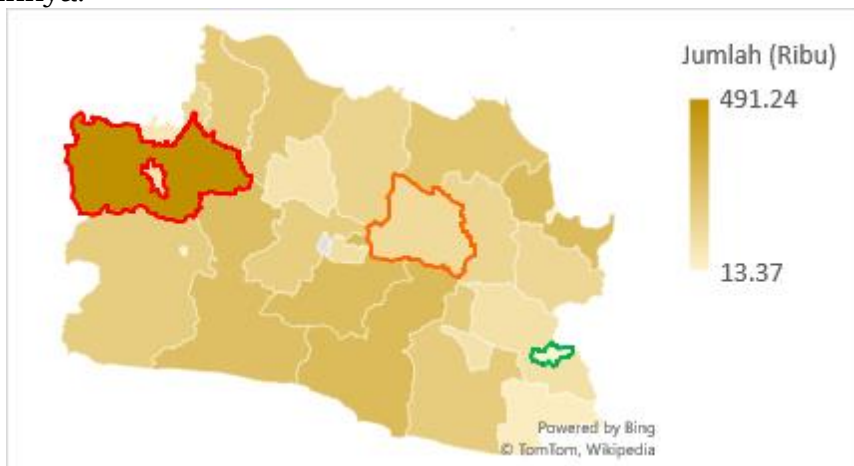
Peningkatan yang dialami Kab. Sumedang memang melebihi rata-rata peningkatan di Jawa Barat, namun dilihat dari pertumbuhan tingkat kemiskinan maka capaian Sumedang (4,4%) masih berada di bawah rata-rata Jawa Barat (6,6%). Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan penduduk miskin di Sumedang relatif lebih rendah dari rata-rata kabupaten kota di Jawa Barat.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

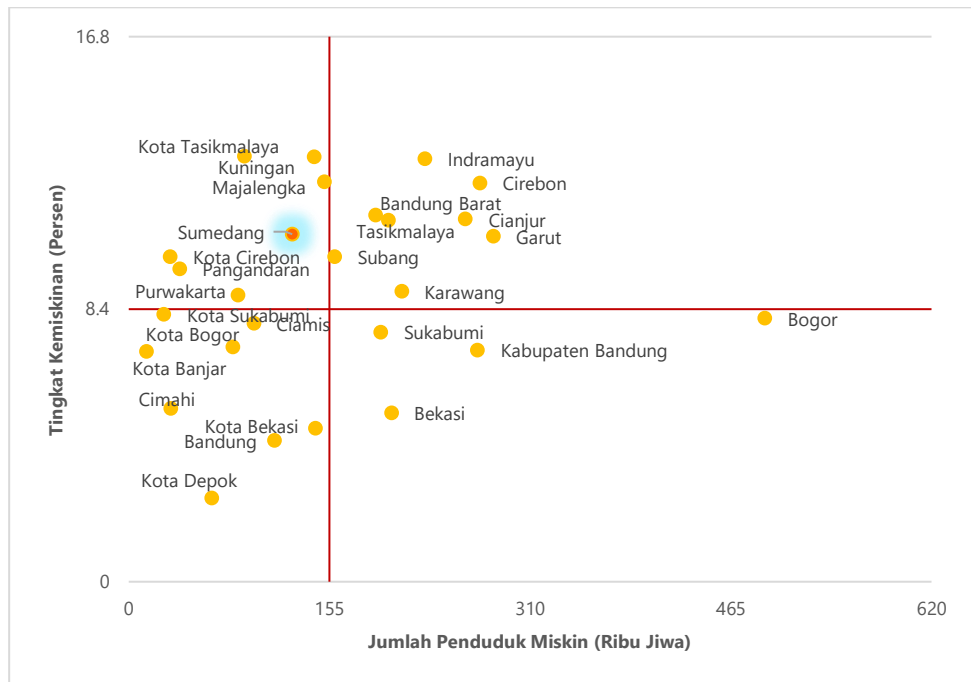
Gambar 2.c. Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Selain pertumbuhan kemiskinan yang lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang juga masih relatif lebih baik dari jumlah penduduk miskin yang relatif lebih rendah, yaitu sekitar 126 ribu jiwa, dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat yang jika dirata-ratakan sekitar 155 ribu jiwa. Jika dikomparasikan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin maka posisi Kab. Sumedang masih berada di kuadran 2 yang lebih baik dari sisi jumlah penduduk miskin namun kurang menguntungkan dari persentase penduduk miskinnya.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

Gambar 2.d. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)

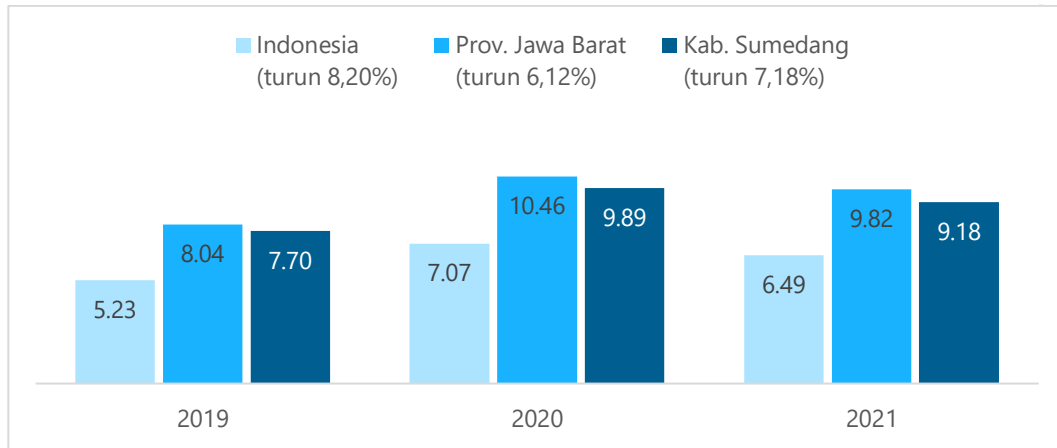


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

Gambar 2.e. Jumlah & Persentase Penduduk Miskin

2.1.3 Ketenagakerjaan

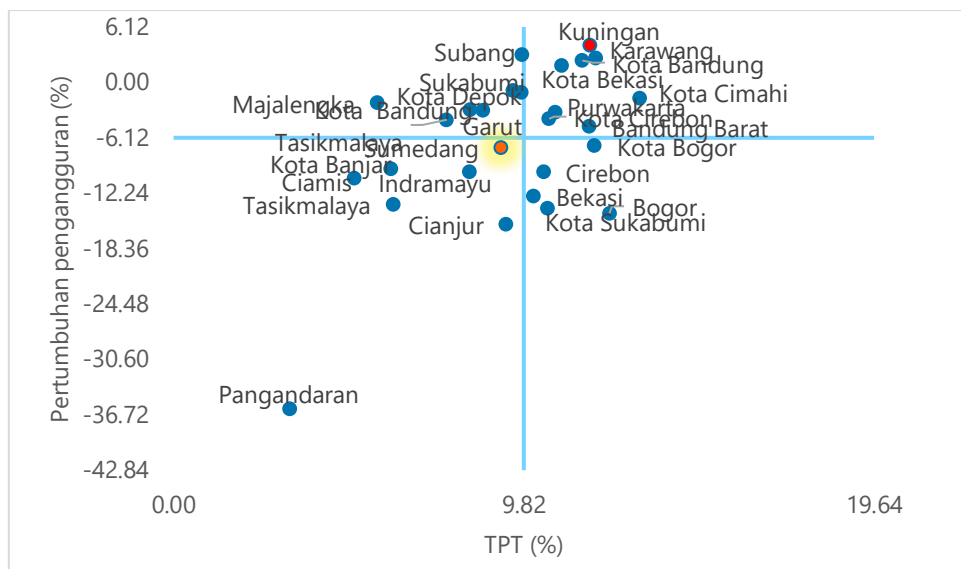
Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 2020 terjadi sebagai dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan kelesuan dunia usaha sehingga terjadi pengurangan jam kerja, merumahkan karyawan hingga PHK. Kondisi yang lebih baik terjadi di 2021 dimana TPT mengalami penurunan, baik di tingkat nasional, Jawa Barat, maupun Kab. Sumedang. Namun, dilihat pertumbuhan TPT Sumedang mampu turun lebih baik dibandingkan Jawa Barat, meski masih lebih rendah dari penurunan di level nasional.



Sumber : BPS, 2021

Gambar 2.f. TPT dan Perubahannya dari 2020 ke 2021

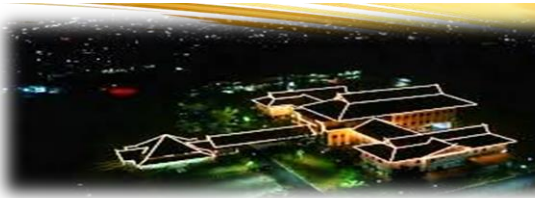
Jika dibandingkan kondisi pengangguran dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, posisi Kab. Sumedang berada di kuadran terbaik karena mampu menurunkan TPT lebih tinggi dari capaian Jawa Barat. Kelebihan lainnya, Kab. Sumedang meskipun memiliki UMK di atas rata-rata Jawa Barat, dan tidak semua kab/kota mengalami kenaikan UMK, namun TPT masih bisa lebih rendah dari Jabar.



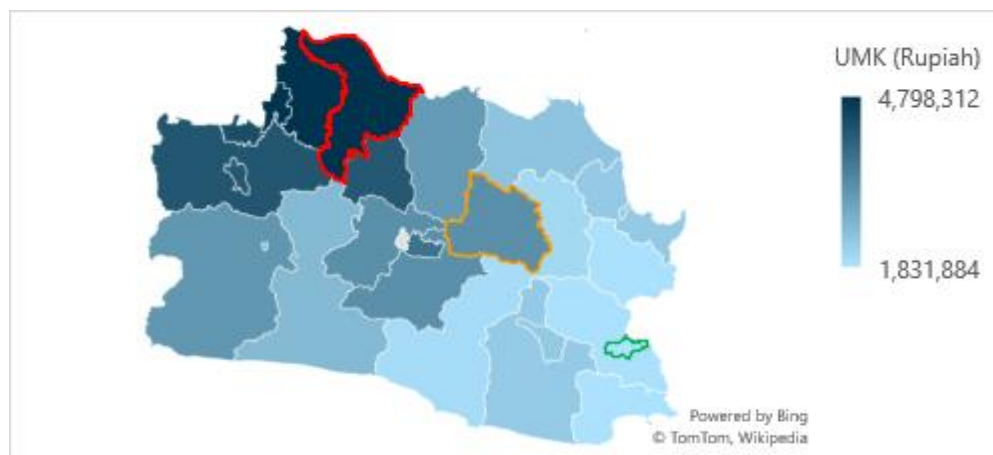
Sumber : BPS, 2021

Gambar 2.g. TPT Tahun 2021 dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Jawa Barat

Di kuadran terbaik, hanya Kab. Sumedang yang memiliki UMK di atas rata-rata Jawa Barat (3,2 juta rupiah) dan mengalami kenaikan UMK juga di atas rata-rata Jawa Barat (95 ribu rupiah). UMK Kab. Sumedang



pada 2021 mencapai Rp. 3.241.929 dengan peningkatan UMK dari 2020 ke 2021 sebesar Rp. 102.000. UMK Kab. Sumedang ini berbeda jauh dengan kabupaten tetangga seperti Majalengka, Garut, dan kabupaten tetangga lainnya, kecuali Kab. Bandung.

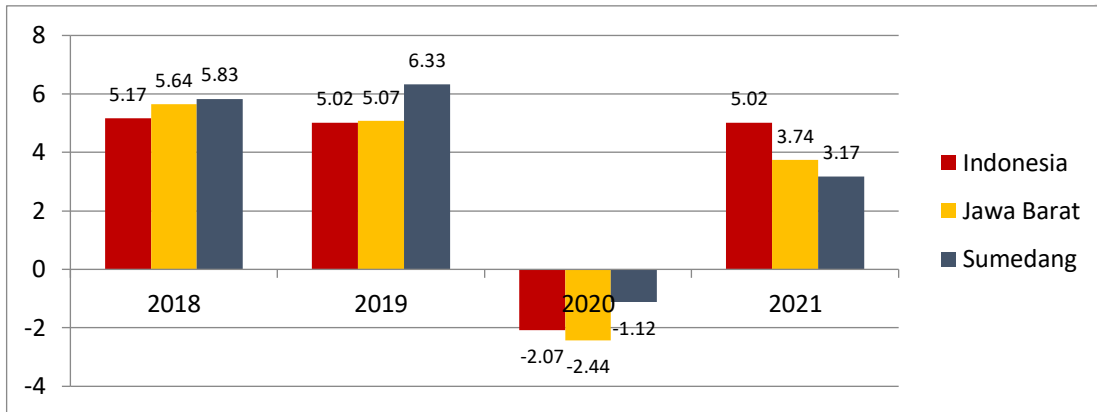


Sumber : BPS, 2021

Gambar 2.h. UMK Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2021

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. Namun, kontraksi yang dialami masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat dan nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang Tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,12%, sementara pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Barat terkontraksi lebih dalam hingga di atas 2 persen. Hal ini disebabkan Kabupaten Sumedang masih memiliki sektor utama yang tidak terkontraksi, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masih mampu tumbuh di atas 2,8 persen di 2020.



Sumber : BPS (2021)

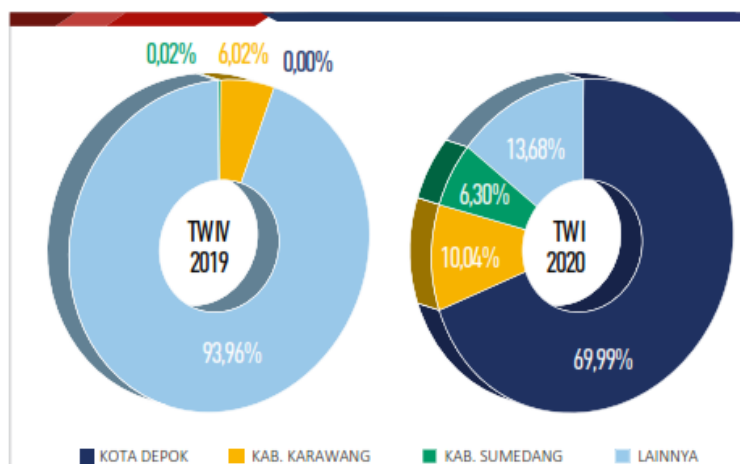
Gambar 2.i. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (%)

Di tingkat Provinsi Jawa Barat, pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi terutama pada Triwulan II-2019 sebesar -5,98%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ini disebabkan oleh melambatnya komponen konsumsi Rumah Tangga menjadi 3,04% (yoy). Menurunnya kontribusi konsumsi Rumah Tangga dipengaruhi oleh penurunan pendapatan masyarakat disebabkan oleh pengurangan jam kerja sebagai kondisi yang paling banyak dialami penduduk usia kerja di masa pandemi hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini merupakan akibat menurunnya kinerja lapangan usaha sektor formal serta terbatasnya aktivitas usaha informal ketika terjadi pembatasan sosial sebagai dampak COVID-19. Meskipun realisasi bantuan sosial dan jaring pengaman sosial dari Pemerintah meningkat sebagai respon untuk mencegah perlambatan ekonomi semakin dalam, namun hal tersebut belum cukup mendorong konsumsi RT untuk tumbuh lebih tinggi pada triwulan II 2020.

Perlambatan perekonomian di Jawa Barat disebabkan pula oleh penurunan realisasi total investasi, terutama disebabkan oleh kontraksi pada penanaman modal asing (PMA). Investor asing mengambil langkah menahan, bahkan menunda investasi ditengah situasi ketidakpastian global pada masa pandemi COVID-19. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat justru tumbuh meningkat sebesar 209,51% (yoy). Meskipun demikian persentase realisasi PMDN di Kabupaten Sumedang pada Triwulan I Tahun 2020 termasuk tiga terbesar



di Jawa Barat yaitu sebesar 6,30%. Pembangunan Tol Cisumdawu memicu tingginya PMDN di Kabupaten Sumedang.



Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat (2020)

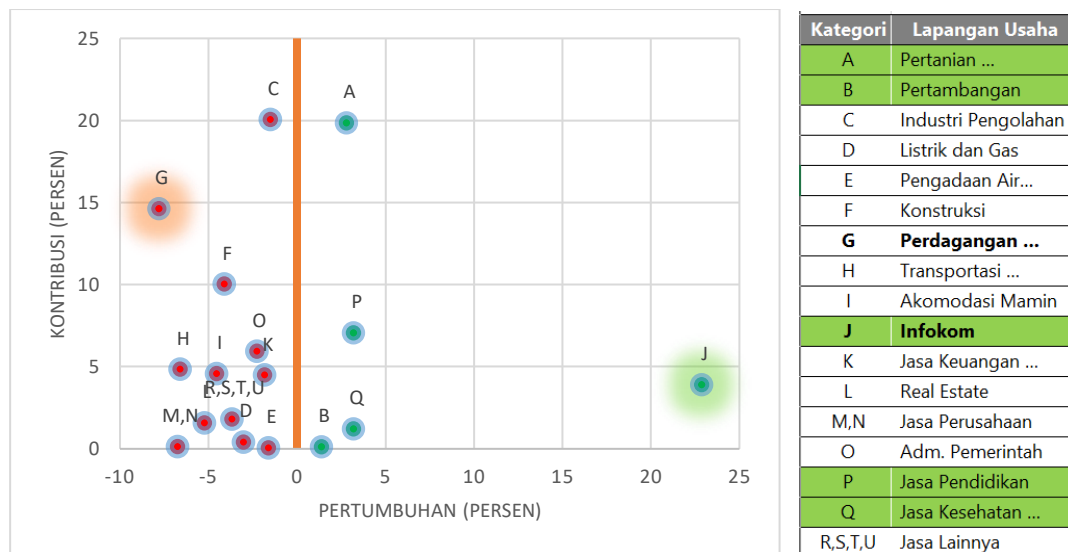
Gambar 2.j. Pangsa Realisasi PMDN TW I Tahun 2020 di Jawa Barat

Dari sisi Lapangan Usaha, penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha akibat dampak pandemi Covid-19 menyebabkan hanya empat kategori lapangan usaha yang masih mampu tumbuh positif, yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi 39,75%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 9,21%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7,64%; dan Jasa Pendidikan 6,86%. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi merupakan sumber pertumbuhan tertinggi yang disebabkan meningkatnya trafik layanan internet dan konten digital akibat kebijakan Work From Home (WFH), Study From Home (SFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sedangkan struktur perekonomian Jawa Barat pada Triwulan II-2020 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 40,10%.

Di Kabupaten Sumedang, dari 17 lapangan usaha, hanya 5 lapangan usaha yang mampu tumbuh positif di 2020. Lapangan usaha lainnya berkontraksi akibat pandemi covid-19 sehingga pertumbuhan ekonomi Kab. Sumedang mengalami kontraksi sebesar -1,12%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam adalah Perdagangan (-7,78%),



sementara lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mampu tumbuh hingga 22,9%.



Sumber: BPS Kab. Sumedang (2021)

Gambar 2.k. Pertumbuhan dan Kontirbusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kab. Sumedang Tahun 2020

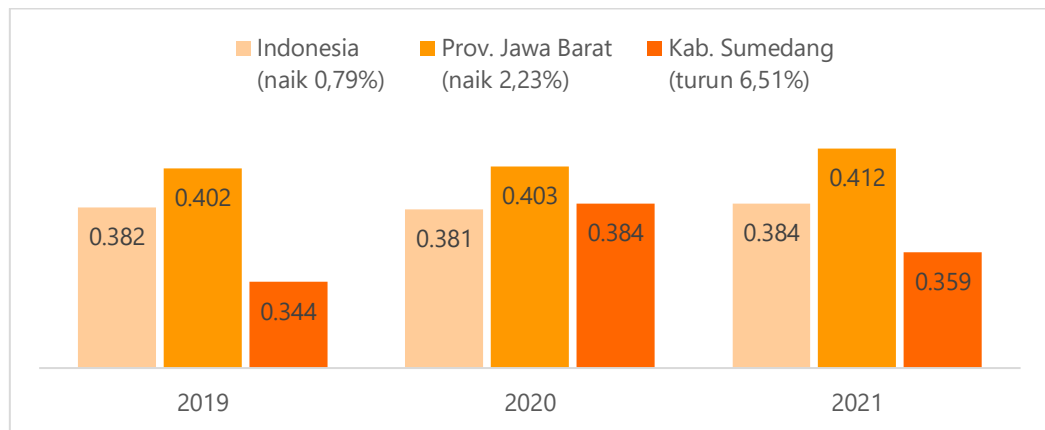
Terdapat indikasi bahwa masih banyak mereka yang bekerja di sektor perdagangan belum mampu beradaptasi memanfaatkan TIK di masa pandemi covid-19 untuk kelangsungan usahanya. Dibuktikan oleh hasil survey Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM bahwa rata-rata usaha mikro mengalami penurunan omzet sebesar 75 persen dan usaha kecil menurun hingga 79 persen. Bahkan, ada sebagian dari pelaku usaha yang menutup usaha disebabkan pembatasan sosial telah menghambat pasokan bahan baku di hulu dan kesulitan pemasaran di hilir akibat keterbatasan para pelaku usaha memanfaatkan teknologi digital.

2.1.5 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang dalam tiga tahun terakhir lebih fluktuatif dibandingkan nasional dan regional Jawa Barat. Di tahun 2019 sebelum terjadi pandemi Covid-19, gini ratio Kab. Sumedang berada di 0,344. Sementara ketika terjadi awal pandemi Covid-19 di tahun 2020, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang meningkat menjadi 0,384, dan pada tahun 2021 ketimpangan



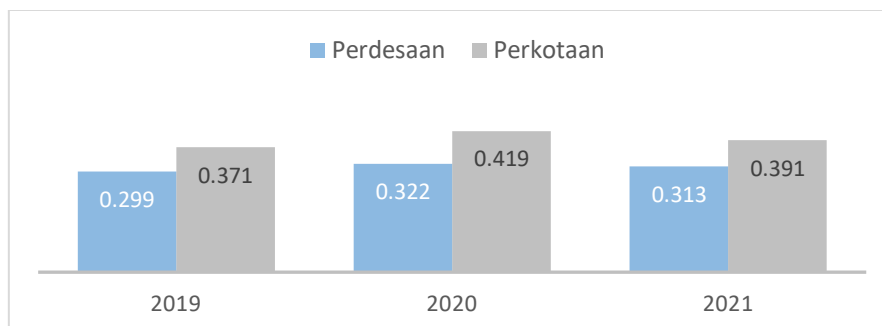
kembali menurun ke 0,359. Capaian ini sangat baik jika dibandingkan dengan nasional dan Jawa Barat yang justru mengalami peningkatan ketimpangan.



Sumber : BPS, 2022

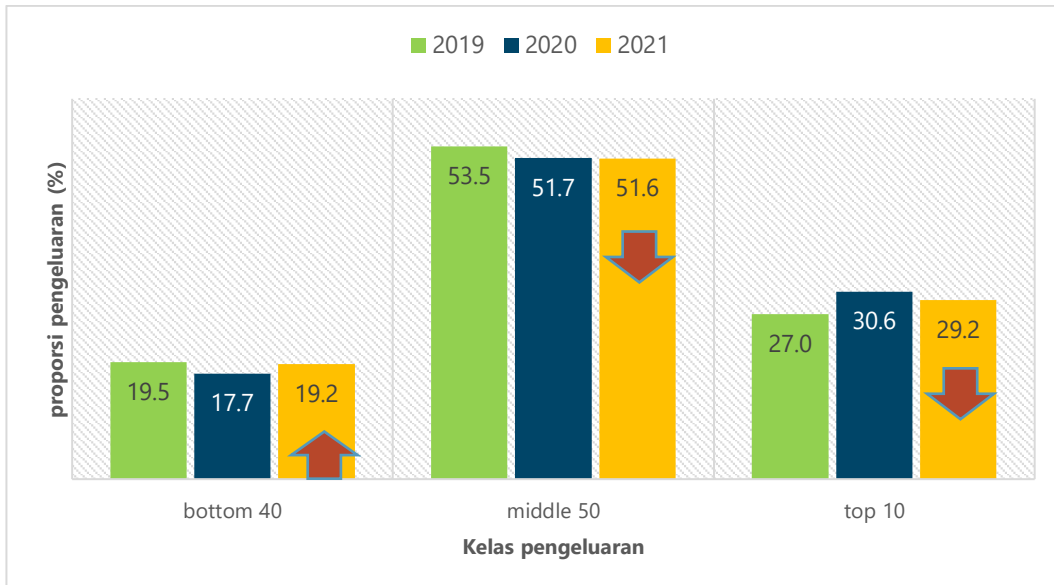
Gambar 2.1. Gini Ratio dan Perubahannya dari 2020 ke 2021

Di tahun 2019 gap gini ratio perkotaan dan perdesaan lebih kecil, dan proporsi pengeluaran kelompok berpendapatan bawah dan menengah meningkat sementara kelompok berpendapatan atas menurun sehingga gini ratio mampu mencapai 0,344. Sementara di tahun 2020, kondisi sebaliknya terjadi akibat ketahanan ekonomi masyarakat bawah cukup rentan menghadapi guncangan akibat pandemi Covid-19. Di 2021, kondisi yang relatif sama dengan 2019 dimana gini ratio perkotaan dan perdesaan menurun dan gap nya mengecil dibandingkan 2020, serta meningkatnya proporsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah menjadikan gini ratio 2021 kembali turun meskipun belum menyamai capaian sebelum pandemi Covid-19.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.m. Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan Sumedang



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.n. Proporsi Pengeluaran per Kapita Berdasarkan Kelompok Pengeluaran di Sumedang

Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menekan tingkat kemiskinan dan ketimpangan adalah melalui pembenahan program jaring pengaman sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat agar lebih efektif dan tepat sasaran atau dalam istilah lain upaya menekan tingkat *inclusion error* (adanya orang tidak miskin yang menerima bantuan) dan *exclusion error* (adanya orang miskin yang tidak menerima bantuan) (Smeru, 2020).

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,46	71,80	0,22
2	Angka Kemiskinan	10,26	10,71	4,20
3	Angka Pengangguran	9,89	9,18	7,18
4	Pertumbuhan Ekonomi	-1,12	3,17	2,17



1	2	3	4	5
5	Pendapatan Per kapita	10.217	10.262	0,99
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,38	0,359	5,53

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	284	Dinas Pendidikan	
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas Pendidikan	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	24.185	Dinas Pendidikan	
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	2.130	Dinas Pendidikan	
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru	746	Dinas Pendidikan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pendidikan anak usia dini			
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	462	Dinas Pendidikan	
		8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	726	Dinas Pendidikan	
		9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
		10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemda	0	Dinas Pendidikan	
		11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	101.126	Dinas Pendidikan	
		12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	41.686	Dinas Pendidikan	
		13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.210	Dinas Pendidikan	
		14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	968	Dinas Pendidikan	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	6.622	Dinas Pendidikan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2.999	Dinas Pendidikan	
		17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.210	Dinas Pendidikan	
		18. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	968	Dinas Pendidikan	
		19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	658	Dinas Pendidikan	
		20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	595	Dinas Pendidikan	
		21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5.639	Dinas Pendidikan	
		22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.852	Dinas Pendidikan	
		23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tandatamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	475	Dinas Pendidikan	
		24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat	65	Dinas Pendidikan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tanda tamat pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah			
		25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	276	Dinas Pendidikan	
		26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	58	Dinas Pendidikan	
		27. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	62	Dinas Pendidikan	
		28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
		29. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8715	Dinas Pendidikan	
		30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	968	Dinas Pendidikan	
		31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	373	Dinas Pendidikan	
		32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	250	Dinas Pendidikan	
		33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	475	Dinas Pendidikan	
		34. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	65	Dinas Pendidikan	



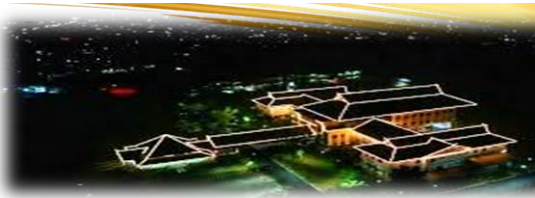
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kesehatan	1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/ kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	560	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3	Dinas Kesehatan	
		3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		4. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	747	Dinas Kesehatan	
		5. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		6. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	747	Dinas Kesehatan	
		7. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		8. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	747	Dinas Kesehatan	
		9. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		10. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	747	Dinas Kesehatan	
		11. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		12. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	35	Dinas Kesehatan	
		13. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		14. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	35	Dinas Kesehatan	
		15. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		16. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	35	Dinas Kesehatan	
		17. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		18. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai	35	Dinas Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		standar			
		19. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		20. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	35	Dinas Kesehatan	
		21. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		22. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5	Dinas Kesehatan	
		23. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		24. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	35	Dinas Kesehatan	
		25. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		26. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PUTR	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas PUTR	
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PUTR	
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten / kota (m)	0	Dinas PUTR	
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten	0	Dinas PUTR	
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / rencana	0	Dinas PUTR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten /kota			
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas PUTR	
vy					
		1) Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	67,40	Dinas PUTR	
		2) Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	35,61	Dinas PUTR	
		3) Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	Dinas PUTR	
		1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	DPKPP	
		2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab /Kota	Ada	DPKPP	
		3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupa ten/Kota penyeleng garan SPAM	Ada	DPKPP	
		4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	DPKPP	
		5) Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	0	DPKPP	
		1) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	6285	DPKPP	
		2) Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	6285	DPKPP	
		3) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan	6285	DPKPP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		SPALD S dan SPALD T			
		4) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	DPKPP	
		5) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0	DPKPP	
		6) Kinerja pelayanan SPALD S akses dasar	6285	DPKPP	
		7) Kinerja pelayanan SPALD S akses aman	6285	DPKPP	
		8) Kinerja pelayanan SPALD T akses aman	0	DPKPP	
		9) Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	6285	DPKPP	
		10) Kinerja sarana pengangkutan lumpur tinja	0	DPKPP	
		11) Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	DPKPP	
		12) Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	DPKPP	
		13) Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	6285	DPKPP	
		14) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan emenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	0	DPKPP	
		1) Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah sederhana) yang deret laik fungsi	0	Dinas PUTR	
		2) Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	331	Dinas PUTR	
		3) Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan / Gedung	Ada	Dinas PUTR	
		4) Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan / Gedung	Ada	Dinas PUTR	
		5) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan	12	Dinas PUTR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dilestarikan			
		6) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten	12	Dinas PUTR	
		7) Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	1	Dinas PUTR	
		8) Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	1	Dinas PUTR	
		1) Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	774.368	Dinas PUTR	
		2) Panjang jalan yang dibangun	774.368	Dinas PUTR	
		3) Panjang jembatan yang dibangun	0	Dinas PUTR	
		4) Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur / fungsi)	17438,29	Dinas PUTR	
		5) Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan	0	Dinas PUTR	
		6) Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	3637,17	Dinas PUTR	
		7) Panjang jembatan yang direhabilitasi	36	Dinas PUTR	
		8) Panjang jalan yang dipelihara	27174,08	Dinas PUTR	
		9) Panjang jembatan yang dipelihara	0	Dinas PUTR	
		1) Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	264	Dinas PUTR	
		2) Jumlah tenaga kerja operator/ teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	264	Dinas PUTR	
		3) Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator / teknisi / analisis di wilayah kabupaten/kota	264	Dinas PUTR	
		4) Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	265	Dinas PUTR	



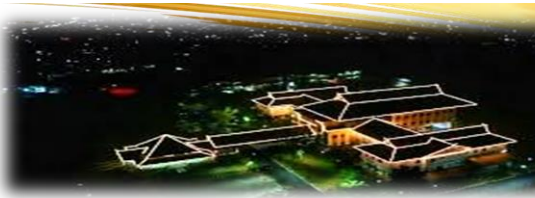
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten / kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	Dinas PUTR	
		6) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	Dinas PUTR	
		7) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas PUTR	
		8) Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilakanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	285	Dinas PUTR	
		9) Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kab / kota	1	Dinas PUTR	
		10) Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	264	Dinas PUTR	
		11) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/	264	Dinas PUTR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		analisis			
		12) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator / teknisi / analisis di wilayah kab/kota	264	Dinas PUTR	
		13) Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/ kota	265	Dinas PUTR	
		14) Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	65	Dinas PUTR	
		15) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	65	Dinas PUTR	
		16) Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan Dinas PUTR pengawasannya	285	Dinas PUTR	
		17) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan egmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	65	Dinas PUTR	
		18) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	265	Dinas PUTR	
		19) Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	140	Dinas PUTR	
		20) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	175	Dinas PUTR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		21) Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	265	Dinas PUTR	
		22) Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	65	Dinas PUTR	
		23) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usahadengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	65	Dinas PUTR	
		24) Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	285	Dinas PUTR	
		25) Jumlah pengawasan terkait ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	65	Dinas PUTR	
4 Perumahan Rakyat					
		1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	500	DPKPP	
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	30	DPKPP	
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	135	DPKPP	
		4. Jumlah unit rumah korban rencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	DPKPP	
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DPKPP	
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	30	DPKPP	
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal	23	DPKPP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sementara korban bencana			
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	30	DPKPP	
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	4785	DPKPP	
		10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPKPP	
		11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPKPP	
		12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPKPP	
		13. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPKPP	
		14. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPKPP	
		15. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DPKPP	
		16. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	119,09	DPKPP	
		17. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	2710	DPKPP	
		18. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	2,09	DPKPP	
		19. Jumlah rumah di kab / kota	353.342	DPKPP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		20. Jumlah unit Peningkatan kualitas RTLH	2710	DPKPP	
		21. Jumlah rumah tidak layak huni	0	DPKPP	
		22. Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	DPKPP	
		23. Rasio rumah dan KK	115,17		
		24. Jumlah rumah pembangunan baru	0	DPKPP	
		25. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	24	DPKPP	
		26. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	14.347	DPKPP	
		27. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	14.347	DPKPP	
		28. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	14.347	DPKPP	
		29. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	14.347	DPKPP	
		30. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	14.347	DPKPP	
		31. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	DPKPP	
		32. Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	DPKPP	
		33. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	DPKPP	
5	Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab / Kota yang ditangani	87	Sat Pol PP	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	4.274	Sat Pol PP	
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	15	Sat Pol PP	
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1	Sat Pol PP	
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1	Sat Pol PP	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	5	Sat Pol PP	
		1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah / legal	100	BPBD	
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang	100	BPBD	



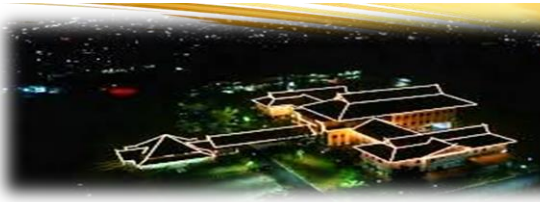
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			
		1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	BPBD	
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah / legal	100	BPBD	
		3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,11	BPBD	
		4. Persentase warga negara yang ikut Pelatihan	0,11	BPBD	
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0,28	BPBD	
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0,28	BPBD	
		1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	BPBD	
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	BPBD	
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	BPBD	
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	BPBD	
		1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kab.	4 Layanan	SAT POL PP	
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	4 Pos/ UPTD Damkar	SAT POL PP	
		3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara	83	SAT POL PP	



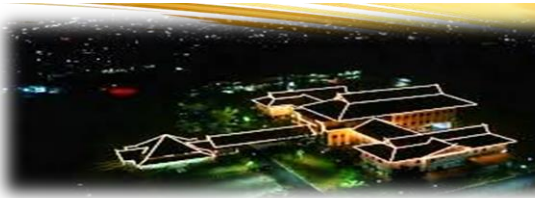
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		bergantian (shift) di kantor kecamatan			
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kel/desa	4 Pos/ UPTD Damkar	SAT POL PP	
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	5	SAT POL PP	
		6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Permen Dagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	21	SAT POL PP	
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	194	SAT POL PP	
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	4	SAT POL PP	
6	Sosial				
		1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	8677	Dinas Sosial	
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	2646	Dinas Sosial	
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	8	Dinas Sosial	
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	0	Dinas Sosial	
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	Dinas Sosial	
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	41	Dinas Sosial	



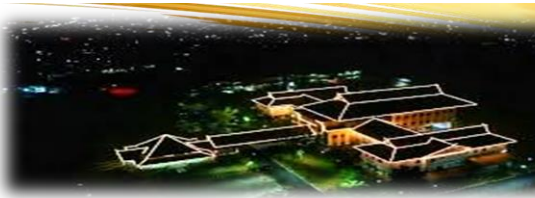
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi			
		7. Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinas Sosial	
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial	
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	73	Dinas Sosial	
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	1	Dinas Sosial	
		11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial	
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinas Sosial	
		13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas Sosial	
		14. Jumlah pekerja social professional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan	8	Dinas Sosial	
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan /atau pusat kesejahteraan sosial	9	Dinas Sosial	
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan Masyarakat	0	Dinas Sosial	
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	0	Dinas Sosial	



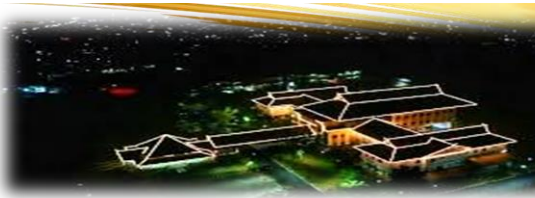
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	8	Dinas Sosial	
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	116	Dinas Sosial	
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	88	Dinas Sosial	
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	21	Dinas Sosial	
		1. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	448	Dinas Sosial	
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial	
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinas Sosial	
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinas Sosial	
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dinas Sosial	
		6. Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan sosial yang tersedia	51	Dinas Sosial	
7	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	34	Disnaker Trans	



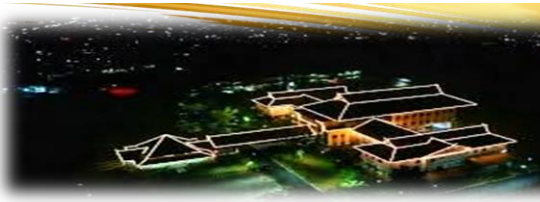
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0	Disnaker Trans	
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	901	Disnaker Trans	
		1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0	Disnaker Trans	
		2. Persentase instruktur Bersertifikat kompetensi	100	Disnaker Trans	
		3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	0,77	Disnaker Trans	
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	36,4	Disnaker Trans	
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	38,4	Disnaker Trans	
		6. Jumlah penganggur yang dilatih	708	Disnaker Trans	
		7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	99,7	Disnaker Trans	
		8. Persentase penyerapan lulusan	41,3	Disnaker Trans	
		9. Lulusan bersertifikat kompetensi	100	Disnaker Trans	
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	100	Disnaker Trans	
		11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	58	Disnaker Trans	
		1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	12,7	Disnaker Trans	
		2. Data tingkat produktivitas total	0	Disnaker Trans	
		1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	23,3	Disnaker Trans	
		2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	25	Disnaker Trans	
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di	36	Disnaker Trans	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			
		4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skalapah	100	Disnaker Trans	
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	69,9	Disnaker Trans	
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,1	Disnaker Trans	
		7. Jumlah mogok kerja	0	Disnaker Trans	
		8. Jumlah penutupan perusahaan	2	Disnaker Trans	
		9. Jumlah perselisihan kepentingan	0	Disnaker Trans	
		10. Umlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Disnaker Trans	
		11. Jumlah perselisihan PHK	10	Disnaker Trans	
		12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	0	Disnaker Trans	
		13. Jumlah perselisihan yang Diselesaikan melalui Perundingan bipartite	0	Disnaker Trans	
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota Yang diberdayakan	0	Disnaker Trans	
		15. Persentase perselisihan Hubungan industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	40	Disnaker Trans	
		1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota	0	Disnaker Trans	
		2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	9082	Disnaker Trans	
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	25	Disnaker Trans	
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Disnaker Trans	
		5. Jumlah Pejabat	0	Disnaker	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Fungsional Pengantar Kerja		Trans	
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Disnaker Trans	
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang Ketenagakerjaan Kab/Kota	0	Disnaker Trans	
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	5292	Disnaker Trans	
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	58	Disnaker Trans	
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	58	Disnaker Trans	
		11. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan yang diterbitkan	62	Disnaker Trans	
		12. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	58	Disnaker Trans	
		13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Disnaker Trans	
		14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	1	Disnaker Trans	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten /kota yg telah dilatih PUG	81	Dinas Sosial	
		2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yg sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kab/kota	109	Dinas Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	Dinas Sosial	
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	Dinas Sosial	
		5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Dinas Sosial	
		6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	Dinas Sosial	
		7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan / fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	Dinas Sosial	
		8. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kab/kota yang mendapatkan pelatihan	3	Dinas Sosial	
		9. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	100	Dinas Sosial	
		10. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1	Dinas Sosial	
		11. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kab / kota	2	Dinas Sosial	
		12. Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2	Dinas Sosial	
		13. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	2	Dinas Sosial	
		14. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	4	DPKP	
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	7	DPKP	
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	DPKP	
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	9	DPKP	
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	0	DPKP	
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	0	DPKP	
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	113401,87	DPKP	
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1	DPKP	
10	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati / Walikota	11	DPKPP	
		2. SK Bupati / Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum / Absentee dan Daftar Subyek	0	DPKPP	
		3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Maksimum / Absentee	0	DPKPP	
		4. Dokumen Izin membuka tanah	49	DPKPP	
		5. Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	DPKPP	
11	Urusan Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA)	44,29	DLHK	
		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,81	DLHK	
		c. Indeks Tutupan	58,81	DLHK	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Hutan (ITH)			
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	15	DLHK	
		3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	215	DLHK	•
		4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten / kota	1,4	DLHK	
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	0	DLHK	
		6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	DLHK	
		7. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	DLHK	
		8. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	100	DLHK	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan	44	Disdukcapil	
		2. Penerbitan akta perceraian	2	Disdukcapil	
		3. Penerbitan akta kematian	1284	Disdukcapil	
		4. Penyajian data kependudukan	1165047	Disdukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas PMD	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa	0	Dinas PMD	



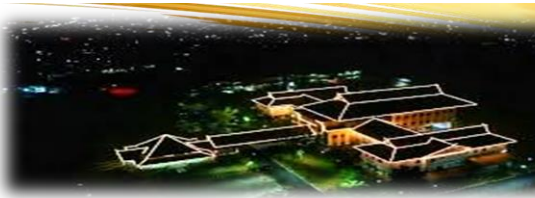
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya			
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	13360	Dinas PMD	
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	270	Dinas PMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/ Kota	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	DPPKB&P3A	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	26,68	DPPKB&P3A	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	25,18	DPPKB&P3A	
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100	DPPKB&P3A	
		5. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	23	DPPKB&P3A	
		6. Persentase Fasilitasi Kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	DPPKB&P3A	
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,41	DPPKB&P3A	
		8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	2	DPPKB&P3A	
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	69,54	DPPKB&P3A	
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota	68,87	DPPKB&P3A	



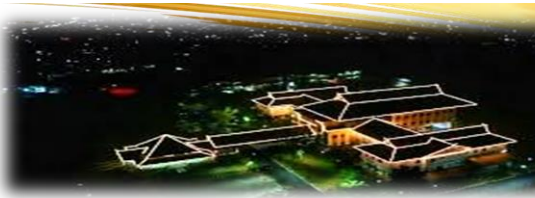
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dengan kesertaan rendah			
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	80,85	DPPKB&P3A	
15	Perhubungan				
		1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	47,62	Dishub	
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	76,67	Dishub	
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100	Dishub	
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	23,88	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika				
		1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra Pemerintah aau menggunakan akses internet yg diamankan disediakan di Dinas kominfo	100	Diskominfo Sanditik	
		2. Persentase perangkat daerah yg menunakan akses internet yg disediakan dinas kominfo	100	Diskominfo Sanditik	
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yg disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dn sinyal lainnya) dgn memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1	Diskominfo Sanditik	
		4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yg dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dgnn Permen Kominfo Nomor 5 tahun 2015 Tahun 2015	100	Diskominfo Sanditik	
		5. Persentase perangkat daerah yg memiliki portal dan situs web yg sesuai standar	100	Diskominfo Sanditik	



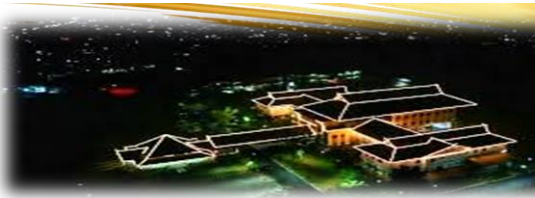
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Persentase perangkat daerah yg mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan UU.	100	Diskominfo Sanditik	
		7. Persentase layanan SPBE (Layanan Publik dan layanan administrasi pemerintahan) yg memanfaatkan Sertifikat elektronik	100	Diskominfo Sanditik	
		8. Persentase system elektronik yg terdaftar sesuai ketentuan peraturan undang-undangan	100	Diskominfo Sanditik	
		9. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yg terintegrasi dgn sisitem penghubung layanan pemerintah	100	Diskominfo Sanditik	
		10. Persentase perangkat daerah yg menggunakan layanan pusat data pemerintahan	100	Diskominfo Sanditik	
		11. Persentase perangkat daerah yg menyimpan data di pusat data pemerintah	100	Diskominfo Sanditik	
		12. Persentase perangkat daerah yg memperbaharui datanya sesuai siklus jns data (sesuai renstra kominfo)	100	Diskominfo Sanditik	
		13. Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	Diskominfo Sanditik	
		14. Persentase perangkat daerah yg mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	Diskominfo Sanditik	
		15. Persentase ASN pengelola TIK yg tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	Diskominfo Sanditik	
		16. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	Diskominfo Sanditik	
		17. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yg menyebarkan informasi	100	Diskominfo Sanditik	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi			
		18. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	165,73	Diskominfo Sanditik	
		19. Persentase diseminasi da layanan informasi publicy dilaksanakan sesuai dgn strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	71,11	Diskominfo Sanditik	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/ Kota	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	DKPP	
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan ldalam daerah kabupaten/kota	100	DKPP	
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,24	DKPP	
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,24	DKPP	
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	36,57	DKPP	
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah	16,20	DKPP	



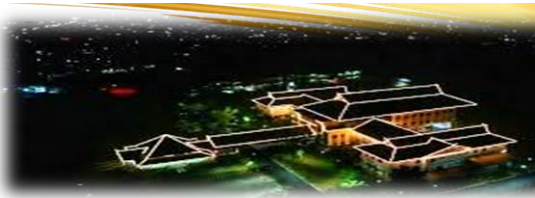
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		keanggotaan			
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	16,20	DKPP	
		8. Persentase koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	18	DKPP	
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten Kota	8,33	DKPP	
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	0,92	DKPP	
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,7	DKPP	
		12. Persentase koperasi yang diberikan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dukungan fasilitasi pendampingan	12,03	DKPP	
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	2,77	DKPP	
		14. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	5,92	DKPP	
		15. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data	1	DKPP	
		16. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,24	DKPP	
		17. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan	1,2	DKPP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sertifikasi produk usaha			
		18. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1	DKPP	
18	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas / intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	DPMPTSP	
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	1	DPMPTSP	
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	1	DPMPTSP	
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	DPMPTSP	
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	1	DPMPTSP	
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	9	DPMPTSP	
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	9	DPMPTSP	
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	4644	DPMPTSP	
		9. Laporan realisasi penanaman modal	148	DPMPTSP	
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	3	DPMPTSP	
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	148	DPMPTSP	
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	41	DPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olah Raga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	225	Disparbud pora	
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	150	Disparbud pora	
		3. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	534	Disparbud pora	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	114	Disparbudpora	
		5. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan 2 pendidikan	125	Disparbudpora	
		6. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0	Disparbudpora	
20	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	1	Diskominfo Sanditik	
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	120	Diskominfo Sanditik	
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	352	Diskominfo Sanditik	
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	120	Diskominfo Sanditik	
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	120	Diskominfo Sanditik	
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	98,33	Diskominfo Sanditik	
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	98,33	Diskominfo Sanditik	
21	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan.	0	Diskominfo Sanditik	
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah.	100	Diskominfo Sanditik	
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi	50	Diskominfo Sanditik	



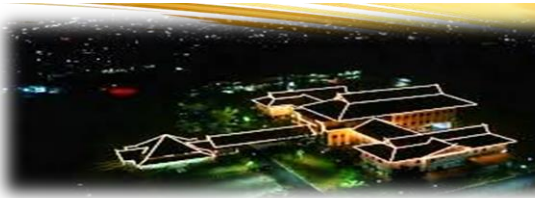
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah.			
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan.	100	Diskominfo Sanditik	
22	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	12	Disparbud pora	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	14	Disparbud pora	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	34	Disparbud pora	
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	120	Disparbud pora	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	12	Disparbud pora	
		6. Perlindungan cagar budaya kabupaten / kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	11	Disparbud pora	
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	12	Disparbud pora	
		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	12	Disparbud pora	
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu)	26	Disparbud pora	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)			
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	2585	Disparbudpora	
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	1784	Disparbudpora	
		12. Pengelolaan, pengamanan pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Disparbudpora	
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	Disparbudpora	
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	1	Disparbudpora	
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Disparbudpora	
		16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	3	Disparbudpora	
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Disparbudpora	
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Disparbudpora	
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	1	Disparbudpora	
23	Perpustakaan				
		1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3671	Dinas Arpus	
		2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	7164	Dinas Arpus	
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,73	Dinas Arpus	
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	53.755	Dinas Arpus	
		5. Jumlah masyarakatan gemar membaca di masyarakat	3	Dinas Arpus	
		6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih	25	Dinas Arpus	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		media (digitalisasi)/ terdapat yang ada di wilayahnya			
		7. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	2	Dinas Arpus	
		8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdapat yang ada di wilayahnya (item)	10	Dinas Arpus	
24	Kerasipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Arpus	
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Arpus	
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Dinas Arpus	
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Dinas Arpus	
		5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Arpus	
		6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Arpus	
		7. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan / kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	0	Dinas Arpus	
		8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	0	Dinas Arpus	
		9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Arpus	
		10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga	0	Dinas Arpus	



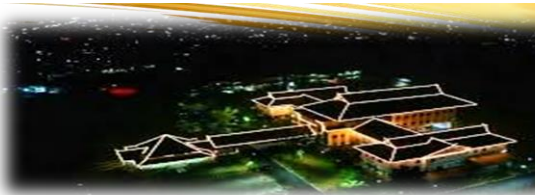
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK			
25	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	21583	Diskanak	
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	Diskanak	
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	0	Diskanak	
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi / dan penguatan kelembagaan)	31	Diskanak	
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	207625	Diskanak	
26	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	66	Disparbud pora	
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	45	Disparbud pora	
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	153	Disparbud pora	
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	Disparbud pora	
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1	Disparbud pora	
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten	0	Disparbud pora	
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	7	Disparbud pora	
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang	0,87	Disparbud pora	



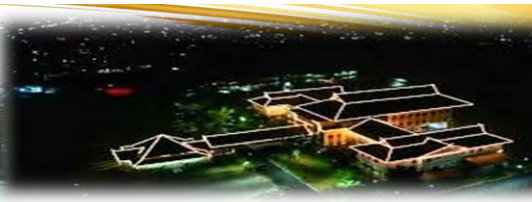
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		disertifikasi			
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0,61	Disparbudpora	
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	40	Disparbudpora	
27	Pertanian	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	96	DPKP	
		2. Prasarana pertanian yang digunakan	61	DPKP	
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	43	DPKP	
		4. Persentase prasarana yang digunakan	61	DPKP	
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	43	DPKP	
		6. Persentase Fasilitasi penanggulangan bencana	0	DPKP	
28	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	1	DPLH	
		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	19	DPLH	
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	1	DPLH	
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	1	DPLH	
29	Energi dan SDM	1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	SETDA/ BAGIAN EKONOMI	
30	Perdagangan	1a. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan Toko swalayan	100	DKPP	
		1b. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko Swalayan	100	DKPP	
		2. Persentase penerbitan TDG	100	DKPP	
		3. Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	1	DKPP	
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu, untuk :		DKPP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bhn berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kab		DKPP	
		6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu		DKPP	
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		DKPP	
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu		DKPP	
		9. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	40,08	DKPP	
		9. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	4,94	DKPP	
		10. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100	DKPP	
31	Perindustrian	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yg lokasinya di daerah kabupaten/kota	1	DKPP	
		2. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	1	DKPP	
		3. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yg diterbitkan	1	DKPP	
		4. Persentase jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bg industri kecil dan menengah yg diterbitkan	1	DKPP	
		5. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota yg masuk dalam SIINas terhadap tgl populasi perusahaan industri kcl, menengah dn perusahaan kawasan industri di	1	DKPP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kab/Kota			
32	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	2	Disnaker Trans	
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	29	Disnaker Trans	
		3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	29	Disnaker Trans	



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

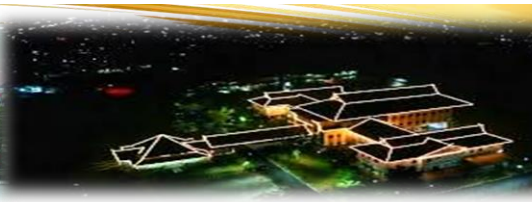
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	98,99	Dinas Pebididikan	
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,15	Dinas Pebididikan	
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,04	Dinas Pebididikan	
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	47,90	Dinas Pebididikan	
2	Kesehatan	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,05	Dinas Kesehatan	
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Dinas Kesehatan	
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	Dinas Kesehatan	
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	Dinas Kesehatan	
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	Dinas Kesehatan	



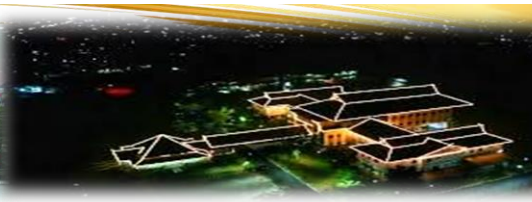
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,59	Dinas Kesehatan	
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	96,32	Dinas Kesehatan	
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	77,88	Dinas Kesehatan	
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,69	Dinas Kesehatan	
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,40	Dinas Kesehatan	
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	80,52	Dinas Kesehatan	
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	66,92	Dinas Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		HIV sesuai standar			
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/ Kota	0	Dinas PUTR	
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	Dinas PUTR	
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	67,20	Dinas PUTR	
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78,65	Dinas PUTR	
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	68,07	Dinas PUTR	
		6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	Dinas PUTR	
		7. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	83,21	Dinas PUTR	
		8. Rasio tenaga operator/	61,11	Dinas PUTR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		teknisi analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Dinas PUTR	
4	Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	17,04	Dinas DPKPP	
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas DPKPP	
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	1,75	Dinas DPKPP	
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,77	Dinas DPKPP	
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	4,06	Dinas DPKPP	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Sat Pol PP	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100	Sat Pol PP	
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	691534	BPBD	
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2669	BPBD	
		5. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	282100	BPBD	
		6. Persentase pelayanan	84,16	Sat Pol PP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	69,53	Sat Pol PP	
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	65,68	Dinas Sosial & P3A	
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	42,54	Dinas Sosial & P3A	
7	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	97,14	Disnaker trans	
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	6,81	Disnaker trans	
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	53108563.017	Disnaker trans	
		4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100	Disnaker trans	
		5. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provins	41,99	Disnaker trans	
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	39,78	Dinas Sosial & P3A	
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,004	Dinas Sosial & P3A	
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,77	Dinas Sosial & P3A	



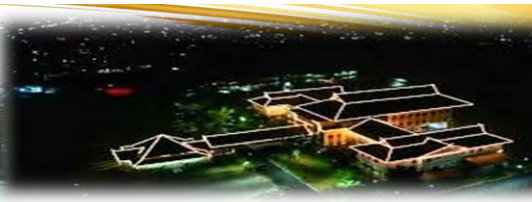
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Pangan	1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	295,304	Dinas DPKP	
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Dinas DPKPP	
		2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	33,34	Dinas DPKPP	
		3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	61,51	Dinas DPKPP	
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	Dinas DPKPP	
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	Dinas DPKPP	
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	Dinas DPKPP	
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	62,26	DLHK	
		2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	76,90	DLHK	
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab.	4,35	DLHK	
12	Administrasi kependudukan	1. Perekaman KTP Elektronik	97,84	DISDUKCAPIL	
		2. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	38,23	DISDUKCAPIL	
		3. Kepemilikan akta kelahiran	97,67	DISDUKCAPIL	
		4. Jumlah OPD yang telah	41,82	DISDUKCAPIL	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama			
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase pengentasan desa tertinggal	0	Dinas PMD	
		2. Persentase peningkatan status desa mandiri	100	Dinas PMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,1	Dinas PPKB&P3A	
		1. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate/mCPR)	81,18	Dinas PPKB&P3A	
		2. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,48	Dinas PPKB&P3A	
15	Perhubungan	1. Rasio konektivitas kabupaten	0,42	Dinas Perhubungan	
		2. V/C Ratio di jalan kab/kota	0,54	Dinas Perhubungan	
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas KOMINFO	100	Diskominfo Sanditik	
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	Diskominfo Sanditik	
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	90,21	Diskominfo Sanditik	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.	1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas	34,78	DKPP	
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	5,80	DKPP	
18	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	260,003	DPMPSTSP	
19	Kepemudaan dan Olah Raga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	10,30	Disparbud pora	
		2. Tingkat partisipasi	34,40	Disparbud	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		pora	
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	20	Disparbud pora	
20	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Diskominfo Sanditik	
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Diskominfo Sanditik	
21	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah	9303,448	Diskominfo Sanditik	
22	Kebudayaan	1. Terlestarikannya cagar budaya	100	Disparbud pora	
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	65,32	Dinas Arpus	
		2. Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	9,85	Dinas Arpus	
24	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100	Dinas Arpus	
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	Dinas Arpus	
25	Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi (sumber data:	17884331	Disperta	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		one data KKP)			
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-100	Disparbud pora	
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-26,19	Disparbud pora	
		3. Tingkat Hunian Akomodasi	12,61	Disparbud pora	
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2272171200	Disparbud pora	
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	16233385133	Disparbud pora	
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	0,049	DPKP	
		2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-100	DPKP	
28	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahu	1 Dok. Rencana Pengelolaan Tahura	DLHK	
29	Energi dan SDM	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	Setda/Bagian Ekonomi	
30	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	9,304	DKPP	
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	40,081	DKPP	
		3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	4,947	DKPP	
31	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten / Kota	3,027	DKPP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	DKPP	
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	DKPP	
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	DKPP	
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	100	DKPP	
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	DKPP	
32	Tansmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	2	Disnaker trans	
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Disnaker trans	
		3. &nbs			



2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	13,116	BKAD	
		2. Rasio PAD	16,585	BKAD	
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat	
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat	
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	71,393	BKAD	
		6. Opini Laporan Keuangan	10	BPKAD	
2	Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	LPBJ Setda	
		2. Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	47,367	LPBJ Setda	
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	29,152	LPBJ Setda	
3	Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	144,885	BKPSDM	
		2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10,14	BKPSDM	
		3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	8,224	BKPSDM	
4	Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	59,7126	BKAD	
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	13,1596	BKAD	
		3. Assets Management	4	BKAD	
		4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja	10,308	BKAD	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dalam APBD Tahun sebelumnya			
5	Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	118,697	BKAD	
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 7 dokumen ----- x100% 12 dokumen	58,333	BKAD	



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,63
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,67
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,66
Terwujudnya penanggulangan MPKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,36
	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,81
	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	70,3
Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73,5
Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,29



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	74,8
	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	66
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,47
	Indeks Risiko Bencana	Poin	145
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP
	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A
	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86
Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per-Kapita	Rp. (Juta)	10,70
Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,15
	Jumlah UMKM	UMKM	18.467

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

2.3.1 ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2021 sebesar 72,63 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 72,62 tahun atau capaian kinerja sebesar 99,99% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai.



Tabel 2.4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Angka Harapan Hidup Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,63	72,62	99,99%	Kinerja sangat tinggi

Sumber : BPS

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi AHH tahun 2021 meningkat sebesar 0,19 tahun atau 0,26%, namun capaian kinerjanya tetap 99,99%.

Tabel 2.5
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup
Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,44	72,43	99,99%	72,63	72,62	99,99%	Realisasi kinerja meningkat dan capaian kinerja tetap

Sumber : BPS

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2019, target jangka menengah AHH adalah 73 tahun dan realisasi pada tahun 2021 adalah 72,62 tahun, sehingga capaian kinerja jangka menengah untuk AHH pada tahun ketiga RPJMD 2018-2019 adalah 99,48%.

Tabel 2.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah RPJMD



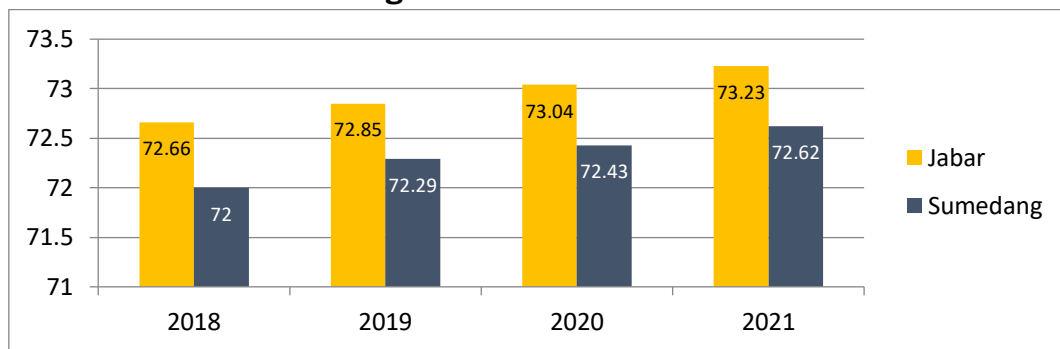
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Tahun 2021	Capaian Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2021
Angka Harapan Hidup	73,00 tahun	72,62 tahun	99,48%

Sumber : BPS dan RPJMD (diolah)

d. Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sumedang memperlihatkan tren meningkat dari tahun 2018 sampai 2021, walaupun selalu berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.1.1
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat



Sumber : BPS

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Angka harapn hidup diantaranya dipengaruhi oleh jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Pada tahun 2021, jumlah kematian ibu sebanyak 36 kasus kematian dari 17.881 kelahiran hidup dengan rasio sebesar 201/100.000 Kelahiran hidup. Kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan kasus kematian ibu, diantaranya :

1. Pandemi Covid-19 berdampak pada banyaknya ibu hamil yang terpapar Covid-19.



2. Terbatasnya ketersediaan bed isolasi pada RS rujukan berdampak pada sulitnya akses rujukan untuk kasus kasus kegawatdaruratan obstetric terutama pada pasien suspek/probable/confirm Covid-19 sehingga pasien tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar.
3. Banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 berdampak pada kurangnya tenaga pelayanan KIA di fasilitas kesehatan.

Solusi dari permasalahan, yaitu :


1. Skrining covid 19 dengan menggunakan rapid antigen pada setiap ibu hamil risiko tinggi usia kehamilan 37 minggu.
2. Tim Promkes melakukan edukasi secara massif dan membuat media promosi untuk edukasi 5M.
3. Koordinasi dengan RSUD terkait rujukan, penambahan bed isolasi kebidanan.
4. Rekrutmen tenaga relawan bidan untuk membantu puskesmas yang kekurangan tenaga karena banyak bidan nya yang terpapar covid 19
5. Percepatan vaksinasi bumil.
6. Penguatan P4K ditingkat Desa.
7. Edukasi tentang pencegahan covid 19 pada kelas ibu hamil.

Kemudian, pada tahun 2021, kasus kematian bayi sebanyak 161 kasus dari 17.881 Kelahiran Hidup dengan Rasio 9/1000 Kelahiran Hidup. Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan kasus kematian bayi, yaitu :

1. Kualitas Pelayanan ANC masih kurang, terutama pada tatalaksana bumil anemia dan KEK.
2. Sarpras untuk kegawatdaruratan neonatal di RSU dan PONED masih kurang memadai.
3. Kemampuan bidan dalam penatalaksanaan keagawatdaruratan neonatal masih kurang.

Solusi dari permasalahan, yaitu :

1. Melakukan bimbingan teknis pada tenaga bidan di puskesmas untuk penguatan kualitas pelayanan ANC.
2. Penguatan asuhan pelayanan neonatal essensial.
3. Melakukan audit kematian bayi setiap triwulan.

- 
- Membuat usulan pemenuhan sarana prasarana kegawardaruratan di PONEK dan PONEK.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja AHH tahun 2021 adalah Rp.143.471.103.109,00 yang terdiri dari 4 program. Sedangkan realisasinya adalah Rp.123.048.464.409,00 atau 85,57%.

Tabel 2.7
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Angka Harapan Hidup Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.320.435.600,00	1.083.896.380,00	82,09
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	131.490.157.061,00	117.104.168.879,00	89,06
Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	10.217.920.448,00	4.509.292.500,00	44,13
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	442.590.000,00	351.106.650,00	79,33
Jumlah	143.471.103.109,00	123.048.464.409,00	85,57

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja AHH tahun 2021 tidak dapat dihitung, karena realisasi kinerja kurang dari 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang mendukung langsung pencapaian target indikator kinerja Angka Harapan Hidup, yaitu :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator kinerja program yaitu Cakupan puskesmas terakreditasi utama, dengan target 10% dan realisasinya 2,86% atau capaian kinerja 28,6%.



2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
Indikator kinerja program yaitu Terjaminnya kualitas obat produk makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat dengan target 100% dan realisasi 100%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Indikator kinerja program yaitu Cakupan desa/kelurahan siaga aktif mandiri dengan target 15% dan realisasinya 7,2% atau capaian kinerjanya 48%.
4. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
Indikator kinerja program yaitu Meningkatnya ketersediaan dan mutu SDM kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dengan target 50% dan realisasinya 45,7%, capaian kinerja 91,4%.

2.3.2 RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Rata-Rata Lama Sekolah” tahun 2021 sebesar 8,67 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumedang sebesar 8,52 tahun atau capaian kinerja sebesar 98,27% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

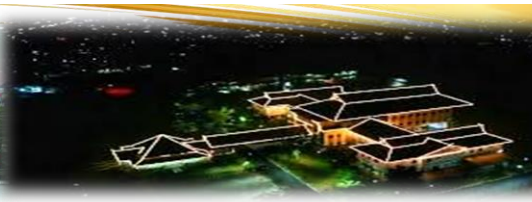
Tabel 2.8
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Kinerja
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,67	8,52	98,27%	

Sumber : BPS

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi rata-rata lama sekolah meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2020 RLS sebesar 8,51 tahun sehingga pada tahun 2021 terdapat peningkatan 0,01 tahun atau sekitar 0,12%.



Tabel 2.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,48	8,51	100,35 %	8,67	8,52	98,27%	Realisasi kinerja meningkat dan Capaian Kinerja Menurun

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah RLS adalah 9,07 tahun dan realisasi pada tahun 2021 adalah 8,52 tahun, sehingga capaian kinerja jangka menengah untuk RLS pada tahun ketiga RPJMD adalah 93,94%.

Tabel 2.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

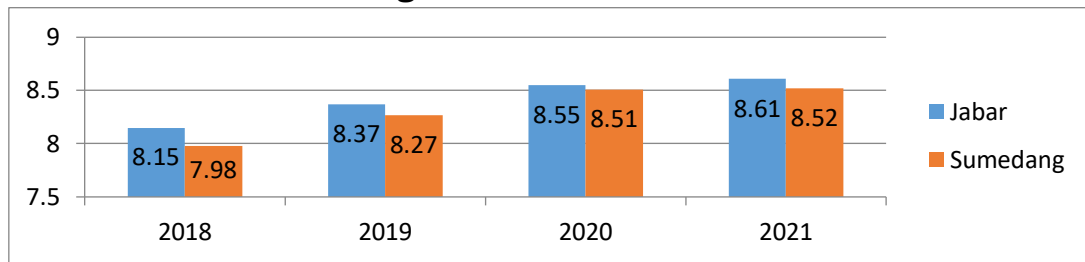
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021
Rata-Rata Lama Sekolah	9,07 tahun	8,52 tahun	92,94%

d. Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Capaian RLS Kabupaten Sumedang menunjukkan tren meningkat dari tahun 2018 sampai 2021 walaupun selalu berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Barat.



Grafik 2.1.2
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumedang
Dengan Provinsi Jawa Barat



Sumber : BPS.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian RLS didukung oleh capaian APK Kesetaraan sebesar 1,95% dan persentase siswa bersertifikat diniyah sebesar 100%.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Ketersediaan PKBM yang cukup tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang.
2. Adanya Bantuan Pendidikan berupa BOPD Provinsi untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB sehingga pendidikan lebih terjangkau.
3. Adanya Bantuan Pendidikan berupa BOP untuk jenjang PAUD dan Kesetaraan sehingga usia 7-21 tahun dapat melanjutkan pendidikan melalui Kesetaraan dengan lebih terjangkau.

Faktor Penghambat :

1. Masih ada sekolah yang belum terdata dalam dapodik, terutama sekolah baru.
2. Jarak tempuh dari rumah siswa menuju sekolah pada umumnya berbeda-beda. Sebagian orang tua terbebani putra-putrinya karena jarak jauh dengan alasan keterbatasan sarana transportasi dan biaya transportasi.
3. Tidak ada Bantuan Pendidikan bagi warga berusia 22 tahun ke atas untuk melanjutkan pendidikan.

Solusi :



1. Pemberdayaan penilik dan pengawas dalam pendataan sekolah yang belum terdata dalam dapodik.
2. Memberlakukan sistem Zonasi pada proses PPDB.
3. Memberikan sosialisasi kepada orang tua untuk menyadari bahwa belajar memerlukan perjuangan dan pengorbanan.
4. Mempermudah proses rekomendasi pendirian PKBM di daerah-daerah yang padat penduduk dan keterbatasan sarana transportasi agar tidak terbebani biaya transportasi.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggara program yang mendukung capaian kinerja RLS pada tahun 2021 adalah Rp. 271.991.941.000,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya adalah Rp. 256.703.321.837,00 atau 94,38%.

Tabel 2.11
Realisasi Anggaran Per Program Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Pendidikan	271.991.941.000,00	256.703.321.837,00	94,38

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja RLS tahun 2021 tidak dapat dihitung, karena capaian kinerja kurang dari 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program Penunjang Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan. Indikator kinerja Program untuk membidik RLS tahun 2021 yaitu :

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	Persen	2,10	1,95	92,86%
Persentase Siswa Bersertifikat Diniyah	Persen	100	100	100%



2.3.3 ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Angka Harapan Lama Sekolah” tahun 2021 sebesar 13,66 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumedang sebesar 12,98 tahun atau capaian kinerja sebesar 95,02% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

Tabel 2.12
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,66	12,98	95,02%	Kinerja sangat tinggi

Sumber : BPS

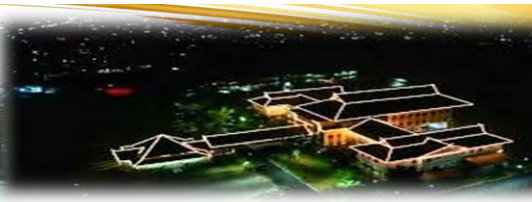
b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Sumedang meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun tidak signifikan. Angka HLS tahun 2020 sebesar 12,97 tahun dan pada tahun 2021 sebesar 12,98 tahun, naik 0,01 tahun.

Tabel 2.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021
dengan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,44	12,97	96,50%	13,66	12,98	95,02%	Realisasi kinerja meningkat dan Capaian Kinerja Menurun

Sumber : BPS



c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah HLS adalah 14,11 tahun dan realisasi pada tahun 2021 adalah 12,98 tahun, sehingga capaian kinerja jangka menengah untuk HLS pada tahun ketiga RPJMD adalah 91,99%.

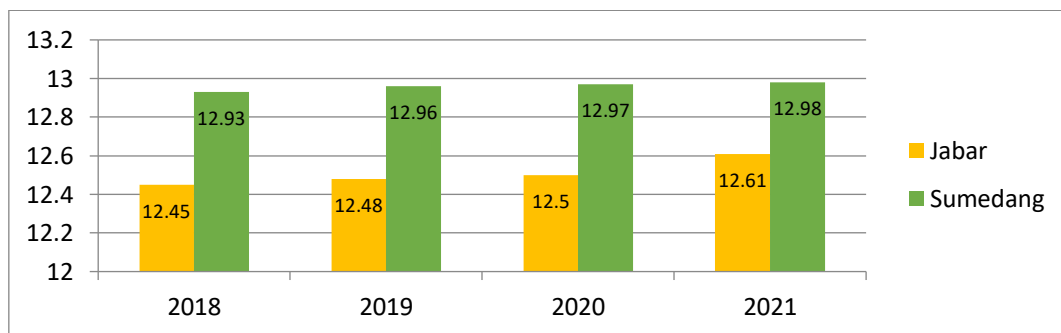
Tabel 2.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021
Angka Harapan Lama Sekolah	14,11 tahun	12,98 tahun	91,99%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/ Nasional

Dari tahun 2018 sampai 2021, HLS Kabupaten Sumedang selalu lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.1.3
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat



Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan



Capaian kinerja HLS ditunjang oleh capaian APK SD sebesar 97,60%; APK SMP 92,40%; APM SD 93,56%; APM SMP 77,72%; Persentase guru yang bersertifikat 84,42%; Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar/SD 1:24; Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar/SMP 1:24; Sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik 39,85%; APK PAUD 64,85%; dan Persentase PAUD yang terakreditasi 45,34%.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang mencukupi.
2. Adanya Bantuan Pendidikan berupa BOS untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK sehingga usia 7-21 tahun dapat melanjutkan pendidikan dengan lebih terjangkau.
3. Adanya Bantuan Pendidikan berupa BOP untuk jenjang PAUD dan Kesetaraan sehingga usia 7-21 tahun dapat melanjutkan pendidikan melalui Kesetaraan dengan lebih terjangkau.

Faktor Penghambat :

1. Masih ada sekolah yang belum terdata dalam dapodik, terutama sekolah baru.
2. Jarak tempuh dari rumah siswa menuju sekolah pada umumnya berbeda-beda. Sebagian orang tua terbebani putra-putrinya karena jarak jauh dengan alasan keterbatasan sarana transportasi dan biaya transportasi.

Solusi :

1. Pendayagunaan penilik dan pengawas dalam pendataan sekolah yang belum terdata dalam dapodik.
2. Memberikan sosialisasi kepada orang tua untuk menyadari bahwa belajar memerlukan perjuangan dan pengorbanan.
3. Mempermudah proses rekomendasi pendirian PKBM di daerah-daerah yang padat penduduk dan keterbatasan sarana transportasi agar tidak terbebani biaya transportasi.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggara program yang mendukung capaian kinerja HLS pada tahun 2021 adalah Rp. 271.991.941.000,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya adalah Rp. 256.703.321.837,00 atau 94,38%.

Tabel 2.15
Realisasi Anggaran Per Program Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Pendidikan	271.991.941.000,00	256.703.321.837,00	94,38

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja HLS tahun 2021 tidak dapat dihitung, karena capaian kinerja kurang dari 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program Penunjang Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan. Indikator kinerja Program untuk membidik Angka HLS tahun 2021 yaitu :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Angka partisipasi Kasar SD	Persen	107,03	97,60	91,19
Angka Partisipasi Kasar SMP	Persen	103,82	92,40	89,00
Angka partisipasi Murni SD	Persen	105,55	92,56	87,69
Angka Partisipasi Murni SMP	Persen	103,40	77,72	75,15
Persentase Guru yang Bersertifikasi	Persen	82,52	84,42	102,30
Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SD)	Rasio	1:27	1:24	83,91
Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SMP)	Rasio	1:32	1:24	79,35
Sekolah pendidikan Dasar Kondisi Bangunan baik	Persen	37,49	39,85	106,30
APK PAUD	Persen	89,71	64,85	79,29
Persentase PAUD yang terakreditasi	Persen	96,51	45,34	45,98

2.3.4 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Persentase Penduduk Miskin” tahun 2021 sebesar 7,36% dan realisasinya berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumedang sebesar 10,71% atau capaian kinerja sebesar 54,48% (kinerja rendah). Target kinerja tidak tercapai.

Tabel 2.16
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya penanggulangan MPKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,36	10,71	54,48%	Kinerja Rendah

Sumber : BPS

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi dan capaian kinerja Persentase Penduduk Miskin tahun 2021 mengalami penurunan. Persentase jumlah penduduk miskin tahun 2020 sebesar 10,26% sedangkan tahun 2021 sebesar 10,71% atau terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,45%.

Tabel 2.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021
dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya penanggulangan MPKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,16	10,26	74,27 %	7,36	10,71	54,48%	Realisasi dan Capaian Kinerja Menurun

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Persentase Penduduk Miskin adalah 5,76% dan realisasi pada tahun 2021 adalah 10,71%, dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Persentase Penduduk Miskin pada tahun ketiga RPJMD adalah 14,06%.

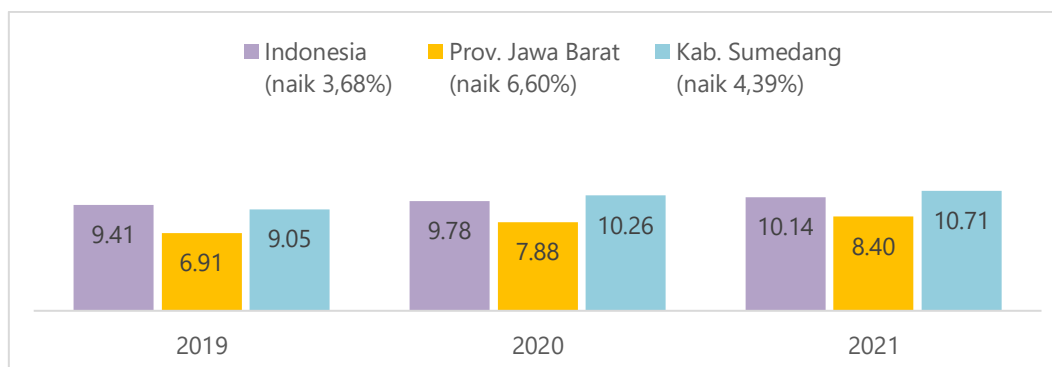
Tabel 2.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021
Persentase Penduduk Miskin	5,76%	10,71%	14,06%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Tingkat kemiskinan sejak adanya pandemi Covid-19 menunjukkan peningkatan di hampir semua wilayah. Jika dikomparasikan peningkatan kemiskinan di Kabupaten Sumedang dengan tingkat kemiskinan di level nasional dan regional Jawa Barat dari tahun 2020 ke 2021 maka peningkatan di Sumedang relatif lebih rendah dibandingkan Jawa Barat namun masih berada di atas peningkatan kemiskinan nasional.

Grafik 2.1.4
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang
Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia

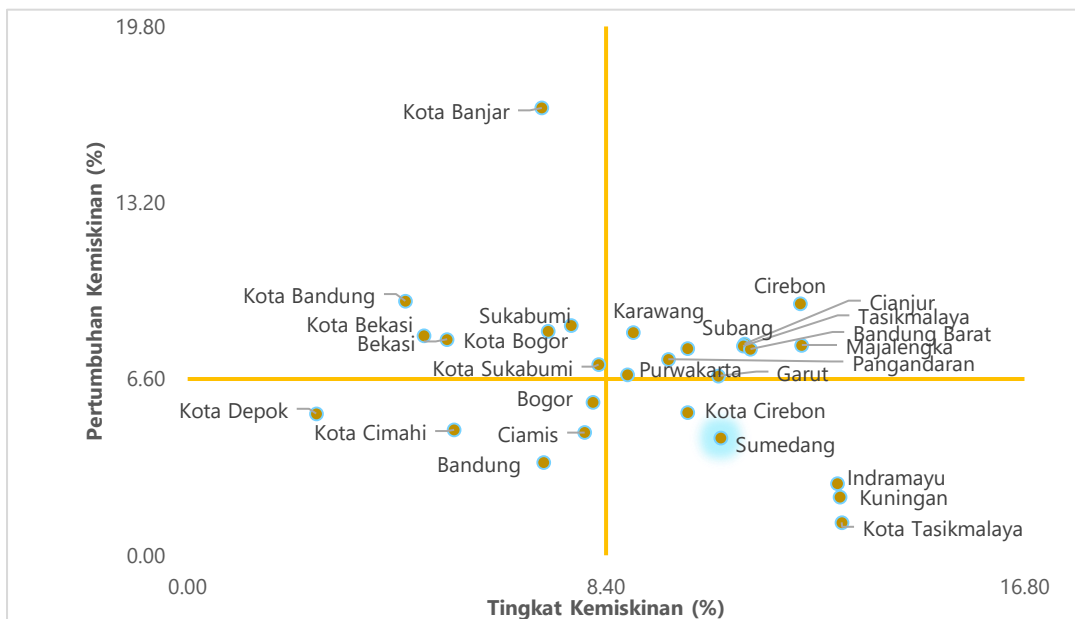




Sumber : BPS

Untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar wilayah, perlu dihitung persentase perubahan tingkat kemiskinan sehingga dapat menilai progress penurunan/peningkatan kemiskinan secara proporsional. Dengan kata lain, tidak cukup fair hanya membandingkan persentase atau jumlah penduduk miskin di setiap wilayah tanpa dilihat dari pertumbuhannya. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki kondisi awal tingkat kemiskinan yang berbeda-beda.

Grafik 2.1.5
Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

Peningkatan yang dialami Kabupaten Sumedang memang melebihi rata-rata peningkatan di Jawa Barat, namun dilihat dari pertumbuhan tingkat kemiskinan maka capaian Sumedang (4,4%) masih berada di bawah rata-rata Jawa Barat (6,6%). Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan penduduk miskin di Sumedang relatif lebih rendah dari rata-rata kabupaten kota di Jawa Barat.

Selain pertumbuhan kemiskinan yang lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang juga masih relatif lebih baik dari jumlah




penduduk miskin yang relatif lebih rendah, yaitu sekitar 126 ribu jiwa, dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat yang jika dirata-ratakan sekitar 155 ribu jiwa. Jika dikomparasikan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin maka posisi Kab. Sumedang masih berada di kuadran 2 yang lebih baik dari sisi jumlah penduduk miskin namun kurang menguntungkan dari persentase penduduk miskinnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pada tahun 2021 terjadi pandemi COVID-19 yang berakibat melemahnya perekonomian sehingga menambah jumlah penduduk miskin di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumedang. Peningkatnya penduduk miskin saat pandemi dikarenakan adanya penurunan pendapatan, penurunan kegiatan ekonomi, dan meningkatnya angka pengangguran. Penurunan pendapatan dikarenakan adanya kebijakan pengurangan jam kerja, dan penurunan daya beli konsumen. Penurunan kegiatan ekonomi atau usaha bangkrut disebabkan oleh penurunan permintaan pasar, kesulitan bahan bahan baku, dan meningkatnya ongkos produksi. Kemudian, adanya peningkatan angka pengangguran disebabkan oleh hilangnya pekerjaan buruh migran, tenaga kerja baru tidak terserap pasar kerja, dan terjadinya PHK.

Kebijakan dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang terdiri dari empat program utama, yaitu :

- 1) Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Sekolah gratis/BOS, Paket B dan C, JKN/Jamkesda/PBI, Jampersal, Rehab Rutilahu, PKH dan BNPT, Pamsimas, Rantang Simpati, Pelayanan Adminduk, PSC 119, Rumah Besar Simpati, Puskesmas, SSQR, Jumat Berkah, Serbu Desa, Tawadu (Tab Siswa Dhuafa), Bansos Covid-19).
- 2) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Padat Karya, KRPL, KUBE, UEP, UPPKS, Pemberdayaan Buruh Tani, Pemberdayaan Kelompok Ternak dan Ikan).
- 3) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (Kredit KUSUMA, Pengembangan desa produktif/OVOP, Koperasi Syariah, Bantuan Supras UMKM, Pelatihan Tenaga Kerja, Warung Pintar, Fasilitasi PIRT, Pembentukan Gerai Produk UMKM, Pujamari).

- 
- 4) Program Peningkatan Kegiatan Ekonomi (Magang Jepang, Transmigrasi, Peningkatan Infrastruktur Strategis, Pembangunan kawasan Wisata, KEK Jatigede, Kalender Event Wisata, Pemanfaatan dana CSR dan PKBL, Digital Marketing (e-Commerce), Penguatan BUMDes, Peningkatan investasi melalui penyerapan tenaga kerja lokal).

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Penduduk Miskin tahun 2021 sebesar Rp.13.786.920.700,00 yang terdiri dari 6 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.13.723.921.040,00 atau 99,54%.

Tabel 2.19
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Rehabilitasi Sosial	1.689.279.700,00	1.685.305.200,00	99,76
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	951.293.000,00	944.652.000,00	99,30
Program Pemberdayaan Sosial	1.200.000.000,00	1.181.103.500,00	98,43
Program Pengendalian Penduduk	202.789.950,00	202.339.950,00	99,78
Program Pembinaan Keluarga Berencana	8.605.040.350,00	8.576.042.690,00	99,66
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.138.517.700,00	1.134.477.700,00	99,65
Jumlah	13.786.920.700,00	13.723.921.040,00	99,54

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase Penduduk Miskin tahun 2021 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja



Program penunjang Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin, yaitu :

1. Program Rehabilitas Sosial

Capaian kinerja program, yaitu : 1) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang menerima bantuan pemakanan sebesar 100,22% (4.816 orang); 2) Persentase Penerima Bantuan Sosial Sandang sebesar 100%; 3) Persentase jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu 91,67%; dan 4) Persentase Pemberian Runifikasi Keluarga sebesar 100%.

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Capaian kinerja program, yaitu : 1) Tersusunya Dokumen Basis Data Terpadu sebanyak 1 dokumen; 2) Persentase DTKS yang menerima bantuan sebesar 99,54% (129.477 Orang).

3. Program Pemberdayaan Sosial

Capaian kinerja program, yaitu : persentase jumlah Puskesmas yang dibentuk di setiap desa sebesar 96,02% (266 Puskesmas).

4. Program Pengendalian Penduduk

Indikator kinerja Program Pengendalian Penduduk tahun 2021 yaitu Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) dengan target 9,06% dan realisasinya 8,5% atau capaian kinerja sebesar 100%.


5. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Indikator kinerja Program Pembinaan Keluarga Berencana tahun 2021 yaitu Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 dengan target 75,07% dan realisasinya 81,10% atau capaian Kinerja Sebesar 100%.

6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Indikator Kinerja Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera tahun 2021 yaitu :

- a) Cakupan Kelompok Bina Kelompok Balita (BKB) yang aktif dengan target 72,51% dan Realisasinya 56,08% atau Capaian Kinerja Sebesar 77,34% dapat diartikan Capaian Tinggi. Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang aktif dengan target 65,80% dan Realisasinya 39,24% atau Capaian Kinerja Sebesar 59,63%.
- b) Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif dengan target 63,60% dan Realisasinya 39,90% atau Capaian Kinerja Sebesar 62,73%.

- 
- c) Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS dengan target 53,79% dan Realisasinya 42.84% atau Capaian Kinerja Sebesar 79,64%.
 - d) Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita dengan Target 19,7 Tahun dan Realisasinya 22,11 Tahun.

2.3.5 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Indeks Pembangunan Gender” tahun 2021 sebesar 95,81 poin dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 95,18 poin atau capaian kinerja sebesar 99,34% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

Tabel 2.20
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya penanggulangan MPKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,81	95,18	99,34%	Sangat Tinggi

Sumber : BPS

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi IPG tahun 2021 sama dengan tahun 2020 yaitu 95,18 poin. Sedangkan untuk capaian kinerjanya justru menurun. Capaian kinerja tahun 2020 sebesar 99,83%, sedangkan tahun 2021 sebesar 99,34% atau terjadi penurunan sebesar 0,49%.



Tabel 2.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021
dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya penanggulangan MPKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,34	95,18	99,83%	95,81	95,18	99,34%	Realisasi Meningkat namun Capaian Kinerja Menurun

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah IPG adalah 96,75 poin dan realisasi pada tahun 2021 adalah 95,18 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah IPG pada tahun ketiga RPJMD sebesar 98,40%.

Tabel 2.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target
Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD

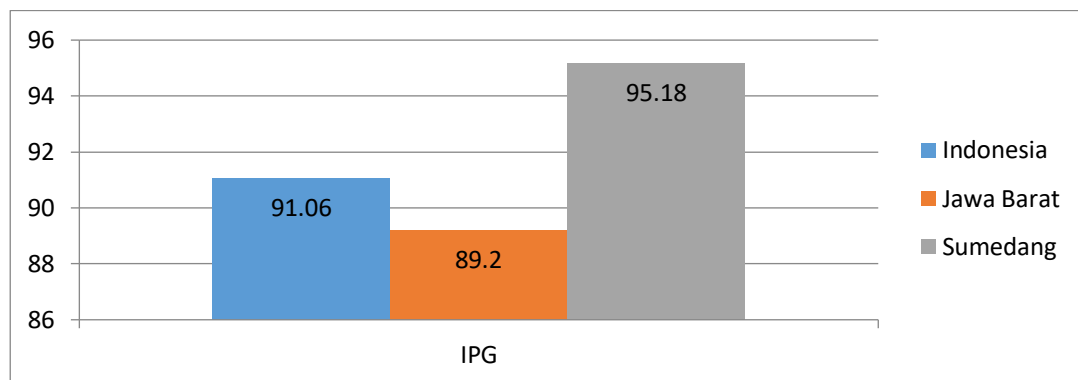
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021
Indeks Pembangunan Gender	96,75 poin	95,18 poin	98,40%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional



Meskipun demikian, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sumedang menjadi yang tertinggi di Jawa Barat sehingga mencerminkan pembangunan antara pria dan wanita di Sumedang sudah lebih merata dan mampu lebih baik dari wilayah kota. Perempuan di Kabupaten Sumedang sudah cukup dominan dalam harapan lama sekolah sehingga diharapkan kaum perempuan di masa mendatang dapat melahirkan generasi yang tangguh dan berkualitas.

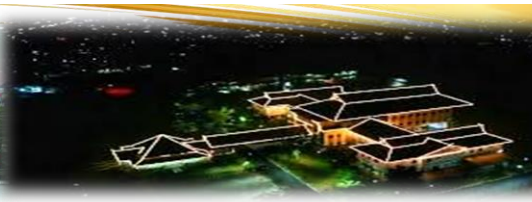
Grafik 2.1.6
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sumedang
Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020



Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

IPG mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan perbaikan kesetaraan gender dalam indikator pembentuk IPM. Hal ini ditunjang oleh program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 yaitu Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang terdiri dari Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang dituangkan dalam pelatihan GAP/GBS bagi pendata APE seluruh Dinas/Badan/Kantor, 26 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 22 desa, serta kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak dengan menghasilkan tiga dokumen tentang gender dan anak.



f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja IPG tahun 2021 adalah Rp.413.192.000,00 yang terdiri dari satu program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.384.510.000,00 atau 93,066%.

Tabel 2.23
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	338.192.000,00	309.510.000,00	91,52
Program Perlindungan Perempuan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
Jumlah	413.192.000,00	384.510.000,00	93,06

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja IPG tahun 2021 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Penunjang Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender, yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Indikator kinerja program yaitu Persentase OPD Responsif Gender dengan target 29,90% dan realisasinya 45,16% atau capaian kinerja 151,03%. Program ini terdiri dari kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh sub kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
2. Program Perlindungan Perempuan
Indikator kinerja program yaitu Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dengan target 100% dan capaian kinerjanya 100%. Program ini

terdiri dari kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

2.3.6 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Indeks Pemberdayaan Gender” tahun 2021 sebesar 70,3 poin dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 70,78 poin atau capaian kinerja sebesar 100,68% (kinerja sangat tinggi). Capaian kinerja telah melebihi target.

Tabel 2.24
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya penanggulangan MPKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	70,3	70,78	100,68 %	Sangat Tinggi

Sumber : BPS

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2020, IDG tahun 2021 menurun sebesar 0,16 poin, namun capaian kinerja meningkat.



Tabel 2.25
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya penanggulangan MPKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	69,77	70,94	101,67 %	70,3	70,78	100,68 %	Realisasi Menurun sedangkan Capaian Kinerja Naik

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah IDG adalah 71,37 poin dan realisasi pada tahun 2021 adalah 70,78 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah IDG pada tahun ketiga RPJMD sebesar 99,17%.

Tabel 2.26
Perbandingan Realisasi Kinerja IDG Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

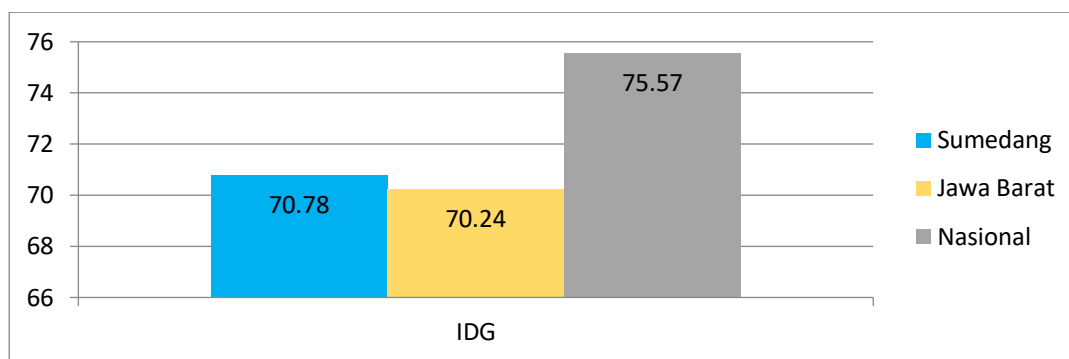
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021
Indeks Pemberdayaan Gender	71,37 poin	70,78 poin	99,17%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

IDG Kabupaten Sumedang tahun 2021 masih di bawah rata-rata nasional, namun lebih baik dari capaian Provinsi Jawa Barat. IDG Kabupaten Sumedang meskipun sudah berada di atas rata-rata Jawa Barat, namun masih dapat dipacu dengan peningkatan kompetensi perempuan menjadi tenaga profesional

dan memberikan sumbangan lebih besar pada pendapatan rumah tangga. Misalnya melalui peningkatan literasi dan interaksi digital.

Grafik 2.1.7
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional

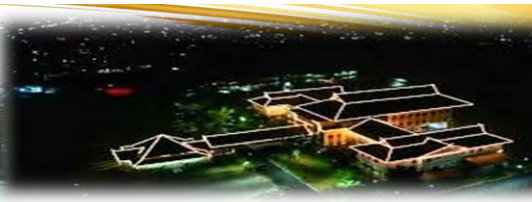


Sumber : BPS

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan gender, pengarusutamaan gender pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 dituangkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Indikator kinerja program yaitu Persentase OPD Responsif Gender dengan target 29,90% dan realisasinya 45,16% atau capaian kinerja 151,03%. Program ini terdiri dari kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh sub kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
2. Program Perlindungan Perempuan
Indikator kinerja program yaitu Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dengan target 100% dan capaian kinerjanya 100%. Program ini terdiri dari kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.



f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja IDG tahun 2021 adalah Rp.413.192.000,00 yang terdiri dari satu program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.384.510.000,00 atau 93,06%.

Tabel 2.27
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	338.192.000,00	309.510.000,00	91,52
Program Perlindungan Perempuan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
Jumlah	413.192.000,00	384.510.000,00	93,06

Capaian kinerja IDG tahun 2021 sebesar 100,68% dan realisasi anggaran program sebesar 93,06%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,62%.

Tabel 2.28
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Terwujudnya penanggulangan MPKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	100,68%	93,06%	7,62	Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender, yaitu :
3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



Indikator kinerja program yaitu Persentase OPD Responsif Gender dengan target 29,90% dan realisasinya 45,16% atau capaian kinerja 151,03%. Program ini terdiri dari kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh sub kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

4. Program Perlindungan Perempuan

Indikator kinerja program yaitu Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dengan target 100% dan capaian kinerjanya 100%. Program ini terdiri dari kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

2.3.7 INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Indeks Kerukunan Umat Beragama” tahun 2021 sebesar 73,5 poin dan realisasinya adalah 72,2 poin atau capaian kinerja sebesar 98,23% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

Tabel 2.29
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73,5	72,2	98,23%	Sangat Tinggi

Sumber : Bakesbangpol Kab. Sumedang

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2020, IKUB tahun 2021 realisasinya sama sedangkan capaian kinerjanya menurun dari semula 98,93% menjadi 98,23%.



Tabel 2.30
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kerukunan Umat Tahun 2021
dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2010			Tahun 2020			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73	72,2	98,93%	73,5	72,2	98,23%	Realisasi Tetap sedangkan Capaian Kinerja Menurun

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

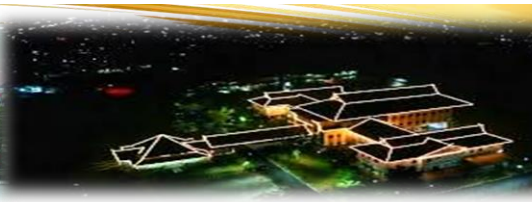
Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah IKUB adalah 74,5 poin dan realisasi pada tahun 2021 adalah 72,2 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah IKUB pada tahun ketiga RPJMD sebesar 96,91%.

Tabel 2.31
Perbandingan Realisasi Kinerja IKUB Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

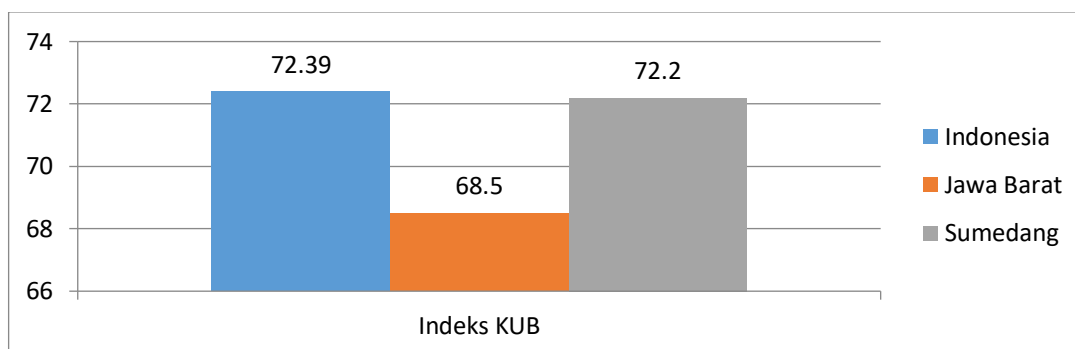
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021
Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,5 poin	72,2 poin	96,91%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Pada tahun 2021 IKUB Kabupaten Sumedang sebesar 72,2 poin, hal ini lebih besar dari indeks KUB Provinsi Jawa Barat yaitu 68,5 poin, namun lebih rendah dari rata-rata IKUB nasional sebesar 72,39 poin.



Grafik 2.1.8
Perbandingan IKUB Kabupaten Sumedang
Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2021



Sumber : Bakesbangpol Kab. Sumedang

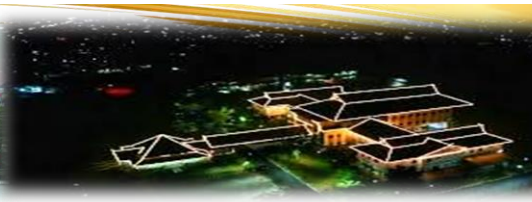
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegiatan atau upaya yang telah dilaksanakan oleh FKUB dalam rangka meningkatkan kerukunan antar umat beragama yaitu :

- 1) Diskusi bersama tokoh agama tentang persiapan pembangunan kantor/sekretariat FKUB Kabupaten Sumedang.
- 2) Woskshop FKUB dengan tema “Peran Tokoh Agama dan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan COVID-19”.
- 3) Pendataan jumlah penduduk pemeluk agama dan pendataan tempat ibadah.
- 4) Potensi konflik antar atau antara umat beragama dapat diatasi secara kekeluargaan yang didahului dengan menjaga sebelum konflik secara bersama-sama seleuruh elemen masyarakat baik tokoh agama, MUI, Ormas Agama, Kesbangpol, Kemenag, dan unsur forkopimda.
- 5) Pelaksanaan kegiatan hari besar keagamaan dilaksanakan sengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan FKUB yang difasilitasi oleh unsur Polres.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja IKUB tahun 2021 adalah Rp. 9.491.510.250,00 yang terdiri dari 6 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 9.308.114.250,00 atau 98,07%.



Tabel 2.32
Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja
IKUB Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.907.337.400,00	2.803.533.900,00	96,43
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	328.000.000,00	327.880.000,00	99,96
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	3.122.889.000,00	3.117.870.000,00	99,84
Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	31.390.000,00	28.159.000,00	89,71
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.406.746.400,00	2.379.766.400,00	98,88
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	695.147.450,00	650.904.950,00	93,64
Jumlah	9.491.510.250,00	9.308.114.250,00	98,07

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja IKUB tahun 2021 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator kinerja program adalah Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, dan ketentraman dengan target 100% dan realisasinya 100%.
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya



Indikator kinerja program yaitu Persentase konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan, target 100% dan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%.

- 3) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerja program yaitu Persentase konflik tidak menjadi konflik lingkup kewaspadaan nasional, target 100% dan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%.

- 4) Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator kinerja program yaitu Persentase konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan, target 100% dan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%.

- 5) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja program yaitu Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan target 100% dan terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan di seluruh kecamatan, terdiri dari kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

- 6) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja program yaitu Persentase konflik SARA yang ditangani dengan baik, dengan target 100% dan tercapai 100%. Program ini dilaksanakan di seluruh kecamatan, terdiri dari kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

2.3.8 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Laju Pertumbuhan Ekonomi” tahun 2021 sebesar 7,29% dan realisasinya 3,17% atau capaian kinerja sebesar 43,48% (kinerja sangat rendah). Target kinerja tidak tercapai.



Tabel 2.33
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
LPE Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,29	3,17	43,48%	Sangat Rendah

Sumber : BPS

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi dan capaian kinerja LPE tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 2.34
Perbandingan Realisasi Kinerja LPE Tahun 2021
dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,01	-1,12	- 15,98%	7,29	3,17	43,48%	Realisasi dan Capaian Kinerja Meningkatkan



c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah LPE adalah 7,88% dan realisasi pada tahun 2021 adalah 3,17%, sehingga capaian kinerja jangka menengah LPE pada tahun ketiga RPJMD sebesar 40,23%.

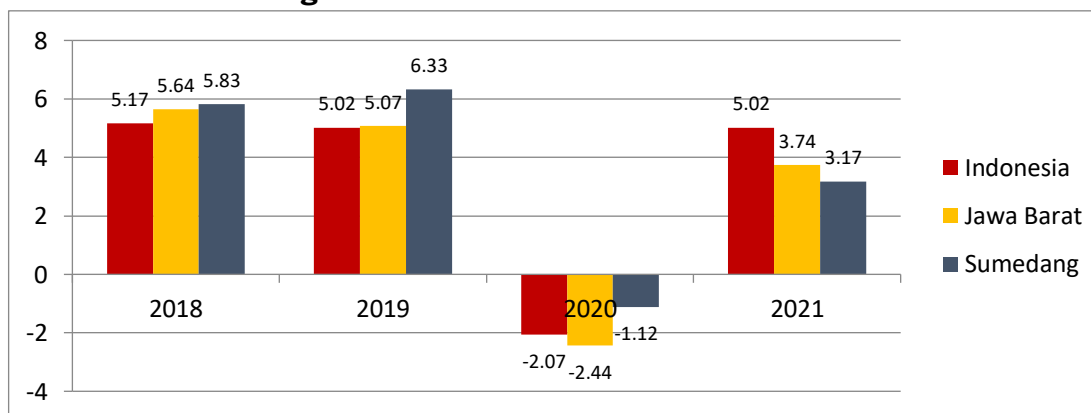
Tabel 2.35
Perbandingan Realisasi Kinerja LPE Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021
Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,88%	3,17%	40,23%

d. Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

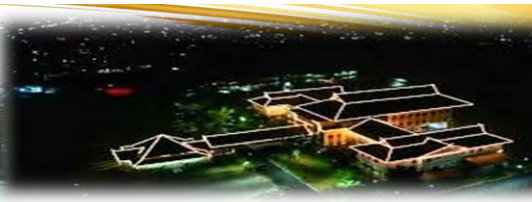
Pada tahun 2021, LPE Kabupaten Sumedang lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan nasional. Walaupun demikian Pertumbuhan ekonomi Sumedang mampu meningkat signifiakan dibandingkan tahun 2020.

Grafik 2.1.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang
Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia



Sumber : Bapppeda Kab. Sumedang

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan



Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah bahwa pandemi COVID-19 secara nyata telah mengganggu aktivitas perekonomian seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Sumedang di dalamnya. Selama pandemi, dunia usaha mengalami gangguan yang signifikan baik dalam proses produksi, distribusi dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian yang berdampak pada menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian Pertumbuhan ekonomi Sumedang mampu berakselerasi lebih cepat dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Adapun desain pemulihan ekonomi kabupaten tahun 2021 adalah melalui :

- Peningkatan akses infrastruktur ke tempat wisata.
- Pemberdayaan PMKS melalui usaha ekonomi produktif (KUBE).
- Peningkatan sarana prasarana koperasi.
- Penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan di UPTD Pasar.
- Penataan dan fasilitasi sarana prasarana UMKM.
- Pembinaan dan fasilitasi peningkatan produksi industri non agro dan kimia.
- Penyediaan sarana prasarana perikanan, peternakan, dan pertanian.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja LPE tahun 2021 adalah Rp. 81.017.205.024,00 yang terdiri dari 27 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 78.510.627.151,00 atau 96,91%.

Tabel 2.36
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
LPE Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	150.000.000,00	145.490.000,00	96,99
Program Promosi Penanaman Modal	200.000.000,00	196.348.500,00	98,17
Program Pelayanan Penanaman Modal	200.000.000,00	199.847.010,00	99,92
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	446.289.000,00	293.603.300,00	65,79
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	76.173.000,00	75.570.000,00	99,21



Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.682.373.000,00	7.866.812.800,00	90,61
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	650.500.000,00	642.660.800,00	98,79
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	754.487.300,00	737.953.400,00	97,81
Program Penangwasan Keamanan Pangan	50.000.000,00	49.360.000,00	98,72
Program Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan	25.524.001.000,00	25.154.237.062,00	98,55
Program Infomasi dan Komunikasi Publik	1.280.365.800,00	1.273.654.800,00	99,48
Program Aplikasi Informatika	6.663.166.400,00	6.427.135.593,00	96,46
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	80.000.000,00	78.077.728,00	97,60
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.808.285.000,00	1.705.082.647,00	94,29
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	359.300.000,00	347.419.250,00	96,69
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	94.010.000,00	91.431.000,00	97,26
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	765.000.000,00	736.445.990,00	96,27
Program Pengembangan Kebudayaan	1.112.540.000,00	1.107.529.900,00	99,55
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	335.950.000,00	335.083.000,00	99,74
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.851.237.000,00	5.614.566.380,00	95,96
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	15.144.951.250,00	14.793.350.379,00	97,68
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	313.657.500,00	282.077.050,00	89,93
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	69.950.550,00	60.764.250,00	86,87
Program Perizinan Usaha Pertanian	32.500.000,00	32.500.000,00	100,00



Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penyuluhan Pertanian	851.500.000,00	771.682.900,00	90,63
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8.950.968.224,00	8.925.475.912,00	99,72
Program Pemasaran Pariwisata	570.000.000,00	566.467.500,00	99,38
Jumlah	81.017.205.024,00	78.510.627.151,00	96,91

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja LPE tahun 2021 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi, yaitu :

1) Program pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu Persentase peningkatan Jumlah Investor. Dengan target tahun 2021 sebesar 40% dan sampai dengan triwulan I Tahun 2021 terealisasi sebesar 85,29% atau sebesar 213,24%. target tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Belum adanya data peta potensi investasi unggulan daerah yang lengkap sesuai dengan kondisi daerah.
- Belum adanya data potensi investasi yang sudah diolah dan dikembangkan menjadi peluang investasi melalui analisis.
- Implementasi kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagai upaya peningkatan daya Tarik investasi daerah

Solusi/rekomendasinya adalah :

- Dilakukan penyusunan data potensi investasi unggulan daerah yang lengkap sesuai dengan kondisi daerah dengan berkoordinasi dengan Bappppeda dan SKPD Teknis.
- Penyusunan studi kelayakan potensi investasi unggulan daerah
- Melaksanakan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Sumedang.

2) Program Promosi Penanaman Modal



Indikator kinerja program promosi penanaman modal yaitu persentase peningkatan minat investasi di Kabupaten Sumedang. Target kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar 5%. Berdasarkan data monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan Semester II tahun 2021 terealisasi sebesar 16,8 % atau sebesar 336%. target tercapai.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Belum adanya data peluang investasi unggulan daerah (sudah dilakukan analisis) sebagai bahan promosi
- Belum adanya dokumen strategi promosi investasi sebagai bahan atau acuan pelaksanaan kegiatan promosi

Solusi/rekomendasi yaitu :

- Koordinasi dengan SKPD teknis dan bidang Perencanaan dan Pengembanagan Iklim Penanaman Modal untuk memperoleh data peluang penanaman modal
- Penyusunan dokumen strategi promosi investasi di Kabupaten Sumedang.

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator kinerja program pelayanan penanaman modal yaitu persentase permohonan penanaman modal yang terfasilitasi, target kinerja tahun 2021 sebesar 80 %, berdasarkan data monitoring dan evaluasi sampai dengan semester II Tahun 2021 terealisasi sebesar 76,06 % atau sebesar 95,08%. Target tidak Tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Dengan adanya pemberlakuan UU Cipta Kerja dan Peraturan pemerintah turunannya terdapat peralihan aplikasi pelayanan perizinan dari Aplikasi SI ICE MANDIRI ke OSS RBA, khususnya untuk IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menuntut adanya penyesuaian Peraturan Daerah.
- Belum seluruh lapisan masyarakat mengetahui kebijakan kemudahan pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan online.

Solusi yang akan dilaksanakan adalah :

- Penyusunan Peraturan Daerah pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung.



- Pemberian layanan jemput bola ke tempat-tempat pelayanan dan keramaian masyarakat dan Peningkatan publikasi layanan melalui media sosial dan website

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator kinerja program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP, target kinerja Tahun 2021 sebesar 70%, berdasarkan data monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan Semester II Tahun 2021 tersealisasi sebesar 61,58% atau sebesar 87,97%. Target tidak Tercapai. Data tersebut diperoleh dari data investor yang wajib LKPM adalah sebanyak 570 perusahaan dan selama Tahun 2021 yang menyampaikan LKPM sebanyak 351 investor/proyek. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Belum adanya database jumlah investor Sumedang yang wajib LKPM
- Belum seluruh investor mengetahui kebijakan mengenai kewajiban menyampaikan LKPM
- Kemampuan Investor untuk melaporkan LKPM sangat terbatas

Solusi atas kendala tersebut yaitu :

- Penyusunan Database investor Kabupaten Sumedang yang wajib LKPM
- Sosialisasi melalui berbagai media mengenai kebijakan LKPM
- Pelatihan mengenai Aplikasi LKPM kepada Investor

5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator Kinerja program Pengelolaan data dan system informasi Penanaman Modal yaitu Persentase data Penanaman Modal dan Perizinan yang Valid, dengan target kinerja tahun 2021 adalah sebesar 100%. Berdasarkan data monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan Semester II Tahun 2021 terealisasi sebesar 100% atau sebesar 100%. Target tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu : Belum ada analisis data mengenai capaian Penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang. Solusi yang akan dilaksanakan yaitu : Penyusunan analisis data capaian Penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang yang dapat menggambarkan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan, permasalahan dan rekomendasi.



6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Indikator kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tahun 2021 yaitu Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum tahun dengan target sebesar 85% dan realisasinya 81,22% atau capaian kinerja sebesar 95,55%. Target kinerja belum tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu sebagai berikut:

- Penentuan lokasi mata air berubah-ubah.
- Jaringan pipanisasi yang melintasi tanah warga yang tidak memberikan izin sehingga jarak semakin panjang.
- Tidak adanya ganti rugi tanah yang dihibahkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Solusi/rekomendasinya adalah:

- Membuat surat pernyataan penentuan lokasi dan Pengukuran ulang untuk menentukan jarak (jumlah pipa) yang digunakan.
- Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat.
- Harus membuat surat pernyataan hibah tanah.

7) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Indikator kinerja program adalah Persentase sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang dikelola dengan target 100% dan realisasinya 100%

8) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Indikator kinerja program adalah Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita target 92,5% dan realisasinya 110,4%, capaian kinerja 119,35%.

9) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Indikator kinerja program adalah Persentase pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) target 100% dan realisasinya 100%.

10) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota dengan aktivitas penyusunan data base perhubungan dengan output dokumen data base Rambu-rambu lalu lintas yang tersebar berdasarkan ruas jalan di Kabupaten Sumedang, dan sub



kegiatan ke dua yaitu Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota dengan aktivitas Penyusunan data base harian rata-rata kendaraan untuk tiap ruas jalan dikabupaten sumedang dengan output yang dihasilkan dokumen LHR.

11) Program Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator kinerja program yaitu Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah, dengan target kinerja sebesar 42,50% dan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 sebesar 71,11% atau capaian kinerja sebesar 167,32%. Target kinerja mencapai 71,11% sangat jauh melebihi target kinerja yang ditentukan pada tahun anggaran 2021 sebesar 42,50%, walaupun koresponden yang mengisi pertanyaan seputar program-program unggulan cuma 1776 orang (masyarakat). Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Kurangnya pemahaman atau rendahnya penggunaan Informasi teknologi (IFTEK) di Masyarakat sebagai tolok ukur penilaian.
- Keterbatasan Jangkauan Informasi.
- Keterbatasan dalam pengelolaan sarana media komunikasi publik melalui media sosial dan web Diskominfo dan IT.
- Informasi yang disampaikan kurang informatif.

12) Program Aplikasi Informatika

Indikator kinerja program yaitu Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik dengan target 90% dan realisasi sampai akhir tahun 2021 sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar 111,11%, Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja ini yaitu Pemanfaatan sistem penghubung layanan aplikasi-aplikasi bidang keuangan dan aplikasi lainnya belum mendukung penerapan dan pengembangan SPBE; Layanan aplikasi tidak optimal.

13) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Indikator kinerja program yaitu Cakupan pengelolaan perikanan tangkap, target 100% dan realisasinya 100%.

14) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja program yaitu Cakupan kelestarian sumber daya perikanan di perairan umum, target 100% dan realisasi 100%, capaian kinerja 100%.



- 15) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Indikator kinerja program yaitu Cakupan pengelolaan perikanan budidaya, target 100% dan realisasi 100%.
- 16) Program Pengelahan dan pemasaran Hasil Perikanan
Indikator kinerja program yaitu Cakupan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, target 100% dan realisasinya 100%.
- 17) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Indikator kinerja program yaitu Persentase Dokumen Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri, dengan target 30% dan realisasinya sebesar 30% atau capaian kinerja 100%.
- 18) Program Pengembangan Kebudayaan
Indikator kinerja program yaitu persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dikembangkan dengan target 10 OPK (100%) dan capaiannya 9 OPK (90%). Kedala yang dihadapi adalah situasi wabah covid 19 yang belum berakhir, masih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPK) dan kurangnya penunjang kegiatan tersebut. Solusinya adalah dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut secara virtual (zoom).
- 19) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Indikator kinerja Program yaitu Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dengan target 1 (satu) Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola dan sudah terealisasi yaitu 1 (satu) Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola. Kedala yang dihadapi adalah situasi wabah covid 19 yang belum berakhir, masih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPK) dan kurangnya penunjang kegiatan tersebut. Solusinya adalah dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut secara virtual (zoom).
- 20) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Indikator kinerja program adalah :
 - Cakupan ketersediaan saran pertanian target 35,77% dan realisasinya 35,89%, capaian kinerja 100,34%.
 - Cakupan pengembangan sarana pertanian target 64,23% dan realisasinya 67,66%, capaian kinerja 105,34%.
 - Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, target 100% dan realisasinya 100%.
- 21) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Indikator kinerja program yaitu :



- Luas tambahan lahan yang terairi dengan target 1824 Ha dan realisasinya 2140 Ha, capaian kinerja 117,32%.
- Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, target 100% realisasinya 100%.

22) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Indikator kinerja program yaitu Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, target 100% dan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%.

23) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Indikator kinerja program :

- Cakupan pengendalian bencana pertanian, target 95% dan realisasinya 102,84%, capaian kinerja 108,25%.
- Cakupan penanggulangan bencana pertanian, target 15% dan realisasinya 18,50%, capaian kinerja 123,33%.

24) Program Perizinan Usaha Pertanian

Indikator kinerja program yaitu Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha peternakan yang diterbitkan, target 100% dan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%.

25) Program Penyuluhan Pertanian

Indikator program yaitu Persentase penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dengan target 38,77% dan realisasinya 40,43%, capaian kinerja 104,28%.

26) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Indikator Kinerja Program yaitu jumlah destinasi wisata yang dikembangkan dengan target 5 objek wisata dengan capaiannya 3 objek wisata. Target kinerja tidak tercapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu masih rendahnya penyerapan atau realisasi anggaran dikarenakan sebagian besar anggaran pada belanja modal (kontraktual) yang sampai dengan saat ini masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Sedangkan Solusinya adalah dengan mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan agar dapat mengajukan term nya sesuai dengan kontrak, sehingga penyerapan atau realisasi anggaran dapat meningkat.

27) Program Pemasaran Pariwisata



Indikator kinerja Program yaitu jumlah destinasi wisata yang dipromosikan dengan target 8 kali dengan capaiannya 9 kali melebihi target, hal ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, diantaranya :

- Dikukuhkannya kerjasama dengan akademisi (perguruan tinggi), diantaranya Universitas pendidikan Indonesia, melalui program kampus merdeka. Sehingga para mahasiswa berkewajiban.
- mempromosikan dan memonitoring objek wisata.
- Bekerjasama dengan media sosial baik cetak maupun elektronik.
- Bekerjasama dengan beberapa asosiasi Mitra kerja pariwisata, seperti PHRI, ASITA, GENPARI, PUTRI.

2.3.9 PERSENTASE TINGKAT KONDISI JALAN KABUPATEN MANTAP

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap” tahun 2021 sebesar 74,80% dan realisasinya sebesar 83,21% atau capaian kinerja sebesar 111,24% (kinerja Sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

Tabel 2.37

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	74,8	83,21	111,24	Sangat Tinggi

Sumber : DPUPR Kab. Sumedang

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi dan capaian kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap tahun 2021 mengalami peningkatan. Realisasi kinerja meningkat 6,23% sedangkan capaian kinerja meningkat 2,54%.



Tabel 2.38
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	70,8	76,98	108,70 %	74,8	83,21	111,24	Realisasi dan Capaian Kinerja Meningkat

Adapun kondisi jalan kabupaten pada tahun 2020 - 2021, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.39
Kondisi Jalan Kabupaten

No.	Kondisi Jalan Kabupaten	Realisasi Kerja					
		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Km	%	Km	%	Km	%
1	Kondisi Baik	366,921	47,38	422,232	54,53	392,495	50,69
2	Kondisi Sedang	180,942	23,37	173,760	22,44	251,878	32,53
3	Kondisi Rusak Ringan	108,089	13,96	29,326	3,79	70,019	9,04
4	Kondisi Rusak Berat	111,263	14,37	149,050	19,25	59,976	7,75
	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten	774,368	100	774,368	100	774,368	100

Sumber : DPUPR Kab. Sumedang

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap adalah 82,8% dan realisasi pada tahun 2020

adalah 76,96%, sehingga capaian kinerja jangka menengah Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap pada tahun ketiga RPJMD sebesar 92,95%.

Tabel 2.40

Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021
Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	82,8%	83,21%	100,50%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya target Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap di Kabupaten Sumedang adalah:

- 1) Dengan adanya penanganan rekonstruksi jalan Pada Tahun 2021 sepanjang 17,438 KM , rehabilitasi jalan sepanjang 3,637 KM, pemeliharaan rutin dan berkala sepanjang 26,174 KM dapat menambah kondisi jalan baik dan sedang menjadi 644,373 KM.
- 2) Meningkatnya nilai kegiatan pemeliharaan rutin;
- 3) Adanya kegiatan Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang (URCTL);
- 4) Kualitas database jalan dan jembatan semakin baik;
- 5) Survey database dilakukan oleh konsultan (Pihak Ke 3);
- 6) Adanya dukungan anggaran survey database pada alokasi perubahan;
- 7) Adaya kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Data Jalan Daerah (SIPDJD) yang dilaksanakan oleh Kemeterian PUPR setiap awal tahun.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap tahun 2021 adalah Rp.61.977.630.000,00

yang terdiri dari dua program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 55.893.624.697,00 atau 90,18%.

Tabel 2.41

**Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2021**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Jalan	58.163.480.000,00	52.113.574.747,00	89,60
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.814.150.000,00	3.780.049.950,00	99,11
Jumlah Total	61.977.630.000,00	55.893.624.697,00	90,18

Capaian kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap tahun 2021 sebesar 111,24% dan realisasi anggaran program sebesar 90,18%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 21,06%.

Tabel 2.42

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	111,24%	90,18%	21,06%	Efisien

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap, yaitu :



1) Program Penanganan Jalan dan Jembatan

Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Jalan tahun 2021 yaitu Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik dan Sedang dengan target sebesar 77,30% dan realisasinya 83,21% atau capaian kinerja sebesar 111,24 %. Target kinerja melebihi target dikarenakan : Meningkatnya nilai kegiatan pemeliharaan rutin; Adanya kegiatan Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang (URCTL); Kualitas database jalan dan jembatan semakin baik;

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Indikator kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase tahun 2021 yaitu Persentase Sistem Drainase Yang baik di wilayah perkotaan dengan target sebesar 45% dan realisasinya terealisasi 33,17%, tidak mencapai target disebabkan oleh Berkurangnya alokasi Anggaran pelaksanaan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase tahun 2021, sehingga Panjang penanganan drainase berkurang.

2.3.10 RASIO JARINGAN IRIGASI

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Rasio Jaringan Irigasi” tahun 2021 sebesar 66% dan realisasinya 67,02% atau capaian kinerja sebesar 101,55% (kinerja sangat tinggi). Capaian kinerja melebihi target.

Tabel 2.43
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	66	67,02	101,55 %	Sangat Tinggi

Sumber : DPUPR Kab. Sumedang



Data luas budidaya pertanian di Kabupaten Sumedang dan data luas area yang terairi dalam kondisi baik bersumber dari Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor 600/Kep.012/PUPR/2021. Berdasarkan data tersebut luasan total area budidaya pertanian sebesar 30.069 Ha yang tersebar dari 26 Kecamatan sedangkan data luas area yang terairi dalam kondisi baik sebesar 20.151,61 ha.

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Daerah irigasi yang terairi pada Tahun 2020 adalah sebesar 19.383,24 ha dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 20.151,61 ha (peningkatan seluas 768,37 ha). Realisasi maupun capaian kinerja Rasio Jaringan Irigasi tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020.

Tabel 2.44
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	64	64,46	100,72 %	66	67,02	101,55 %	Realisasi dan Capaian Kinerja Meningkat

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Rasio Jaringan Irigasi adalah 70% dan realisasi pada tahun 2021 adalah 67,02%, sehingga capaian

kinerja jangka menengah Rasio Jaringan Irigasi pada tahun ketiga RPJMD sebesar 95,74%.

Tabel 2.45
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021
Rasio Jaringan Irigasi	70%	67,02%	95,74%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja melebihi target, faktor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja, antara lain :

1. Adanya penanganan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan Luas Area yang terairi seluas 384,185 Ha Peningkatan Jaringan irigasi dengan luas penanganan seluas 230,511 Ha dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan luas area penanganan seluas 153,674 Ha sehingga total penanganan dari ketiga Sub kegiatan tersebut seluas 768,37 Ha dapat menambah Luas Area Irigasi dalam kondisi baik menjadi 20151,61 Ha.
2. Penanganan daerah Irigasi di Kabupaten Sumedang sesuai dengan Kewenangan yang telah ditetapkan.
3. Dilaksanakannya kegiatan rehabilitasi/perbaikan kondisi bangunan air dan saluran guna mengembalikan fungsi layanan jaringan irigasi.
4. Pelaksanakan pemberian air sudah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Air dan apabila ada kekurangan dalam pembagian air maka pelaksanaan pembagian giliran air sudah biasa dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Adapun permasalahan yang terjadi antara lain :



- Terbatasnya sumber daya manusia pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- Saluran dan bangunan irigasi pada jaringan irigasi teknis mengalami kerusakan berat.
- Terjadi alih fungsi lahan sehingga berkurangnya areal irigasi dan mengakibatkan meningkatkan koefisien aliran.
- Musim kemarau yang menyebabkan kekeringan.
- Database yang kurang memadai.

Adapun solusinya yaitu :

- Rehabilitasi jaringan irigasi guna mengabaikan fungsi layanan jaringan irigasi.
- Meningkatkan kondisi fisik jaringan irigasi.
- Peningkatan layanan irigasi dengan meningkatkan kapasitas kemampuan SDM atau petugas Operasi dan Pemeliharaan.
- Diperlukan pemuktahiran database.
- Perlu adanya inventarisasi jaringan irigasi dan aset irigasi secara berkala di daerah Kabupaten Sumedang.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Rasio Jaringan Irigasi tahun 2021 adalah Rp.29.600.148.000,00 yang terdiri dari satu program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.28.067.656.125,00 atau 94,82%.

Tabel 2.46
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	29.600.148.000,00	28.067.656.125,00	94,82

Capaian kinerja Rasio Jaringan Irigasi tahun 2021 sebesar 101,55% dan realisasi anggaran program sebesar 94,82%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,73%.



Tabel 2.47
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam Pencapaian Kinerja Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Rasio Jaringan Irigasi	101,55%	94,82%	6,73%	Efisien

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Penunjang Capaian Kinerja Rasio Jaringan Irigasi, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Indikator kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) tahun 2021 yaitu Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan target sebesar 45,20% dan realisasinya 45,20% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai karena adanya penanganan Sub Kegiatan meliputi Rehabilitasi Jaringan, Peningkatan Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi adanya penangan sepanjang 28.758,62 m' dapat menambah panjang irigasi dalam kondisi baik menjadi 955.327,95 m' (45,20%) dan menghasilkan Luas Area Irigasi yang terairi menjadi 20.151,61 Ha dan tercapai target Kinerja Rasio Jaringan Irigasi sebesar 67,02%

2.3.11 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" tahun 2021 sebesar 59,47 poin dan realisasinya berdasarkan data hasil pengujian Dinas Lingkungan Hidp dan Kehutanan Kabupaten Sumedang yang bekerja sama dengan Laboratorium Lingkungan Hidup yang berakreditasi terhadap tingkat pencemaran air sungai dan udara ambient serta data tutupan lahan hasil pencitraan Kenetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didapatkan angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang sebesar 62,26 poin

atau capaian kinerja sebesar % (kinerja sangat tinggi). Pencapaian kinerja telah melebihi target.

Tabel 2.48
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,47	62,26	104,69	Sangat Tinggi

Sumber : DLHK Kab. Sumedang

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang sebesar 62,26 poin termasuk kriteria “SEDANG”. Poin tersebut merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) sebesar 44,29 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 80,81 poin, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) IKTL sebesar 58,81 poin. Perhitungan dengan rumus baru sebagaimana Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LH Nomor : S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH untuk tahun 2020-2024, dengan rumus sebagai berikut :

$$IKLH = (0,367 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$$

Dengan kriteria Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.49
Kriteria IKLH

No	Nilai/Skor	Kriteria
1	90-100	Sangat Baik
2	70 – 89,9	Baik
3	50 – 69,9	Sedang
4	25 – 49,9	Buruk
5	0 – 24,9	Sangat Buruk



Pada tahun 2021 perhitungan IKLH dilakukan melalui aplikasi IKLH yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana Kabupaten/Kota dan Provinsi hanya menginput data hasil pengujian kualitas air, udara dan data tutupan lahan melalui link <https://ppkl.menlhk.go.id>.

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi dan capaian kinerja IKLH mengalami penurunan. Realisasi IKLH menurun 8,63 poin, sedangkan capaian kinerjanya menurun 15,1%.

Tabel 2.50
Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2021
dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,18	70,89	119,79 %	59,47	62,26	104,69 %	Realisasi dan Capaian Kinerja Menurun

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah IKLH adalah 60,11 poin dan realisasi pada tahun 2021 adalah 62,26 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah IKLH pada tahun ketiga RPJMD sebesar 103,58%. Dengan demikian target jangka menengah telah terlampaui.



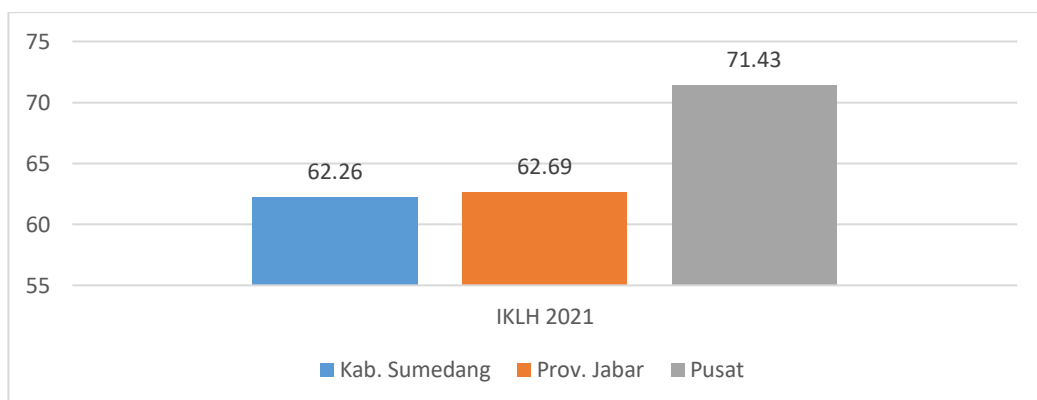
Tabel 2.51
Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,11 poin	62,26 poin	103,58%

d. Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

IKLH Kabupaten tahun 2021 hanya berada sedikit di bawah capaian Provinsi Jawa Barat, namun apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional perbedaannya cukup signifikan sebesar 9,17 poin.

Grafik 2.1.10
Perbandingan IKLH Tahun 2021 Kabupaten Sumedang
dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional



Sumber : DLHK Kab. Sumedang

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan



Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja IKLH tahun 2021 diantaranya adalah program Citarum Harum dan pemeliharaan tanaman hasil Rehabilitasi lahan Kritis di luar kawasan hutan pada tahun 2010 dimana sudah mulai teridentifikasi di citra sebagai tutupan lahan yang memadai. Adanya pandemi covid-19 sangat membantu memperbaiki lingkungan karena adanya pengurangan aktivitas industri, transportasi dan even-even tertentu yang acapkali berpotensi mencemari sungai, udara dan lahan yang bervegetasi baik.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja IKLH tahun 2021 adalah Rp. 121.891.515.086,00 yang terdiri dari 17 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 105.008.023.285,00 atau 86,15%.

Tabel 2.52
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja IKLH
Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	115.000.000,00	97.685.000,00	84,94
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	48.030.000,00	45.370.000,00	94,46
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	107.450.000,00	104.388.750,00	97,15
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	161.555.000,00	151.522.500,00	93,79
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	50.000.000,00	26.830.000,00	53,66
Program Pengelolaan Persampahan	3.965.720.000,00	3.959.214.500,00	99,84



Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	124.450.000,00	124.302.000,00	99,88
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	685.107.750,00	679.857.750,00	99,23
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	606.740.000,00	572.352.000,00	94,33
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.819.677.000,00	3.805.243.000,00	99,62
Program Pengembangan Permukiman	1.185.000.000,00	1.178.245.700,00	99,43
Program Penataan Bangunan Gedung	12.827.444.663,00	11.558.683.539,00	90,11
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	90.349.713.673,00	75.461.136.180,00	83,52
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	327.200.000,00	327.000.000,00	99,94
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.196.100.000,00	1.135.463.900,00	94,93
Program Kawasan Permukiman	4.102.327.000,00	3.623.420.800,00	88,33
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.220.000.000,00	2.157.307.666,00	97,18
Jumlah Total	121.891.515.086,00	105.008.023.285,00	86,15



Capaian kinerja IKLH tahun 2021 sebesar 104,69% dan realisasi anggaran program sebesar 86,15%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 18,54%.

Tabel 2.53
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	104,69%	86,15%	18,54%	Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu :

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Indikator kinerja program yaitu Persentase Kecukupan instrumen Pengelolaan Lingkungan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.

2) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Indikator kinerja program yaitu persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Lembaga yang Berperan Aktif Dalam Pengembangan Kapasitas Lingkungan dengan target sebesar 5,24% dan realisasinya 3,77% atau capaian kinerja sebesar 72,01%. Indikator kinerja program tersebut didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan 37 Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup



3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indikator kinerja program yaitu Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten dengan target sebesar 43,80% dan realisasinya 43,80% atau capaian kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja program tersebut didukung oleh Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan.

Indikator kinerja Program yaitu Persentase Pengujian Kualitas Air Sungai dengan target sebesar 62,90% dan realisasinya 62,90% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Indikator kinerja program tersebut didukung oleh Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Indikator kinerja Program yaitu Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan target sebesar 100% dan realisasinya 28,57% atau capaian kinerja sebesar 28,57%. Hal ini dikarenakan pada kegiatan tersebut bersifat situasional tergantung kepada pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jika dilihat dari indeks kualitas pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan sepertinya sudah lebih baik sehingga pengaduan menjadi lebih berkurang. Indikator kinerja program tersebut didukung oleh Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

6. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator kinerja Program Pengelolaan Persampahan tahun 2021 yaitu Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangi Melalui 3R dan Sektor Informal dengan target sebesar 30% dan realisasinya 16,34% atau capaian kinerja sebesar 54,47%. Indikator kinerja program tersebut didukung oleh Kegiatan Pengelolaan Sampah.

7. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya



Indikator kinerja program yaitu Persentase pengelolaan kawasan konservasi dengan target 66% dan realisasinya 666%, capaian kinerja 100%.

8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Indikator kinerja Program yaitu Persentase RTH Terkelola dengan target sebesar 11,11% dan realisasinya 11,11% atau capaian kinerja sebesar 100,00%. Target kinerja tercapai. Indikator kinerja program tersebut didukung oleh Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

9. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Indikator kinerja Program yaitu Timbulan Sampah yang Ditangani dengan target sebesar 70% dan realisasinya 76,90% atau capaian kinerja sebesar 90,13%. Target kinerja tidak tercapai. Indikator kinerja program tersebut didukung oleh Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Persampahan.

10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Indikator kinerja program yaitu Persentase rumah tangga bersanitasi, target 70% dan realisasinya 55,46%, capaian kinerja 79,23%.

11. Program Pengembangan Permukiman

Indikator kinerja program yaitu Persentase lingkungan permukiman kumuh, target 0,15% dan realisasinya 0,29%, capaian kinerja 51,72%.

12. Program Penataan Bangunan Gedung

Indikator kinerja program yaitu Persentase bangunan pemerintah tang tertata, target 58,75% dan realisasinya 61,25%, capaian kinerja 104,24%.

13. Program Penataan Bangunan dan lingkungannya

Indikator kinerja program yaitu Persentase bangunan pemerintah tang tertata, target 58,75% dan realisasinya 61,25%, capaian kinerja 104,24%.

14. Program Pengembangan Jasa Kontruksi

Indikator kinerja program yaitu Jumlah usaha jasa kontruksi yang memenuhi kualifikasi teknis di wilayah Kabupaten Sumedang dengan target sebesar 260 Penyedia Jasa dan realisasinya 265 Penyedia Jasa atau capaian kinerja sebesar 100 %.

15. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Persentase ketersediaan RTR dengan target sebesar 50 % dan realisasinya 50% atau capaian kinerja sebesar 100 % hal ini ditandai dengan



tersusunnya 2 dokumen RDTR (materi Teknis) dan 2 dokumen RRTR, selain itu juga dengan terpenuhinya 10 objek pemanfaatan ruang;

16. Program Kawasan Pemukiman

Indikator kinerja Program Kawasan Permukiman tahun 2021 yaitu Rasio Rumah Layak Huni dengan target sebesar 82% dan realisasinya 80,50% atau capaian kinerja sebesar 98,17%.

17. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Indikator kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tahun 2021 yaitu Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum tahun dengan target sebesar 85% dan realisasinya 81,22% atau capaian kinerja sebesar 95,55%.

2.3.12 INDEKS RISIKO BENCANA

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Indeks Risiko Bencana” tahun 2021 sebesar 145 poin dan realisasinya berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Sumedang adalah 124,39 poin atau capaian kinerja sebesar 114,21% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

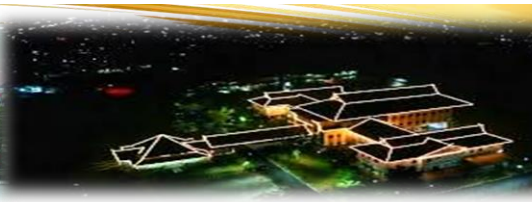
Tabel 2.54
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Risiko Bencana Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana	Poin	145	124,39	114,21 %	Sangat Tinggi

Sumber : BPBD Kab. Sumedang

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun terus menunjukkan tren menurun, dan ini merupakan hal yang baik, berarti risiko bencana semakin kecil. Pada tahun 2018 IRB sebesar 162 poin, tahun 2019 menurun menjadi 157 poin, tahun 2020 sebesar 142 poin, dan kembali turun tahun 2021 menjadi 124,39 poin.



Tabel 2.55
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2021
dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana	Poin	150	142,2	105,20 %	145	124,39	114,21 %	Realisasi dan Capaian Kinerja Meningkat

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

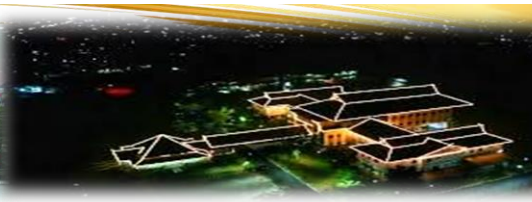
Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Indeks Risiko Bencana adalah 135 poin dan realisasi pada tahun 2021 adalah 124,39 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah Indeks Risiko Bencana pada tahun ketiga RPJMD sebesar 107,86%.

Tabel 2.56
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021
Indeks Risiko Bencana	135 poin	124,39 poin	107,86

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam yang terdiri atas kegiatan Pengelolaan Informasi Penanggulangan Bencana, Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana.



Upaya lain yang dilakukan untuk pengurangan indeks risiko bencana yaitu dengan dibuatnya kebijakan untuk penanggulangan bencana diantaranya yaitu Perda No. 3 Tahun 20117 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 360/Kep.439-BPBD/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang pengukuhan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Kabupaten Sumedang masa bhakti 2020-2023. Upaya selanjutnya adalah dengan penanaman seribu pohon di Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Cisitu dan Kecamatan Cimalaka serta penyebaran informasi kebencanaan berupa penyebaran booklet dan Peta Rawan Bencana di 26 Kecamatan dan adanya pemasangan Rambu-Rambu Daerah Rawan bencana di 51 Titik.

Kemudian didukung dengan adanya sistem informasi kebencanaan yang terdiri dari Sistem Peringatan Dini Pergerakan Tanah Early Warning System (EWS) di Kecamatan Sumedang Selatan dan Sistem Peringatan Gempa Bumi (inaTEWS). Selain dengan penyebaran informasi ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik mengenai kesiapsiagaan kebencanaan.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Indeks Risiko Bencana tahun 2021 adalah Rp. 4.423.358.800,00 yang terdiri dari 3 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 4.398.916.311,00 atau 99,45%.

Tabel 2.57
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja
Indeks Risiko Bencana Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penanganan Bencana	359.700.000,00	358.046.291,00	99,54
Program Penanggulangan Bencana	2.027.875.000,00	2.009.086.220,00	99,07
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.035.783.800,00	2.031.783.800,00	99,80
Jumlah	4.423.358.800,00	4.398.916.311,00	99,45

Capaian kinerja Indeks Risiko Bencana tahun 2021 sebesar 114,21% dan realisasi anggaran program sebesar 99,45%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,76%.



Tabel 2.58
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Indeks Risiko Bencana Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana	114,21%	99,45%	14,76%	Efisien

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Risiko Bencana, yaitu :

1) Program Penanganan Bencana

Indikator kinerja program yaitu Persentase Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan tercapai 100%, dan Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanganan Kebencanaan sebanyak 51 Orang.

2) Program Penanggulangan Bencana

Indikator kinerja program yaitu :

- Jumlah desa/kelurahan rawan bencana yang mendapatkan informasi peringatan dini bencana dengan target 277 desa/kelurahan dengan capaian kinerja 100%.
- Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan target 15 desa/kelurahan dengan realisasi 3 desa/kelurahan atau capaian kinerja 20%.
- Persentase kecepatan respons bencana kurang dari 24 jam dengan target 100% dan tercapai 100%.
- Persentase korban bencana yang diberikan bantuan dengan target 100% dan realisasinya 100%.



- Persentase pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan dengan target 100% dan realisasinya 40%.
- 3) Program Pencegahan, Penanganan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Indikator kinerja program adalah Tingkat waktu tanggap (response timerate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) target 90% dan realisasinya 84,16%, capaian kinerja 93,51%. Kendalanya dikarenakan ada beberapa kasus kebakaran yang lokasinya jauh dan sulit dijangkau sehingga sehingga tidak terlayani sesuai waktu tanggap 15 menit (response timerate).

2.3.13 OPINI BPK

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Opini BPK” tahun 2021 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan realisasinya berdasarkan data dari BPK adalah WTP atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

Tabel 2.59
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Opini BPK
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi

Sumber : BPKAD Kab. Sumedang

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Predikat WTP telah diraih selama 7 tahun berturut-turut semenjak tahun 2015 (atas laporan keuangan tahun 2014).



Tabel 2.60
Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2021
dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	Realisasi dan Capaian Kinerja Stabil

Sumber : BPKAD Kab. Sumedang

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Opini BPK adalah WTP dan realisasi pada tahun 2020 adalah WTP, sehingga capaian kinerja jangka menengah Opini BPK pada tahun ketiga RPJMD sebesar 100%.

Tabel 2.61
Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021
Opini BPK	WTP	WTP	100%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan



Target kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk capaian realisasi tahun 2021 adalah WTP sehingga capaian kinerja telah 100%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam penjelasan Pasal 16 disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Selama waktu pencapaian opini WTP, terdapat tantangan dan juga strategi serta upaya pencapaian dalam mempertahankannya. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian opini BPK terhadap laporan keuangan dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu:

1. Keterbatasan SDM;
2. Komitmen stakeholder;
3. Kompleksitas transaksi audit oleh BPK RI;
4. Keterbatasan waktu; dan
5. Keterbatasan teknologi informasi.

Sedangkan sebagai strategi dan upaya mencapai serta mempertahankan opini BPK terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Regulasi dan kelembagaan
 - Menyempurnakan peraturan yang ada;
 - Menyempurnakan SOP;
 - Membuat daftar masalah dan solusinya (MR);
 - Memastikan semua transaksi ada dasar hukumnya.
2. Sumber Daya Manusia
 - Peningkatan komitmen jajaran pimpinan daerah dan stakeholder lainnya dalam mendukung pelaporan keuangan yang berbasis akrual;
 - Penguatan nilai-nilai organisasi dengan fakta integritas;
 - Sosialisasi dan pelatihan akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
 - Melakukan bimbingan langsung dalam penyelesaian masalah helpdesk.
3. Teknologi informasi
 - Menyediakan sarana dan prasarana teknologi pendukung informasi;



- Koordinasi dengan pembuat aplikasi terkait akuntansi dan aset.
4. Sistem Pengendalian Internal
 - Peningkatan peran Inspektorat daerah dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui review laporan keuangan
 - Menyempurnakan system pengendalian internal dari tahap penganggaran hingga pertanggungjawaban;
 - Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan auditor internal maupun eksternal.
 5. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan
 - Membuat timeline serta target penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;
 - Melakukan monitoring secara berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan LKPD;
 - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan auditor untuk memastikan tindak lanjut sudah sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan.
 6. Adanya sinergi antar stakeholder, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Pemeriksa Laporan Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan program-program yaitu : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; Program Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Sekretariat Daerah; dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Opini BPK tahun 2021 adalah Rp. 484.663.111.876,00 yang terdiri dari 3 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 414.920.043.091,00 atau 85,61%.

Tabel 2.62
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja
Opini BPK Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	476.463.643.474,00	407.314.300.201,00	85,49



Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.422.181.000,00	1.330.200.730,00	93,53
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.777.287.402,00	6.275.542.160,00	92,60
Jumlah	484.663.111.876,00	414.920.043.091,00	85,61

Capaian kinerja Opini BPK tahun 2021 sebesar 100% dan realisasi anggaran program sebesar 85,61%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,39%.

Tabel 2.63
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Opini BPK Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	100%	85,61%	14,39%	Efisien

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Opini BPK, yaitu :

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ini mempunyai 2 (Dua) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Utama Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, yaitu:

a) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, indikator kinerja :

1. Penempatan uang daerah dan penatausahaan penempatan uang daerah; perhitungan alokasi dana transfer ke desa; rekonsiliasi data



transaksi harian; perhitungan silpa RKUD; penatausahaan utang dan piutang daerah; penagihan piutang daerah; penerbitan surat pengesahan pendapatan dan belanja daerah yang tidak melalui RKUD.

2. RAK murni dan Perubahan SKPD, RAK Daerah, Surat Pencairan Dana (SPD).
 3. Sosialisasi kebijakan dana transfer, lembar konfirmasi transfer, laporan realisasi belanja dana spesifik, laporan realisasi DAU, laporan realisasi DTU, rekonsiliasi belanja dana spesifik, perhitungan silpa dana spesifik, fasilitasi penyaluran dana spesifik, rekonsiliasi dana desa.
 4. Verifikasi SPM, register SP2D terbit, penerbitan SP2D, Advis SP2D, laporan posisi kas, evaluasi belanja, rekonsilias belanja, rekonsiiasi iuran jaminan kesehatan, rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan perangkat desa, rekonsiliasi iuran wajib pegawai, pemutakhiran ata penerima dana PFK, perhitungan alokasi dana transfer ke desa.
 5. Petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan.
 6. SK Tim, Modul Learning Management System (LMS), FG Evaluasi LMS, Workshop, bimbingan teknis, pendampingan aplikasi SIPD, evaluasi penatausahaan belanja.
- b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, indikator kinerja :
1. Dokumen register penerimaan kas daerah dan register pengeluaran kas daerah.
 2. Berita acara rekonsiliasi neraca, berita acara rekonsiliasi LRA dan berita acara rekonsiliasi LO tahun anggaran 2021 per OPD.
 3. Laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran pemerintah daerah kabupaten TA 2021.
 4. Laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran pemerintah daerah kabupaten TA 2021.
 5. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020, Perda tentang Pertanggungjawaban



Pelaksanaan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020.

6. Laporan hasil tindak lanjut BPK.
 7. Dokumen analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 8. Dokumen panduan dan kebijakan akuntansi.
 9. Dokumen sistem dan prosedur akuntansi.
 10. Pembinaan sistem akuntansi keuangan daerah.
 11. Dokumen laporan keuangan.
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ini mempunyai 1(Satu) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Utama Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, yaitu: Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan indikator kinerja :
- Tersusunya Rancangan Peraturan Bupati tentang Satuan Standar Harga, HSPK dan SBU Tahun Anggaran 2022 yang benar dan akurat.
 - Tersusunya Rancangan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
 - Tersusunya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Paket pemeliharaan Aplikasi pengelolaan BMD dan tersusunnya dokumen pelaporan BMD disertai rincian BMD sesuai kondisi sebenarnya.
 - Terbangunnya tanda batas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan pemasangan plang dan tanda batas pada asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
 - Tersusunya laporan hasil penilaian barang milik daerah dan berita acara penilaian barang milik daerah yang benar dan akurat.
 - Laporan belanja modal sesuai dengan fisik barangnya.
 - Tersusunya berita acara pemindahtangan, penghapusan barang milik daerah.
 - Dokumen rincian barang ke neraca.
 - Pengurus barang yang mengikuti bimtek.
- 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



Indikator kinerja Program yaitu Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 18.99% dan realisasinya 17.38% atau capaian kinerja sebesar 91.52%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 87.07% yang ditunjang Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah mencapai 98.90%, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah 98.63%, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah mencapai 98.41%, Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah mencapai 98.85%, Penilaian PBB P2 dan BPHTB mencapai 93.63%, Penetapan Wajib Pajak mencapai 96%, Penagihan Pajak Daerah mencapai 87.17 serta Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah mencapai 97.61%.

2.3.14 NILAI SAKIP KABUPATEN

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Nilai SAKIP Kabupaten” tahun 2021 adalah Kategori A (80,01 – 90,00) sedangkan realisasinya berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/291/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 adalah BB (71,53) atau capaian kinerja sebesar 89,40% (kategori kinerja tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

Tabel 2.64
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A	BB	89,40%	

Sumber : Kemen PANRB

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi kinerja nilai SAKIP pada tahun 2021 mengalami peningkatan, namun capaian kinerjanya menurun.

Tabel 2.65
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	BB	B	96,07%	A	BB	89,40%	Realisasi Kinerja Meningkat dan Capaian Kinerja Menurun

Adapun perbandingan hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.66
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi		
			2019	2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,40	27,26	24,78
2.	Pengukuran Kinerja	25	15,03	16,49	17,86
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,30	10,80	11,89
4.	Evaluasi Kinerja	10	6,28	4,03	6,01
5.	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20	7,97	8,68	10,99
Jumlah		100	60,98%	67,26%	71,53

Sumber : Bagian Organisasi Setda

Tabel 2.67
Peringkat Nilai SAKIP

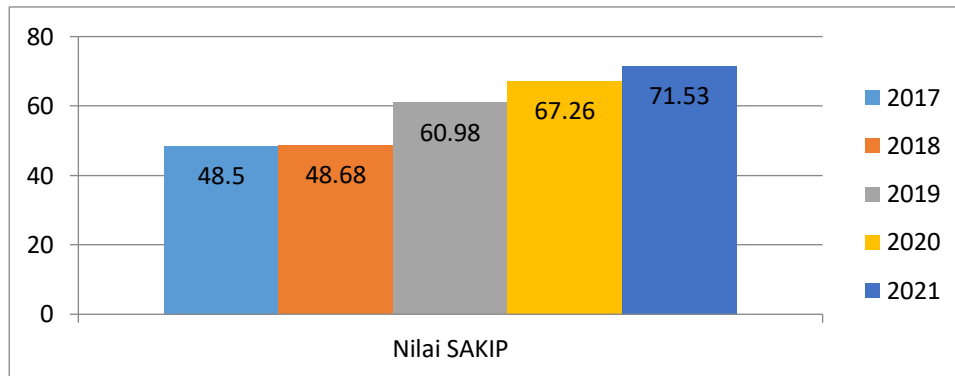
Peringkat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan



Peringkat	Nilai	Interpretasi
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Nilai SAKIP Kabupaten Sumedang dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan tren terus meningkat. Peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dari sebesar 48,50 poin (Predikat C) dan menempatkan Kabupaten Sumedang pada peringkat ke 27 dari 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat, menjadi sebesar 71,53 poin (Predikat BB) dan menempatkannya pada peringkat ke 5 di Provinsi Jawa Barat.

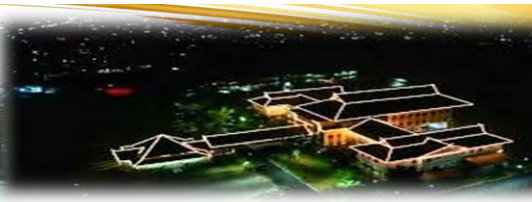
Grafik 2.1.11
Perkembangan Nilai SAKIP



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Sumedang

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Nilai SAKIP Kabupaten adalah A dan realisasi pada tahun 2021 adalah BB, sehingga capaian kinerja jangka menengah Nilai SAKIP Kabupaten pada tahun ketiga RPJMD sebesar 89,40%.



Tabel 2.68
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021
Nilai SAKIP Kabupaten	A	BB	89,40

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Kendala	Solusi
1.	Rumusan tujuan dan sasaran pada RPJMD dan Renstra belum seluruhnya berorientasi hasil dan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja yang terukur.	Reviu RPJMD dan Renstra PD untuk merevisi indikator kinerja tujuan dan sasaran supaya berorientasi hasil dan SMART
2.	Aplikasi e-planning, e-budgeting dan e-SAKIP namun belum sepenuhnya terintegrasi.	Integrasi aplikasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dalam e-Office
3.	IKU Pemda, IKU OPD, dan IKI belum seluruhnya memenuhi kriteria SMART	Reviu IKU dan IKI melalui cascading kinerja berdasarkan Permenpanrb No. 89 Tahun 2021 dan Permenpanrb No. 8 Tahun 2021
4.	Capaian IKI belum dijadikan dasar pemberian <i>reward and punishment</i> diantaranya pada penentuan besaran TPP	Perubahan Perbup TPP untuk penyesuaian dengan Kepmendagri No. 900-4700 Tahun 2020
5.	Analisis capaian kinerja belum seluruhnya sesuai Permendagri No. 53 Tahun 2014	Bimbingan teknis teknis penyusunan laporan kinerja bagi PD



No.	Kendala	Solusi
6.	Laporan kinerja belum seluruhnya dijadikan dasar perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.	Laporan kinerja harus dijadikan dasar perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya yang bisa terakomodasi dari hasil evaluasi triwulanan yang dilengkapi dengan rencana aksi tindak lanjut
7.	Beberapa rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat belum ditindaklanjuti oleh sebagian pimpinan PD secara optimal untuk peningkatan budaya kinerja tinggi di tingkat PD, dan evaluasi program yang dilakukan belum mencakup keseluruhan program dan kegiatan, sehingga masih memiliki potensi terjadinya inefisiensi dan inefektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat PD	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring dan evaluasi oleh Gugus Tugas SAKIP untuk memastikan rekomendasi atas evaluasi internal ditindaklanjuti oleh setiap PD.- Dokumen LKIP menyajikan evaluasi seluruh program kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran / IKU
8.	Secara umum capaian kinerja yang ditetapkan dalam PK tingkat Pemda tahun dapat berhasil dicapai, namun masih ada beberapa indikator kinerja yang target capaiannya di bawah 100%, yaitu sebanyak 8 indikator kinerja capaian kerjanya berkisar antara 83,00% - 99,00%.	<ul style="list-style-type: none">- Pemberian motivasi melalui pemberian <i>reward and punishment</i> oleh Bupati/Wabup terhadap setiap PD supaya meningkatkan kinerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK)- Reviu / rasionalisasi target IKU terutama indikator kinerja yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19



Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah berupaya memenuhi persyaratan minimum requirement untuk memperoleh predikat A, antara lain sebagai berikut :

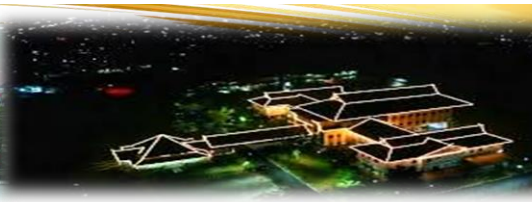
- 1) SAKIP telah berbasis digital dan telah terintegrasi melalui penerapan aplikasi MAUTI (Mari Unjuk Kinerja untuk Sumedang Simpati), serta telah dilakukan cascading sampai ke Indikator Kinerja Individu (IKI) dan sedang dikembangkan terkoneksi dengan manajemen kinerja ASN.
- 2) Aplikasi MAUTI (SAKIP Digital) telah diterapkan di seluruh perangkat daerah (SKPD Kabupaten dan Kecamatan), dan dapat dijadikan rujukan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah tahun berikutnya.
- 3) Telah dilahirkan inovasi SAKIP Desa yang secara sistemik kami desain untuk turut mengakselerasi kinerja implementasi SAKIP Kabupaten Sumedang. Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sumedang, terutama terkait dengan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting dan peningkatan kualitas pelayanan publik, telah di cascading sampai dengan tingkat desa. Disamping itu pula saat ini telah diterbitkan kebijakan pembangunan Zona Integritas Desa sebagai bentuk komitmen bagi terwujudnya Pemerintah Desa yang bebas dari KKN.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Nilai SAKIP Kabupaten tahun 2021 adalah Rp. 1.696.583.557.879,00 yang terdiri dari 11 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.565.224.712.699,00 atau 92,26%.

Tabel 2.69
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja
Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2021

Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.661.384.662.329,00	1.531.361.741.907,00	92,17



Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	143.000.000,00	143.000.000,00	100,00
Program Penataan Desa	525.050.000,00	518.220.000,00	98,70
Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.818.565.000,00	1.795.328.700,00	98,72
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.444.574.800,00	6.289.802.248,00	97,60
Program Perekonomian dan Pembangunan	1.034.478.000,00	1.016.148.000,00	98,23
Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18.151.812.250,00	17.232.560.644,00	94,94
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.714.621.250,00	1.632.711.250,00	95,22
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.607.512.050,00	4.501.929.250,00	97,71
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	359.795.000,00	347.790.000,00	96,66
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	399.487.200,00	385.480.700,00	96,49
Jumlah Total	1.696.583.557.879,00	1.565.224.712.699,00	92,26

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Nilai SAKIP Kabupaten tahun 2021 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja



Program penunjang Capaian Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten, yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program penunjang semua pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang terdiri dari dukungan yang bersifat administratif, keuangan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, sarana prasarana, atau dukungan lainnya. Program ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

2) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator program yaitu Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik dengan target kinerja sebesar 95% dan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 sebesar 98,33% atau capaian kinerja sebesar 103,51%.

3) Program Penataan Desa

Indikator kinerja program yaitu Cakupan Desa yang Menerima Program Penataan Desa dengan target 39% dan realisasinya 39%, atau capaian kinerja 100%.

4) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator kinerja program yaitu Cakupan Desa Administrasi dengan target 100% dan realisasinya 100%.

5) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator kinerja Program, yaitu:

- a. Persentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang berkategori "baik" dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100%.
- b. Nilai LPPD dengan target skor sebesar 3,45 dan realisasinya 3,45 atau capaian kinerja sebesar 100%.
- c. Persentase tertib administrasi kewilayahan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
- d. Persentase Perangkat Daerah bidang Kesehatan, sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan olahraga yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik" serta fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan. dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.



- e. Persentase pemrosesan rancangan produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
 - f. Persentase cakupan pengaduan hukum yang ditindak lanjuti, dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
 - g. Persentase pemutakhiran data pada website JDIH secara berkelanjutan, dengan target sebesar 100% dan 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
 - h. Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindak lanjuti kedalam perjanjian Kerjasama, dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
 - i. Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam rencana aksi yang jelas dan terukur, dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
- 6) Program Perekonomian dan Pembangunan.
- Indikator kinerja program yaitu :
- Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori Baik, target 100% dan realisasinya 75%, capaian kinerja 75%.
 - Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan triwulanannya berkategori Baik, target 100 dan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%.
 - Tingkat Kematangan UKPBJ, target Level 4 dan realisasinya Level 2, capaian kinerja 50%.
 - Capaian realisasi pengadaan barang dan jasa terhadap jumlah usulan, target 100% dan realisasi 100%, capaian kinerja 100%.
 - Persentase Perangkat Daerah bidang SDA, Pertanian, Sarana Ekonomi, Perdagangan, dan UMKM yang target capaian kerjanya berkategori Baik, target 100% dan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%.
- 7) Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- Indikator kinerja program yaitu terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tercapai 100%.
- 8) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja Program yaitu Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target 100% dengan realisasi sebesar 93,73% atau capaian kinerja sebesar 93,73%.

- 9) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
Indikator Kinerja Program yaitu Persentase ketercapaian Target Program pembangunan pemerintahan dan pembangunan Manusia berkatagori Baik, persentase ketercapaian target program pembangunan perekonomian dan SDA berkatagori baik serta persentase ketercapaian target program pembangunan infrastruktur dan kewilayahan berkatagori baik dengan target kinerja 100% dengan realisasi sebesar 96,27% atau capaian kinerja sebesar 100%.
- 10) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Indikator Kinerja Program yaitu Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan dengan target kinerja 100% dengan realisasi sebesar 96,66% atau capaian kinerja sebesar 100%.
- 11) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Indikator kinerja program yaitu Persentase Desa yang Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Desa dengan target 100% dan tercapai 100%.

2.3.15 INDEKS REFORMASI BIROKRASI

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” tahun 2021 sebesar 75 poin dan realisasinya berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/264/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 adalah 66,74 poin atau capaian kinerja sebesar 88,99% (kinerja tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

Tabel 2.70
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75	66,74	88,99%	Tinggi

Sumber : Kemen PANRB



b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

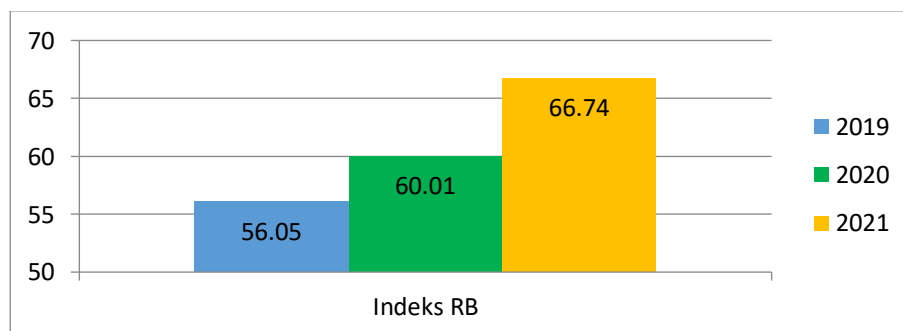
Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi dan capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan.

Tabel 2.71
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

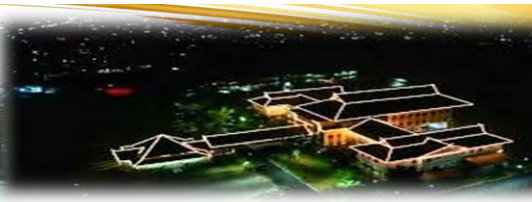
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	70	60,01	85,73 %	75	66,74	88,99 %	Realisasi dan Capaian Kinerja Meningkat

Indeks Reformasi Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun menunjukkan tren terus meningkat. Indeks RB pada Tahun 2019 sebesar 56,05 poin dan pada tahun 2020 sebesar 60,01 poin. Pada tahun 2021 indeks RB kembali naik menjadi sebesar 66,74 poin.

Grafik 2.1.12
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumedang



Sumber : Bagian Organisasi



c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Indeks Reformasi Birokrasi adalah 85 poin dan realisasi pada tahun 2021 adalah 66,74 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun ketiga RPJMD sebesar 78,52%.

Tabel 2.72
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021
Indeks Reformasi Birokrasi	85 poin	66,74 poin	78,52%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Indeks Reformasi Birokrasi yaitu :

No.	Kendala	Solusi
1.	Pelaksanaan RB pada PD belum merata dan sebaik pada tingkat Pemda	Roadshow Pembinaan Reformasi Birokrasi ke seluruh Perangkat Daerah dengan melibatkan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah
2.	Kinerja Agen Perubahan belum optimal	Pembinaan kinerja Agen Perubahan
3.	Monitoring rencana aksi belum optimal	Monev Rencana Aksi RB di tingkat Perangkat Daerah secara berkala



No.	Kendala	Solusi
4.	Kinerja assessor belum optimal	Bimtek Assessor dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang Reformasi Birokrasi dengan narasumber dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat
5.	Peta keterkaitan antara kebijakan Pemda dan PD belum sepenuhnya disusun	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah telah menindaklanjuti/menjabarkan Roadmap RB tingkat Pemda ke dalam Renaksi RB di setiap Perangkat Daerah - Telah disusun Tabel Keselarasan Renstra OPD dengan RPJMD, dan Tabel Keselarasan Renja OPD dengan RKPD.
6.	Kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum diterapkan	Telah dilaksanakan penyetaraan dan pelantikan pada tanggal 31 Desember 2021
7.	Penguatan sistem manajemen SDM masih belum sepenuhnya optimal, antara lain hasil pemetaan talenta belum seluruhnya dijadikan dasar penempatan dan mutasi	Sedang proses pembuatan aplikasi Manajemen Talenta (talent pool)
8.	Pembangunan zona integritas belum dilakukan secara intensif yang ditandai dengan jumlah PD yang mendapat predikat WBK/WBBM	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan monitoring pembangunan ZI di setiap perangkat daerah. - Pengajuan 10 (sepuluh) Perangkat Daerah untuk mendapatkan predikat WBK di tahun 2021. - Pengajuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan predikat WBBM di tahun 2021.



No.	Kendala	Solusi
9.	Tingkat pelaporan LHKASN melalui aplikasi SIHARKA masih rendah	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong ASN untuk tertib dalam menyampaikan LHKASN melalui aplikasi Siharka, sehingga pada tahun 2020 jumlah ASN yang menyampaikan LHKASN mengalami peningkatan mencapai 90%.- Perbup No. 80 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
10.	Beberapa hasil antara masih belum optimal, antara lain untuk “Kualitas Pengelolaan Arsip” dan “ASN Profesional” serta “Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik”	Upaya perbaikan : <ul style="list-style-type: none">• Kualitas Pengelolaan Arsip :<ol style="list-style-type: none">1. Telah adanya Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.2. Sedang dilaksanakan penyusunan pedoman retensi arsip.• ASN Profesional :<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi : Optimalisasi pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar ASN dengan melakukan penyesuaian profesi dan kompetensi; Updating status kepegawaian pada SAPK secara berkala



		<p>terkait kualifikasi PNS.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Kompetensi : Peningkatan kompetensi ASN melalui webinar 400 orang dan diklat SAKIP 32 orang (20 JP); Peningkatan kompetensi melalui coaching clinic dan mentoring pada setiap SKPD.3. Kinerja : Pembinaan dan monitoring pelaksanaan PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS; Melakukan Bimbingan Kinerja dan Konseling Kinerja; Membangun sistem informasi kinerja dalam e-office.4. Disiplin : Optimalisasi disiplin PNS melalui absen mobile dengan penerapan radius/jangkauan absensi; Melaksanakan monitoring pelaksanaan kode etik dan kode perilaku PNS; Penilaian perilaku 360 derajat sebagai salah satu faktor pengurang TPP. <ul style="list-style-type: none">• Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik : monev melalui aplikasi sehingga bisa memantau kinerja Perangkat Daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik selain melaksanakan monev langsung ke setiap Perangkat Daerah.
--	--	--



Selanjutnya dapat Kami laporkan bahwa, dalam 2 (dua) tahun terakhir ini perkembangan capaian reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sangat pesat, antara lain sebagai berikut :

- 1) Area Majamenen Perubahan. Kami telah mendorong setiap ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi agen perubahan (agent of change) di lingkungan kerja maupun lingkungan sosial masing-masing. Salah satu ASN, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang menerima penghargaan Piala Adhigana Anugerah ASN Tahun 2020 untuk kategori PPT Teladan. Yang bersangkutan kini menjadi role model untuk ASN lainnya.
- 2) Area Kelembagaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah berkomitmen mensukseskan penyederhanaan birokrasi di daerah. Pengalihan dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021.
- 3) Area Tatalaksana. Akselerasi capaian area tatalaksana antara lain terlihat dari signifikannya peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sumedang, dari sebelumnya sebesar 2,46 poin meningkat menjadi 3,52 poin.
- 4) Area SDM Aparatur. Peningkatan capaian pada area SDM aparatur dibuktikan dengan pemberian Anugerah Meritokrasi dari KASN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas kenaikan Indeks Sistem Merit mencapai 290 poin. Indeks Sistem Merit Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kini menjadi yang terbaik pertama tingkat nasional untuk kategori kabupaten. Disamping itu, Indeks Profesionalitas ASN mengalami kenaikan yang signifikan dari sebelumnya sebesar 59,45 poin meningkat menjadi 62,75 poin.
- 5) Area Akuntabilitas. Dibuktikan dengan peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabuapten Sumedang, dari sebesar 48,50 poin (Predikat C) dan menempatkan Kabupaten Sumedang pada peringkat ke 27 dari 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat, menjadi sebesar 71,53 poin (Predikat BB) dan menempatkannya pada peringkat ke 5 di Provinsi Jawa Barat.
- 6) Area Pengawasan. Dibuktikan dengan pencapaian Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP pada Level 3 (Salah satu yang terbaik di tingkat nasional). Hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk melakukan upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),

serta meningkatkan kualitas APIP dalam memberikan pendampingan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

- 7) Area Peraturan Perundang-Undangan. Dibuktikan dengan diraihnya Anugerah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang masuk ke dalam salah satu Kabupaten/Kota dengan pengelolaan JDIH terbaik di tingkat nasional.
- 8) Area Pelayanan Publik. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah pionir dalam pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jawa Barat. Seiring pelaksanaan transformasi digital, saat ini telah dikembangkan Mal Maya Pelayanan Publik (Digital Public Service Mall) melalui aplikasi Tahu Sumedang. Disamping itu, perangkat daerah yang secara teknis mengelola MPP yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 adalah Rp.1.671.357.077.829,00 yang terdiri dari 4 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.1.540.605.846.682,00 atau 92,18%.

Tabel 2.73
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja
Indeks Reformasi Tahun 2021

Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.661.384.662.329,00	1.531.361.741.907,00	92,17
Program Kepegawaian Daerah	5.703.907.700,00	5.005.487.996,00	87,76
Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.296.893.500,00	3.290.172.479,00	99,80
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	971.614.300,00	948.444.300,00	97,62
Jumlah	1.671.357.077.829,00	1.540.605.846.682,00	92,18



Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini merupakan program penunjang semua pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang terdiri dari dukungan yang bersifat administratif, keuangan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, sarana prasarana, atau dukungan lainnya. Program ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- 2) Program Kepegawaian Daerah
Indikator kinerja program yaitu : (a) Persentase ASN yang berkinerja baik, target 98% dan realisasinya 25,05% (capaian kinerja 25,26%); (b) Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi, target 64% dan realisasinya 20,46% (capaian kinerja 31,97%); (c) Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan, target 87% dan tercapai 100% (capaian kinerja 114,94%); (d) Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan, target 100% dan realisasi 78,53% (capaian kinerja 78,53%).
- 3) Program Penyelenggaraan Pengawasan
Indikator kinerja program yaitu : Persentase Pemenuhan SPIP target 100%; Persentase Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah target 100%; Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang Diselesaikan Rekomendasi target 90%; dan Persentase Penurunan Temuan Penyimpangan terhadap APBD target 6%. Keseluruhan target tercapai 100%.
- 4) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Indikator kinerja program yaitu : Cakupan Zona Integritas target 100% dan Persentase OPD dan Pemerintahan Desa yang diberi konsultasi target 5%. Keseluruhan target tercapai 100%.

2.3.16 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja



Target kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” tahun 2021 sebesar 86 poin dan realisasinya berdasarkan data dari Bagian Organisasi adalah 85,60 poin atau capaian kinerja sebesar 99,55% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja belum tercapai. Nilai capaian IKM didapatkan dari rata-rata nilai IKM 55 perangkat daerah dan 7 kelurahan. Berdasarkan perhitungan hasil survei, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2.74
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

No.	Unsur SKM	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,36	0,370
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,36	0,370
U3	Waktu Penyelesaian	3,33	0,367
U4	Biaya/Tarif	3,72	0,409
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,36	0,370
U6	Kompetensi Pelaksana	3,39	0,373
U7	Perilaku Pelaksana	3,47	0,382
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,45	0,379
U9	Sarana dan Prasarana	3,60	0,400
Jumlah			3,424
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85,60
Mutu Pelayanan			B
Kinerja Unit Pelayanan			BAIK

Sumber : Laporan SKM Kabupaten Sumedang Tahun 2021 (Bagian Organisasi).

Dari tabel di atas diketahui bahwa unsur survey kepuasan masyarakat tertinggi adalah kepastian unsur Biaya/Tarif sebesar 3,72 sedangkan yang terendah yaitu unsur Waktu Penyelesaian sebesar 3,33. Adapun untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 85,60, sehingga mutu pelayanan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang termasuk kategori B dengan kinerja unit pelayanan BAIK.

Tabel 2.75
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja IKM Tahun 2021



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86	85,60	99,55%	Sangat Tinggi

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Sumedang

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan tahun 2020 maka pada tahun 2021 realisasi kinerja meningkat namun capaian kinerja menurun. Realisasi IKM meningkat 1,8 poin, sedangkan capaian kinerjanya menurun 1,43%.

Tabel 2.76
Perbandingan Realisasi Kinerja IKM Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83	83,80	100,98 %	86	85,60	99,55 %	Realisasi meningkat sedangkan Capaian Kinerja Menurun

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah IKM adalah 90 poin dan realisasi pada tahun 2021 adalah 85,60 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah IKM pada tahun ketiga RPJMD sebesar 95,11%.

Tabel 2.77
Perbandingan Realisasi Kinerja IKM Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah RPJMD



Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2021
Indeks Kepuasan Masyarakat	90 poin	85,60 poin	95,11%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu masih terdapat unsur pelayanan yang nilai rata-ratanya masih dibawah 86% atau 3,42 yaitu :

- 1) Unsur Persyaratan (NRR = 3,36/84%)
- 2) Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (NRR = 3,36/84%)
- 3) Unsur Waktu Penyelesaian (NRR = 3,33/83%)
- 4) Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (NRR = 3,36/84%)
- 5) Unsur Kompetensi Pelaksana (NRR = 3,39/85%)

Selain itu, dari hasil analisis yang dilakukan terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga pada tahun 2021 tidak tercapai target, yaitu :

No	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	1. Kurangnya publikasi persyaratan layanan oleh masing-masing unit layanan 2. Sebagian besar unit-unit layanan belum secara rinci menjelaskan persyaratan	1. Harus melaksanakan publikasi secara masif dengan menggunakan berbagai media 2. Evaluasi Standar Pelayanan secara berkala untuk persyaratan layanan	1. Peningkatan penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Publik 2. Pelaksanaan evaluasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah



No	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
2	1. Kurangnya publikasi mekanisme dan prosedur layanan oleh masing-masing unit layanan 2. Sebagian besar unit – unit layanan belum secara rinci menjelaskan Mekanisme dan prosedur layanan	1. Harus melaksanakan publikasi secara masiv dengan menggunakan berbagai media 2. Evaluasi Standar Pelayanan secara berkala untuk Mekanisme dan prosedur layanan	1. Peningkatan penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Publik 2. Pelaksanaan evaluasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah
3	Beberapa produk layanan yang berada pada masing-masing unit layanan masih terdapat keterlambatan dalam proses penyelesaian atau jangka waktu penyelesaian dipandang terlalu lama sehingga masyarakat/pengguna layanan merasa kurang puas atas layanan yang diberikan	1. Evaluasi Standar Pelayanan secara berkala untuk Waktu Penyelesaian 2. Peningkatan penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Publik	1. Pelaksanaan evaluasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah 2. Peningkatan penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Publik
4	Masih terdapat pengaduan- pengaduan yang belum terselesaikan	1. Penempatan petugas khusus penanganan pengaduan yang telah di bekali kompetensi 2. Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, SP4N LAPOR, Website	1. Peningkatan Kompetensi Petugas Pengelola Pengaduan dengan mengikutsertakan pada pelatihan- pelatihan, seminar, bimtek dll. 2. Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, SP4N LAPOR, Website pada masing-masing unit layanan



No	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
5	Masih kurangnya sarana prasana untuk pengguna layanan berkebutuhan khusus dan umum pada tiap-tiap unit layanan	Peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan	Peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan pada seluruh unit layanan Perangkat Daerah

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja IKM tahun 2021 adalah Rp. 1.687.890.135.329,00 yang terdiri dari 21 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.556.583.346.235,00 atau 92,22%.

Tabel 2.78
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja IKM Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.661.384.662.329,00	1.531.361.741.907,00	92,17
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	450.000.000,00	444.547.148,00	98,79
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	200.000.000,00	199.443.600,00	99,72
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	2.271.000.000,00	1.349.879.580,00	59,44
Program Pendaftaran Penduduk	1.190.948.000,00	1.150.803.500,00	96,63
Program Pencatatan Sipil	195.610.000,00	194.610.000,00	99,49
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	531.750.000,00	518.925.000,00	97,59
Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	951.100.000,00	920.900.800,00	96,82
Program Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan	4.892.020.000,00	4.849.602.500,00	99,13



Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	363.100.000,00	348.205.000,00	95,90
Program Pembinaan Perpustakaan	735.210.000,00	724.721.000,00	98,57
Program Pengelolaan Arsip	207.252.300,00	203.340.300,00	98,11
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	101.379.000,00	99.874.000,00	98,52
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	136.450.000,00	136.250.000,00	99,85
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	250.000.000,00	249.100.000,00	99,64
Program Perlindungan Khusus Anak	75.000.000,00	74.991.600,00	99,99
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.319.215.250,00	2.291.548.050,00	98,81
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.936.492.450,00	9.774.294.950,00	98,37
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.122.446.000,00	1.120.268.300,00	99,81
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	176.500.000,00	170.299.000,00	96,49
Jumlah	1.687.890.135.329,00	1.556.583.346.235,00	92,22

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) untuk pencapaian kinerja IKM tahun 2021 tidak dapat dihitung, karena capaian kinerja tidak mencapai 100%.



f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program ini merupakan program penunjang semua pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang terdiri dari dukungan yang bersifat administratif, keuangan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, sarana prasarana, atau dukungan lainnya. Program ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- 2) Program Pengembangan Kawasan Transmigran
Indikator kinerja program adalah Jumlah transmigran lokal yang dilatih dan ditempatkan dengan target 71 orang dan realisasinya 76 orang, capaian kinerja 107,04%.
- 3) Program penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Indikator kinerja Program yaitu Persentase Sengketa Pertanahan yang difasilitasi dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
- 4) Program Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.
Indikator kinerja Program yaitu Persentase (Jumlah Bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan target sebesar 100% dan realisasinya 59,44% atau capaian kinerja sebesar 59,44%.
- 5) Program Pendaftaran Penduduk.
Indikator kinerja program yaitu Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan target sebesar 97% dan realisasinya 98,56% atau capaian kinerja sebesar 101,61%.
- 6) Program Pencatatan Sipil.
Indikator kinerja Program yaitu Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dengan target sebesar 86% dan realisasinya 98,05% atau capaian kinerja sebesar 114,01%.
- 7) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Indikator kinerja Program yaitu Persentase layanan yang sesuai standar manajemen mutu dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
- 8) Pogram Pengembangan Kapasitas Kepemudaan.



Indikator Program yaitu Jumlah Anggota Pramuka yang dibina 95.860 orang dengan realisasinya 95.860 orang.

9) Program Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan.

Indikator kinerja Program yaitu Jumlah Atlet Pemula yang dibina dengan target 20 Atlet/orang dengan capaiannya 20 atlet/orang; dan Jumlah Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat dengan target 20 kali dengan capaiannya 20 kali.

10) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Indikator kinerja program yaitu Jumlah Anggota Pramuka yang dibina sebanyak 95.680 orang dan tercapai 100%.

11) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Indikator kinerja program yaitu skor Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) dengan target kinerja sebesar 300 dan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 sebesar 318 atau capaian kinerja sebesar 106%.

12) Program Pembinaan Perpustakaan

Indikator kinerja Program yaitu jumlah pengunjung dengan targetnya yaitu 77.988 orang dan terealisasi sebanyak 37.588 orang.

13) Program Pengelolaan Arsip

Indikator kinerja program yaitu : a) pemeliharaan ruang penyimpanan arsip yang memiliki indikator luas ruang penyimpanan arsip yang terpelihara, dengan target seluas 1268 m² 462 m² dan realisasinya seluas 1268 m² 462 m²; b) Jumlah berkas yang selesai diakuisisi, targetnya adalah 500 berkas dan realisasinya 535 berkas; dan c) Jumlah berkas yang sudah diverifikasi kebenaran jenis arsipnya oleh tim verifikator dengan target 500 berkas dan realisasinya 2172 berkas.

14) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Indikator kinerja program yaitu jumlah arsip yang sudah dilakukan penataan dan pendataan. Target pada tahun 2021 adalah 4710 berkas dan realisasinya adalah 2712 berkas.

15) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Indikator kinerja program yaitu : a) Jumlah Makam direhabilitasi (3 Lokasi/100%); b) Jumlah Makam Pahlawan yang dipelihara (3 Lokasi/100%); dan c) Tersedianya Jasa Pengamanan Makam (3 Orang/100%).

16) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).



Indikator kinerja program yaitu : a) Jumlah Laporan Layanan Peningkatan Kualitas hidup Anak 12 Laporan (100%); dan b) Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 12 Laporan (100%).

17) Program Perlindungan Khusus Anak

Indikator kinerja program yaitu Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak sebanyak 115 Orang.

18) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik.

Indikator kinerja program adalah Persentase layanan kepada masyarakat dengan target 100% dan terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan di seluruh kecamatan, terdiri dari kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait; Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecaatan; Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan.

19) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator kinerja program adalah Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dengan target 100% dan tercapai 100%. Program ini dilaksanakan di seluruh kecamatan, terdiri dari kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di lingkup kecamatan.

20) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Indikator kinerja program yaitu Tingkat pendidikan dan partisipasi politik, target 100% dan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%

21) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator kinerja program yaitu Persentase ormas yang dibina, target 100% dan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%.

2.3.17 PENGELUARAN PER KAPITA

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Pengeluaran Per-Kapita” tahun 2021 sebesar Rp.10,70 juta dan realisasinya berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumedang adalah Rp.10,26 juta atau capaian kinerja sebesar 95,89% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai. Pengeluaran per kapita mengalami penurunan sejalan

dengan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan sehingga menyebabkan daya beli masyarakat berkurang.

Tabel 2.79
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Pengeluaran Per Kapita Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per-Kapita	Rp. (Juta)	10,70	10,26	95,89%	Sangat Tinggi

Sumber : BPS

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan tahun 2020, realisasi Pengeluaran Per Kapita tahun 2021 naik sebesar Rp.40.000,00 namun capaian kinerjanya menurun sebesar 2,57%.

Tabel 2.80
Perbandingan Realisasi Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2021
Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per-Kapita	Rp. (Juta)	10,38	10,22	98,46%	10,70	10,26	95,89%	Realisasi Kinerja Meningkat dan Capaian Kinerja Menurun

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Pengeluaran Per Kapita adalah Rp.11,35 juta dan realisasi pada tahun 2021 adalah Rp.10,26 juta,

sehingga capaian kinerja jangka menengah Pengeluaran Per Kapita pada tahun ketiga RPJMD sebesar 90,40%.

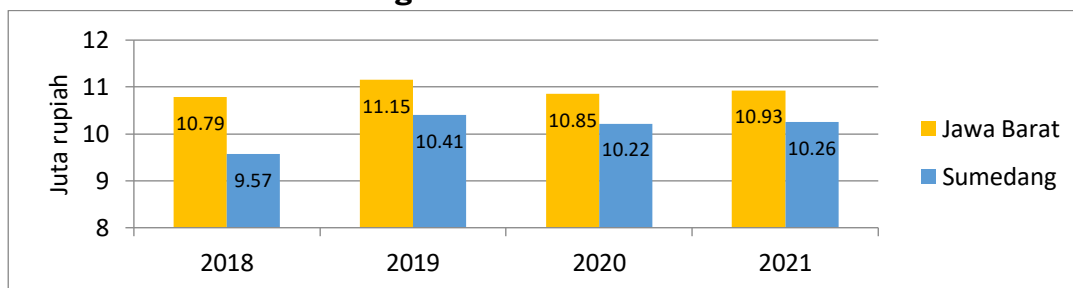
Tabel 2.81
Perbandingan Realisasi Kinerja Pengeluaran Per Kapita Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2021
Pengeluaran Per-Kapita	Rp.11,35 juta	Rp.10,26 juta	90,40%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/ Nasional

Perlu strategi dan upaya yang lebih keras lagi untuk meningkatkan pengeluaran per-kapita, karena capaian setiap tahunnya selalu berada di bawah capaian Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.1.13
Perbandingan Pengeluaran Per-Kapita Kabupaten Sumedang
Dengan Provinsi Jawa Barat



Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu disebabkan banyak masyarakat terdampak pandemi covid-19 seperti pengurangan jam kerja, dirumahkan, hingga PHK sehingga menyebabkan daya beli menurun dan



bertambahnya jumlah penduduk miskin. Solusi/rekomendasinya yaitu pengembangan potensi ekonomi lokal yang berbasis pertanian diintegrasikan dengan industri pengolahan dan agrowisata karena sektor-sektor yang memiliki angka pengganda untuk distribusi pendapatan dan penciptaan lapangan pekerjaan masih didominasi oleh sektor pertanian, maka pengembangan sektor pertanian menjadi strategis terutama dikaitkan dengan misi RPJPD untuk mewujudkan sumedang sebagai kabupaten agribisnis yang didukung industri dan pariwisata. Berdasarkan data BPS, terjadi peralihan yang besar dari lapangan kerja non pertanian ke sektor pertanian di tahun 2021.

Pada tahun 2021 upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan pengeluaran perkapita adalah dengan pelaksanaan program-program yang relevan dengan capaian kinerja sebagai berikut : 1) cakupan koperasi aktif terealisasi 40,41%; 2) laju pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran terealisasi 6,35%; 3) Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan terealisasi 39%.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Pengeluaran Per Kapita tahun 2021 adalah Rp. 18.474.419.000,00 yang terdiri dari 6 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.376.679.998,00 atau 18,28%.

Tabel 2.82
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja
Pengeluaran Per Kapita Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	390.304.000,00	361.404.000,00	92,60
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	240.000.000,00	231.445.000,00	96,44
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	16.197.500.000,00	1.163.431.657,00	7,18
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	187.820.000,00	164.280.541,00	87,47
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	36.990.000,00	36.740.000,00	99,32



Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1.421.805.000,00	1.419.378.800,00	99,83
Jumlah	18.474.419.000,00	3.376.679.998,00	18,28

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Pengeluaran Per Kapita tahun 2021 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Pengeluaran Per-Kapita, yaitu :

- 1) Program Pendidikan dan Latihan Pekoperasian.
Indikator kinerja Program yaitu cakupan koperasi aktif dengan target sebesar 81% dan realisasinya 40,41% atau capaian kinerja sebesar 49,88%.
- 2) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
Indikator kinerja Program yaitu cakupan koperasi aktif dengan target sebesar 81% dan realisasinya 40,41% atau capaian kinerja sebesar 49,88%.
- 3) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
Indikator kinerja Program yaitu laju pertumbuhan sub 166ector perdagangan besar dan eceran dengan target sebesar 5,49% dan realisasinya 6,35% atau capaian kinerja sebesar 115,66%.
- 4) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Indikator kinerja Program yaitu laju pertumbuhan sub 166ector perdagangan besar dan eceran dengan target sebesar 5,49% dan realisasinya 6,35% atau capaian kinerja sebesar 115,66%.
- 5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
Indikator kinerja Program yaitu laju pertumbuhan sub sector perdagangan besar dan eceran dengan target sebesar 5,49% dan realisasinya 6,35% atau capaian kinerja sebesar 115,66%.
- 6) Program Pemberdayaan Lembaga kemasyaraktan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Indikator kinerja program yaitu Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan dengan target 39% dan realisasinya 39% atau capaian kinerja 100%.

2.3.18 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2021 sebesar 6,15% dan realisasinya berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumedang adalah 9,18% atau capaian kinerja sebesar 50,73% (kinerja rendah). Target kinerja tidak tercapai.

Tabel 2.83
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,15	9,18	50,73%	Kinerja rendah

Sumber : BPS

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2020 realisasinya meningkat 2,26% dan capaian kinerjanya menurun 39,26%.

Tabel 2.84
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021
dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Mencipt	Tingka	Perse	6,35	9,89	44,25	6,15	9,18	50,73	Realisas



akan wirausaha dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	t Pengangguran Terbuka	n			%			%	i dan capaian kinerja Meningkat
--	------------------------	---	--	--	---	--	--	---	---------------------------------

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 5,68% dan realisasi pada tahun 2021 adalah 9,18%, sehingga capaian kinerja jangka menengah Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun ketiga RPJMD sebesar 38,38%.

Tabel 2.85

Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

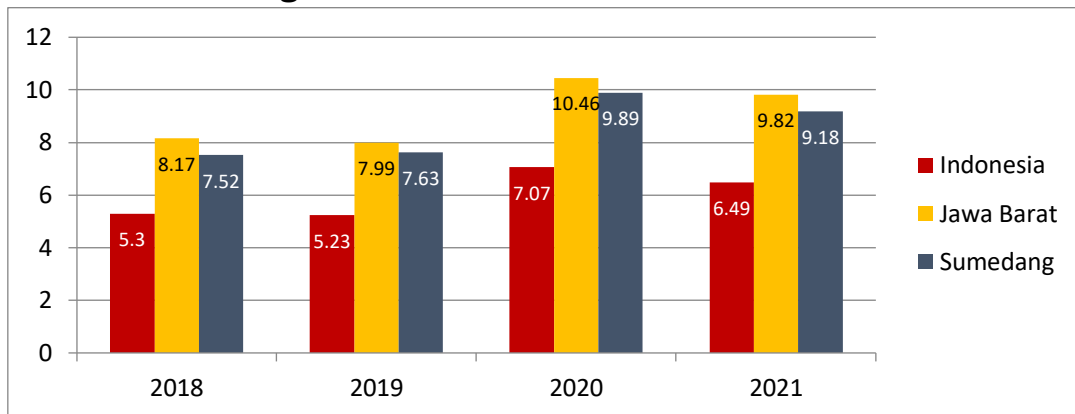
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,68%	9,18%	38,38%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sumedang dari tahun 2018-2021 selalu di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Namun, berada di atas rata-rata nasional.



Grafik 2.1.14
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang
Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia



Sumber : BPS

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu meningkatnya angka kemiskinan yang disebabkan pandemi Covid-19 berkorelasi positif dengan meningkatnya pengangguran terbuka. Meningkatnya angka pengangguran disebabkan oleh hilangnya pekerjaan buruh migran, tenaga kerja baru tidak terserap oleh pasar kerja dan terjadinya PHK. UMK Sumedang tahun 2021 Rp.3.241.929,67 berada di atas rata-rata UMK Jawa Barat dan berbeda jauh dengan kabupaten tetangga seperti Majalengka, Garut, dan kabupaten tetangga lainnya, kecuali Kab. Bandung, hal tersebut merupakan salah satu faktor melemahkan daya saing bagi masuknya investor ke Sumedang. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka Sumedang masih tetap berada di bawah Provinsi Jawa Barat.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Penguatan Calon Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan (pelatihan kewirausahaan), uji kompetensi calon pencari kerja, dan pelaksanaan magang.

Solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka adalah peningkatan pendidikan keterampilan/vokasi, peningkatan investasi, membuka lapangan pekerjaan padat karya, menumbuhkan wirausahawan baru, serta

pembangunan destinasi wisata yang dapat membuka peluang usaha bagi warga masyarakat sekitar.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 adalah Rp. 2.374.401.500,00 yang terdiri dari 3 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.324.800.269,00 atau 97,91%.

Tabel 2.86
Realsiasi Anggaran Program Penunjang Capaian Kinerja
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.626.000.000,00	1.610.582.769,00	99,05
Program Penempatan Tenaga Kerja	402.447.500,00	381.697.500,00	94,84
Program Hubungan Industrial	345.954.000,00	332.520.000,00	96,12
Jumlah	2.374.401.500,00	2.324.800.269,00	97,91

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka, yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator kinerja Program yaitu Menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka dengan berdasarkan target RPJMD murni 2018-2023 sebesar 6,15% dan realisasinya 9,18% atau capaian kinerja sebesar 50,73%. Sedangkan berdasarkan target RPJMD Perubahan sebesar 9,35% dan realisasinya 9,18% atau capaian kinerja sebesar 98,18%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu situasi pasca pandemic



covid-19 yang menyebabkan situasi ekonomi yang masih tidak menentu. Laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah negative, sehingga kelompok UMKM sulit untuk berkembang karena kesulitan dalam pemasaran solusi/rekomendasinya adalah Proses Pelatihan ini masih memerlukan tindak lanjut dan pendampingan, baik dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun Dinas/Instansi yang bergerak dalam pembinaan kelompok UMKM. Sehingga diharapkan hasil dari pelatihan ini dapat ditindaklanjuti oleh Dinas/ Instansi yang berkaitan dengan proses produksi, pemasaran dan upgrading skill, sehingga kelompok usaha ini dapat terus berkembang.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja tahun 2021 yaitu Menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka dengan berdasarkan target RPJMD murni 2018-2023 sebesar 6,15% dan realisasinya 9,18% atau capaian kinerja sebesar 50,73% Sedangkan berdasarkan target RPJMD Perubahan sebesar 9,35% dan realisasinya 9,18% atau capaian kinerja sebesar 98,18%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pasca pandemic covid-19 yang menyebabkan Perusahaan Sebagian ada yang masih tutup, karyawan dirumahkan, PHK karyawan sehingga menyebabkan lowongan kerja tidak ada dan angka pengangguran meningkat. tisolusi/rekomendasinya adalah Memperluas penciptaan lapangan kerja dengan menyiapkan tenaga kerja terampil dan terlatih untuk kebutuhan lokal, dalam dan luar negeri yang memenuhi standar kompetensi, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk memperbaiki ekonomi keluarga, menciptakan lapangan kerja/usaha baru khususnya lapangan kerja sektor usaha baru (WUB), Meningkatkan keterampilan kerja dan kualitas pencari kerja untuk memasuki dunia usaha.

2.3.19 JUMLAH UMKM

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Jumlah UMKM” tahun 2021 sebesar 18.467 UMKM dan realisasinya berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKMPP Kabupaten

Sumedang adalah 61.587 UMKM atau capaian kinerja sebesar 333,49% (kinerja sangat tinggi). Capaian kinerja telah melebihi target.

Tabel 2.87
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Jumlah UMKM Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Jumlah UMKM	UMKM	18.467	61.587	333,49 %	Sangat Tinggi

Sumber : DKPP Kab. Sumedang

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Jumlah UMKM dari tahun ke tahun menunjukkan tren meningkat. Tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 15.467 UMKM kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 17.717 UMKM, tahun 2020 meningkat menjadi 20.507 UMKM dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sehingga total jumlah UMKM tahun 2021 sebanyak 61.587 UMKM. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020), maka pada tahun 2021 terdapat penambahan jumlah UMKM sebanyak 41.080 UMKM atau sekitar 200,32%.

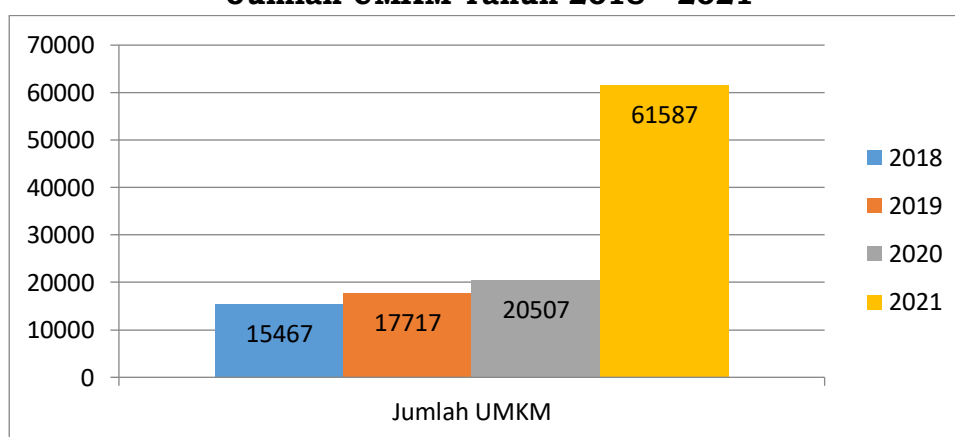
Tabel 2.88
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah UMKM Tahun 2021
dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Menciptakan wirausahawan dan	Jumlah UMKM	UMKM	17.467	20.507	117,40 %	18.467	61.587	333,49 %	Realisasi dan Capaian Kinerja Meningkat



tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar									kat
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

Grafik 2.1.15
Jumlah UMKM Tahun 2018 - 2021



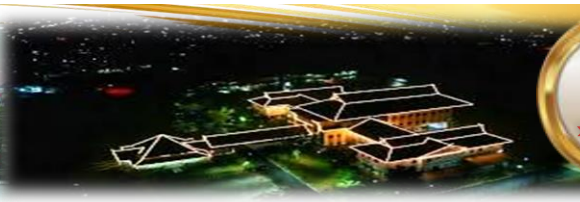
Sumber : DKPP Kab. Sumedang

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Jumlah UMKM adalah 20.467 UMKM dan realisasi pada tahun 2021 adalah 61.587 UMKM, sehingga capaian kinerja jangka menengah Jumlah UMKM pada tahun ketiga RPJMD sebesar 100,20%.

Tabel 2.89
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah UMKM Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2021
Jumlah UMKM	20.467 UMKM	61.587 UMKM	300,91%



d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan jumlah UMKM yaitu melalui pelaksanaan Program Pengembangan UMKM (Pelatihan kemasan produk UMKM dan Pemberdayaan UMKM); Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM (Pengembangan Kredit Usaha Mikro dan Kecil/Kredit KUSUMA, Penguatan Pemasaran dan Akselerasi Pasar Produk UMKM, Pengembangan Jaringan dan Kemitraan UMKM, Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Sarana Prasarana UMKM); serta Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (pengembangan 16 sub sektor ekonomi kreatif) dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (pengembangan kapasitas 60 orang pelaku usaha ekonomi kreatif)

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan jumlah UMKM yaitu akibat dari pandemi COVID-19 berdampak pada terganggunya aktivitas perekonomian yang menyebabkan banyak UMKM yang gulung tikar karena omset menurun drastis akibat adanya pembatasan aktivitas ekonomi tersebut.

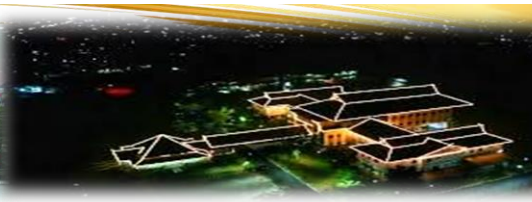
Solusi untuk peningkatan jumlah UMKM diantaranya dengan program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, serta didukung dengan adanya program Kredit KUSUMA, Pengembangan desa produktif/OVOP (One Product One Village), Koperasi Syariah Masjid Besar, Bantuan sarana prasarana UMKM, Pelatihan Tenaga Kerja, Warung Pintar, Fasilitasi PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), Pembentukan Gerai Produk UMKM, dan Pujamari (Pusat Jajanan Malam Hari).

Tabel 2.90
Jumlah UMKM Tahun 2019 - 2021

No.	Kategori	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Usaha Mikro	11.117	13.907	
2.	Usaha Kecil	4.539	4.539	
3.	Usaha Menengah	2.061	2.061	
	Jumlah	17.717	20.507	61.587

Sumber : DKPP

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Anggaran yang mendukung capaian kinerja Jumlah UMKM tahun 2021 adalah Rp. 2.030.261.000,00 yang terdiri dari 3 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.016.941.692,00 atau 99,34%.

Tabel 2.91
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja
Jumlah UMKM Tahun 2020

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengembangan UMKM	1.475.261.000,00	1.463.244.450,00	99,19
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	190.000.000,00	189.729.000,00	99,86
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	365.000.000,00	363.968.242,00	99,72
Jumlah	2.030.261.000,00	2.016.941.692,00	99,34

Capaian kinerja Jumlah UMKM tahun 2021 sebesar 333,49% dan realisasi anggaran program sebesar 99,34%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 234,15%.

Tabel 2.92
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Jumlah UMKM Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Jumlah UMKM	333,49 %	99,34%	234,15%	Efisien



f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Jumlah UMKM, yaitu :

1) Program Pengembangan UMKM

Kinerja program yaitu meningkatnya kualitas wirausahawan, indikator kinerjanya adalah jumlah UMKM sebanyak 18.467 UMKM dan realisasinya 61.587 UMKM atau capaian kinerja sebesar 333,49%.

2) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Indikator kinerja program yaitu jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dengan target 16 sub sektor dengan capaiannya 16 sub sektor (100%).

3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indikator kinerja program yaitu jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitas kompetensi sumber dayanya dengan target 60 orang dengan capaiannya 60 orang (100%).



BAB III

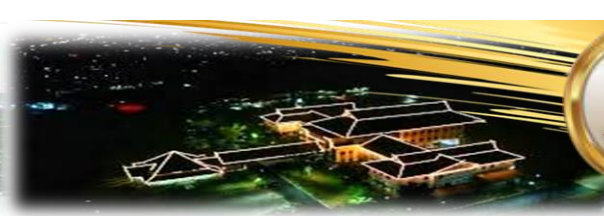
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Selain itu,



pengalokasian dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP. Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan tindak lanjut serta laporan realisasi anggaran berupa neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan barang dari para kepala SKPD yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dana tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan (medebewind) kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah.

3.2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pusat/ Kementrian

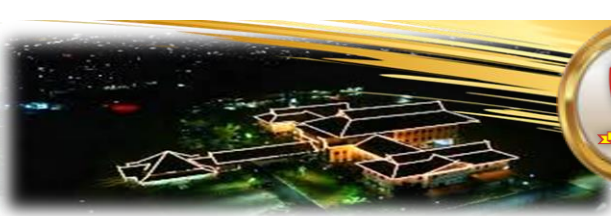
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang mendapatkan Program yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk tugas pembantuan dengan Jumlah anggaran di tahun 2021 yaitu: sebesar Rp. 6.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.960.000.000,- atau sekitar 97,55%.

Program / Kegiatan, jumlah anggaran , realisasi, yang melaksanakan serta asal dana diperoleh diuraikan sebagai berikut :

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pemberian tugas pembantuan yaitu :

Peraturan Menteri/LPNK No. 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati /Walikota dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non Sistem resi gudang yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021.



- b. Instansi Pemberi Tugas : Kementerian Perdagangan Republik
Pembantuan Indonesia
- c. Satuan Kerja yang melaksanakan : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian
Kab.Sumedang
- d. Program : Program Pengembangan Perdagangan
Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan
sarana Distribusi Perdagangan
(Revitalisasi Pasar inpres Kabupaten
Sumedang Provinsi Jawa Barat)
- e. Kegiatan yang refresentatif : Terbangunnya pasar rakyat inpres
- f. Alokasi anggaran : Rp. 6.000.000.000,00
- g. Realisasi : Rp. 5.960.000.000,00
- h. Lokasi : Kabupaten Sumedang

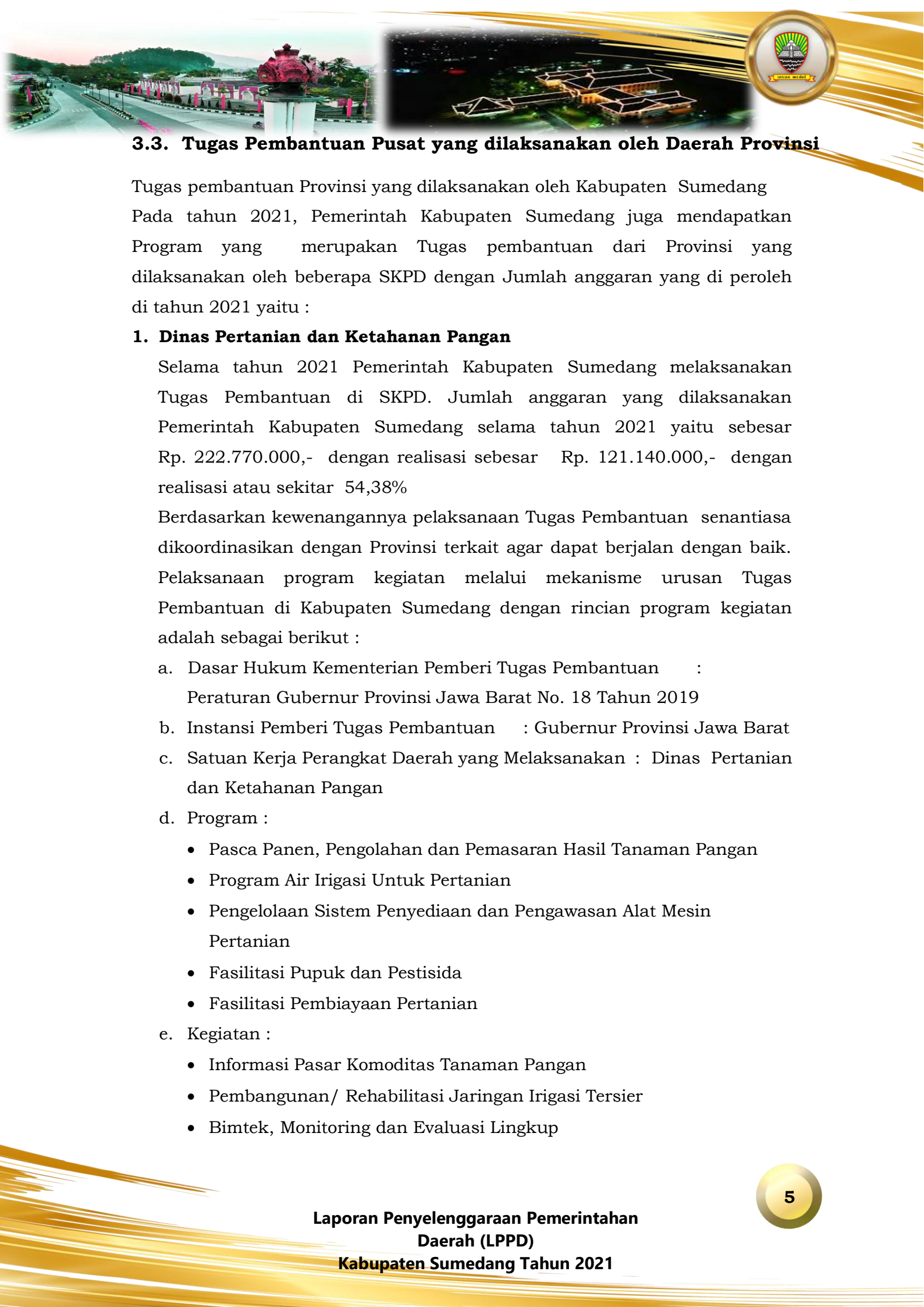
Melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan dengan kementerian terkait, penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Sumedang dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil masing-masing penyelenggara tugas pembantuan yang mendapat predikat penilaian sangat tinggi. Secara lengkap tugas pembantuan yang diterima dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



TABEL 4.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN (Rp)	(%)	KET
1	Kementrian	Peraturan Mentri/LPNK	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Jl. Sebelas April Kel. Kotakaler Kec. Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Jawa barat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang	6.000.000.000	5.960.000.000	100%	5.639.771.165	100%	Pembangunan pasar Rakyat Inpres s/d tanggal 27 Desember 2021
	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	No.98 Tahun 2020 Ttg Penugasan Bupati /Walikota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non Sistem resi gudang yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021	Kegiatan Pengembangan sarana Distribusi perdagangan (Revitalisasi Pasar inpres kabupaten sumedang Provinsi Jawa Barat) Keluaran (Output) Terbangunnya pasar rakyat inpres yang representatif								

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang



3.3. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

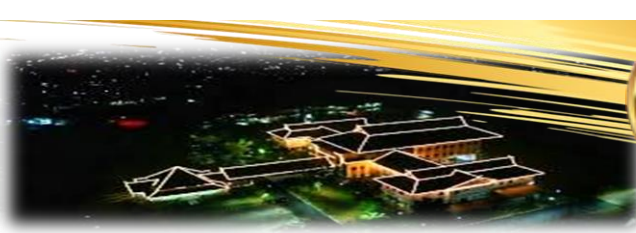
Tugas pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sumedang Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga mendapatkan Program yang merupakan Tugas pembantuan dari Provinsi yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD dengan Jumlah anggaran yang di peroleh di tahun 2021 yaitu :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Selama tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sumedang melaksanakan Tugas Pembantuan di SKPD. Jumlah anggaran yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumedang selama tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 222.770.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.140.000,- dengan realisasi atau sekitar 54,38%

Berdasarkan kewenangannya pelaksanaan Tugas Pembantuan senantiasa dikoordinasikan dengan Provinsi terkait agar dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan program kegiatan melalui mekanisme urusan Tugas Pembantuan di Kabupaten Sumedang dengan rincian program kegiatan adalah sebagai berikut :

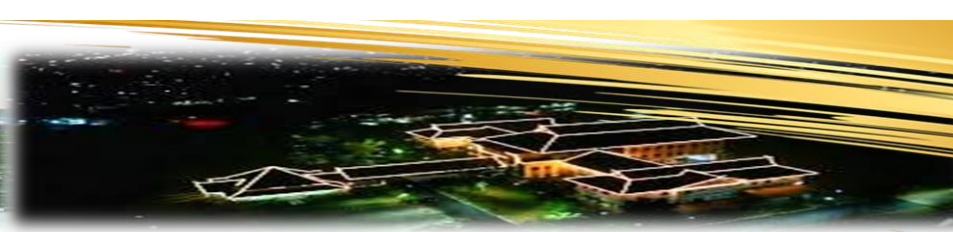
- a. Dasar Hukum Kementerian Pemberi Tugas Pembantuan :
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 18 Tahun 2019
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Gubernur Provinsi Jawa Barat
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- d. Program :
 - Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
 - Program Air Irigasi Untuk Pertanian
 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
 - Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
 - Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
- e. Kegiatan :
 - Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan
 - Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
 - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup



- Alat dan Mesin Pertanian
 - e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi
- f. Realisasi : Rp. 121.140.000
- g. Lokasi : Kabupaten Sumedang

Melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan dengan Provinsi Jawa Barat terkait, penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Sumedang dapat berjalan dengan baik.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil masing-masing penyelenggara tugas capaian kinerja tahun 2021 mencapai target sebesar 54,38% dikarenakan masih belum stabil akibat pandemic covid, secara lengkap tugas pembantuan yang diterima dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 4.1 Rincian Tugas Perbantuan di Kabupaten Sumedang

NO	BIDANG URS	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)
1	Pertanian	TP Provinsi	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Kabupaten Sumedang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.810.000	3.060.000	52,67
			Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan			14.700.000	8.400.000	57,14
			Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan			41.250.000	22.300.000	54,06
			Pengelolaan Produksi Tanaman Serealiala Tanaman Pangan			4.810.000	710.000	14,76
			Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan			46.300.000	31.970.000	69,05
			Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan			109.900.000	54.700.000	49,77
JUMLAH BIDANG TANAMAN PANGAN						222.770.000	121.140.000,00	54,38

Sumber: Dinas Pertanian Tahun 2021



2. Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang

Program dan Kegiatan yang di terima selama tahun 2021 oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang yang di dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang, jumlah anggaran yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 35.350.000.000 dan Rp. 9.100.000.000,- dengan realisasi atau sekitar 100 %.

a. Dasar Hukum

- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019
- Perjanjian Pemberian Pinjaman PT SMI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Nomor PERJ-117/SMI/0920 dan nomor 900/117/BPKAD
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman
- Pengelolaan Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Gubernur Provinsi Jawa Barat

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

d. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan serta realisasinya yaitu :

e. Program : Bantuan Sosial

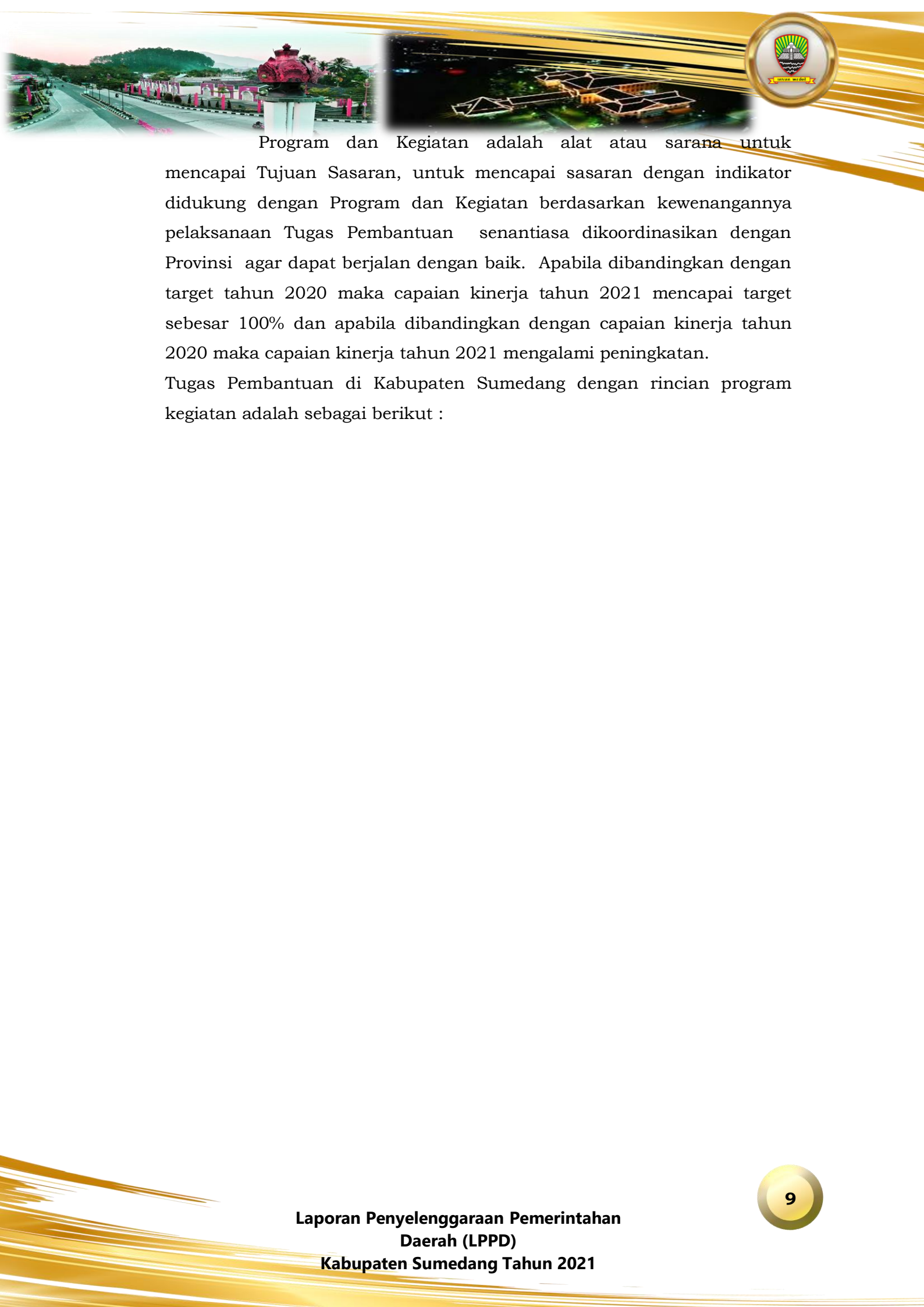
Kegiatan :

- Peningkatan Kualitas RTLH
- Tersedianya rumah masyarakat yang layak huni sebanyak 2020 unit
- Tersedianya rumah masyarakat yang layak huni sebanyak 520 (ABT)

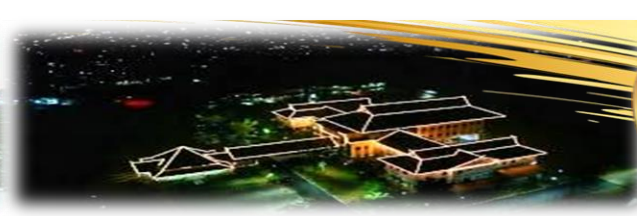
f. Alokasi Anggaran :

- Rp. 35.350.000.000
- Rp. 9.100.000.000

g. Lokasi : Kabupaten Sumedang



Program dan Kegiatan adalah alat atau sarana untuk mencapai Tujuan Sasaran, untuk mencapai sasaran dengan indikator didukung dengan Program dan Kegiatan berdasarkan kewenangannya pelaksanaan Tugas Pembantuan senantiasa dikoordinasikan dengan Provinsi agar dapat berjalan dengan baik. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 maka capaian kinerja tahun 2021 mencapai target sebesar 100% dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 maka capaian kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan. Tugas Pembantuan di Kabupaten Sumedang dengan rincian program kegiatan adalah sebagai berikut :



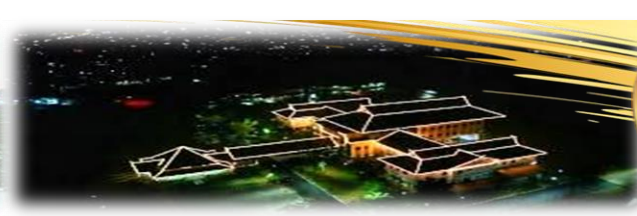
3 Dinas Perhubungan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan serta realisasinya

Selama Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sumedang melaksanakan tugas pembantuan di beberapa SKPD salah satunya, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Sumedang. Jumlah anggaran tugas pembantuan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 25.000.000.000,- karena dilakukan refocusing menjadi Rp. 15.000.000.000,- dengan relaisasi sebesar Rp. 14.901.438.950 atau sekitar 99,34% yaitu:

- a. Dasar Hukum : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 166 Tahun 2021
- b. Instansi Pemberi : Gubernur Provinsi Jawa Barat
Tugas Pembantuan
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Bidang Perhubungan
- d. Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- e. Kegiatan : Pengadaan Alat Pengendali Lalu Lintas Pengembangan Area Traffic Control System (ATCS)
- f. Pagu : Rp. 25.000.000.000,00
- g. Anggaran refocusing : Rp. 15.000.000.000,00
- h. Relaisasi : Rp. 14.901.438.950,00
- i. Lokasi : Kabupaten Sumedang

Capaian kinerja tahun 2021 mencapai target sebesar 99,34% Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2021 tidak mencapai target, maka capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya refocusing kegiatan, sehingga beberapa paket pekerjaan fisik terkait pembangunan dan pemeliharaan



tertunda. Pelaksanaan Tugas Pembantuan senantiasa dikoordinasikan dengan Provinsi terkait agar dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan program kegiatan melalui mekanis meurusan Tugas Pembantuan di Kabupaten Sumedang dengan rekapitulasi tugas Perbantuan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:



Tabel 4.2.3 Rincian Tugas Perbantuan di Kabupaten Sumedang

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN (Rp)	(%)	KET
1	Perhubungan	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 166 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengadaan Alat Pengendali Lalu Lintas Pengembangan Area Traffic Control System (ATCS)	Kabupaten Sumedang	Dinas Perhubungan	25.000.000.000	15.000.000.000	60.00	14.901.438.950	99.34	

Sumber : Dinas Perhubungan



3.4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi secara umum pada penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Belum semua Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dapat menyampaikan informasi awal terkait pagu indikatif Tugas Pembantuan yang akan diberikan ke daerah sehingga keselarasan dalam perencanaan sulit terbangun.	<ol style="list-style-type: none">1. Proaktif dengan melakukan konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi terkait potensi tugas pembantuan yang akan diberikan.2. Mempedomani petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan dan pedoman terkait lainnya.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, yaitu :

1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendidikan Dasar
 - a) Pendidikan Sekolah Dasar
 - b) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3. Pendidikan Kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

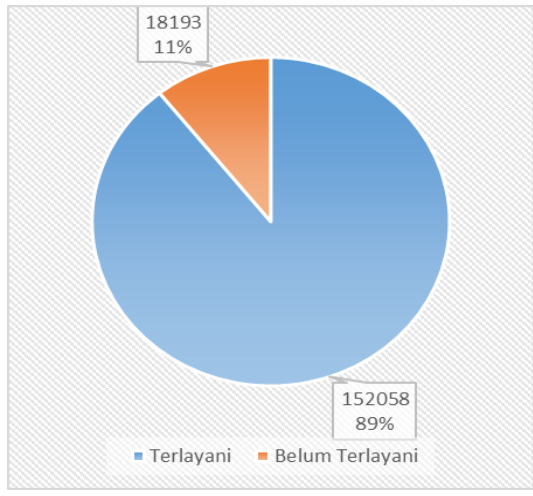
Pelayanan dasar dimaksud dijabarkan dalam indikator-indikator yang menggambarkan sasaran/target yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	100%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100%

4.1.3 Realisasi Capaian

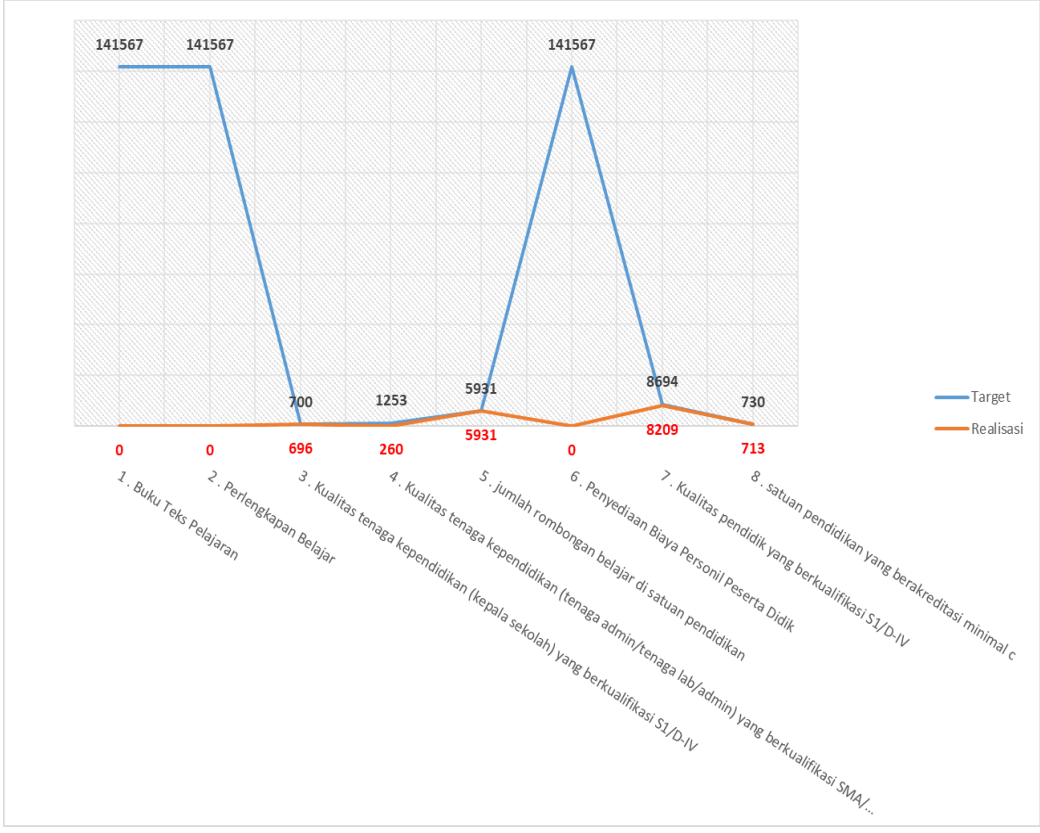
Realisasi Pelayanan Dasar Pemerintah Bidang Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

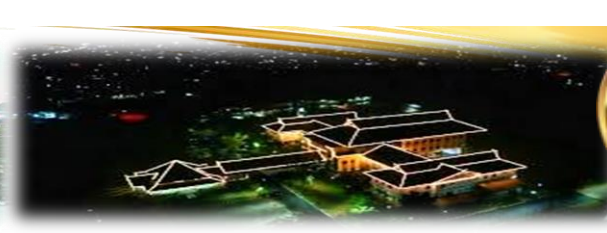
1. Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)



Jumlah warga negara usia 7-15 tahun sebanyak 170.251 jiwa, jumlah yang terlayani sebanyak 152.058 jiwa, sehingga warga negara yang belum terlayani sebanyak 18.193 jiwa. Dengan demikian total pencapaiannya adalah 89.31%.

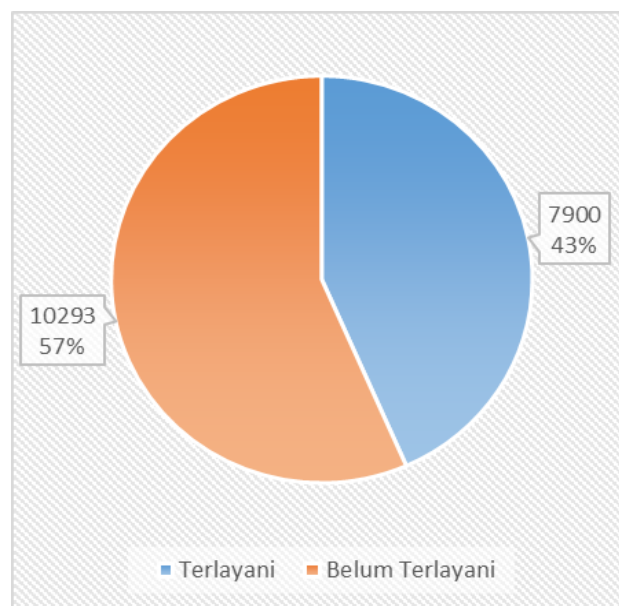
Sedangkan realisasi untuk setiap jenis layanan dapat dilihat pada grafik berikut :





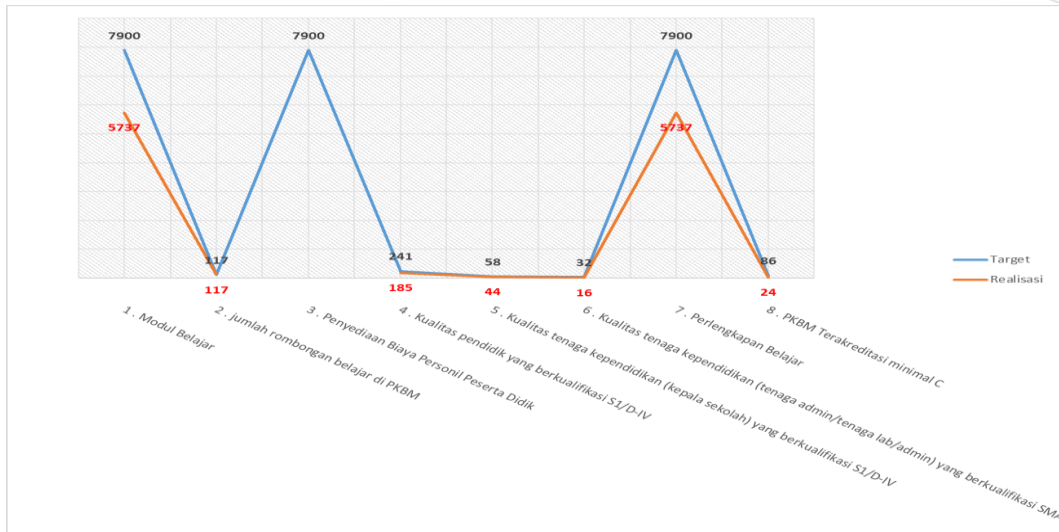
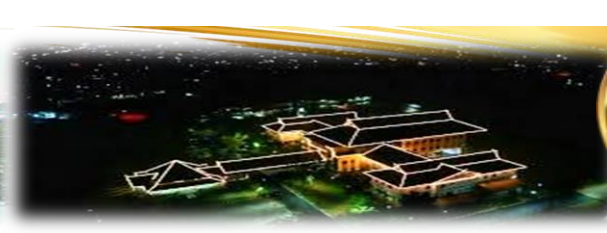
Jenis Layanan	Target	Realisasi
1. Buku Teks Pelajaran	141.567	-
2. Perlengkapan Belajar	141.567	-
3. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	700	696
4. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1.253	260
5. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	5.931	5.931
6. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	141.567	-
7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	8.694	8.209
8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	730	713

2. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan



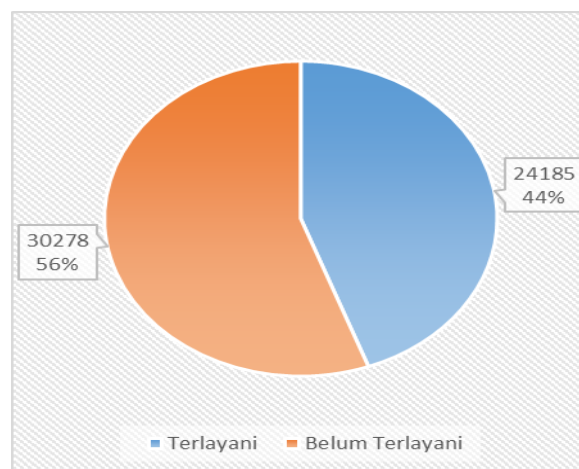
Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah sebanyak 18.193 jiwa, jumlah yang terlayani sebanyak 7.900 jiwa, sehingga warga negara yang belum terlayani sebanyak 10.293 jiwa. Dengan demikian total pencapaiannya adalah 43.42%.

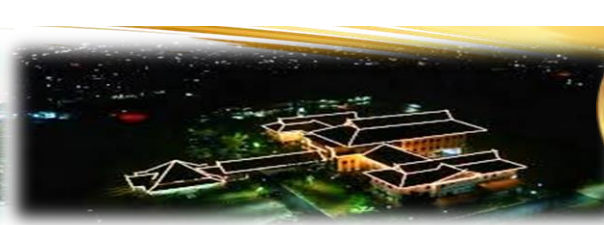
Sedangkan realisasi untuk setiap jenis layanan dapat dilihat pada grafik berikut :



Jenis Layanan	Target	Realisasi
1. Modul Belajar	7.900	5.737
2. jumlah rombongan belajar di PKBM	117	117
3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	7.900	-
4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	241	185
5. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	58	44
6. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	32	16
7. Perlengkapan Belajar	7.900	5.737
8. PKBM Terakreditasi minimal C	86	24

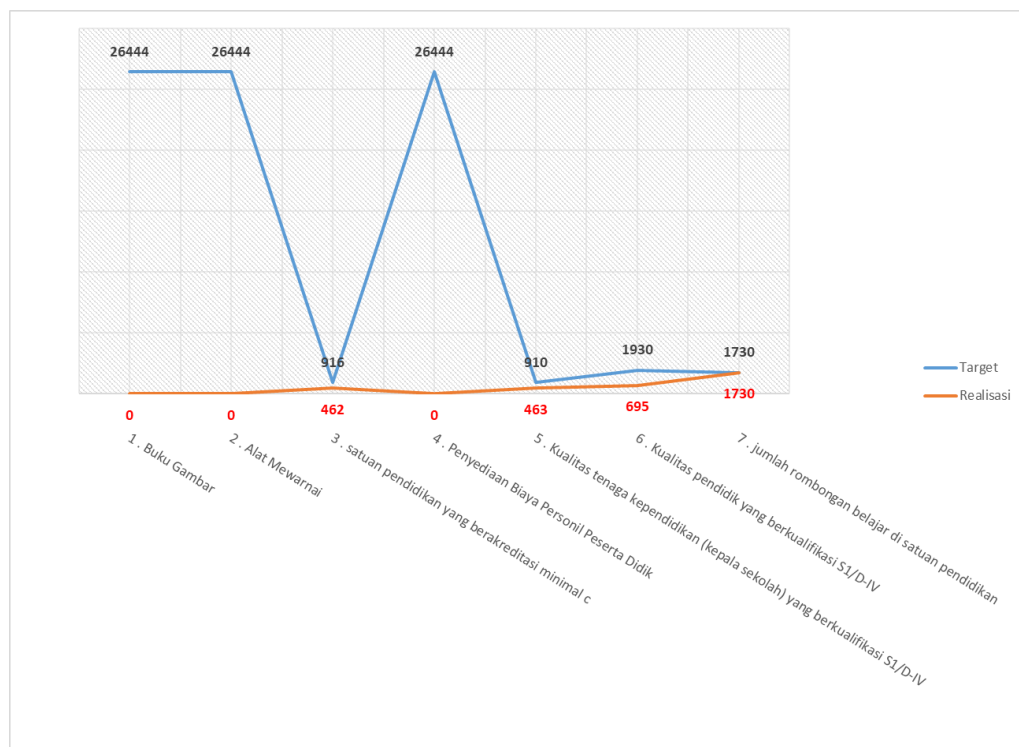
3. Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD



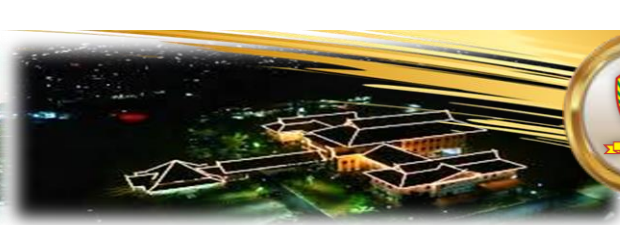


Jumlah warga negara usia 5-6 tahun sebanyak 54.463 jiwa, jumlah yang terlayani sebanyak 24.185 jiwa, sehingga warga negara yang belum terlayani sebanyak 30.278 jiwa. Dengan demikian total pencapaiannya adalah 44.41 %.

Sedangkan realisasi untuk setiap jenis layanan dapat dilihat pada grafik berikut :



Jenis Layanan	Target	Realisasi
1. Buku Gambar	26.444	-
2. Alat Mewarnai	26.444	-
3. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	916	462
4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	26.444	-
5. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	910	463
6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.930	695
7. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.730	1730



4.1.4 Alokasi Anggaran

Pada dasarnya seluruh anggaran dari berbagai sumber yang dialokasikan untuk bidang Pendidikan adalah untuk memenuhi SPM baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi yang secara langsung menembak SPM adalah sebesar Rp. 223.949.389.092,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Dari anggaran tersebut realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 230.305.830.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan realisasi capaian kinerja sebesar 97,24%, dengan rincian tabel dibawah ini :



Tabel 4.1

Capaian Kinerja Realisasi Standar Pelayanan Minimal 2021 Sub Bidang Pendidikan

NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET	TOTAL ANGGARAN PERANGKAT				TOTAL (Rp)	TOTAL ANGGARAN DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM	TOTAL REALISASI DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM
					APBD II (Rp)	BANTUAN PROVINSI (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA			
1	DINAS PENDIDIKAN	1 Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100	89,31	84.905.379.000	44.794.643.000	178.813.935.000	642.238.258.085	950.752.215.085	223.608.578.000	217.436.981.247,20
		2 Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	100	43,42	5.124.648.000	-	4.988.200.000	-	10.112.848.000	4.988.200.000	4.850.525. 680,00
		3 Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100	44,41	35.313.081.200	-	1.709.052.000	-	37.022.133.200	1.709.052.000	1.661.882.164,80
JUMLAH			100		125.343.108.200	44.794.643.000	185.511.187.000	642.238.258.085	997.887.196.285	230.305.830.000	223.949.389.092,00

Alokasi anggaran tahun 2021 di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan berjumlah Rp. 230.305.830.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD Rp. 125.343.108.200,-
- b. APBD Provinsi Jawa Barat Rp. 44.794.643.000,-
- c. APBN Rp. 185.511.187.000,-
- d. Sumber dana lain yang sah Rp. 642.238.258.085,-



4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) didukung personil sebagaimana tabel berikut :

KECAMATAN	GTU/PTY	NON ASN	PNS	PPPK
Buahdua	37	22	0	0
Cibugel	57	35	0	0
Cimalaka	70	18	0	0
Cimanggung	65	27	0	0
Cisarua	21	3	0	0
Cisitu	33	25	1	0
Conggeang	20	35	0	0
Darmaraja	27	17	0	0
Ganeas	43	20	2	0
Jatigede	15	45	2	0
Jatinangor	90	18	0	0
Jatinunggal	36	120	0	0
Pamulihan	74	57	1	0
Paseh	35	11	1	0
Rancakalong	58	49	0	0
Situraja	54	16	2	0
Sukasari	64	25	0	0
Sumedang Selatan	94	51	0	1
Sumedang Utara	37	68	1	1
Surian	19	22	0	0
Tanjungkerta	29	59	0	0
Tanjungmedar	26	44	0	0
Tanjungsari	104	60	0	0
Tomo	15	19	0	0
Ujungjaya	13	12	0	0
Wado	63	37	0	1
Grand Total	1199	915	10	3

2. Taman Kanak-kanak (TK)

KECAMATAM	GTU/PTY	NON ASN	PNS	PPPK
Buahdua	16	2	3	0
Cibugel	8	5	0	0
Cimalaka	35	6	21	0
Cimanggung	47	8	3	0
Cisarua	20	4	3	0
Cisitu	17	5	1	0
Conggeang	11	0	3	0
Darmaraja	17	1	4	0
Ganeas	12	0	1	0
Jatigede	4	3	0	0
Jatinangor	79	0	3	0
Jatinunggal	11	7	2	0
Pamulihan	28	6	6	0
Paseh	28	5	8	0
Rancakalong	13	3	6	0
Situraja	24	9	7	0
Sukasari	25	2	2	0
Sumedang Selatan	65	6	10	1
Sumedang Utara	82	18	14	0
Surian	2	3	3	0
Tanjungkerta	20	2	7	0
Tanjungmedar	14	3	0	0
Tanjungsari	62	3	10	0
Tomo	15	6	0	0
Ujungjaya	16	2	1	0
Wado	11	0	2	0
Grand Total	682	109	120	1

3. Pendidikan Dasar

a. Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar didukung personil sebagai berikut :

KECAMATAN	GTU/PTY	NON ASN	PNS	PPK
Buahdua	0	84	156	8
Cibugel	0	81	89	11
Cimalaka	0	142	215	8
Cimanggung	22	204	194	29



KECAMATAN	GTY/PTY	NON ASN	PNS	PPK
Cisarua	0	51	68	3
Cisitu	0	71	150	7
Conggeang	18	90	123	4
Darmaraja	0	91	153	6
Ganeas	0	63	92	2
Jatigede	0	69	106	9
Jatinangor	85	186	179	9
Jatinunggal	1	153	159	17
Pamulihan	17	137	144	6
Paseh	0	69	120	9
Rancakalong	12	112	177	13
Situraja	0	91	183	6
Sukasari	1	57	58	8
Sumedang Selatan	48	196	305	15
Sumedang Utara	17	194	286	10
Surian	0	49	66	5
Tanjungkerta	0	89	166	9
Tanjungmedar	0	95	111	3
Tanjungsari	38	179	190	10
Tomo	9	57	102	2
Ujungjaya	0	74	118	5
Wado	0	98	163	16
Grand Total	268	2782	3873	230

b. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama didukung personil sebagai berikut :

KECAMATAN	GTY/PTY	NON ASN	PNS	PPPK
Buahdua	15	34	50	4
Cibugel	1	32	35	8
Cimalaka	12	44	101	2
Cimanggung	125	81	62	13



KECAMATAN	GTY/PTY	NON ASN	PNS	PPPK
Cisarua	0	13	24	0
Cisitu	2	34	65	7
Conggeang	6	24	48	3
Darmaraja	5	29	57	12
Ganeas	0	20	30	2
Jatigede	15	30	37	9
Jatinangor	168	113	115	6
Jatinunggal	16	48	44	7
Pamulihan	26	60	73	13
Paseh	0	22	57	5
Rancakalong	18	48	64	6
Situraja	1	56	91	7
Sukasari	9	15	27	3
Sumedang Selatan	44	109	201	9
Sumedang Utara	9	63	141	8
Surian	0	10	14	1
Tanjungkerta	26	32	52	2
Tanjungmedar	0	13	15	1
Tanjungsari	85	91	103	11
Tomo	1	23	35	3
Ujungjaya	0	19	39	4
Wado	13	61	55	17
Grand Total	597	1124	1635	163

4. Pendidikan Kesetaraan

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan didukung personil sebagai berikut :

KECAMATAM	GTY/PTY	NON ASN	PNS	PPPK
Buahdua	0	0	0	0
Cibugel	0	0	0	0
Cimalaka	10	8	3	0
Cimanggung	2	2	4	0
Cisarua	11	0	0	0



KECAMATAM	GTU/PTY	NON ASN	PNS	PPPK
Cisitu	7	7	1	0
Conggeang	3	4	7	0
Darmaraja	0	0	0	0
Ganeas	10	6	3	1
Jatigede	0	0	0	0
Jatinangor	37	5	2	0
Jatinunggal	6	0	2	0
Pamulihan	8	5	6	0
Paseh	11	1	0	0
Rancakalong	6	4	6	2
Situraja	19	9	3	1
Sukasari	19	12	0	0
Sumedang Selatan	21	10	6	1
Sumedang Utara	26	8	3	0
Surian	0	6	0	0
Tanjungkerta	1	3	0	0
Tanjungmedar	2	0	0	0
Tanjungsari	13	22	11	0
Tomo	4	5	0	0
Ujungjaya	9	12	2	0
Wado	16	9	4	2
Grand Total	241	138	63	7

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh, adalah sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. APK/APM SD/SMP di dorong oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terasa manfaatnya baik untuk dirinya maupun untuk lingkungannya. Juga didukung adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besar sekali manfaatnya untuk operasional sekolah, utamanya Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap anak dari keluarga miskin dalam meringankan biaya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.



2. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, LPMP, Perusahaan, Pegiat dan Praktisi Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai kebutuhan KBM khususnya berbasis lingkungan dan budaya sekitar.
3. Pemerintah daerah melakukan rekrutmen dan seleksi guru kontrak daerah sesuai analisis kebutuhan.
4. Didalam juknis Pemanfaatan dana BOS, sudah dapat mengalokasikan dana BOS untuk perawatan gedung sekolah untuk gedung atau ruangan dengan tingkat kerusakan ringan.

Faktor Penghambat :

1. Usia peserta didik dibawah 7 tahun dan diatas 13 tahun masih bersekolah di tingkat SD.
2. Usia peserta didik dibawah 13 tahun dan diatas 15 tahun masih bersekolah di tingkat SMP.
3. Peserta didik yang berada diperbatasan bersekolah keluar kabupaten atau dari luar kabupaten bersekolah kedalam kabupaten.
4. Kompetensi guru belum sesuai kebutuhan KBM (mutu dan kompetensi guru rendah).
5. Kemampuan guru dalam penguasaan IT masih rendah.
6. Aktifitas KKG dan MGMP di kabupaten/kota belum dilaksanakan secara optimal untuk mengadakan kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya belajar dan budaya berbagi ilmu sesama guru.
7. Terdapat ketimpangan jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu.
8. Penyebaran guru belum merata.
9. Guru enggan ditugaskan di tempat yang terpencil akibat pengaruh intervensi politik.
10. Kekurangan guru PNS.
11. Jumlah murid pada sekolah tertentu kurang dari 10 dalam satu kelas.



12. Banyak ruang kelas / guru / tata usaha / perpustakaan / laboratorium / lainnya yang memiliki intensitas kerusakan berat.
13. Perbandingan jumlah ruang kelas terhadap siswa tidak sesuai peraturan (rombel tidak ideal) dan Kurangnya fasilitas: kelas, perpustakaan, laboratorium.
14. Penumpukkan siswa di wilayah tertentu (disparitas satuan pendidikan).
15. Bangunan tidak ramah anak dan kebutuhan khusus lainnya.
16. Masih banyak PAUD yang belum terakreditasi.
17. Rendahnya kuota akreditasi untuk PAUD.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2021, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Adanya Perubahan target Indikator Sasaran yang di sampaikan ke BAPPEDA
2. Melaksanakan sosialisasi serta mengevaluasi Program dan kegiatan yang lebih menbidik terhadap target sasaran kinerja Pendidikan
3. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun swasta serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan maupun anggaran agar tercipta keterpaduan, integritas, dan transparansi dalam rangka mewujudkan Pendidikan di Kabupaten Sumedang
4. Memperketat batasan usia ketika pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
5. Memperketat pemberlakuan zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
6. Pemerintah daerah mempermudah ijin belajar untuk guru, serta memberikan beasiswa dan kemudahan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi D4/S1 untuk menempuh pendidikan. Bagi yang tidak memungkinkan (dikarenakan



usia mendekati pensiun) dapat diberikan pelatihan agar kompetensinya dapat setara dengan guru D4/S1

7. Pemerintah daerah memberikan pelatihan IT secara berkala kepada guru-guru melalui KKG atau MGPM dengan bekerja sama dengan berbagai tenaga atau rewan ahli IT atau guru-guru IT, dan pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada KKG/MGMP yang aktif mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi guru
8. Pemerintah daerah meredistribusi guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan pemerataan guru, atau melakukan rotasi guru secara berkala
9. Pemerintah daerah bersama DPRD Komisi Pendidikan membuat aturan khusus terkait rotasi guru secara berkala, misalnya 3 atau 5 tahun sekali berdasarkan analisis kebutuhan sehingga semua guru pasti dirotasi dan mengurangi intervensi politik, serta mengalokasikan dana untuk pembangunan dan renovasi perumahan yang layak bagi guru di daerah terpencil
10. Pemerintah daerah menerapkan multigrade dan multisubject, guru bisa mengajar mata pelajaran serumpun dan mengajar di kelas jenjang berbeda
11. Pemerintah daerah melakukan analisis populasi anak usia sekolah dengan satuan pendidikan terdekat, dan pemerintah daerah mengambil sikap terkait sekolah yang hanya memiliki siswa kurang dari 10 pada setiap kelas, baik melakukan merger sekolah serta menyarankan siswa tersebut untuk bersekolah di sekolah lain atau membina sekolah tersebut agar mendapatkan siswa sesuai kondisi sekolah
12. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan pendataan dan pemetaan kondisi ruang kelas berdasarkan zona pendidikan. Sesuai dengan hasil pendataan dan pemetaan. Pemda memberikan prioritas alokasi anggaran kepada pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas berdasarkan kondisi ruang yang rusak berat, dan Penambahan ruang kelas baru dari anggaran APBD



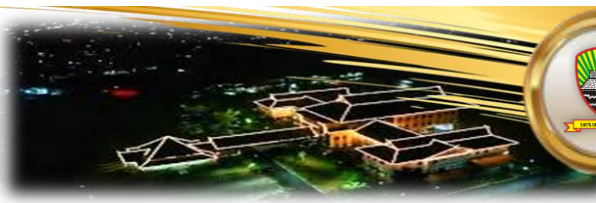
13. Sekolah dalam satu zona saling mendukung baik secara infrastruktur maupun PTK melalui sharing resources dan redistribusi guru
14. Memperkuat peran Gotong Royong tripusat pendidikan dalam zona dengan mendorong orang tua dan masyarakat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan
15. Pembangunan harus memperhatikan isu gender dan difabel, serta Pengembangan mulok yang ramah anak
16. Pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran untuk membantu PAUD yang belum terakreditasi, serta memetakan PAUD di masing-masing zona pendidikan yang belum terakreditasi sehingga dapat dilakukan prioritas percepatan akreditasi
17. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Himpaudi dan IGTKI untuk mendorong lembaga-lembaga paud untuk akreditasi serta berkoordinasi dengan BAN untuk di tambah kuota

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada pasal 2 ayat (3), Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara pada usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan berat (ODGJ) yang terlayani kesehatan	Persen	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%

4.2.2 Target Pencapaian SPM

1. Target

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Capaian



kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

2. Perhitungan Pembiayaan

Pada perhitungan pembiayaan, pemerintah daerah melakukan pemetaan pembiayaan, karena terdapat sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam penerapan SPM, tetapi dalam pola perhitungan SPM perlu diperhatikan untuk tidak *double counting* pembiayaan, seperti yang telah dialokasikan JKN maka tidak perlu ada di kebutuhan SPM, contoh : biaya obat program, obat TB, vaksin yang dibiayai oleh pusat tidak perlu diperhitungkan, selain itu untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang sama pada kegiatan SPM seperti pendataan, ATK, dll dalam satu penghitungan pembiayaan sehingga alokasi dapat efisien dan efektif.

Untuk mempermudah penghitungan pembiayaan daerah tersebut telah disiapkan tools costing SPM dalam bentuk sistem informasi yang tersedia. Sistem informasi ini digunakan untuk mempermudah daerah dalam perencanaan pelaksanaan SPM.

4.2.3 Realisasi Capaian

Dari dua belas indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang sudah ditentukan sesuai Peraturan menteri kesehatan, belum semua bisa mencapai target 100%. Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan tahun 2021 adalah sebesar 86,54%.

Capaian paling rendah adalah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, yaitu hanya sebesar 24,15% dan yang paling tinggi adalah capaian SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Pelayanan Kesehatan Balita yaitu sebesar 100 %.



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR CAPAIAN/OUTPUT			CAPAIAN (%)	KET
		Sasaran	Dilayani	Selisih		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	17,218	17,218	0	100	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	17,878	17,878	0	100	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	17,555	17,555	0	100	
4	Pelayanan kesehatan balita	81,696	81,696	0	100	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	38,108	36,807	1,301	96.59	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	808,100	778,361	29,739	96.32	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	189,427	147,535	41,892	77.88	
8	Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi	248,173	244,911	3,262	98.69	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	64,351	62,678	1,673	97.40	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1,653	1,331	322	80.52	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	13,413	3,436	10,174	25.62	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	21,922	14,671	7,251	66.92	



4.2.4 Alokasi Anggaran dan Capaian Kinerja

Pada dasarnya seluruh anggaran dari berbagai sumber yang dialokasikan untuk bidang kesehatan adalah untuk memenuhi SPM baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi yang secara langsung menembak SPM adalah sebesar Rp. 7.482.094.500,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah). Dari anggaran tersebut realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 6.288.317.055.00 (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Lima Rupiah), dengan realisasi capaian kinerja sebesar 84,04%, dengan rincian tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Capaian Kinerja Realisasi Standar Pelayanan Minimal 2021 Sub Bidang Kesehatan

NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET	TOTAL ANGGARAN PERANGKAT				TOTAL REALISASI (Rp)	TOTAL ANGGARAN DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM
					APBD II (Rp)	BANTUAN PROVINSI (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA (Rp)		
1	DINAS KESEHATAN									
		1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	99,03%	149.095.000	-	1.145.515.900	-	1.294.610.900	1.307.348.450
		2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	74,24%	98.160.000	-	2.557.567.564	-	2.655.727.564	3.576.986.000
		3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	98,96%	60.500.000	-	134.306.750	-	194.806.750	197.056.750
		4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	96,48%	37.875.000	-	470.577.500	-	508.452.500	527.002.500
		5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	89,36%	60.325.000	-	607.985.100	-	668.310.100	747.885.100
		6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	80,63%	102.910.000	-	89.464.700	-	192.374.700	238.579.700
		7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	95,59%	-	-	108.840.000	-	108.840.000	113.865.000
		8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	92,87%	110.169.425	-	-	-	110.169.425	118.625.000
		9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	57,95%	68.397.000	-	-	-	68.397.000	118.034.000



NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET	TOTAL ANGGARAN PERANGKAT				TOTAL REALISASI (Rp)	TOTAL ANGGARAN DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM
					APBD II (Rp)	BANTUAN PROVINSI (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA (Rp)		
		10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	95,89%	243.443.000	-	6.975.000	-	250.418.000	261.148.000
		11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	96,02%	159.357.366	-	13.800.000	-	173.157.366	180.344.000
		12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	66,22%	63.052.750	-	-	-	63.052.750	95.220.000
JUMLAH			100%	84,04%	1.153.284.541	-	5.135.032.514	-	6.288.317.055	7.482.094.500

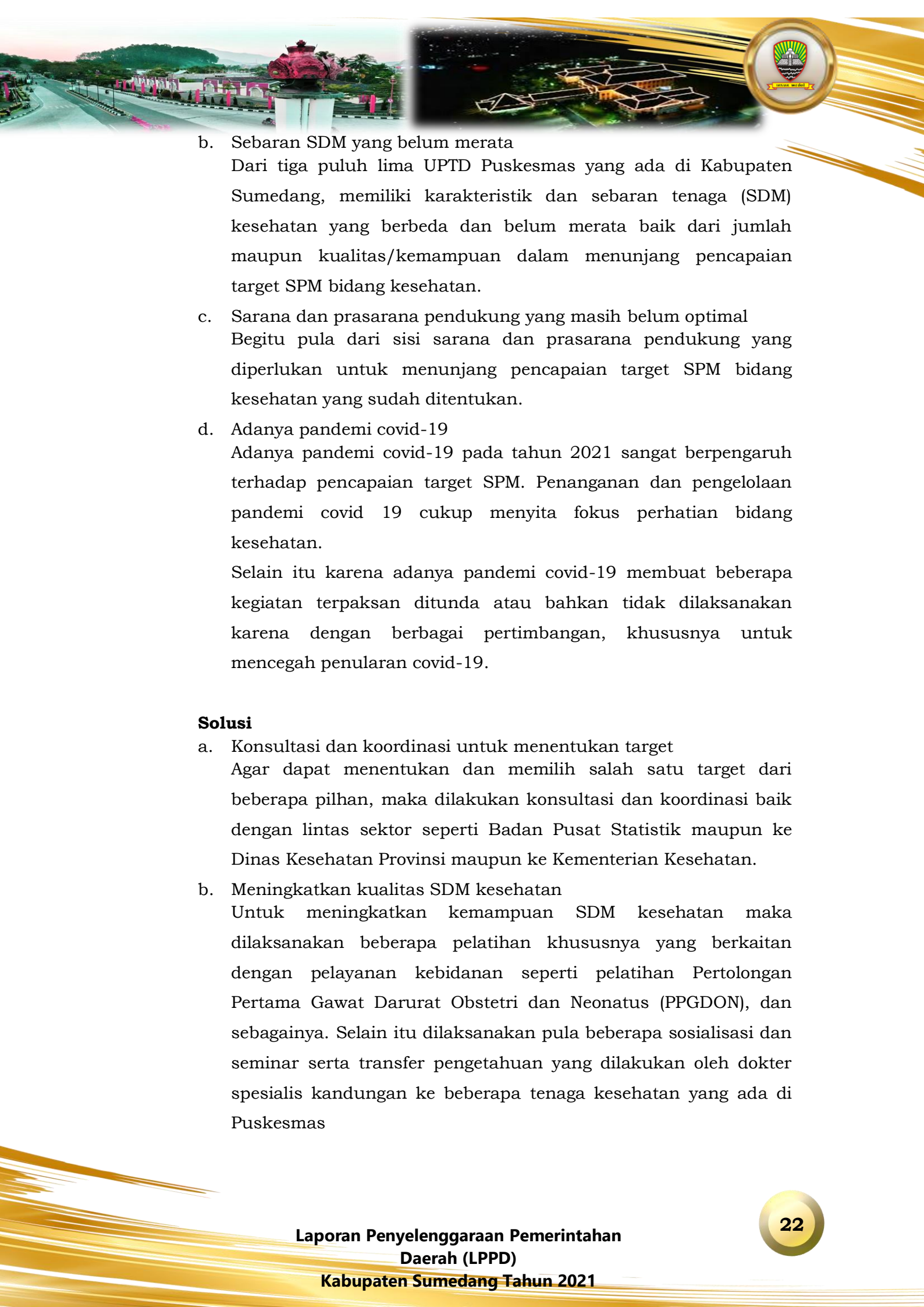
4.2.5 Dukungan Personil

Seluruh tenaga (personil) di Dinas Kesehatan ikut terlibat dalam upaya pencapaian SPM Bidang Kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang terlibat langsung adalah beberapa jenis tenaga fungsional seperti ; dokter, bidan, perawat dan tenaga fungsional lainnya dengan jumlah sebanyak 1.902 orang yang tersebar di 35 Puskesmas.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi Permasalahan

a. Kesulitan menentukan target

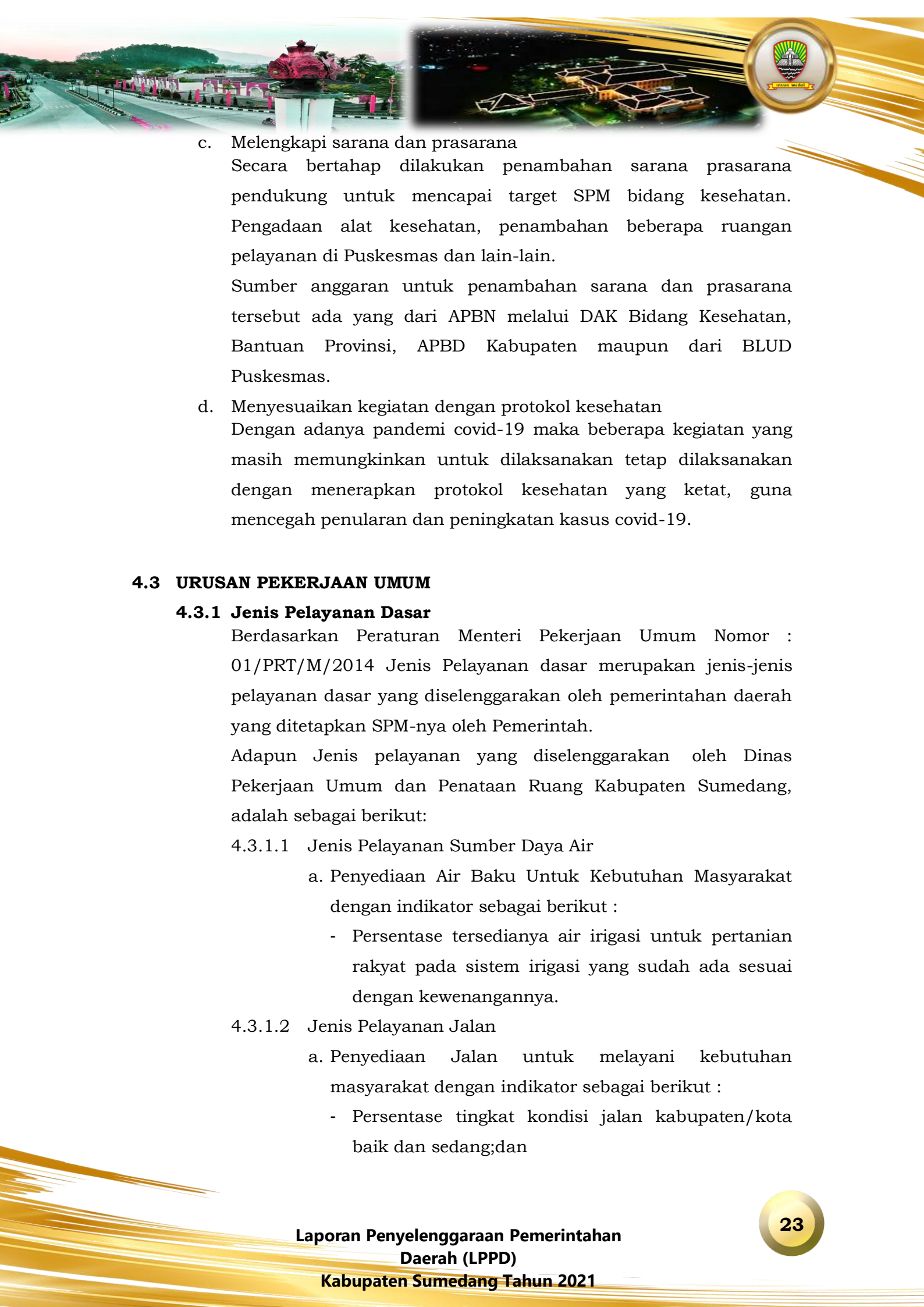
Dari beberapa indikator SPM Bidang kesehatan, ada beberapa indikator yang mengalami kesulitan untuk menentukan target capaian. Misalnya untuk Kematian Ibu, terjadi kesulitan apakah akan menggunakan angka kematian ibu, ratio kematian ibu atau jumlah kematian ibu. Setiap pilihan indikator memiliki ketentuan dan rumus yang berbeda dan akan menimbulkan hasil analisis dan interpretasi yang berbeda-beda juga.



- b. Sebaran SDM yang belum merata
Dari tiga puluh lima UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Sumedang, memiliki karakteristik dan sebaran tenaga (SDM) kesehatan yang berbeda dan belum merata baik dari jumlah maupun kualitas/kemampuan dalam menunjang pencapaian target SPM bidang kesehatan.
- c. Sarana dan prasarana pendukung yang masih belum optimal
Begitu pula dari sisi sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan untuk menunjang pencapaian target SPM bidang kesehatan yang sudah ditentukan.
- d. Adanya pandemi covid-19
Adanya pandemi covid-19 pada tahun 2021 sangat berpengaruh terhadap pencapaian target SPM. Penanganan dan pengelolaan pandemi covid 19 cukup menyita fokus perhatian bidang kesehatan.
Selain itu karena adanya pandemi covid-19 membuat beberapa kegiatan terpaksa ditunda atau bahkan tidak dilaksanakan karena dengan berbagai pertimbangan, khususnya untuk mencegah penularan covid-19.

Solusi

- a. Konsultasi dan koordinasi untuk menentukan target
Agar dapat menentukan dan memilih salah satu target dari beberapa pilhan, maka dilakukan konsultasi dan koordinasi baik dengan lintas sektor seperti Badan Pusat Statistik maupun ke Dinas Kesehatan Provinsi maupun ke Kementerian Kesehatan.
- b. Meningkatkan kualitas SDM kesehatan
Untuk meningkatkan kemampuan SDM kesehatan maka dilaksanakan beberapa pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan seperti pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan Neonatus (PPGDON), dan sebagainya. Selain itu dilaksanakan pula beberapa sosialisasi dan seminar serta transfer pengetahuan yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan ke beberapa tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas



- c. Melengkapi sarana dan prasarana
Secara bertahap dilakukan penambahan sarana prasarana pendukung untuk mencapai target SPM bidang kesehatan. Pengadaan alat kesehatan, penambahan beberapa ruangan pelayanan di Puskesmas dan lain-lain.
Sumber anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana tersebut ada yang dari APBN melalui DAK Bidang Kesehatan, Bantuan Provinsi, APBD Kabupaten maupun dari BLUD Puskesmas.
- d. Menyesuaikan kegiatan dengan protokol kesehatan
Dengan adanya pandemi covid-19 maka beberapa kegiatan yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, guna mencegah penularan dan peningkatan kasus covid-19.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 Jenis Pelayanan dasar merupakan jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

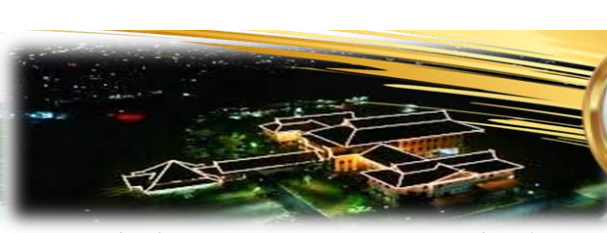
Adapun Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut:

4.3.1.1 Jenis Pelayanan Sumber Daya Air

- a. Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat dengan indikator sebagai berikut :
 - Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

4.3.1.2 Jenis Pelayanan Jalan

- a. Penyediaan Jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator sebagai berikut :
 - Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang; dan



- Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

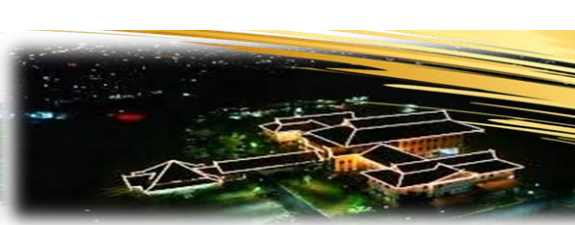
Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tingkat Pemerintah Kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, Pemenuhan data SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang tidak bisa terdokumentasikan dengan maksimal, dikarenakan kegiatan yang menyangkut urusan tersebut dilaksanakan oleh SKPD yang lain. Adapun SKPD yang melaksanakannya meliputi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DKPP) Kabupaten Sumedang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang.

4.3.3 Realisasi Capaian

Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :



No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Target Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A. Sub Bidang Pekerjaan Umum							
1.	Penyediaan Air Minum	Mewujudkan Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga berakses air minum	Persen	100	81,22	95,55 %
2.	Penyediaan Sanitasi	Mewujudkan Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	100	55,46	79,23%



4.3.4 Alokasi Anggaran

APBN

Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN (DAK Reguler) Kabupaten sebesar Rp. 12.362.050.000,00. Anggaran dimaksud dipergunakan untuk mendanai program dan kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 4.3
Capaian Realisasi Anggaran APBD dan APBN Penerapan SPM Tahun 2021
Sub Bidang Pekerjaan Umum

NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET	TOTAL ANGGARAN PERANGKAT				TOTAL REALISASI (Rp)	TOTAL ANGGARAN DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM
					APBD II (Rp)	BANTUAN PROVINSI (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA (Rp)		
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
		1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								
		1. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	100%	99,68%	-	-	3.779.677.000	-	3.767.598.000	3.779.677.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								
		1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100%	91,60%	-	-	2.220.000.000	-	2.035.823.950	2.220.000.000
		2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100%	92,25%	-	-	2.200.000.000	-	2.029.590.450	2.200.000.000
		3. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100%	89,09%	-	-	4.162.373.000	-	3.708.331.400	4.162.373.000
		JUMLAH	100%	76,94%	-	-	12.362.050.000	-	9.511.753.350	12.362.050.000



4.3.5 Dukungan Personil

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 508 Orang, terdiri dari 186 orang Pegawai Negeri Sipil dan 322 orang Pegawai Honorer.

Adapun personil yang dimiliki lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten sumedang Per 31 Desember 2021

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Dinas	Pembina Tk. I - IV/b	S 2	1	
2.	Sekretaris	Penata Tk.I - III/d	S 2	1	
3.	Kepala Bidang (Kabid)			4	
	- Kabid. Bina Marga	Penata Tk.I - III/d	S1	1	
	- Kabid. Sumber Daya Air	Penata Tk.I - III/d	S 1	1	
	- Kabid. Tata Ruang	Pembina - IV/a	S 2	1	
	- Kabid. Jasa Konstruksi	Penata Tk.I - III/d	S 2	1	
4.	Kepala UPTD			11	
	- PUPR Wilayah Pamulihan	Penata Tk.I - III/d	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Tanjungsari	Penata - III/c	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Sumedang Kota	Penata Tk.I - III/d	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Tanjungkerta	Penata - III/c	S 2	1	
	- PUPR Wilayah Conggeang	Penata - III/c	S 2	1	
	- PUPR Wilayah Tomo	Penata - III/d	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Cimalaka	Penata - III/c	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Situraja	Penata - III/c	S 2	1	
	- PUPR Wilayah Wado	Pembina - IV/a	S 1	1	
	- Peralatan dan Perbengkelan	Penata - III/c	S1	1	



NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
	- Laboratorium Bahan Kontruksi	Penata Tk.I - III/d	S 2	1	
5.	- Kepala Seksi (Kasi)			11	
	- Bid. Bina Marga			3	
	- Kasi. Perencanaan dan Evaluasi	Penata Tk.I - III/d	S 2	1	
	- Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penata Tk.I - III/d	S 1	1	
	- Preservasi Jalan dan Jembatan	Penata - III/c	S2	1	
	- Bid. Sumber Daya Air			3	
	- Kasi. Perencanaan	Penata Tk.I - III/d	S 2	1	
	- Kasi. Pelaksanaan	Penata Tk.I - III/d	S 1	1	
	- Kasi. Pemeliharaan	Penata - III/c	S 2	1	
	- Bid. Tata Ruang			3	
	- Kasi. Perencanaan Tata Ruang	Penata Tk.I - III/d	S 1	1	
	- Kasi. Pemanfaatan Tata Ruang	Penata - III/c	S 2	1	
	- Kasi. Pengendalian Tata Ruang	Pembina - IV/a	S 2	1	
	- Bid. Jasa Konstruksi			2	
	- Kasi. Pengaturan dan Pemberdayaan	Penata Tk.I - III/d	S 1	1	
	- Kasi. Pengawasan	Penata - III/c	S 1	1	
6.	- Kepala Sub Bagian (Kasubag)			14	
	- Sekretariat			3	
	- Kasubag Program	Penata - III/c	S 1	1	
	- Kasubag Umum, Aset dan Kepegawaian	Penata - III/c	S 1	1	
	- Kasubag Keuangan	Penata Tk.I - III/d	S 1	1	
	- Tata Usaha UPTD			11	
	- PUPR Wilayah Pamulihan	Penata - III/c	S1	1	
	- PUPR Wilayah Tanjungsari	Penata - III/c	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Sumedang Kota	Penata Tk.I - III/d	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Tanjungkerta	Penata Muda Tk.I - III/b	S1	1	
	- PUPR Wilayah Conggeang	Penata - III/c	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Tomo	Penata - III/c	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Cimalaka	Penata - III/c	S 2	1	
	- PUPR Wilayah Situraja	Penata - III/c	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Wado	Penata - III/c	S 1	1	
	- Peralatan dan Perbengkelan	Penata - III/c	S 2	1	
	- Laboratorium Bahan Konstruksi	Penata - III/c	S 2	1	



NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
7.	- Staf/Pelaksana				
	- PNS			151	
	- Pengelola Program dan Kegiatan	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	- Penglola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Penata – III/c	S 1	1	
		Penata Muda – III/b	S 1	1	
	- Pengadministrasi Persuratan	Pengatur Tk.I – II/d	SLTA	1	
	- Pelaksana Sub Bagian Umum Aset dan Kepegawaian	Penata Muda – III/a	SLTA	1	
		Pengatur TK.I II/d	SLTA	2	
		Pengatur – II/c	SLTA	1	
	- Pramu Bhakti	Pengatur Muda Tk. I – II/b	SLTP	1	
	- Bendahara	Penata – III/c	S2	1	
		Penata Muda Tk. I – III/b	S1	1	
	- Pengelola Gaji	Penata Muda Tk. I – III/b	D3	1	
	- Pengadministrasi Penerimaan	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
	- Pengadministrasi Keuangan	Penata Muda Tk. I – III/b	SLTA	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	4	
		Pengatur – II/c	SLTA	1	
	- Pengolah Data Aplikasi	Pengatur – II/c	D3	1	
	- Pengelola Keuangan	Penata TK.I- III/d	S1	1	
		Penata-III/c	S1	2	
	- Penilik Jalan	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	4	
	- Pengawas Jalan dan Jembatan	Penata Muda Tk. I – III/a	S1	2	
	- Analis Jalan Jembatan	Penata Muda TK. I – III/a	S1	1	
	- Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Penata Muda TK.I – III/b	D3	1	
	- Pemeriksa Jalan dan Jembatan	Penata Muda – III/a	S1	1	
	- Pemelihara Jalan	Penata Muda – III/a	S1	2	
		Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	17	
		Pengatur – II/c	SLTA	6	
		Pengatur Muda TK.I – II/b	SLTA	1	
	- Pengawas Irigasi	Penata – III/a	S 1	4	
	- Analis Sumber Daya Air	Penata – III/c	S1	1	
Penata Muda TK.1 – III/b		S1	1		
Penata Muda – III/a		S1	1		



NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
	- Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	Penata Muda - III/b	SLTA	1	
		Pengatur Tk. I - II/d	SLTA	2	
	- Pengelola Jaringan Irigasi	Pengatur - II/c	D3	1	
	- Pengelola Sumber Daya Air	Pengatur - II/c	D3	1	
	- Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pengatur - II/c	D3	2	
	- Petugas Operasi dan Pemeliharaan	Pengatur TK.1 - II/d	SLTA	13	
		Pengatur - II/c	SLTA	8	
		Pengatur Muda Tk. I - II/b	SLTA	1	
	- Analis Tata Ruang	Penata - III/c	S2	1	
	- Analis Pemanfaatan Ruang	Penata Muda Tk. I - III/b	S2	1	
			S1	1	
	- Pengawas Tata Ruang	Penata - III/c	S1	1	
	- Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penata Muda - III/a	S1	2	
		Pengatur Muda - II/c	D3	2	
	- Pengadministrasi Umum Tata Ruang	Penata Muda - III/a	S1	1	
	- Penelaah Mutu Konstruksi	Penata - III/c	S1	1	
		Penata Muda - III/a	S1	1	
	- Pengelola Jasa Konstruksi	Penata Muda - III/a	D3	3	
	- Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	Penata Muda TK.I - III/b	S1	1	
	- Pengelola Pemeliharaan Laboratorium	Penata Muda TK.I - III/b	D3	1	
	- Pemelihara peralatan laboratoriu	Pengatur TK.I - II/d	SLTA	1	
	- Pengawas Pengoperasian Alat Berat	Penata Muda - III/a	S1	1	
	- Operator Alat Berat	Pengatur Tk. I - II/d	SLTA	13	
		Pengatur - II/c	SLTA	4	
		Pengatur Muda TK. I - II/b	SLTA	1	
	- Pramu Kebersihan	Pengatur - II/c	SLTP	1	
		Pengatur Muda TK.I - II/b	SLTP	1	
		Pengatur Muda - II/a	SLTP	2	
			SD	1	
		Juru TK.I - I/d	SD	1	
	- JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	Penata Muda - III/a	S1	5	
	- JF Teknik Pengairan Ahli Pertama	Penata Muda - III/a	S1	2	

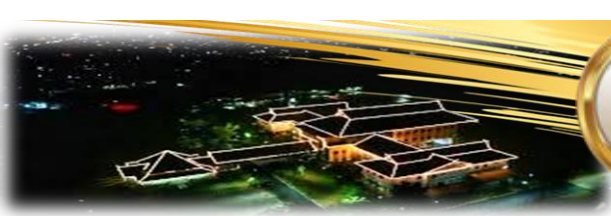


NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
	- JF Penata Ruang Ahli Pertama	Penata Muda - III/a	S1	1	
	- Honorier			322	
			S 2	19	
			S 1	62	
			D3	14	
			SLTA	84	
			SLTP	5	
			SD	2	
	Jumlah PNS		186		
	Jumlah Honorier		322		
	Jumlah Total		508		

Sumber : DUK Per 29 Desember Tahun 2021 Dinas PUPR Kab. Sumedang

Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian dinas;
 - b. menetapkan kebijakan teknis tentang pembangunan perkotaan dan perdesaan yang mengacu kepada kebijakan nasional dan provinsi;
 - c. mengawasi pengelolaan sumber daya air;



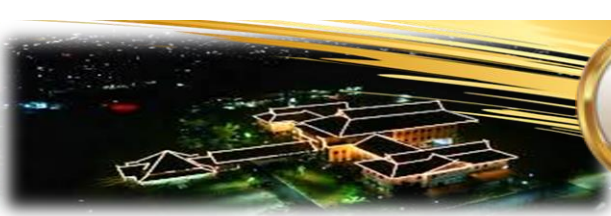
- d. menetapkan pengaturan jalan kabupaten meliputi perencanaan umum dan pembiayaan, penetapan status, pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten.
- e. menetapkan rekomendasi teknis untuk :
 - (1) Ijin pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kabupaten
 - (2) Ijin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air permukaan
 - (3) Ijin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air dan penambangan pada wilayah sungai dalam kabupaten
 - (4) Ijin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder kabupaten
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang dibantu oleh :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Bina Marga;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Jasa Kontruksi
 - e. Bidang Tata Ruang
 - f. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan serta Irigasi;
 - g. UPT Laboratorium Pemeriksaan Bahan dan Pekerjaan;
 - h. UPT Peralatan;

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi sehingga kegiatan sangat sulit dilaksanakan disebabkan oleh beberapa kendala sebagai berikut :

1. Dalam menyusun perencanaan anggaran SPM belum sesuai dengan ketentuan yang ada.



2. RKA dan KAK belum dibuat oleh OPD pengampu
3. Lambatnya koordinasi dari bidang-bidang yang bersangkutan
4. Keahlian atau kemampuan Sumber daya manusia terbatas.
5. Untuk pencapaian target SPM pada pelayanan jalan tidak ditunjang dengan rencana kegiatan yang optimal.
6. Ketersediaan anggaran tidak optimal sehingga mempengaruhi pencapaian fisik dilapangan sehingga sangat sulit untuk mencapai target indikator yang ditentukan.

b. Solusi :

Adapun solusi yang ditawarkan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a) Antara SKPD terkait harus ada koordinasi yang baik
- b) Diadakan konsultasi dan studi banding kepada daerah lain berkaitan dengan SPM.
- c) Perlu dilaksanakan Bintek dalam penyusunan SPM dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi.
- d) Harus ada kegiatan penyusunan data base terhadap indikator terkait
- e) Harus ada penambahan alokasi anggaran dari pusat
- f) Melakukan koordinasi dengan BAPPEDA
- g) Penerapan SPM Bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memerlukan kerjasama semua pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Serta diperlukan dukungan alokasi anggaran yang baik dari pusat, provinsi maupun Pemerintah Daerah sehingga target pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dapat tercapai

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman terdiri dari sebagian Sub Bidang Perumahan kawasan Permukiman, Tata Bangunan dan Pertanahan yaitu:



- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota ;
- b. Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimaksud untuk point a di atas yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yang terjadi di Kabupaten Sumedang dalam indikator yang menggambarkan sasaran/target yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu memerlukan beberapa tahapan dimulai dari :

1. Perencanaan Anggaran.
2. Pencarian dan pengkajian lahan baru yang aman dari bencana.
3. Pembebasan dan perubahan status Lahan.
4. Pembangunan dan penyerahan rumah yang layak huni bagi korban bencana.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 anggaran untuk penerapan SPM baru malaksanakan Pembebasan lahan untuk korban bencana di wilayah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dan pendatatan tingkat kerusakan adapun pembangunannya akan dilaksanakan pada Tahun 2022 .

Tabel 4.5
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021
Sub Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Sub Bidang Perumahan Kawasan Permukiman					
1.	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Masyarakat terkena dampak korban bencana di wilayah Kabupaten Sumedang	1. Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana 2. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi 3. Bagi Korban Bencana.	Persen	100 %



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah di Wilayah Kabupaten Sumedang	1. Subsidi Sewa 2. Penyediaan Rumah Layak Huni	Uang presen	100%

4.4.3 Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran SPM Tahun 2021

Total alokasi anggaran tahun 2021 untuk pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dilaksanakan untuk pengadaan Tanah dan pembebasan proses adimitrasi pelepasan Tanah dalam rangka pembangunan baru, dilokasi baru korban bencana dengan anggaran dari sumber lainnya sebesar Rp. 2.296.000.000,00, realisasi Rp. 2.271.000.000,00 dengan capaian kinerja realisasi anggaran sebesar 98,91%.

Kemudian sebelum ke tahapan Pembangunan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2022 untuk akurasi tingkat kerusakan lokasi bencana longsor Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan kegiatan pendataan tingkat kerusakan lokasi masyarakat korban bencana dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 25.000.000,00 Realisasi Anggaran sebesar Rp. 24.879.250,00 dengan Capaian sebesar 99,52%.



Tabel 4.6
Capaian Realisasi SPM Tahun 2021
Sub Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET	TOTAL ANGGARAN PERANGKAT				TOTAL REALISASI (Rp)	TOTAL ANGGARAN DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM
					APBD II (Rp)	BANTUAN PROVINSI (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA (Rp)		
1	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN									
		Pembangunan baru dilokasi baru/relokasi bagi korban bencana	100%	100%	2.271.000.000	-	-	-	2.271.000.000	2.271.000.000
		1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota								
		Pendataan Tingkat kerusakan rumah akibat bencana	100%	99,52%	25.000.000	-	-	-	24.879.250	25.000.000
JUMLAH			100%	99,99%	2.296.000.000				2.295.879.250	2.296.000.000

4.4.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang terlibat dalam pencapaian SPM bidang urusan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebanyak 117 orang terdiri dari 63 orang PNS dan 54 orang non-PNS.

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Eselon II/b	1 orang
2.	Eselon III/a	1 orang
3.	Eselon III/b	3 orang
4.	Eselon IV/a	11 orang
5.	Staf (PNS)	47 orang
6.	Staf (Honorar)	54 orang



4.4.5 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yaitu :

- a. Belum optimalnya tingkat pemahaman regulasi tentang penyusunan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Belum optimalnya dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal dari mulai perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi;
- c. Belum pernah dilaksanakan bintek penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
- d. Keterbatasan anggaran yang tersedia;
- e. Keterbatasan sumber daya manusia
- f. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang membidik SPM merupakan SPM Dinas PUPR sehingga program dan kegiatan tersebut tidak menjadi target SPM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang pada Tahun 2021.

b. Solusi

Solusi atas permasalahan tersebut di atas adalah :

- a. Semua OPD pengampu perlu dilaksanakan bintek penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
- b. harus diadakan kegiatan penyusunan data base tiap bidang yang melaksanakan SPM;
- c. mengupayakan tambahan anggaran untuk program/kegiatan yang membidik langsung pencapaian SPM;
- d. memprioritaskan pendanaan pada program dan kegiatan yang membidik SPM;
- e. Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi dilaksanakan secara optimal agar capaian penerapan Standar



Pelayanan Minimal dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

4.5 URUSAN SOSIAL

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Bidang urusan sosial ada beberapa jenis pelayanan dasar yang menjadi pedoman dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permensos No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial pada tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pusat antara lain:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang tahun 2021 tercantum dalam tabel 2.7 berikut :

Tabel 4.7
Target SPM Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Indikator	Target
1.	Program pelayanan dan rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	100%
		Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar Luar Panti sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Indikator	Target
		Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut Usia terlantar di luar Panti Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	100%
		Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial	Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya	100%
2.	Program Perlindungan Sosial		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%

Dari tabel diatas dapat terlihat jelas target pencapaian SPM setiap Jenis Pelayanan Dasar dan kegiatan beserta indikator nya ditargetkan 100%.

4.5.3 Realisasi Capaian

Target yang dapat dicapai/ direalisasikan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang tahun 2021 tercantum dalam tabel 2.8 berikut :

Tabel 4.8

Capaian/Realisasi SPM Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Indikator	Target		
				Jumlah orang yang berhak mendapat layanan (target tahun n)	Jumlah orang yang terlayani	Capaian Kinerja (%)
1.	Program pelayanan dan rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	5.692	1.042	18.30 %



No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Indikator	Target		
				Jumlah orang yang berhak mendapat layanan (target tahun n)	Jumlah orang yang terlayani	Capaian Kinerja (%)
		Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar Luar Panti sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	211	109	51.65%
		Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut Usia terlantar di luar Panti Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	38.865	3.729	9.6%
		Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial	Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	18	15	83.33%
2.	Program Perlindungan Sosial		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat terlihat realisasi/capaian kinerja SPM setiap indikatornya dan dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar adalah sebesar 18,30%, dengan jumlah orang yang berhak mendapat layanan (target tahun 2021) adalah 5.692 orang, sedangkan jumlah orang yang terlayani pada tahun 2021 adalah 1.042 orang dengan rincian bantuan 993 Orang bantuan reguler dari Kemensos (Sembako+PKH), 15 Orang mendapat bantuan Non Reguler UEP dari Anggaran APBD Provinsi, 27 Orang Mendapat bantuan dari



Anggaran APBN dan 7 Orang mendapat bantuan UEP non Reguler APBN.

- b. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya adalah sebesar 51,65%, dengan jumlah orang yang berhak mendapat layanan (target tahun 2021) adalah 211 orang, sedangkan jumlah orang yang terlayani pada tahun 2021 adalah 109 orang.
- c. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya adalah sebesar 9.6%, dengan jumlah orang yang berhak mendapat layanan (target tahun 2021) adalah 38.865 orang, sedangkan jumlah orang yang terlayani pada tahun 2021 adalah 3.729 orang.
- d. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya adalah sebesar 83,33%, dengan jumlah orang yang berhak mendapat layanan (target tahun 2021) adalah 18 orang, sedangkan jumlah orang yang terlayani pada tahun 2021 adalah 15 orang.
- e. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana dilakukan penanganan dan penanggulangan bencana secara maksimal dengan persentase 100%.



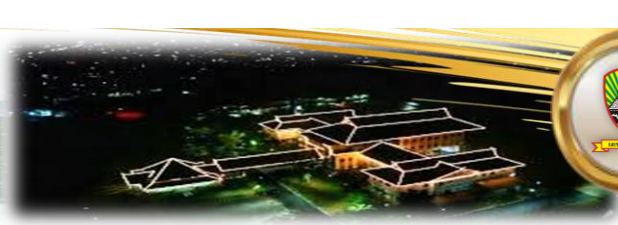
4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2021 di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial berjumlah dengan anggaran APBD sebesar Rp. 266.125.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 264,626.700,00 dengan dengan realisasi Capaian anggaran sebesar 99,44%.

Tabel 4.9

Capaian/Realisasi SPM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang 2021

NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET	TOTAL ANGGARAN PERANGKAT				REALISASI (Rp)	TOTAL (Rp)	TOTAL ANGGARAN DUKUNGAN PENCAPIAN SPM
					APBD II (Rp)	BANTUAN PROVINSI (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA (Rp)			
1	DINAS SOSIAL										
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	100%	99,70 %	94.125.000	-	-	-	93.840.500	94.125.000	94.125.000
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	100%	100%	26.000.000	-	-	-	26.000.000	26.000.000	26.000.000
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	100%	83,33%	6.000.000	-	-	-	5.000.000	6.000.000	6.000.000
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	100%	15.000.000	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	99,83%	125.000.000	-	-	-	124.786.200	125.000.000	125.000.000
		JUMLAH	100%	99,44%	266.125.000	-	-	-	264,626.700	266.125.000	266.125.000



4.5.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang Sosial sejumlah 6 orang dengan Mitra Kerja baik dari Kementerian Sosial maupun dari masyarakat seperti TKSK (26 orang) Pendamping Disabilitas (7 orang), Pendamping lanjut usia (1 orang), Sakti Peksos (2 orang), TAGANA (51 orang) dan PSM (277 orang). Dalam pelayanan pengaduan/laporan masyarakat telah dibentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang menangani Orang Terlantar, Orang dengan Tempat Tinggal Tidak Tetap, Permintaan pengusulan Basis Data Terpadu, Pengaduan Bantuan Sosial dan layanan kesejahteraan sosial lainnya.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

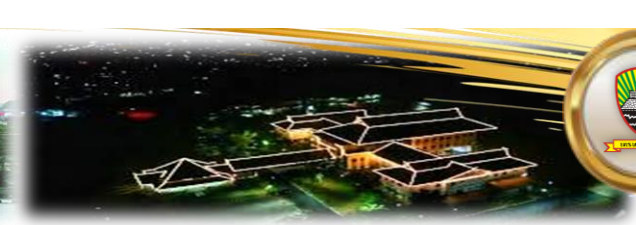
Masih ada beberapa permasalahan yang terkait dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial dengan permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya SDM Profesional dan sarana prasarana yang menangani urusan sosial, sehingga dalam penanganan dan pencegahan terjadinya PMKS belum optimal;
- b. Belum terpilah dan terverifikasinya data PMKS di BDT sehingga belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani.
- c. Masih kurangnya keberfungsian PSKS dalam menangani PMKS di Kabupaten Sumedang

b. Solusi

Dari permasalahan tersebut di atas, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
2. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan PMKS serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;



3. Usulan verifikasi dan validasi data BDT;
4. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

4.6 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

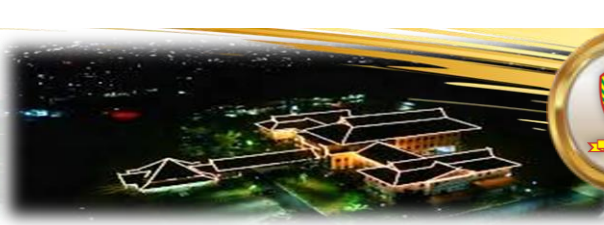
SATPOL PP

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota, adalah Bidang Urusan " *Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat* ". Dan pada Tahun 2017 terjadi Perubahan SOTK sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dimana salah satunya dengan adanya bidang baru yaitu bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran, dan secara otomatis bertambah pula tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	Setiap Tahun
		2. Jumlah Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat daerah	100	Setiap Tahun
		3. Jumlah Capaian SPM	100	Setiap Tahun



4.6.3 Realisasi Capaian

Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan " *Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat* ". pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	REALISASI
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100	100%
		1. Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	84,16%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	2. Jumlah Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	100	6,63%

Formulasi Perhitungan :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K-3/87 Kasus}}{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K-3/87 Kasus}} \times 100\% = 100\%$$

2. a. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten /Kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Bidang Penanggulangan Kebakaran/85 layanan

$$\frac{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021 (101 Kejadian)}}{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten /Kota pada Tahun X}} \times 100\% = 84.16\%$$



b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019 dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja/7 Pelayanan

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran}} \times 100\% = 6.63\%$$

Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021 (101 Kejadian)

3. Jumlah Pencapaian SPM

= Point (a) + (b)

= 84,16% + 6,63%

= 91,09%

Realisasi Pencapaian SPM pelayanan dasar Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat:

a. Kontribusi Pemerintah Daerah:

- Adanya dukungan kebijakan berupa produk Hukum dalam pelaksanaan tugas;
- Adanya dukungan pendanaan program dan kegiatan dari Anggaran APBD.

b. Kontribusi Swasta/masyarakat

- Adanya Respons dari masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan Perda nomor 7 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

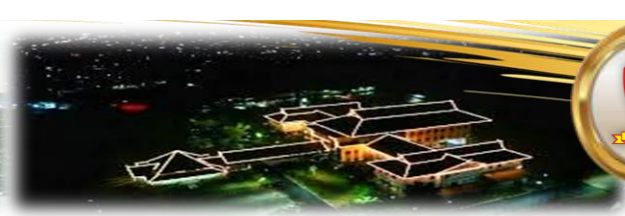
4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk penerpan Standar pelayanan Minimal di Kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berjumlah Rp. 4.003.731.700,00,- Realisasi sebesar Rp. 3.912.781.700,00 dengan capaian realisasi sebesar 97,73%, dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:



Tabel 4.10
Capaian/Realisasi SPM Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang 2021

NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET	TOTAL ANGGARAN PERANGKAT				TOTAL REALISASI DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM	TOTAL ANGGARAN DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM
					APBD II (Rp)	BANTUAN PROVINSI (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA (Rp)		
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				TOTAL ANGGARAN					
		1 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			1.967.947.900,00				1.880.997.900,00	
		Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan petrol, pengamanan dan pengawalan	100%	100%	893.999.950,00	-	-	-	893.999.950,00	893.999.950,00
		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	100%	100%	633.218.000,00	-	-	-	633.218.000,00	633.218.000,00
		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	190.229.950,00	-	-	-	190.229.950,00	190.229.950,00
		Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	100%	65,29%	250.500.000,00	-	-	-	163.550.000,00	250.500.000,00
		2 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			2.035.783.800,00				2.031.783.800,00	
		Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	100%	99,80%	2.035.783.800,00	-	-	-	2.031.783.800,00	2.035.783.800,00
		JUMLAH	100%	97,73%	4.003.731.700,00				3.912.781.700,00	4.003.731.700,00



4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) yaitu :

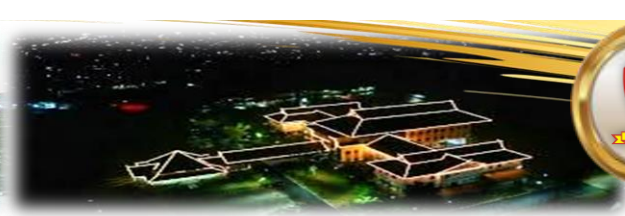
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kompisisi Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang menurut tingkat pendidikan, sebagaimana pada tabel dibawah ini:

No	Gol	Jml	Pendidikan Umum						Jenis Kelamin		Pendidikan Penjenjangan Diklat Struktural		
			SD	SMP	SMA	D.3	S1	S2	L	P	PIM IV	PIM III	PIM II
1.	IV-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV-b	2	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1
	IV-a	5	-	-	-	-	4	1	4	1	3	1	-
2.	III-d	15	-	-	1	-	12	2	13	2	14	-	-
	III-c	4	-	-	2	-	2	-	4	-	-	-	-
	III-b	9	-	-	2	-	7	-	9	-	-	-	-
	III-a	4	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-
3.	II-d	5	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-
	II-c	17	-	-	17	-	-	-	17	-	-	-	-
	II-b	3	-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	-
	II-a	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
4.	I-d	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	I-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		67	1	-	31	-	31	4	63	4	17	2	1

b. Pegawai Non PNS/Tenaga Tidak Tetap

Jenis Kelamin	Jml	Pendidikan Umum						Diklat Kesamaptaaan Polisi PP
		SD	SMP	SMA	D.3	S1	S2	
Laki-laki	108	-	-	106	1	1	-	-
Perempuan	14	-	-	10	2	2	-	-
Jumlah	122	-	-	116	3	3	-	-



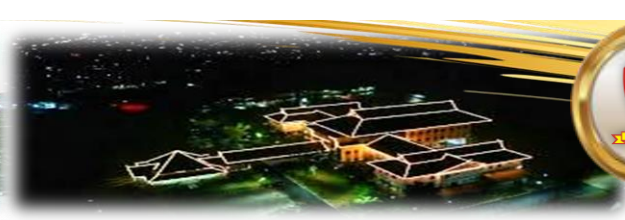
4.6.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Faktor Internal
 - a. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil
 - Masih kurangnya Pejabat dan Staf yang belum mengikuti latihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja.
 - Masih kurangnya tenaga PPNS dimana sementara ini hanya ada 2 orang.
 - b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana.
 - c. Masih perlunya penambahan Anggaran.
2. Faktor Eksternal
 - a. Masih adanya penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. Masih adanya Kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Masih adanya peredaran minuman keras.
 - d. Masih Terjadinya unjukrasa dan persengketaan.

b. Solusi

1. Mengusulkan para Pejabat Struktural dan Staf untuk mengikuti Diklat Teknis Ke-Satpol PP-an;
2. Mengusulkan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang untuk mengikuti Diklat PPNS maupun Diklat Teknis Pemadam Kebakaran;
3. Membuat surat usulan Penambahan Personil Kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang terutama yang sudah memiliki Sertifikat selaku PPNS;
4. Membuat surat usulan penambahan Sarana dan Prasarana Kantor;
5. Membuat surat usulan Penambahan Anggaran;
6. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah terutama yang menyangkut gangguan Ketentraman dan Ktertiban Umum serta Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Sumedang;



7. Mengantisipasi adanya unjuk rasa;
8. Mengantisipasi secara dini akan terjadinya bencana alam dengan melakukan himbauan – himbauan kepada masyarakat.

4.7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4.7.1 Jenis Pelayanan Dasar

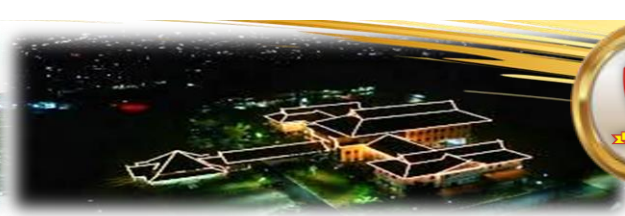
Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap Warga Negara. Terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut:

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, yaitu :

Pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (*hazards*) dan kerentanan (*vulnerability*) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (*capacity*) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu :

Serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang

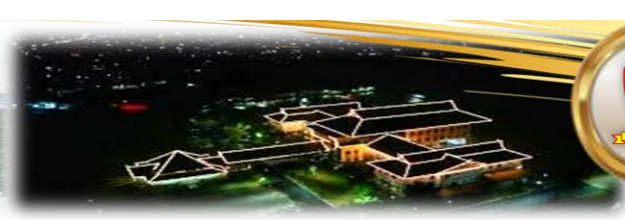


sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu : Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib (bukan pilihan). Dengan demikian, pembiayaannya dalam APBD maupun APBN menjadi prioritas. Terkait dengan pengadaan pelayanan dasar, untuk menjamin akses dan mutu pelayanannya, disusunlah Standar Pelayanan Minimalnya, Selanjutnya dapat dikatakan bahwa mau tidak mau pemenuhan pelayanan dasar harus diselenggarakan tanpa melihat pada potensi maupun pertumbuhan daerah karena pelayanan minimal ini menjadi bagian dari penyelenggaraan urusan wajib. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan dasar ini mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan masing-masing Lembaga. Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya, dengan melaksanakan SPM, maka penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud.

Aspek pembagian urusan pemerintahan terkait kebencanaan diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf 'e' menyatakan bahwa penanggulangan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada rumpun urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memiliki makna bahwa penyelenggaraan



urusan wajib terkait pelayanan dasar harus memiliki kriteria, sebagai berikut:

1. Bersifat layanan dasar yang disediakan pemerintah kepada masyarakat.
2. Pelaksanaannya berpedoman pada standar pelayanan minimal
3. Merupakan prioritas urusan yang harus dilaksanakan di daerah
4. Memerlukan kelembagaan perangkat daerah yang kuat (struktur, personel, peralatan dan anggaran)
5. Pengarusutamaan PRB dalam perencanaan dan penganggaran secara integrative

Indikator dan Nilai SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang urusan Bencana dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah sebagai berikut :



4.7.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pengurangan Indeks Risiko Bencana	1. Jumlah Desa /Kelurahan Rawan bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana	277 Desa/ Kel	277 Desa/ Kel	277 Desa/ Kel	277 Desa/ Kel	277 Desa/ Kel
			2. Jumlah / Desa Kelurahan Tangguh Bencana	5 Desa/ Kel	5 Desa/ Kel	5 Desa/ Kel	5 Desa/ Kel	5 Desa/ Kel
			3. Persentase Kecepatan Respon Bencana Kurang dari 24 Jam	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Persentase Korban Bencana Yang Diberikan Bantuan	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Persentase Pemulihan Pasca Bencana Yang Berhasil di Realisasikan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Tersebar nya informasi penanggulangan bencana ke Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana	277 Desa/ Kel	277 Desa/ Kel	277 Desa/ Kel	277 Desa/ Kel	277 Desa/ Kel
3.	Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB)	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Kajian Risiko Bencana (KRB)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen



No.	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
				0 Titik	128 Titik	128 Titik	128 Titik	128 Titik
4.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Daerah Rawan Bencana	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Yang Diinformasikan Sesuai Jenis Bencana Ancaman Bencana	0 Titik	128 Titik	128 Titik	128 Titik	128 Titik
5.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah Relawan Penanggulangan Bencana Yang Siaga	Jumlah Relawan Penanggulangan Bencana yang Siaga	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang

4.7.3 Realisasi Capaian

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Urusan Bencana Kabupaten Sumedang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Realisasi target caaian SPM urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebencanaan

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	INDIKARTOR PENCAPAIAN /OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
1	2	3			4	5
1.	Pelayanan informasi rawan bencana					
	• Jumlah yang harus dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	Persentase capaian	
		642.744	642.744	0	100%	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian	



NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	INDIKARTOR PENCAPAIAN /OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
1	2	3			4	5
1.	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	4.195	4.195	0	100%	
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	691.534	691.534	0	100%	
	3. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	691.534	691.534	0	100%	
	4. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	94	94	0	100%	
	5. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana					
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana • Jumlah yang harus dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	Persentase capaian	
		1.919	1.919	0	100%	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian	
	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.919	1.919	0	100%	
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana • Jumlah yang harus dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	Persentase capaian	
		976.510	976.510	0	100 %	



NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	INDIKARTOR PENCAPAIAN /OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani		
1	2	3			4	5
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian	
	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.821	2.821	0	100%	
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	2.821	2.821	0	100%	
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1.164	1.164	0	100%	
	4. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1.164	1.164	0	100%	
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	2.821	2.821	0	100%	
	6. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	965.719	965.719	0	100%	

4.7.4 Alokasi Anggaran

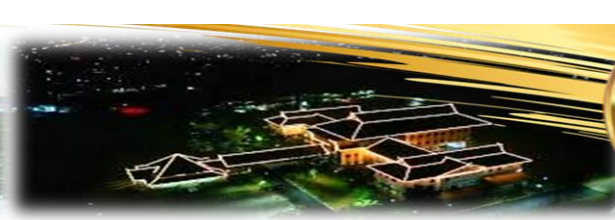
APBD

Alokasi anggaran tahun 2021 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 1.837.135.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 4.11
Capaian/Realisasi SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sumedang 2021

NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET	TOTAL ANGGARAN PERANGKAT				TOTAL REALISASI DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM	TOTAL ANGGARAN DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM
					APBD II (Rp)	BANTUAN PROVINSI (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA (Rp)		
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				TOTAL ANGGARAN					
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			137.580.000,00				137.580.000,00	137.580.000,00
		4.7.4.1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100%	98.580.000,00	-	-	-	98.580.000,00	98.580.000,00
		4.7.4.2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	18 Titik Daerah Rawan Bencana	100%	39.000.000,00	-	-	-	39.000.000,00	39.000.000,00
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			544.470.000,00	-	-	-	544.470.000,00	544.470.000,00
		1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100%	195.080.000,00	-	-	-	195.080.000,00	195.080.000,00
		2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3 Desa/ Kelurahan	100%	154.160.000,00	-	-	-	154.160.000,00	154.160.000,00
		3. Penyusunan Rencana Kontijensi	2 Dokumen	100%	195.230.000,00	-	-	-	195.230.000,00	195.230.000,00
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1.155.085.000,00	-	-	-	1.155.085.000,00	1.155.085.000,00
		1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	35 orang	100%	1.006.745.000,00	-	-	-	1.006.745.000,00	1.006.745.000,00
		2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3 Jenis	100%	148.340.000,00	-	-	-	148.340.000,00	148.340.000,00
		JUMLAH		100%	1.837.135.000				1.837.135.000	1.837.135.000



4.7.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 sebanyak 60 orang dengan perincian :

No.	Uraian	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Pelaksana	Esselon III,a	1
2.	Sekretaris	Esselon IV,a	1
3.	Kepala Seksi	Esselon IV,a	3
4.	PNS	Fungsional Umum	10
5.	NON PNS	-	10
6.	PHL (PUSDALOPS)	-	35

Jumlah tenaga PNS/ CPNS sebanyak 16 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut :

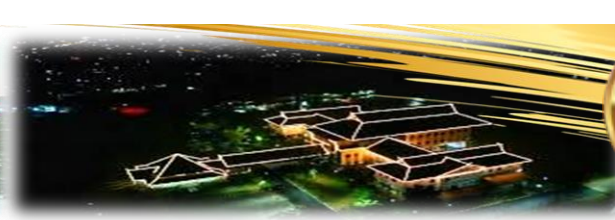
No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S 2	: 1 orang
2.	S 1	: 5 orang
3.	D3	: 3 orang
4.	SLTA	: 5 orang

4.7.6 Permasalahan dan Solusi SPM

a. Permasalahan

Ada beberapa Indikator SPM Bidang Urusan Bencana yang tidak mendapatkan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan/ program sehingga target tidak tercapai, beberapa indikator SPM yang tidak mencapai target mutu pelayanan dasar sebagai berikut :

- Prosedur operasional penanggulangan bencana;
- Sarana prasarana penanggulangan bencana;
- Peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
- Pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.



b. Solusi

Memaksimalkan kegiatan/program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional dan melakukan skrining ke sasaran lebih di tingkatkan. Kegiatan lebih banyak didanai oleh Biaya SPPD yang bersumber dari APBD. Memaksimalkan kegiatan Pengadaan Peralatan Penunjang Penanggulangan Bencana tahun yang akan berjalan.



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 yang disampaikan kepada Pemerintah melalui Gubernur sesuai amanat Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 merupakan bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah. Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sistematika penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 disusun dengan mengacu kepada Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120.04/926/OTDA tanggal 26 Januari 2022 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pra Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 terhadap laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2020.

Apabila mencermati hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021, maka disadari bahwa apa yang telah dilakukan selama tahun tersebut disamping telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan dan membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga dalam perjalanan masih menyisakan beberapa hal yang belum terselesaikan secara tuntas karena dihadapkan beberapa kendala dan hambatan. Oleh karena itu sangat perlu didukung adanya penyempurnaan strategi penanganan dan komitmen bersama para stakeholder sebagai modal dasar dalam pelaksanaan percepatan sehingga hasilnya dapat semakin optimal. Hasil pembangunan yang telah dicapai pada Tahun 2021 tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2023 dapat dicapai dan dilaksanakan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2020 ini disusun sebagai gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang di



berbagai bidang urusan yang dijabarkan dalam program kegiatan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2021. Laporan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk melaksanakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumedang untuk mencerminkan dan memperlihatkan kinerja yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sumedang selama Tahun 2021, sebagai bahan evaluasi untuk melaksanakan perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Sumedang pada khususnya.

Selanjutnya Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif untuk mengisi pembangunan Kabupaten Sumedang di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Sumedang **"SIMPATI" (Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, Kreatif)**.

Sumedang, Maret 2022